

Nasiwan dkk

MENUJU INDIGENOUSASI ILMU SOSIAL INDONESIA

Sebuah Gugatan atas Penjajahan Akademik

FISTRANS Institute

**MENUJU INDIGENOUSASI
ILMU SOSIAL INDONESIA**
Sebuah Gugatan atas Penjajahan Akademik

FISTRANS Institute

MENUJU INDIGENOUSASI ILMU SOSIAL INDONESIA

Sebuah Gugatan atas Penjajahan Akademik

Ditulis Oleh:

Cahyo Pamungkas / Cholisin / Syed Farid Alatas /
Yanuardi / Purwo Santoso / Dwi Harsono / Zulkarnain /
Hastuti / Suharno / Taat Wulandari / Nasiwan

MENUJU INDIGENOUSASI ILMU SOSIAL INDONESIA: SEBUAH GUGATAN ATAS PENJAJAHAN AKADEMIK

Nasiwan, dkk.

Editor Isi: Budi Mulyono

Editor bahasa: Budi Mulyono

Desain sampul: Ikwarta Bima Panguldir Ilham

Desain Isi: Dwi Fajar W

Cetakan pertama, FISTRANS Institute, September 2012

© Hak penerbitan FISTRANS Institute, 2012

FISTRANS Institute

Forum Ilmu Sosial Transformatif (FISTRANS) Institute merupakan sebuah lembaga diskusi yang selalu berikhtiar untuk menghadirkan suatu pemikiran yang segar, kritis, dan memberikan perspektif alternatif tentang berbagai dimensi ilmu sosial di Indonesia.

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Jalan Gejayan-Affandi, Gang Guru, Karangmalang

No. Telepon. 86168 psw 38

Katalog Dalam Terbitan

MENUJU INDIGENOUSASI ILMU SOSIAL INDONESIA: SEBUAH GUGATAN ATAS PENJAJAHAN AKADEMIK

Nasiwan, dkk.

Yogyakarta: FISTRANS Institute, 2012

(xiv+200 hlm; 14,5 x 21 cm)

ISBN : 978-602-19081-6-7

SAMBUTAN DEKAN FIS UNY

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulisan buku oleh Forum Ilmu Sosial Transformatif (FISTRANS) Institute Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta (FIS UNY) yang berjudul "Menuju Indigenisasi Ilmu Sosial Indonesia: Sebuah Gugatan atas Penjajahan Akademik" dapat terselesaikan dengan baik.

Buku ini merupakan wujud usaha ilmuwan sosial untuk mengembangkan Ilmu sosial yang bercorak ke-Indonesian sehingga akan melahirkan sebuah teori, konsep, keilmuan sosial yang mampu menjadi acuan penyelenggaraan Pendidikan Ilmu Sosial yang bercorak Indonesia.

Tulisan dalam buku ini merupakan hasil diskusi FISTRANS Institute FIS UNY yang diadakan rutin setiap bulan dengan menghadirkan para Ilmuwan Sosial baik di lingkungan FIS UNY maupun dari luar dengan berbagai gagasan ataupun solusi-solusi terhadap permasalahan terkait dengan ilmu sosial dalam upaya untuk membumikan ilmu sosial.

Buku ini merupakan seri pertama dan saya mengapresiasi terhadap penerbitan buku ini. Saya berharap akan terbit buku FISTRANS Institute seri-seri berikutnya sehingga akan dihasilkan sebuah gagasan yang utuh dan komprehensif serta diejawantahkan menjadi langkah-langkah nyata untuk mewujudkan pendidikan Ilmu Sosial yang bercorak Indonesia.

Akhir kata, semoga buku ini mampu memberikan manfaat bagi kemajuan Ilmu Sosial di Indonesia.

Wassalamua'alaikum. Wr.Wb.

Yogyakarta, 3 September 2012
Dekan FIS UNY

Prof. Dr. Ajat Sudrajat.

KATA PENGANTAR

URGENSI INDIGENEOUSASI ILMU SOSIAL INDONESIA

Oleh Nasrwan
Ketua FISTRANS Institute

PERKEMBANGAN ilmu-ilmu sosial di Asia termasuk di Indonesia dalam waktu yang lama berada dalam pengaruh dominasi ilmu-ilmu sosial yang berkembang di Eropa atau Amerika. Kondisi yang demikian sudah berlangsung dalam waktu yang sangat lama lebih dari satu abad jauh sebelum Indonesia merdeka.

Kondisi perkembangan ilmu sosial yang demikian telah mengundang beberapa intelektual di Asia dan juga Indonesia mempertanyakan kondisi perkembangan ilmu sosial yang memprihatinkan tersebut. Kondisi perkembangan ilmu sosial di Asia dilukiskan berada dalam kondisi ketergantungan (*captive mind*) dengan ilmu-ilmu sosial Barat.

Dalam ruang lingkup yang lebih luas menghadapi kemandegan ilmu-ilmu sosial di Asia, sejumlah intelektual di berbagai negara memiliki kegelisahan yang sama untuk menghadirkan ilmu sosial yang

dapat langsung diterapkan dalam menjelaskan masyarakat Muslim. Pada dekade 1970-an, Ismail Raji Al-Faruqi mengemukakan idenya mengenai islamisasi ilmu-ilmu sosial kontemporer. Untuk mencapai tujuannya itu, Al-Faruqi mendirikan *The Assosiation of Muslim Social Scientists* dan menjadi ketua umumnya antara 1972–1978, kemudian berpartisipasi aktif dalam lembaga internasional *The International Institute of Islamic Thought* (IIIT). Langkah Al-Faruqi menggagas mengenai islamisasi ilmu-ilmu sosial itu menjadi terobosan penting dalam proses interaksinya dengan teori-teori Barat. Gagasan Al-Faruqi itu didukung oleh Naquib Al-Attas yang juga mendorong dilakukan islamisasi ilmu-ilmu secara luas dengan memasukkan elemen-elemen Islam dalam ilmu-ilmu kontemporer (Jurdi, 2011).

Diantara pandangan penting Al-Faruqi dan Al-Attas adalah berkaitan dengan: *Pertama*, percermatan mereka tentang fenomena kebiasaan ilmuwan di negara-negara Asia untuk menggunakan kategori-kategori, pemilihan masalah, konseptualisasi, analisis, generalisasi, deskripsi, eksplanasi, dan interpretasi yang ditiru dari Barat. Pada sisi yang lain, sebagian negara Dunia Ketiga sebenarnya telah berusaha untuk keluar dari "belunggu imperialisme akademis" seperti yang dilakukan oleh intelektual India, Cina dan juga negara-negara berkembang lainnya, tetapi keinginan itu belumlah dilakukan secara sistematis dan melembaga. Tingkat kebergantungan akademis dipandang paralel dengan tingkat ketergantungan ekonomi. Tingkat kebergantungan ilmuwan sosial negara berkembang menurut catatan Syed Farid Alatas meliputi: 1) kebergantungan pada gagasan; 2) kebergantungan pada media gagasan; 3) kebergantungan pada teknologi pendidikan; 4) kebergantungan pada bantuan riset dan pengajaran; 5) kebergantungan pada investasi pendidikan; 6) kebergantungan ilmuwan sosial Dunia Ketiga pada permintaan Barat akan ketrampilan mereka (Alatas, 2010).

Dalam konteks perkembangan ilmu sosial di Indonesia, kegelisahan intelektual pernah disampaikan oleh ilmwan tersohor Indonesia Prof. Selo Sumardjan, beliau menyatakan bahwa "mengenai perkembangan ilmu-ilmu sosial sebagai ilmu... betapa sedikitnya buku-buku atau karangan-karangan dalam bahasa Indonesia yang secara murni menambah atau mungkin mengubah *teori-teori* yang sampai sekarang dikenal" (Sumardjan, Ondrowino, 1990).

Dengan kegelisahan intelektual yang hampir sama, Kuntowijoyo (2006), menyatakan bahwa persoalan serius yang dihadapi oleh ilmuwan sosial di Indonesia adalah bagaimana menghadirkan ilmu sosial yang mampu untuk melakukan transformasi? Mengapa perlu memfokuskan pada pertanyaan ini. Hal ini dikarenakan ilmu sosial pada dekade ini masih mengalami kemandekan. Ilmu sosial yang dibutuhkan adalah bukan hanya mampu menjelaskan fenomena sosial, namun juga mentransformasikan fenomena sosial tersebut, memberi petunjuk ke arah mana transformasi dilakukan, untuk apa dan oleh siapa?

Di antara solusi yang dapat ditawarkan, untuk menghadapi kondisi perkembangan ilmu sosial yang disebut dalam kondisi yang *captive mind*, ialah pentingnya ikhtiar untuk membangun suatu diskursus alternatif ilmu-ilmu sosial di luar arus besar diskursus ilmu-ilmu sosial Barat. Dari diskursus alternatif inilah kemudian muncul berbagai gagasan kritis tentang pentingnya melakukan indigeneousasi ilmu-ilmu sosial, Islamisasi ilmu-ilmu sosial, di Indonesia muncul gagasan pentingnya Ilmu Sosial Profetik (ISP) yang gagas pertamakalinya oleh seorang cendekiawan terkemuka Prof. Kuntowijoyo.

Langkah strategis berikutnya adalah bagaimana menurunkan gagasan Indigeneousisasi, Ilmu Sosial Profetik pada tataran yang lebih praksis. Tulisan ini menegaskan tentang tentang urgensi indigenousasi ilmu sosial melalui *prophetic education* sebagai bagian dari langkah untuk melahirkan perspektif teoritis yang sesuai dengan konteks keindonesiaan serta berusaha keluar dari dominasi perspektif teori-teori Barat atau Eropa-sentris.

Dengan mempertimbangkan perspektif di atas, maka kami berusaha menghadirkan tulisan yang merupakan kumpulan makalah dari serial diskusi bulanan komunitas FISTRANS (Forum Ilmu Sosial Transformatif). Sebagaimana namanya, FISTRANS berikhtiar untuk menghadirkan suatu diskusi yang segar, kritis, dan memberikan perspektif alternatif tentang berbagai dimensi ilmu sosial di Indonesia. Pada mulanya komunitas ini berambisi untuk melakukan serial diskusi dengan urutan topik diskusi dimulai dari persoalan ontologi, epistemologi, termasuk di dalamnya tentang pendekatan dan metodologi ilmu sosial, dan kemudian diakhiri dengan berbagai studi kasus.

Tema besar yang diusung dalam berbagai sub topik, dipersatukan oleh suatu tema yang menjadi semacam benang merah yakni tentang “*Indigenisasi Ilmu Sosial Indonesia: Sebuah Gugatan atas Penjajahan Akademik*”. Tema besar ini dielaborasi ke dalam tiga bagian: *pertama* membahas pada aras teori dan konsep ilmu sosial khususnya yang terkait dengan gagasan perlunya melakukan proses indigenisasi ilmu-ilmu Sosial di Indonesia. Termasuk di dalamnya menggugat dan mengkritik kemandekan kalangan akademisi di universitas. Pembahasan tersebut dapat disimak melalui tulisan Cahyo Pamungkas, Prof. Alatas dan Cholisin.

Bab kedua membahas tentang pendekatan dan metodologi. Dalam bab ini dihadirkan tiga tulisan, dari Prof. Puwo Santoso, Dwi Harsono dan Zulkarnain. Dalam bab ini pembahasan penting terkait dengan suatu ikhtiar baru untuk menemukan pendekatan dalam studi ilmu sosial yang lebih cocok untuk memahami fenomena sosial di Indonesia, bukan merupakan pendekatan yang bersifat *copy-paste* dari ilmu-ilmu Barat (bersifat Eropasentris).

Bab ketiga tentang kasus dan fenomena sosial di Indonesia. Pada konteks ini diangkat kebhinekaan Indonesia yang dapat disimak melalui sajian hasil penelitian Dr. Suharno dan Taat Wulandari serta tulisan Nasiwan tentang gagasan Indonesia baru. Pada bagian ini diberikan contoh bagaimana menggunakan teori-teori ilmu sosial yang berbasis pada kearifan lokal dan masyarakat yang multikultural, serta upaya untuk melakukan teoritisasi pendidikan politik yang berbasis pada kondisi masyarakat Indonesia.

Kami dari FISTRANS dalam menerbitkan edisi perdana dari serial diskusi FISTRANS ini mohon maaf karena berbagai keterbatasan baru dapat menerbitkan sebagian naskah, sebanyak 11 tulisan. Naskah tersebut membahas sub tema-tema sebagai berikut: tulisan pertama “Merumuskan Kembali Peranan Lembaga Produksi Ilmu Pengetahuan Modern: Analisis terhadap Pemikiran Delanty”, tulisan ini merupakan sumbangan pemikiran yang kritis dan serius dari Cahyo Pamungkas, seorang peneliti dari LIPI. Tulisan Kedua “Peran Universitas dalam Mengatasi Problematika Pengembangan Ilmu Sosial” merupakan tulisan dari Pak Cholisin (Wakil Dekan I FIS UNY). Tulisan ketiga disumbangkan oleh Prof. Syed Farid Alatas, dari Universiti Nasional Singapura dengan judul “Orientalisme dalam Pengkajian

Sejarah Melayu". Tulisan keempat berjudul "Indegenousasi Teori Pembangunan sebagai Wacana Alternatif dari Teori Pembangunan Barat," merupakan sumbangan tulisan dari Yanuardi, seorang akademisi dari FIS UNY.

Tulisan kelima berjudul "Pembudayaan Analisis Kontekstual di Indonesia", yang merupakan sumbangan dari Prof. Purwo Santoso, seorang guru besar dari FISIPOL UGM. Tulisan keenam berjudul "Pendekatan Baru Memahami Institusi di Indonesia", sumbangan dari Dwi Harsono seorang akademisi dari FIS Universitas Negeri Yogyakarta yang juga merupakan alumnus Utrecht Universiteit, Belanda. Tulisan ketujuh berjudul "Konsepsi Negara dalam Perspektif Historis", yang disumbangkan oleh Zulkarnain yang merupakan staf pengajar di FIS UNY. Tulisan kedelapan berjudul "Pembelajaran Geografi pada Sub Disiplin Ilmu Sosial," tulisan ini merupakan sumbangan dari Dr. Hastuti, seorang akademisi dari FIS UNY. Tulisan kesembilan berjudul "Kebijakan tentang Resolusi Konflik yang Sesuai dengan Konstruksi Masyarakat Multikultural", yang merupakan sumbangan tulisan dari Suharno, pembahasan dalam tulisan tersebut memberikan pemahaman baru tentang resolusi konflik yang berbasis pada nilai-nilai lokal, diangkat dari hasil penelitian lapangan di Kalimantan Barat. Tulisan kesepuluh berjudul "Pembiasaan Sikap Toleransi melalui Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal," tulisan ini merupakan sumbangan dari Taat Wulandari, akademisi FIS UNY, sedang menyelesaikan program S3 di Pascasarjana UNY. Untuk tulisan terakhir (kesebelas) berjudul "Memperkuat Indonesia Baru melalui Pendidikan Politik," kontribusi dari Nasiwan, berlatar belakang akademisi FIS UNY.

Komunitas FISTRANS berharap dan bermimpi kehadiran buku ini bisa menjadi inspirasi bagi terjadinya suatu transformasi yang tidak terbatas pada aras pemikiran tetapi lebih jauh sebuah tranformasi masyarakat Indonesia, yang gerakan awalnya dimulai oleh para pendidik-guru, aktivis sosial yang memiliki kesadaran bahwa ilmu adalah merupakan instrumen sangat dahsyat bagi terjadinya transformasi bahkan sebuah revolusi sosial. Ingat, semuanya bermula dari kata-kata, semua perubahan bermula dari ide-ide gemilang. Mimpi tersebut menjadi mungkin untuk direalisasikan mengingat dalam komunitas FISTRANS, merupakan forum mempertemukan

berbagai pihak yang memiliki perhatian serius pada tema tersebut, yakni dari kalangan ahli, para guru besar yang menggeluti ilmu sosial, para dosen, para guru, serta para praktisi yang sehari-hari berkiprah dalam kegiatan pembelajaran ilmu-ilmu sosial. Selamat membaca, semoga mendapatkan cahaya pencerahan ilmu untuk pada waktunya memenuhi panggilan suci mencerahkan masyarakat Indonesia (*minna dzulumat illa nur*—dari kegelapan penjajahan ilmu menuju ketercerahan-kemerdekaan ilmu).

Yogyakarta, 3 September 2012
Ketua FISTRANS

Nasiwan

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DEKAN FIS UNY

KATA PENGANTAR

Nasrwan

Urgensi Indigenisasi Ilmu Sosial Indonesia ~ VII

BAB I

Cahyo Pamungkas

Merumuskan Kembali Peranan Lembaga Produksi Ilmu Pengetahuan Modern:

Analisis terhadap Pemikiran Delanty ~ 3

Cholisn

Peran Universitas dalam Mengatasi Problematika Pengembangan Ilmu Sosial ~ 29

Prof. Syed Farid Alatas

Orientalisme dalam Pengkajian Sejarah Melayu ~ 45

BAB II

Yanuardi

**Indigenisasi Teori Pembangunan sebagai Wacana Alternatif
dari Teori Pembangunan Barat ~ 65**

Prof. Purwo Santoso

Pembudayaan Analisis Kontekstual di Indonesia ~ 77

Dwi Harsono

Pendekatan Baru Memahami Institusi di Indonesia ~ 85

BAB III

Zulkarnain

Konsepsi Negara dalam Perspektif Historis ~ 99

Dr. Hastuti

Pembelajaran Geografi pada Sub Disiplin Ilmu Sosial ~ 127

Suharno

Kebijakan tentang Resolusi Konflik yang Sesuai dengan Konstruksi Masyarakat Multikultural ~ 137

Taat Wulandari

Pembiasaan Sikap Toleransi melalui Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal ~ 151

Nasiwan

Memperkuat Indonesia Baru melalui Pendidikan Politik ~ 167



Bab 1

MERUMUSKAN KEMBALI PERANAN LEMBAGA PRODUKSI ILMU PENGETAHUAN MODERN: ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN DELANTY¹

Cahyo Pamungkas
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

A. Abstract:

This paper is a book review to Delanty works (2011) entitled "Challenging Knowledge: The University in the knowledge Society." He describes the changes of universities as well as mode of knowledge production in three periods that is classical, liberal modernity, and organized modernity. In liberal modernity, state supported universities development but university should assist the state in social engineering, legitimacy over national integration, and development the democratic political system. However, in organized modernity, universities are not primary place for knowledge production. The

¹ Paper ini merupakan tinjauan buku. Dipresentasikan dalam Diskusi Perkembangan dan Problematika Pengembangan Ilmu Sosial di Indonesia Kontemporer, tanggal 6 Januari 2012 di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

borders of knowledge become obscure due to trans-disciplinary become norms and the rising of post-disciplinary of knowledge. The production of knowledge is assured by scientific procedures and by financial, social, and political accountability. Postmodern approach called as the end of knowledge period.

B. Pendahuluan

Menurut Delanty, sejarah sistem pemikiran politik dan sosial Barat merupakan ekspresi dari konflik antara dua jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan sebagai ilmu pengetahuan dan pengetahuan sebagai budaya. Asal muasalnya berasal dari oposisi dalam Bahasa Yunani klasik antara *logos* dan *doxa* atau antara pengetahuan versus opini. *Logos* adalah bahasa atau ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh dunia universitas, sedangkan *doxa* merupakan pengetahuan budaya yang dihasilkan oleh orang awam.² Subjek yang ingin dibahas oleh Delanty adalah bagaimanakah hubungan antara ilmu pengetahuan dan kultur demokrasi berkaitan dengan peranan, kedudukan, dan fungsi universitas. Selain itu juga, apakah demokrasi pengetahuan itu mungkin diwujudkan dan universitas sejenis apa yang mampu melaksanakannya. Demokrasi pengetahuan adalah konsep yang menghubungkan antara proses produksi pengetahuan dengan penyebarannya ke masyarakat luas sehingga masyarakat memiliki akses terhadap ilmu pengetahuan.

C. Modernitas Dan Universitas

Delanty membedakan modus produksi pengetahuan, model-model budaya, dan kerangka institusional. Konsep pertama mengacu pada produksi pengetahuan sebagai serangkaian wacana yang melintasi epistemologis dan kelembagaan. Pengetahuan yang dimaksud ialah

² Konflik juga muncul dalam superioritas pengetahuan melawan demokrasi. Plato menolak dunia ilmu pengetahuan sebagai ilusi dan demokrasi sebagai ekspresi degenerasi politik. Pada masa Yunani, nampak pengetahuan tidak kompatibel dengan demokrasi dan tidak ada sesuatu yang dapat menjembatani antara keduanya. Era Immanuel Kant menandai babak baru hubungan antara ilmu pengetahuan dan demokrasi dimana salah satu visi Kant adalah pengembangan universitas modern. Kant memberikan tekanan pada republikanisme-patrista yang membatasi demokrasi ke wacana akademik. Dalam membedakan antara pendapat pribadi dan pendapat publik, ditekankan bahwa yang kedua adalah diskursus akademik, sementara yang pertama di luar diskursus akademik. Kant mengeluarkan dari universitas, hal-hal yang dapat mengganggu fungsinya sebuah masyarakat. Dengan demikian, alasan publik, diinstitusionalisasikan ke dalam universitas dan di-depolitisasi.

pengetahuan yang dimiliki kelompok, lembaga, dan organisasi. Model kultural mengacu pada model interpretasi dimana masyarakat memperoleh pengetahuan dan menawarkan frame objektif merujuk pada orientasi nilai (Weber) atau perjuangan untuk memperoleh kapital simbolik (Bourdieu).

Kerangka kelembagaan mencakup modus produksi dan akumulasi kekayaan, regulasi penduduk dan hubungan sosial, dan pemerintahan. Teori pergeseran kognitif dalam modernitas ialah jika perubahan modus produksi pengetahuan mencakup transformasi budaya dan masyarakat. Dengan kata lain, perubahan dalam sistem pengetahuan mendorong perubahan dalam kapital budaya dan akhirnya perubahan dalam kelembagaan. Delanty melihat secara historis modus produksi pengetahuan ke dalam tiga kelompok: klasik, modernitas liberal, dan *organized modernity*.

(1) Munculnya Universitas Modern

Universitas pada abad pertengahan ialah tempat pengetahuan yang universal terkait dengan ideologi universal ke-Kristen-an. Universitas sebagai institusi yang kosmopolitan tidak terikat kepada negara bangsa tetapi berkaitan dengan universal order. Dengan munculnya negara bangsa pada abad ke-17, universitas menjadi ternasionalisasi dan secara gradual karakternya yang kosmopolitan. Dengan menurunnya fungsi *ecclesiastical*, maka pengetahuan menjadi wacana yang mengambang dan digunakan sebagai alat untuk melakukan dominasi atau emansipasi. Ketegangan antara dimensi kosmopolitan dan nasional, berlanjut kepada konstribusi intelektual yang menjadikan universitas tidak dapat secara total didominasi oleh satu kekuasaan. Sejak masa pencerahan, universitas berkembang dengan dukungan dari negara. Dengan demikian, negara menyediakan sistem pengetahuan yang pada saat yang sama juga sistem kekuasaan.

Pada masa sesudah Revolusi Perancis (1789), intelektual pencerahan mulai memperdebatkan ide mengenai universitas untuk mentransformasikan modernitas itu sendiri. Misalnya, rasionalitas dan kepercayaan, modernitas dan tradisional, fakta dan nilai. Perdebatan ini terjadi terutama di Jerman karena universitas memiliki ikatan yang kuat dengan tradisi ilmu pengetahuan kemanusiaan dan membantu membentuk identitas nasional Jerman. Gagasan universitas sebagai

pusat pendidikan liberal dikemukakan pertama kali oleh Imanuel Kant. Menurunnya *corporate order* pada zaman pertengahan menjadikan universitas menjadi beraliansi dengan negara. Hal ini menandai lahirnya universitas modern atau menggeser negara kota yang ideal menjadi republik yang ideal.

(2) Modernitas Liberal : Abad ke 19

Pencerahan pada abad ke-19 terjadi pada negara-bangsa modern dimana universitas menjadi penting sebagai peletak dasar-dasar kebudayaan nasional. Dengan berkurangnya penggunaan bahasa latin, universitas menjadi penting sebagai tempat untuk memajukan bahasa nasional dan mengkodifikasi kesusastraan nasional serta geografi. Sebagai tempat kebudayaan nasional, universitas kehilangan sifat kosmopolitannya, sehingga fungsi yang signifikan ialah pembentukan elit nasional. Universitas juga merespon pembentukan masyarakat borjuis dan kebutuhan untuk lembaga pendidikan dan kebudayaan kelas menengah.

Dua pandangan universitas modern pada masa modernitas liberal yaitu cita-cita *neo-humanist* (Newman) dan cita-cita modern (Spencer). Ide pertama berakar dari ide *neo-humanist* Jerman tentang kebebasan akademik dan pencarian pengetahuan sebagai tujuannya sendiri. Ide kedua berasal dari Perancis yang menekankan pada ilmu pengetahuan ilmiah (*science*) dan pendidikan liberal. Namun, tidak sampai pertengahan kedua abad ke-20, dua model ini menjadi terpisah dan universitas modern berkembang pesat jauh meninggalkan ide pengetahuan sebagai tujuan. Bjorn Wittorck mengemukakan bahwa asal universitas modern pada masa sekarang adalah universitas yang berorientasi penelitian pada akhir abad ke-19. Universitas memunculkan ilmuwan spesialis dan profesional yang menggantikan ilmuwan generalis di bawah pelembagaan sistem pengetahuan kognitif.

Baik pada masa pencerahan dan maupun *counter-pencerahan*, teori-teori universitas didasarkan atas ide pengetahuan sebagai tujuan. Walaupun universitas di Perancis menekankan pada aspek utilitarianisme pengetahuan dan universitas di Jerman menekankan pada dimensi kebudayaan, namun universitas sebagai tempat mencari pengetahuan universal tidak pernah dipertanyakan. Skeptisisme ini dikemukakan oleh Weber yang melihat ilmu pengetahuan sebagai alat

rasionalisasi. Weber berangkat dari pencerahan bahwa ilmu pengetahuan tidak membawa fungsi emansipatoris dan melawan penggunaan ilmu pengetahuan sebagai politik.³

(3) Universitas pada masa *oganized modernity*

Abad ke-20 ialah era universitas modern yaitu suatu masa yang ditandai oleh universitas riset dan pendidikan tinggi massal. Universitas menjadi sentral dari tujuan-tujuan ekonomi, sosial, dan politik, ia menjadi penting dalam membentuk *big science*. Bahkan, Galbraith mengatakan bahwa institusi pendidikan dalam negara industri baru dapat digunakan untuk tujuan-tujuan politik. Universitas pada abad ke-20 muncul dari masyarakat massal dan menggambarkan model kultural dominan integrasi sosial yang didasarkan atas kewarganegaraan, yaitu sebagai anggota komunitas nasional. Model universitas *neo-humanist* atau liberal merupakan produk dari masyarakat borjuis, yang merupakan ekspresi dari keterasingan budaya masyarakat dan dari pandangan dominan yang mengatakan bahwa kemajuan berasal dari kekuatan emansipatoris pengetahuan.

Kepercayaan pada persamaan lebih utama daripada mengejar kebenaran dan kemajuan, telah menjadi misi sosial yang sentral dari universitas modern. Universitas berusaha untuk menyebarkan pengetahuan dan tradisi-tradisi budaya. Tujuan dari universitas pada masa modern ini ialah menyediakan pengetahuan untuk masyarakat yang tidak kritis. Oleh karena itu, hubungan antara modus pengetahuan dan masyarakat ialah transmisi struktur kognitif baru ke dalam kerangka-kerangka institusional. Namun, modus pengetahuan itu sendiri relatif menjadi determinan sosial yang otonom pada abad ke-20. Pertumbuhan universitas massal dan meningkatnya tuntutan masyarakat menyebabkan legitimasi universitas berpindah dari kemanusiaan ke ilmu pengetahuan alam (*science*). Universitas perlahan-lahan menjadi lembaga akreditasi dalam *a credential society*.

³ Sementara itu, Karl Jesper berpendapat bahwa universitas ialah tempat dimana pengajaran, penelitian, dan transmisi budaya terjadi. Dalam tradisi pencerahan, tradisi Humbolt adalah berbicara tentang pendidikan bagi semua orang dimana tujuan universitas ialah mampu menawarkan *weltanschauung*. Kebebasan akademik ialah tujuan dari pencarian kebenaran: universitas ialah tempat dimana kebenaran dicari tanpa syarat apapun dalam segala bentuknya

Modernitas liberal ialah masa differensiasi, pemisahan kelembagaan dan ruang-ruang budaya, spesialisasi dan rasionalisasi. Pada masa *organized modernity*, universitas dapat dilihat sebagai paralel dengan inkubator dari *oganized modernity*. Universitas modern ialah produk dari urbanisasi dan industrialisasi, yaitu sebuah lembaga pendidikan massal. Aspek yang penting ialah kewarganegaraan sosial daripada pembangunan karakter dan identitas nasional dan diseminasi pengetahuan. Jika pada model modernitas liberal dan klasik, universitas ialah didasarkan atas transmisi pengetahuan dari dosen kepada mahasiswa, maka pada masa *organized modernity*, universitas berusaha untuk mendiseminasi pengetahuan ke masyarakat. Oleh karena itu, universitas modern memiliki kontribusi pada warga negara yang terdidik dan berkontribusi pada demokasi karena kewarganegaraan merupakan dimensi yang penting dari demokrasi.⁴

Universitas pada pertengahan kedua abad ke-20, dapat dilihat sebagai pembangunan kewarganegaraan sosial dalam masyarakat secara luas. Dalam teori evolusi masyarakat modern, pengembangan pendidikan tinggi ialah bagian dari revolusi pendidikan yang merupakan unsur pembentuk modernitas disamping revolusi industri dan demokrasi. Revolusi pendidikan mengikuti revolusi demokratik yang mengikuti revolusi industri. Jika revolusi industri bertepatan dengan masyarakat borjuis, maka revolusi pendidikan ialah membubarkan masyarakat borjuis. Prinsip-prinsip kewarganegaraan dibentuk oleh persamaan sebagai basis hak-hak yang didefinisikan secara legal. Revolusi pendidikan mengarah pada inkorporasi kelas menengah ke dalam pendidikan setelah perang dunia kedua. Kontribusi universitas pada kewarganegaraan adalah dengan cara menyediakan angkatan kerja terlatih untuk melayani dan mengubah sistem occupational yaitu ekonomi yang bergantung kepada teknologi. Universitas juga menyediakan pelatihan pofesi legal yang menjadi sentral bekerjanya demokrasi.

Namun, kontribusi universitas kepada demokrasi lebih besar dari pelatihan dan akreditasi profesional. Menurut Durkheim, transisi dari masyarakat tradisional ke modern, bentuk-bentuk mekanik integrasi

⁴ Demokrasi terdiri dari konstitusionalisme, pluralisme, dan kewarganegaraan. Menurut Marshall, kewarganegaraan ialah status yang melekat pada semua anggota masyarakat, yang berkembang dari hak-hak sipil, hak-hak politik menjadi hak-hak sosial.

digantikan bentuk-bentuk organik dari solidaritas. Masyarakat modern melibatkan pegeseran dari integrasi sosial melalui keluarga dan agama ke *occupational groups* dan saling ketergantungan antara kelompok-kelompok ini. Pendidikan adalah bagian yang sangat penting dari kewarganegaraan sipil karena integrasi sosial dapat dicapai melalui pendidikan. Negara tidak akan mampu melakukan integrasi jika tidak ada nilai-nilai tradisional tidak tersedia. Dengan demikian, pendidikan menurut Durkheim, dapat menghubungkan negara lebih dekat kepada kehidupan individu-individu.

Menurut Shill, universitas telah berkontribusi kepada artikulasi model-model budaya masyarakat terutama dalam membawa nilai-nilai demokrasi dan kewarganegaraan. Tanpa institusi yang memiliki pengetahuan tentang bentuk-bentuk budaya, masyarakat tidak memiliki kapasitas untuk memproduksi narasi budaya bagi integrasi sosial. Universitas menjadi penting dalam mendefinisikan identitas budaya negara bangsa dalam fase pembentukannya. Ketika demokrasi terancam, universitas menjadi tempat perlawanan ide-ide yang reaksioner. Kontribusi universitas terhadap kewarganegaraan ialah melakukan inkorporasi terhadap orang-orang yang jumlahnya semakin meningkat ke dalam masyarakat.

Dua sintesis visi dari masyarakat modern menuut Parson dan Kerr adalah menurunnya ide liberal universitas di bawah kondisi-kondisi pendidikan massal dalam masyarakat industrial. Mereka melihat pluralisme dalam masyarakat yang memungkinkan terjadinya integrasi. Dalam masyarakat modern, pengetahuan yang memiliki kegunaan sosial tidak dilihat sebagai ancaman terhadap otonomi universitas. Universitas dilihat sebagai alat untuk merespon kekuatan-kekuatan eksternal tetapi tidak membahayakan hilangnya identitas mereka. Masa kini adalah masa *big science* dan *big government* yang didorong oleh perang dingin dan pengorganisasian kapitalisme mengikuti garis fordisme. Universitas modern pada masa *organized modernity* dilindungi oleh negara, yang bergantung pada kemampuan universitas untuk mendefinisikan misi nasional dan kebijakan pemerintah yang sah. Universitas mampu mengarahkan kelompok menengah antara negara dan pasar karena didanai dan bertanggung jawab terhadap kekuatan-kekuatan pasar. Berdasarkan domain pengetahuan, budaya, dan *social order*; universitas menduduki sebuah posisi di semua domain

ini, tidak hanya produsen pengetahuan tetapi membentuk dan men-transmisikan budaya, dan menjadi aktor yang sentral dalam masyarakat.

Berdasarkan paparan di muka, dapat diketahui bahwa modernitas tidak lain adalah konsep pengetahuan sebagai dirinya sendiri atau otonomisasi pengetahuan. Pada intinya konsep ini mengandung dua buah unsur yaitu: (1) pemisahan Tuhan dari manusia dan alam semesta atau *human centric* dan; (2) keunggulan akal budi dan data lapangan untuk produksi pengetahuan. Perkembangan modernitas ini tidak terlepas dari perkembangan filsafat Barat yang menekankan pada oposisi biner. Misalnya perbedaan antara Tuhan dan alam semesta, akal budi dan perasaan, data lapangan dan spekulasi. Perkembangan modernitas seperti ini berpengaruh terhadap perkembangan universitas. Jika universitas pada abad pertengahan berkarakter kosmopolitan dan tidak memisahkan antara ilmu pengetahuan dan agama, maka universitas pada masa modern menjadi kehilangan karakter kosmopolitannya dan memisahkan ilmu pengetahuan dari agama.

Baik pada masa modernitas liberal maupun *oganized modernity* universitas beraliansi dengan negara. Universitas berperan dalam pen-definisan kebudayaan nasional pada masa modernitas liberal dan mengembangkan konsepsi kwanegaraan modern dan demokrasi pada masa *organized modernity*. Sebagai implikasinya pengetahuan yang dihasilkan oleh universitas modern ialah *object oriented knowledge*. Hal ini menjadi tantangan bagi Sosiologi Pengetahuan yang berusaha mengembangkan *subject oriented knowledge* dimana peneliti/ilmuwan mengarahkan produksi pengetahuan ilmiah. Setelah mengetahui perkembangan modernitas dan universitas, pada bagian berikut akan dijelaskan perkembangan pemikiran tentang peran universitas dalam masyarakat.

D. Peta Pemikiran Tentang Universitas

Tahun 1960-an dan 1970-an dapat dilihat sebagai masa dekonstruksi yang mengawali perkembangan kontemporer filsafat dan pengetahuan sosial. Apa yang didekonstruksi ialah kebijakan yang sudah mapan, identitas budaya yang sudah tetap, dan nilai-nilai tradisional borjuis pada masa modenitas. Hal ini termasuk ide mengenai pembentukan karakter diri dan identitas nasional (*bildung*). Hubungan budaya

dengan masyarakat telah ditransformasikan dimana budaya tidak lagi berfungsi menjadi milik kelompok tertentu dan tidak lagi menjadi entitas stabil yang didefinisikan oleh kode-kode yang diterima secara universal. Berikut ini dideskripsikan pemikiran empat tokoh mengenai pengetahuan dan arti penting universitas sebagai situs produksi pengetahuan.

(1) Juergen Habermas⁵

Habermas mempertanyakan ide universitas melalui kritiknya terhadap mereka yang mereduksi universitas ke dalam situs produksi pengetahuan atau budaya humanisme saja. Universitas tidak bisa didefinisikan menurut *organized* atau *liberal modernity*. Menurutnya, tugas universitas ialah memberikan pendidikan politik melalui pembentukan kesadaran politik mahasiswanya. Pada akhir tahun 1960-an, Habermas mengkhawatirkan universitas akan diserap oleh ide memproduksi dan mentransfer pengetahuan teknis dan menyediakan pendidikan keahlian bagi tenaga kerja. Habermas menekankan peranan universitas sebagai *interpreter* dari *society self-understanding* atau menyalurkan (*transmit*), menafsirkan, dan mengembangkan tradisi budaya masyarakat. Untuk menafsirkan dan juga mentransformasikan secara kritis, universitas berada dalam fungsi meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan aksi. Habermas menekankan perlunya universitas secara kritis melaksanakan demokratisasi radikal.

Universitas memiliki dua pilihan yang terbuka yaitu menganut demokrasi maupun nilai-nilai kapitalisme dan teknologi. Pilihan tersebut ialah mengintegrasikan universitas yang didepolitisasi ke dalam sistem kerja sosial dan memutus ikatannya ke bidang politik, atau universitas menegaskan dirinya di dalam sistem demokrasi. Dalam praktiknya dapat diterjemahkan bahwa universitas diperintah oleh mahasiswa, akademisi junior, dan non-pofesor. Demokratisasi universitas mendatangkan berakhirnya hierarki akademik dan administrasi departemen-departemen. Habermas menentang ide Nikhlas Luhman,

⁵ Perdebatan mengenai universitas di Jerman dimulai lagi oleh pada tahun 1960-1970-an. Akar permasalahan yang didiskusikan tidak jauh berbeda antara konsepsi dasar universitas Humboldt (*bildung*) dengan Kant (*liberal education*). Jika Jasper, Gadame, dan Schelsky berdiri di atas ide-ide Humboldt, Habermas berdiri pada tradisi Kant dan beraliran Hegelian-Marxism bahwa universitas adalah situs untuk melakukan kritik. Jasper percaya bahwa tradisi klasik Jerman masih menawarkan model yang relevan pada masa sekarang dan mengabaikan diferensiasi ilmu pengetahuan sebagai ancaman dari ide dasar universitas. Jasper mempertahankan ide bahwa universitas ialah satu dari visi-visi kemanusiaan bojius yang terakhir.

yaitu universitas hanyalah semata-mata organisasi tanpa fungsi moral. Bagi Habermas, pengetahuan dalam *decentred society* sebagai penghubung antara dunia makna dan reproduksi budaya.

Ide pencerahan masih relevan pada masa kini tetapi harus di-realisasikan ke dalam masyarakat komunikatif. Universitas sebagai situs komunikasi adalah ide utama Habermas. Bagi Habermas posisi universitas terletak antara struktur dunia makna sosial dan budaya. Pengetahuan menurut Habermas ialah struktur yang dideferensiasikan dan dihubungkan dengan masyarakat melalui penghubung yang tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan manusia secara kognitif. Penghubung semua pengetahuan ilmiah bukan rasionalitas ilmiah, namun ketertarikan pengetahuan dalam komunikasi.

(2) Alvin Gouldner

Ambivalensi pemikiran Manheim tentang ideologi sebagai ide-ide yang melegitimasi sistem kekuasaan dan dunia ide yang bersifat utopia, membuat Gouldner membedakan antara intelektual dan intelegensia. Intelektual mengacu kepada mereka yang aktif dalam pengetahuan emansipatoris dan kritis, bersifat politik. Intelegensia merujuk kepada mereka yang aktif dalam mengembangkan pengetahuan teknis. Keduanya memiliki misi sosial melawan *status quo* melalui cara emansipatoris dan teknokratis. Intelegensia menggunakan cara-cara pemikiran kognitif yang telah mapan, sedangkan intelektual tidak mencari normalisasi seperti demikian. Keduanya membentuk kelas baru pengetahuan dalam masyarakat *post-industrial* yang disebut Bourdieu sebagai bourjuasi kultural

Gouldner dan Lyotard berpendapat bahwa pengetahuan dapat secara politik memiliki komitmen emansipatoris, tetapi beberapa ilusi dari kiri lama harus dibuang.⁶ Salah satu karakter kelas baru ialah borjuasi budaya, yang memiliki kontrol terhadap pendidikan dan melaluinya mereka bersaing dengan kelas lama. Sekolah merupakan alienasi utama dari kelas lama dan universitas ialah tempat memproduksi kelas baru.⁷ Universitas adalah tempat dimana kelas baru

⁶ Kelas baru ialah elitis, berorientasi diri sendiri, dan menggunakan pengetahuan khusus untuk memperjuangkan kekuasaan dan kepentingan mereka sendiri. Kelas baru berdasarkan atas paradoks bahwa mereka emansipatoris dan elitis, namun wacana mereka dalam sebuah kritik bentuk-bentuk dominasi yang mapan dan pada saat yang sama meninggalkan dominasi dan tradisi.

⁷ Namun Gouldner tidak menyadari bahwa pendidikan melayani fungsi reproduksi tatanan sosial sebagaimana disebutkan oleh Louis Althusser yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi lebih dari sekedar aparat ideologi negara. Gouldner mengakui bahwa akademisasi mengkonversikan krisis sosial ke dalam penyelesaian teka-teki secara teknis, dirancang untuk melindungi paradigma dominan dan kerangka masyarakat dari subversion.

mencari aliansi dengan bisnis atau budaya apolitik. Tesis Gouldner ialah kelas baru tidak mengontrol kapital budaya seperti pengetahuan. Universitas mengembangkan budaya wacana kritis kosmopolitanisme dan reflektivitas. Pandangan ini sejalan dengan Habermas dan Touraine walaupun Gouldner berbeda dari Habermas bahwa kelas baru masih memiliki kemungkinan melakukan kritik politik daripada konsepsi Habermas kritik budaya atau moral.⁸

(3) Pierre Bourdieu

Sosiologi Bourdieu berangkat dari pandangan konvensional bahwa pendidikan mengurangi ketidakmerataan sosial dan mengarah pada pembangunan kewarganegaraan sosial. Lembaga-lembaga pendidikan tidak secara langsung memproduksi ketidakmerataan sosial, namun pendidikan ialah alat untuk melegitimasi distribusi sumberdaya sosial yang tidak merata, dengan memakai akses yang berbeda terhadap kapital kultural. Pendidikan, ketika tidak menjadi alat kekuasaan kelas atau hegemoni negara, digunakan untuk memperkuat kekuasaan dalam masyarakat dengan menyediakan mekanisme transmisi atau reproduksi kekuasaan. Hal tersebut dilakukan melalui proses pengenalan dan penanaman kekerasan simbolik, yaitu tatanan simbolik suatu kelompok tertentu yang kepentingannya diproduksi dengan menggunakan struktur kekuasaan yang dimediasi secara budaya.

Kelas dominan dalam masyarakat menyerahkan kekuasaan untuk memilih kepada institusi akademik yang melayani kepentingan kelompok dominan. Ideologi meritokratik pendidikan menyembunyikan realitas stratifikasi sosial ekonomi budaya dan geografis yang terpisah dari kelas (kekerasan simbolik). Semua budaya merupakan kekerasan simbolik karena melibatkan kepentingan kelompok dominan dan didasarkan atas kondisi mendasar salah pengakuan (*misrecognition*), yaitu kemampuan kognitif budaya dominan untuk menyembunyikan kondisi-kondisi sosial dari keberadaannya dengan secara salah memberikan status natural dan *legitimate*: Dalam formasi

⁸ Namun Gouldner mendapatkan kritik atas penekanannya bahwa intelektual merupakan kelas baru karena intelektual cenderung menjadi elit baru daripada sebuah kelas (Bottomore 1964, Eissenstadt 1966, Etzioni 1985). Apa yang penting dalam analisis Gouldner ialah bahwa sifat dasar pengetahuan bahwa pengetahuan tidak diproduksi oleh elit perseorangan dan pengetahuan disebarkan melalui masyarakat oleh perpanjangan kelas pengetahuan yang menjadi kelas menengah. Produksi pengetahuan dalam masyarakat modern tidak independen dari kepentingan-kepentingan sosial dan model-model budaya.

sosial yang mapan: budaya yang sah ialah budaya yang didukung oleh legitimasi dominan, tidak lebih dari kultur dominan yang sewenang-wenang sebagaimana salah pengakuan terhadap kebenaran objektif sebagai kesewenang-wenangan budaya yang dominan. Pendidikan tinggi berkaitan dengan konsolidasi mekanisme seleksi, legitimasi, dan akreditasi.

Pendidikan menjadi arena kebudayaan dimana masyarakat menyeleksi individu-individu untuk posisi-posisi kekuasaan dan mengalokasikan status dan prestis. Dengan demikian, sekolah dan universitas pada dasarnya adalah lembaga-lembaga seleksi. Universitas adalah arena kekuasaan. Perjuangan tiga jenis kapital simbolik dalam universitas ialah kekuasaan akademik, kekuasaan ilmiah, dan kekuasaan intelektual. Pertama ialah jenis kekuasaan yang mengendalikan administrasi sumberdaya akademik, kedua merupakan jenis kekuasaan yang datang dari reputasi penelitian yang berbasis pada publikasi ilmiah. Ketiga, adalah kekuasaan yang berasal dari kemampuan untuk mempengaruhi opini publik.

Sosiologi Bourdieu mengenai universitas menyebutkan bahwa universitas dibentuk oleh sistem relasi antara berbagai jenis kekuasaan. Struktur arena universitas adalah bentuk hubungan-hubungan kekuasaan antara agen-agen dan antara kekuasaan-kekuasaan yang beroperasi dalam universitas. Struktur arena universitas menggambarkan struktur arena kekuasaan dimana seleksi dan indoktrinasi berkontribusi pada reproduksi struktur sehingga bentuk-bentuk kekuasaan yang dimediasi secara budaya menjadi lebih penting dalam masyarakat modern. Bourdieu menunjukkan bahwa modus produksi pengetahuan berkaitan dengan praktik-praktik sosial dan struktur-struktur kognitif.

(4) Gibbons

Gibbons dkk, menunjukkan bahwa universitas menjadi seperti perusahaan-perusahaan dan sebaliknya, perusahaan-perusahaan menjadi lebih mirip dengan universitas.⁹ Sebagai hasilnya hubungan-hu-

⁹ Mengawali konsep corporate university, General Motor membangun universitasnya sendiri di Chicago. Pengakuan bahwa pengetahuan adalah kunci keuntungan kompetitif, universitas korporat ditujukan untuk menyediakan kesempatan-kesempatan belajar. Corporate university di Amerika Serikat ini menjadi kasus ekstrim penetrasi nilai-nilai pasar ke dalam praktik akademik yang disebut sebagai market-like behavior. Pada sisi lain, universitas dibawah tekanan negara untuk mengajarkan program-program yang relevan dengan pekerjaan.

bungan baru antara universitas dan industri adalah pengetahuan yang berguna sebagai pengganti pengetahuan untuk dirinya sendiri. Bagi Gibbons dkk, aturan (*rule*) pengguna pengetahuan adalah karakter utama produksi pengetahuan baru. Pengetahuan diciptakan untuk digunakan daripada sebagai tujuannya sendiri. Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengetahuan diciptakan untuk konteks aplikasi. Dengan demikian, kompetisi adalah basis penemuan pengetahuan. Gibbons dkk mengatakan bahwa pengetahuan yang dibutuhkan dunia industri bersifat spesifik dan diciptakan dalam konteks aplikasi.

Produser pengetahuan yang lain di luar universitas adalah *think-tanks*, lembaga-lembaga konsultan, NGO, masyarakat profesi, badan-badan Litbang pemerintah dan *corporate*. Hal ini juga termasuk masuknya akademisi-akademisi universitas menjadi konsultan pemerintah. Hal ini menjadikan universitas mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dirinya terhadap kondisi-kondisi *post-fordisme*.

Menurut Gibbons, modus produksi pengetahuan bergeser dari model 1 ke model 2 pada masa *post-fordisme*. Perbedaan model 2 dari model 1 ialah sebagai berikut. Pada model 1, masalah-masalah diciptakan dan dipecahkan dalam sebuah konteks yang diatur oleh sekelompok kecil ilmuwan atau komunitas akademik dimana universitas adalah tempat penelitian dan hasil-hasil penelitian di dalamnya disebarluaskan. Dalam model 2, pengetahuan dibentuk dalam konteks aplikasi dan diciptakan di luar universitas. Jika pada model 1, pengetahuan bersifat disipliner dan hierarkis, maka dalam model 2 bersifat trans-disipliner dan *fluid* (mengambang). Model 1 bersifat homogen dan relatif otonom, sedangkan model dua bersifat heterogen, *accountable*, dan reflektif.

Situasi dideferensiasi ini menyebabkan batas-batas antardisiplin pengetahuan menjadi semakin kabur. Batas-batas pengetahuan tidak didefinisikan oleh disiplin-disiplin yang mapan tetapi konteks aplikasi penelitian yang ditujukan kepada konstituen dan kelompok pengguna. Gibbons dkk mengatakan bahwa hasil difusi modus pengetahuan baru ini, batas-batas antara disiplin menjadi kabur dan memberikan jalan bagi sebuah struktur yang lebih terbuka dimana berbagai pengetahuan dikombinasikan dalam konfigurasi novel. Implikasinya, peneliti bekerja dalam sebuah area daripada sebuah disiplin pengetahuan. Paparan berikut ini menunjukkan proses lahirnya produksi pengetahuan baru dalam masyarakat.

E. Lahirnya Modus Baru Produksi Pengetahuan

Peranan universitas pada abad ke-17 adalah mendorong perkembangan modernitas dan kebudayaan masyarakat modern. Pada sisi lain, modernitas memberikan peluang hidup dan suasana yang kondusif untuk berkembangnya universitas. Selanjutnya pada abad ke-20 yang dikenal sebagai abad modernisasi yang terorganisir (*organized modernity*), perkembangan universitas bergantung kepada negara. Negara mendukung perkembangan universitas dengan menyediakan pembiayaan dan penyediaan kebijakan yang mendukung universitas. Sementara, sebagai imbalannya, universitas mendukung negara melalui rekayasa sosial dan pemberian legitimasi terhadap integrasi nasional dan kebudayaan nasional. Namun, perbedaan peran universitas pada masa modern ini dapat dibedakan antara universitas di negara-negara barat dengan universitas di negara-negara *postkolonial*. Universitas berperan memberikan legitimasi dan justifikasi pada agenda-agenda negara terutama pada universitas-universitas di negara *postkolonial*. Sedangkan di negara-negara maju, universitas berperan dalam mengembangkan budaya demokrasi.

Situasi universitas pada masa sekarang menunjukkan kondisi pengetahuan pada masa sekarang. Aspek yang paling penting adalah penetrasi komunikasi ke dalam jantung struktur epistemik masyarakat ketika pengetahuan dan demokrasi ditransformasikan oleh komunikasi. Pada masa modernitas, institusi pengetahuan berada dalam ruangan di luar aliran komunikasi dimana ruangan ini diduduki oleh universitas. Berdasarkan konsepsi ini, pengetahuan terletak di dalam universitas dan tidak berada dalam masyarakat. Bentuk-bentuk tindakan komunikasi tidak mendapatkan perhatian cukup dari universitas karena universitas membatasi diri mereka sebagai *pre-political private domain* yang mengecualikan bidang publik dari universitas.

Sebagai konsekuensinya, meskipun universitas adalah tempat perlawanan intelektual terhadap kekuasaan, institusi ini didesain untuk melayani kepentingan nasional dengan ilmu pengetahuan teknis yang berguna dan menjaga serta mereproduksi tradisi kebudayaan nasional. Sebagai pelindung struktur kognitif negara nasional modern, universitas merepresentasikan paradigma pengetahuan epistemik yang ditandai dengan karakteristik otonomi.

Modus pengetahuan seperti ini ditantang pada tahun 1960 dan pada banyak negara dilakukan reformasi universitas pada pertengahan tahun 1970-an. Namun, reformasi ini memiliki dampak yang kecil terhadap produksi pengetahuan karena sebagian besar berkaitan dengan pengorganisasian kelembagaan universitas sesuai dengan tuntutan mahasiswa. Meskipun universitas pada masa modern berperan mendukung radikalisasi kewarganegaraan yang demokratis, pengetahuan berbasis pada disiplinairitas berlanjut sampai pada masyarakat industrial. Masyarakat industrial dewasa ini mengalami krisis pada struktur wewenang dan struktur kognitif sebagaimana terjadi pada masa lalu. Meskipun pada awal 1970-an, universitas mengembangkan kultur kewarganegaraan demokratis seperti: advokasi kewarganegaraan, perjuangan hak-hak politik dan sosial dari gerakan hak-hak sipil sampai sosialisme demokratis dan feminisme, namun semua itu tidak berkaitan langsung dengan produksi pengetahuan itu sendiri, tetapi dengan ide-ide keadilan, kebahagiaan, persamaan, dan emansipasi.

Setelah runtuhnya komunisme, kedudukan universitas mengalami perubahan. Jika pada masa modernitas yang terorganisir, situasi universitas pada posisi aman karena mendukung agenda-agenda negara, setelah komunisme berakhir universitas mengalami kehilangan kredibilitas sebagai produser pengetahuan karena dianggap terlalu dekat dengan negara dan modernitas. Dengan kata lain, ketika peranan dan fungsi negara secara perlahan-lahan digantikan oleh pasar, maka universitas dipaksa untuk bersaing dalam arena produksi pengetahuan yang terbuka. Sebagai implikasinya, universitas dianggap sebagai abnormal yang perlu diajari dengan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam situasi ini, universitas harus melakukan reposisi untuk menjaga citranya sebagai produsen ilmu pengetahuan. Bahkan, beberapa intelektual berpendapat bahwa peranan universitas pada masa *postmodern* ialah sebatas memberikan gelar. Ketika peranan negara semakin berkurang, maka peranan universitas sebagai produser pengetahuan juga berkurang dan digantikan oleh *think-tank*, *Transnational Corporations*, dll.

Delanty menjelaskan bahwa menurut Gibbon (1984), sebuah model pengetahuan baru mengganti model pengetahuan lama. Perbedaan antara modus pengetahuan universitas dengan modus baru dapat digambarkan sebagai berikut:

Universitas/Tradisional	Modus baru
Produksi pengetahuan cenderung disipliner dan homogen	Produksi pengetahuan cenderung transdisipliner dan heterogen
Membedakan antara basic versus applied	Pengetahuan diproduksi dalam konteks aplikasi
Dijamin oleh metodologi ilmiah dan prinsip-prinsip ilmiah.	Dijamin oleh kaidah-kaidah ilmiah dan akuntabilitas secara finansial, sosial, dan politik
Memiliki struktur yang establish	Tidak bersifat struktural

Model baru ini dikarakterisasikan oleh proliferasi produser ilmu pengetahuan yang bekerja pada konteks aplikasi. Pada situasi ini, universitas tidak lama menjadi tempat primer produksi pengetahuan karena ditantang oleh produser baru ilmu pengetahuan. Batas-batas disiplin ilmu pengetahuan menjadi tidak jelas sejak transdisiplinartitas menjadi norma dan fenomena baru *postdisiplinary* ilmu pengetahuan menjadi muncul (Turner, 1999). Untuk sebagian orang, hal ini dikatakan sebagai periode akhir pengetahuan (Lyotard, 1984).

Deligitimasi universitas juga menunjukkan krisis modernitas itu sendiri. Sekarang ini, kita sedang menyaksikan berakhirnya modus ilmu pengetahuan yang muncul bersamaan dengan modernitas yang diorganisir beserta model budaya dan kerangka kelembagaannya. Spesialisasi dalam disiplinaritas dan batas-batas nasional telah menghentikan jenis pengetahuan eksklusif dan universitas tidak lagi menjadi tempat khusus produksi pengetahuan. Dengan pembubaran gerakan sosialis lama dan datangnya politik baru, universitas telah menjadi tempat utama pertentangan identitas budaya. Pada perdebatan ini, perilaku identitas *postmodernist*—penolakan konsep yang stabil dari *the self* dalam hal *multiplicity* dan heterogenitas—telah menembus struktur kognitif itu sendiri, membuat disensus daripada konsensus mengenai order pada hari ini.

Sebagai akibatnya, pendapat yang mengatakan bahwa universitas berdasarkan landasan *cognitive idea* sebagaimana ditunjukkan oleh Newman (1996) atau Jasper (1960) tidak lagi berlaku. Dengan hilangnya *self-legitimizing idea* atau model kognitif yang mendasar dan munculnya *multiple order of cognitive model*, pertanyaan identitas

muncul. Salah satu krisis dari universitas adalah meningkatnya perdebatan identitas universitas dalam beberapa tahun terakhir.

Perubahan utama dalam modus pengetahuan adalah sebagai berikut. *Pertama*, fakta sejarah antara negara dan pengetahuan yang dibentuk pada akhir abad ke-17 sedang mulai menjadi longgar. Meskipun masih menjadi pendukung keuangan utama pengetahuan, negara tidak lagi menjadi satu-satunya penjaga pengetahuan. *Kedua*, masyarakat modern menjadi semakin bergantung kepada pengetahuan baik di ekonomi produksi, pengaturan politik, maupun kehidupan sehari-hari. *Ketiga*, perubahan dalam modus pengetahuan sebagai hasil dari pendidikan massa, protes sosial, gerakan sosial baru, dan munculnya teknologi informasi. *Keempat*, demokratisasi pengetahuan secara relatif telah diikuti oleh pertumbuhan kontestasi klaim pengetahuan.

Tesis utama Delanty ialah bahwa situasi sekarang telah mengalami pergeseran kognitif. Perubahan dalam modus pengetahuan lebih jauh dari perubahan dalam kerangka kelembagaan masyarakat. Interpretasi postmodernis terhadap identitas universitas, seperti Lyotard, berpendapat bahwa universitas telah mencapai akhirnya dan dengan berakhirnya modernitas, universitas telah jatuh ke dalam perusahaan birokratik. Ide-ide kognitif yang mendasar seperti—universalitas pengetahuan, kebenaran, persatuan budaya—menjadi tidak relevan dan realitas sosial ekonomi dan telah menjadikan universitas instrumental.

Identitas dan peranan baru universitas muncul di sekitar demokratisasi pengetahuan, yang dimaknai sebagai partisipasi aktor-aktor dalam konstruksi realitas secara sosial. Delanty berpendapat bahwa universitas masih memiliki peranan yang penting. Restrukturisasi modus pengetahuan ini tidak mengimplikasikan pada berakhirnya universitas namun lebih pada *reconstitution* (pembentukan kembali) universitas. Signifikansi universitas pada masa kini ialah menjadi tempat penting untuk saling keterkaitan antara berbagai pengetahuan masyarakat.¹⁰

¹⁰ Universitas tidak dapat membangun kembali kesatuan pengetahuan yang telah terpecah-pecah, namun dapat membuka jalan bagi komunikasi antara berbagai jenis pengetahuan yang berbeda-beda terutama antara pengetahuan sebagai ilmu dan pengetahuan sebagai budaya. Tugas universitas adalah membuka ruang-ruang komunikasi dalam masyarakat daripada menjadi organisasi birokratik. Tiga jenis *communicative interacting* yang dijelaskan Delanty ialah; (1) hubungan baru antara universitas dan masyarakat, (2) hubungan baru antara ilmu pengetahuan, dan (3) mengubah hubungan antara universitas dan negara. Delanty sampai pada kesimpulan bahwa tugas penting universitas pada abad ke-21 adalah menjadi aktor kunci dalam ruang publik dan dengan demikian memperkuat demokratisasi pengetahuan. Universitas menjadi lembaga kunci dalam masyarakat yang mampu memediasi modus pengetahuan, artikulasi model-model budaya, dan inovasi kelembagaan.

Dengan demikian, sudah saatnya kita mulai mengkaji model baru yaitu segitiga hubungan antara negara, pasar, dan universitas sebagai kerangka analisa dalam menjelaskan masalah-masalah sosial. Kerangka berfikir ini didasarkan atas pendekatan postkolonialitas dalam ilmu-ilmu sosial yang berusaha untuk menjelaskan fenomena kolonialisasi dalam pengetahuan terhadap masyarakat negara berkembang. Selain itu, kerangka ini menggunakan pendekatan transdisiplinaritas yang menganggap ilmu-ilmu sosial saling terkait satu sama lain.

Dialektika antara universitas, pasar, dan negara, akan menjadi dasar bari reposisi peranan universitas dalam konteks pembebasan masyarakat postkolonial melalui ilmu pengetahuan. Kerangka baru ini memiliki kelemahan yaitu seolah-olah mereduksi permasalahan sosial ke dalam arena negara, pasar, dan universitas. Namun, kelebihanya adalah: (1) menjadi metode alternatif bagi universitas dalam mereposisi modus produksi pengetahuannya agar sesuai dengan tuntutan zaman; (2) mengurangi segregasi batas-batas dalam ilmu sosial ketika digunakan dalam menganalisis permasalahan sosial; dan (3) memiliki pembebasan yang mengarah pada dijunjungnya harkat dan martabat manusia. Reposisi peranan universitas pada masa kini juga harus menempatkan globalisasi sebagai faktor penting, paparan berikut ini akan menjelaskan peranan dan tantangan universitas dalam era globalisasi.

F. Universitas dan Globalisasi

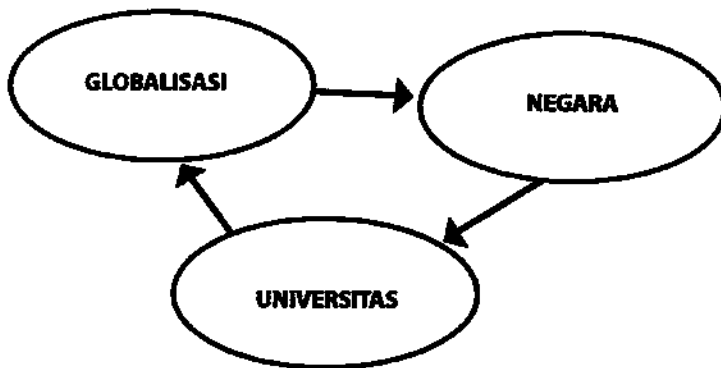
Pada umumnya, tesis globalisasi didominasi oleh pandangan transnasionalisasi ekonomi dunia dalam area pasar, keuangan, dan komunikasi. Globalisasi terkait dengan meningkatnya kapitalisme keuangan internasional dan perubahan teknologi, mengarah pada fragmentasi, pluralitas, bahkan *chaos*. Santos berpendapat bahwa globalisasi dapat dilihat sebagai fenomena global yang dilokalkan dan fenomena lokal yang diglobalkan. Pandangan lainnya tentang globalisasi ialah kosmopolitanisme yaitu sesuatu yang melawan proses homogenisasi.

Sementara Appadurai (1996), melihat globalisasi sebagai aliran *chaotik* dari lingkup budaya seperti lingkup etnik, lingkup media, lingkup teknologi, lingkup keuangan dan *ideoscape* dimana semuanya menyediakan kelompok-kelompok budaya tertentu dengan pembentukan identitasnya dan model-model pengorganisasiannya. Bagi Lash

dan Urry (1998), globalisasi adalah pergerakan informasi yang sangat cepat sebagai hasil dari disorganisasi kapitalisme yang tidak mampu lagi membatasi ekonomi dan budaya dalam batas-batas nasional.

Dengan kata lain, globalisasi merupakan restrukturisasi ekonomi yang mencakup pasar, keuangan, dan jaringan komunikasi. Hal tersebut ditandai oleh beberapa fenomena sebagai berikut. Pertama, adanya standarisasi, homogenitas, dan keseragaman. Kedua, adanya LSM-LSM internasional yang bisa mengonter proyek-proyek yang didominasi oleh organisasi tertentu. Globalisasi dapat membuat masyarakat menjadi lebih kosmopolitan. Namun, Ritzer menyebutkan bahwa globalisasi tidak lain ialah Mc-donalisasi yaitu fenomena seperti penyebaran restoran Mc-Donald ke seluruh dunia. Globalisasi juga ditandai dengan perubahan peranan negara dalam produksi kebijakan. Negara memiliki wewenang untuk membuat kebijakan pada masa modernitas, namun orientasi pembangunan yang dilakukan negara pada masa postmodern berbeda karena masyarakat merupakan suatu jaringan yang saling terkoneksi.

Hubungan antara globalisasi, negara, dan universitas, dapat digambarkan sebagai berikut:



Universitas sebagai lembaga nasional dalam jangka waktu yang lama, tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial bahkan global. Universitas pada masa modernitas liberal adalah membentuk kebudayaan nasional dan pusat dari produksi ekonomi nasional melalui pelatihan profesional. Sebagai lembaga nasional, universitas terhambat untuk mengembangkan spirit kosmopolitanisme. Kecenderungan

globalisasi berkaitan dengan universitas adalah bahwa model-model pendidikan tinggi nasional menjadi serupa. Universitas menjadi subjek tekanan *performativity* dan homogenisasi budaya. Dengan menurunnya dominasi negara bangsa sebagai pendukung utama universitas. Universitas dipaksa bergantung kepada sumber-sumber pendanaan untuk hidup dalam dunia yang dikendalikan oleh pasar. Kedudukan universitas menjadi bergeser dari aparat ideologi negara bangsa penjaga warisan budaya bangsa menjadi relatif independen dari sistem birokratik. Pengembangan mobilitas mahasiswa yang meningkat, internasionalisasi kurikulum dan kebijakan pendidikan, kerjasama penelitian internasional adalah contoh dari globalisasi pengetahuan sebagai penyebaran pengetahuan yang mengarah pada pembentukan jaringan masyarakat berdasarkan informasi.

Universitas pada masa lalu sebagai lembaga yang penting dalam mendefinisikan nilai-nilai Barat seperti universalisme dimana pada abad ke-19 universitas menghasilkan individu-individu untuk berfungsi sebagai warga negara. Namun pada masa global, universitas beroperasi melalui dunia luas yang tidak dilokasikan dalam kebudayaan nasional. Dengan kata lain, pada masa global, universitas hanya menjadi agen yang melakukan transmisi informasi dari produsen ke pengguna. Implikasinya adalah bahwa pengetahuan yang ditransmisikan lebih sedikit dibandingkan dengan informasi.

Sebagai contoh globalisasi pengetahuan dan memburuknya lembaga pendidikan sebagai berikut; (1) Jaringan internet telah mengubah sifat dasar komunikasi dan menempatkan sebagian besar pengetahuan dalam *non-place of cyberspace* serta menghilangkan waktu dan jarak sebagai hambatan pengetahuan dan komunikasi; (2) Akademisi semakin sering berpergian dan menghadiri konferensi internasional. Hal ini membuat karya-karya ilmiah dan penelitian mereka semakin spesifik; (3) Jumlah publikasi yang dilakukan bersama-sama (*co-authored or multi-authored*) semakin meningkat dalam penelitian yang bergantung kepada dana-dana besar. Model ini menandakan berakhirnya model tradisional; (4) Pendidikan tinggi semakin distandarisasikan. Program pertukaran mahasiswa semakin meningkat dan mahasiswa/pengajar semakin mampu berbahasa asing. Pergerakan mahasiswa juga tidak ditentukan oleh jaringan kolonial dan postkolonial; dan (5) Pengetahuan transnasional semakin menjadi kenyataan.

Contoh-contoh globalisasi pengetahuan di atas dapat dilihat sebagai produk internasionalisasi. Apa perbedaan antara internasionalisasi dan globalisasi? Pendidikan tinggi adalah contoh dari keterbatasan globalisasi dan dipahami sebagai keberlanjutan internasionalisasi. Jika globalisasi mendatangkan berkurangnya negara bangsa oleh pasar, komunikasi, dan proses deterritorialisasi, maka internasionalisasi mengharapkan keberadaan pusat-pusat nasional yang bekerja pada area tertentu.

Dampak globalisasi pada universitas adalah membentuk kapitalisme akademik dimana peranan universitas adalah tidak memajukan *citizenship* tetapi menjadi subordinasi pasar. Universitas tidak lagi menjadi agen perubahan dalam sistem demokrasi dan modernitas. Pada periode paska-1990-an, universitas mengalami perubahan ke bidang politik atau lebih bersifat politis. Hal ini seiring dengan universitas yang mulai menyesuaikan diri ke pasar global. Dengan demikian, peranan universitas adalah meningkatkan daya saing masyarakat yang pada akhirnya akan bermuara mendorong ekonomi nasional.

Dampak lain dari globalisasi terhadap universitas adalah bahwa pembiayaan universitas tidak sepenuhnya menjadi tanggungan negara. Universitas mulai bergantung pada sumbangan mahasiswa, donasi-donasi, konsultasi-konsultasi profesional, dan kegiatan-kegiatan lain yang menguntungkan. Namun demikian, masyarakat pada masa globalisasi membutuhkan universitas sebagai tenaga untuk mencetak para profesional. Revolusi post-industri tergantung kepada universitas dalam kedudukannya sebagai lembaga komersial. Sebagai akibatnya, universitas sebagai produsen ilmu pengetahuan yang kadang-kadang melupakan nilai-nilai dan moralitas.

Delanty menjelaskan tentang kondisi postmodernitas dalam kaitannya dengan bagaimana universitas berperan pada kondisi tersebut. Delanty menguraikan pandangan Lyotard tentang teori postmodern universitas. Lyotard melihat munculnya masyarakat *postindustrial* ialah realitas sosiologis dari tesis post-strukturalis. Pada masyarakat seperti ini, tidak ada lagi prinsip-prinsip kesatuan yang menyatukan—*grand narrative*—yang dapat melayani, melegitimasi, atau mengatasi tatanan sosial dan politik. Doktrin pencerahan ialah membuat pengetahuan menjadi instrumen bagi masyarakat untuk

beremansipasi membebaskan dirinya dari dogmatisme tradisi. Visi pengetahuan seperti ini menjadi basis dari ideologi nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan positivisme. Pengetahuan mengandung prinsip-prinsip metafisik yang memiliki ketegangan dengan tatanan sosial, bersifat abstrak dan hanya bisa diwujudkan melalui transformasi realitas.

Menurut Lyotard, kondisi postmodern telah menjadikan pengetahuan sebagai meta-naratif menjadi tidak relevan. Pada masa sekarang, pengetahuan tidak lagi bersifat abstrak, metafisik, dan emansipatoris dimana masyarakat postindustrial bergantung kepada pengetahuan seperti ini. Kita hidup di dalam sebuah masyarakat informasi yang memiliki pengetahuan yang terfragmentasi oleh komodifikasi dan instrumentalisasi pengetahuan. Sebagai akibatnya, pengetahuan kehilangan misi emansipasinya. Kekuasaan naratif yang menyatukan telah dihilangkan oleh *mood of fragmentation* yang datang bersama masyarakat post-industrial dan konversi pengetahuan menjadi informasi. Hal ini berimplikasi secara mendalam terhadap universitas dimana universitas tidak bisa lagi menduduki sebuah ruang otonom karena ruang-ruang tersebut telah terkikis. Lyotard sampai pada kesimpulan bahwa universitas sebagai institusi modernitas tidak lagi relevan dengan tuntutan-tuntutan dari kondisi postmodern.

Namun, Delanty berpendapat bahwa pandangan Lyotard bersifat ambivalen. Pada satu sisi, tahap perkembangan akhir dari kapitalisme adalah adalah bentuk post-industrial yang ditandai oleh dominannya sektor jasa, teknologi, dan informasi. Pada sisi lain, kondisi postmodern menggambarkan sejenis politik pluralitas dimana perjuangan politik terjadi pada berbagai tingkatan dan tidak dapat dikonsentrasikan hanya pada satu perjuangan saja seperti perjuangan kelas. Lyotard tidak melihat universitas sebagai pusat dari perjuangan-perjuangan ini atau peran universitas telah berakhir.

Bagi Lyotard, pengajaran memiliki fungsi *counter-revolutioner*, sedangkan penelitian masih memiliki *possibility of subversion*. Delegitimasi pengetahuan adalah salah satu aspek dari delegitimasi otoritas. Profesor tidak lebih kompeten dari jaringan tempat menyimpan memori dalam menransmisikan pengetahuan yang mapan (*established*). Berbeda dengan Lyotard, Delanty berpendapat bahwa peran universitas belum berakhir, namun merupakan sebuah situs terjadinya konflik.

Pada bagian akhir, Delanty menjelaskan mengenai produksi pengetahuan baru yang tidak semata-mata merupakan nilai pasar, munculnya budaya tekno-korporat manajerialisme dan kapitalisme akademik, namun konflik terhadap identitas. Dua kekuatan yang mentransformasikan universitas pada masa sekarang ialah instrumentalisme dan relativisme. Karena politik budaya dan pasar tidak lagi membentuk prinsip kesatuan dan tidak menawarkan alat-alat untuk memperbaiki tujuan moral, maka universitas harus mencari jalannya sendiri untuk melampui instrumentalisme dan relativisme.

Universitas memiliki peranan penting dalam mendefinisikan arah perubahan dalam budaya dan ekonomi. Universitas dapat mengambil fungsi-fungsi yang lebih kosmopolitan karena instrumentalisme pasar dan relativisme budaya adalah kekuatan-kekuatan global yang melampui masyarakat nasional. Universitas memiliki kesempatan untuk menjadi pemain utama dalam membentuk budaya kosmopolitan sebagai unsur dalam globalisasi.

G. Penutup

Analisa Delanty tentang keterkaitan antara universitas dan postmodernitas menumbuhkan semangat dan pandangan bahwa universitas masih memiliki peran dalam kondisi postmodern dimana universitas menjadi situs konflik dan pusat perjuangan dalam berbagai tingkatan. Selain itu, universitas masih memiliki kemungkinan menjadi kekuatan pembentuk kosmopolitanisme di tengah instrumentalisme ekonomi dan relativisme budaya. Namun, Delanty belum menjelaskan tentang kedudukan universitas sebagai arena perjuangan politik yang didalamnya terdapat kontestasi aktor-aktor di dalamnya.

Ilmu pengetahuan dan wacana yang merepresentasikan universitas pada kenyataannya adalah terkait relasi objektif antara aktor-aktor dalam universitas. Jika relasi ini merupakan relasi kekuasaan yang dipengaruhi kepemilikan kapital masing-masing aktor, maka ilmu pengetahuan dominan yang disosialisasikan pada dunia akademik ialah ilmu pengetahuan yang didukung oleh kekuasaan yang dominan dalam universitas. Pada akhirnya, pandangan Delanty justru kontradiktif karena universitas sebagai situs perjuangan bukanlah ruang yang netral dari dominasi kekuasaan.

Merujuk pada Bourdieu, Delanty melupakan bahwa peranan universitas tidak lebih sebagai lembaga seleksi kelas dari masyarakat kapitalisme lanjut. Dengan demikian, universitas tidak lebih sebagai penjaga tatanan sosial, politik, dan budaya kapitalisme, sebagaimana menjaga negara-bangsa pada masa modernitas. Pandangan Delanty bahwa universitas belum berakhir yang ditandai oleh 3.600 perguruan tinggi di Amerika Utara adalah kurang kuat karena hanya bersifat artifisial dan tidak menyentuh pada substansi universitas sebagai agen emansipasi modernitas yang telah berakhir.

Universitas seharusnya memahami bahwa hubungan antara universitas dan masyarakat adalah dialektik (Berger dan Lucman, 1979) bahwa ilmu pengetahuan adalah produk masyarakat yang menjadi basisnya dan ilmu pengetahuan menjadi faktor dalam perubahan sosial. Pengetahuan sudah saatnya dipahami sebagaimana konsep Dant (1991: 3) yakni pengetahuan yang diciptakan oleh orang-orang dalam kelompok-kelompok dimana ciri-ciri sosiologis kelompok tersebut menentukan isi dan bentuk pengetahuan. Pengetahuan diproduksi sebagai orang-orang yang membentuk masyarakat dan tinggal bersama-sama masyarakat.

Daftar pustaka:

- Berger, Peter dan Thomas Luckman. 1979. "Introduction" dalam *The Social Construction of Reality*. New York: Penguin Books.
- Dant, Tim. 1991. *Knowledge, Ideology, and Discourse: a Sociological Perspectives*. London and New York: Routledge.
- Delanty, Gerard. 2001. *Challenging Knowledge: the University in the Knowledge Society*. Buckingham: The Society for Research into Higher Education and Open University Press.

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Selain itu, masyarakat juga dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan. Dengan demikian, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia adalah kesehatan. Dengan demikian, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia adalah lingkungan. Dengan demikian, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia adalah ekonomi. Dengan demikian, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia adalah budaya. Dengan demikian, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia adalah politik. Dengan demikian, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

PERAN UNIVERSITAS DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA PENGEMBANGAN ILMU SOSIAL

Chelisin

Dosen Jurusan PKN & Hukum FIS UNY

A. Pendahuluan

Persoalan yang dihadapi universitas dalam mengembangkan ilmu sosial sangat kompleks. Universitas sering dikritik masih kurang berperan memproduksi ilmu pengetahuan, tetapi cenderung lebih berperan menjadi konsumen ilmu pengetahuan dari negara-negara maju. Memang para pakar/ilmuwan sosial sering memberikan bermacam komentar di berbagai media massa tentang isu-isu aktual tetapi cenderung bersifat spekulatif, percakapan di warung kopi, bocoran informasi dari para pejabat penting, dan jarang yang berbasis riset. Para pakar dengan kemampuan menyatakan pendapatnya mampu mempengaruhi opini publik. Para pakar menjadi orang berpengaruh, pengetahuannya cenderung tidak memproduksi ilmu pengetahuan tetapi cenderung memproduksi kekuasaan.

Kritik lain terhadap ilmuwan sosial adalah kecenderungannya menjadi kepanjangan kepentingan rezim dan pasar. Pandangan-pandangan mereka cenderung merupakan legitimasi penguasa maupun pasar (neoliberalisme), kurang berpihak pada kepentingan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Tulisan ini, berupaya membahas bagaimana seharusnya peran universitas dalam mengembangkan ilmu sosial dalam arti memproduksi ilmu pengetahuan dan mengurangi sebagai konsumen serta memiliki keberpihakan kepada masyarakat yang selama ini terjepit oleh kekuasaan negara dan kekuatan pengusaha (pasar), dengan cara mencari alternatif pendekatan ilmu sosial yang sesuai dengan kepentingan (atau ideologi) bangsa.

B. Kepentingan Negara Dan Pasar Dalam Pengembangan Ilmu Ilmu Sosial di Universitas

Universitas (Perguruan Tinggi) memiliki kekhasan dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang lain. Yang khas pada perguruan tinggi adalah bahwa, pendidikan dijalankan hanya dengan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai sarannya. Dengan demikian, kedudukan ilmu pengetahuan dalam pendidikan tinggi adalah esensial. Sementara itu pengetahuan ilmiah ini diharap diproduksi dalam penelitian dan didistribusikan melalui pengabdian masyarakat (Ignas Kleden, 2004: 52).

Sodjatmoko (1986: 32), melihat ilmu pengetahuan dalam aspek dinamis dan kreatifitasnya, yaitu sebagai kegiatan manusia kreatif, artinya ilmu pengetahuan dalam fungsinya sebagai pengetahuan baru. Pemahaman semacam ini seharusnya merupakan pemahaman ilmuwan sosial di universitas. Karena teori sosial itu sendiri dinamis. Sekarang teori itu masih berlaku, besok sudah ada teori baru. Aspek kreatifitas penting, misalnya jika pembangunan memandang masyarakat sebagai potensi kreatif bukan sebagai alat produksi, akan melahirkan ilmu pengetahuan baru yang dapat mengatasi "krisis humanis". Hal ini sejalan dengan pernyataan A.N.Whitehead, seperti dikutip Mohammad Hatta (Bung Hatta) dalam *Tanggung Jawab Moral Kaum Inteligencia*, bahwa fungsi universitas memberikan petunjuk yang disertai ciptaan untuk masyarakat. Suatu universitas yang tidak dapat memenuhi fungsi ini, tidak ada dasarnya untuk berdiri (Mahasin

dan Natsir, eds., 1984: 5). Bagi Bung Hatta, tujuan universitas adalah membentuk manusia susila dan demokratis yang insyaf akan tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat nasional dan dunia seluruhnya menjadi tujuan yang terutama daripada Pendidikan Tinggi. Maka titik berat daripada pendidikannya terletak pada pembentukan karakter (watak). Selanjutnya Bung Hatta menyatakan ilmu dapat dipelajari oleh segala orang yang cerdas dan tajam otaknya, akan tetapi manusia yang berkarakter tidak diperoleh dengan begitu saja. Pangkal segala pendidikan karakter ialah cinta akan kebenaran dan berani mengatakannya salah dalam menghadapi sesuatu yang tidak benar. Pendidikan ilmiah pada Pendidikan Tinggi dapat melaksanakan pembentukan karakter itu, karena ilmu wujudnya mencari kebenaran dan membela kebenaran (Mahasin dan Natsir, eds., 1984: 7) . Apa yang dinyatakan Bung Hatta dalam konteks kecamannya terhadap posisi kaum intelektual Indonesia selama tahun 1958 -1966 sebagai “intelektual yang disewa penguasa” .

Kondisi kaum intelektual yang demikian masih tampak selama rezim Orde Baru. Perkembangan ilmu sosial pada rezim ini lebih didominasi sebagai alat legitimasi penguasa untuk mempertahankan *status-quo*. Juga tampak diabdikan untuk kepentingan pembangunan, terutama bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Ilmu sosial terutama ilmu ekonomi, seperti dikemukakan oleh David Ranson dalam majalah radikal kekiri *Rampart* edisi Oktober 1970, mengecap para ekonom yang diketuai oleh Widjojo Nitisastro sebagai “*the Berkeley Mafia*”. Ia mengembangkan suatu teori konspirasi tentang kelompok “Mafia Berkeley” ini. Menurut Ransom, apa yang berkembang sejak 1966 yang dikenal sebagai Orde Baru telah direkayasa oleh sejumlah tokoh kapitalis AS bekerjasama dengan pemerintah di Washington DC (Sabam Siagian, 2012). Akibatnya perkembangan ilmu sosial non-ekonomi terpinggirkan dari kehidupan daya kritisnya. Dengan kata lain, perkembangan ilmu sosial pada rezim Orde Baru lebih ditekankan untuk kepentingan pembangunan atau untuk mengabdikan kepada kepentingan negara. Misalnya paham integralistik sebagai pemikiran penguasa menjadi sangat dominan (*hegemonic*), meskipun konsep ini bertentangan secara diametral dengan demokrasi, tetapi ada pembenaran dari sebagian ilmuwan sosial. Contoh lain, dominannya pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi akan membawa kepada

kehidupan yang demokratis, hal ini berdampak pada kecenderungan mengabaikan kehidupan non ekonomi (politik, sosial, budaya). Ilmu sosial non-ekonomi, menjadi sekedar diabdikan untuk mewujudkan stabilitas politik dan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi atau untuk memperoleh kepercayaan hutang atau investasi asing. Maka tak mengherankan jika ilmu sosial yang dikembangkan justru untuk memasung demokrasi atau partisipasi politik, misalnya kebijakan massa mengambang merupakan upaya depolitisasi, penerapan asas tunggal merupakan upaya mematikan pluralisme.

Pandangan lain dikemukakan Arif Budiman (1989: 44-45) yang memberikan penilaian perkembangan ilmu sosial pada masa rezim Orde Baru lebih didominasi oleh pendekatan psikologis/kebudayaan dari pada pendekatan struktur. Dalam pendekatan kebudayaan menekankan aspek-aspek psikologis dan sistem nilai masyarakat yang melingkunginya. Misalnya, dalam membahas tentang kegagalan pembangunan disebabkan karena mental orang-orangnya serta nilai-nilai kebudayaannya yang kurang atau belum cocok dengan kebutuhan pembangunan modern. Malas, boros, orientasi pada *prestise* ketimbang prestasi, antara lain merupakan contoh-contoh budaya yang tidak cocok dengan modernisasi.

Contoh lain, betapa ilmu sosial didominasi oleh pendekatan budaya tercermin pada kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh LIPI. Koentjaraningrat (Beny Subianto, 1989: 71-72) pada tahun 1965 bertepatan dengan awal Repelita I memimpin penelitian Lembaga Research Kebudayaan Nasional-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LRKN-LIPI) tentang orientasi dan sikap mental orang Indonesia terhadap aktivitas ekonomi. Kesimpulan yang diajukan, bahwa pembangunan ekonomi akan mendapat rintangan-rintangan yang bersumber pada mentalitas masyarakatnya seperti kurang mempunyai *need of achievement* serta masih kuatnya mentalitas priyayi yang terlalu mementingkan status. Pada tahun 1970, LRKN-LIPI mengadakan Seminar Perkembangan Sosial Budaya dalam Pembangunan. Kesimpulan yang diajukan bahwa sikap mental orang Indonesia pada umumnya belum siap untuk pembangunan.

Pendekatan struktur menekankan aspek organisasi masyarakat, sistem imbalan, dan perubahan-perubahan material terutama teknologi. Kegagalan pembangunan misalnya, disebabkan karena kebijakan

pembangunan yang lebih berpihak kepada kepentingan kelompok tertentu atau mengarah pada monopoli dan KKN. Atau karena sistem imbalan yang tidak adil, misalnya dalam bisnis internasional negara maju lebih banyak mengeruk keuntungan dari pada negara berkembang.

Dalam kondisi perkembangan ilmu sosial yang demikian (didominasi pendekatan budaya), maka menjadi tidak mudah untuk mengungkap fakta-fakta kelemahan pembangunan yang disebabkan karena adanya kesalahan pada kebijakan pembangunan, atau pada sistem ekonomi dan sistem politik yang dikembangkan. Karena tidak mempersoalkan bagaimana mentalitas itu sendiri terbentuk. Sebaliknya lebih mudah menunjukkan kelemahan pada mental masyarakat. Meskipun tidak selalu mental masyarakatlah yang menjadi kendala pembangunan, bahkan ada kecenderungan mental penguasa yang korup dan tidak memiliki pengabdian yang tinggi kepada kemajuan bangsa merupakan kendala utamanya.

Kritik terhadap cendekiawan dunia ketiga dilontarkan Darojatun Kuntjara Jakti, yang menyatakan adanya kesan yang makin dirasakan bahwa cendekiawan dunia ketiga tampak seperti sekumpulan “orang Barat” di “dunia Timur”. Karena ketika dunia ketiga betul-betul memerlukan alternatif yang merdeka, yang terlepas dari model Barat, para cendekiawannya justru menoleh ke Barat yang oleh cendekiawan Barat sendiri mulai ditinggalkan kalau tidak diragukan lagi kebenarannya atau diragukan relevansinya untuk baik masyarakat dunia Timur maupun masyarakat Barat sendiri (Mahasin dan Natsir, eds.,1984: 235). Kleden (2004: 52) juga mengkritik para pakar Indonesia yang dinilai tangkas memakai keahlian mereka untuk membentuk pendapat umum dan mendapat pengaruh politik sekalipun mereka tidak didukung oleh konstituen politik manapun. Hal ini menunjukkan ilmu tidak memproduksi pengetahuan, tetapi hanya memproduksi kekuasaan.

Apabila sikap para ilmuwan sosial terhadap ilmu dan pengetahuan dihadapkan dalam tiga kategori yaitu (1) mengonsumsi dan mengaplikasikan temuan ilmu pengetahuan yang sudah ada, (2) mendistribusikan temuan yang sudah dihasilkan, (3) memproduksi pengetahuan-pengetahuan baru (dan mereproduksi pengetahuan

lama) demi kelanjutan dari *the progress of knowledge* (Kleden, 2004: 51), tampaknya masih dalam kategori satu dan dua. Kiranya tepat sekali apa yang dikatakan Kleden (2004: 49), bahwa ketergantungan kita pada pasar luar negeri yang dipaksakan oleh jenis kapitalisme yang diterapkan di Indonesia mendapat refleksinya yang sempurna dalam produksi pengetahuan ilmiah tentang Indonesia.

Melalui kebijakan Ditjen Dikti tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Arah Kurikulum LPTK, tampaknya ada upaya untuk memenuhi kategori ketiga (memproduksi dan mereproduksi pengetahuan). Hal ini dapat dipahami antara lain pada kualifikasi berikut ini.

Kualifikasi Sarjana/D4 (Level 6) sebagai “analisis” yaitu:

1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEK pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

Kemudian untuk kualifikasi ahli terdiri atas :

1. Profesi guru (PPGT/Level 7), yaitu:
2. Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEK untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
3. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.
4. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

Magister (level 8) , yaitu :

1. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
2. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner .
3. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Doktor (level 9), yaitu :

1. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
2. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner.
3. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Kebijakan Ditjen Dikti di atas, dengan tegas menuntut peran pendidikan tinggi, untuk memproduksi ilmu pengetahuan yang dilakukan para staf pengajar/peneliti karena pada umumnya mereka sudah masuk kualifikasi ahli (Magister dan Doktor).

C.Peran Universitas Dalam Memberikan Arah Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial

Universitas sesuai dengan karakteristiknya harus mampu memproduksi ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilakukan. Ilmu pengetahuan apa yang dihasilkan tentunya disesuaikan dengan nilai dan kepentingan masyarakat Indonesia. Nilai dan kepentingan masyarakat Indonesia yaitu nilai-nilai dasar Pancasila dan tujuan negara yang seharusnya menjadi acuan dalam melahirkan ilmu sosial

di Indonesia. Apabila hal ini yang dilakukan maka indigenisasi ilmu sosial dapat dikembangkan. Sri Edi Swasono (2011) dalam konteks ini menyatakan bahwa hampir semua statuta universitas kita mencantumkan Pancasila sebagai asas atau dasar berdirinya. Demikian pula sumpah sarjana para wisudawan menegaskan kesetiaan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Namun dalam kenyataannya kurikulum dan silabus universitas jauh dari, bahkan mengesampingkan, nilai-nilai Pancasila. Paham leberalisme/neoliberalisme, demikian pula paham individualisme, justru secara luas dikuliahkan di kampus-kampus kita. Indonesia menganut paham kebersamaan dengan asas kekeluargaan yang menyertainya karena itu berseberangan dengan leberalisme dan individualism bawaannya.

Arah pendidikan kita (termasuk lembaga pendidikan universitas), belum membumi. Dalam penilaian HAR Tilaar (Ester, 2012) arah pendidikan kita, tak tahu mau ke mana. Seharusnya pendidikan bertumpu pada masyarakat dan budaya Indonesia, jangan hanyut pada globalisasi. Sebab masih ada 30 juta penduduk miskin, nelayan, dan petani miskin, tetapi pendidikan kita diarahkan untuk bersaing dengan negara maju, bukan memecahkan masalah bangsa. Lebih lanjut, Tilaar menyatakan bahwa pendidikan tak boleh dikuasai kebijakan publik. Keduanya harus kembali pada nilai-nilai dalam UUD 1945 dan Pancasila. Daed Joesoef (2011), menyatakan bahwa Perguruan Tinggi patut dipersalahkan dalam kesepian pemsaryakatan dan penghayatan nilai-nilai Pancasila. Sebagai lembaga pencetak formal terakhir dari keintelektualan putra-putri bangsa. Selama ini dalam proses pendidikan universitas secara diam-diam berpendirian bahwa universitas adalah bebas nilai. Padahal tidak ada yang namanya universitas adalah bebas nilai. Bukankah ilmu pengetahuan yang menjadi urusan utamanya sehari-hari jelas tidak bebas nilai. Dengan mengutip pendapat Dr. Steven Muller, Daed Joesoef menyatakan bahwa kebingungan dalam hal ini; tidak hanya bodoh, tetapi juga berakibat fatal.

Jaya Suparna (2012), budayawan Indonesia, juga menilai bahwa ilmu-ilmu pasti sampai ilmu sosial yang diajarkan di Perguruan Tinggi juga didominasi ilmu asing. Maka tidak ada psikologi, sosiologi, atau filosofi Indonesia, karena yang diajarkan Cuma teori-teori bikinan orang asing bernama Freud, Jung, Ardono, Weber, Plato, Sartre,

dan lainnya. Bahkan karena menggemari segala sesuatu yang asing, upacara wisuda setia menggunakan busana kebudayaan yang pada hakikatnya mirip badut. Ia juga menceritakan pengalamannya ketika berhasrat menggelar wayang orang di panggung Sydney Opera House (SOH) bersama kelompok seniman Wayang Bharata, banyak pihak sebangsa dan senegara sendiri justru menganggap hasrat saya akan mempermalukan Indonesia. Sebab, kata mereka, wayang orang adalah kesenian kampung. Mujur yang memuji pertunjukan wayang orang di SOH sebagai salah satu pertunjukan terbaik sepanjang sejarah SOH, malah manajer produksi SOH warga negara Australia.

Ketua Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia (MWA UI) KH Said Aqil Siradj, mengatakan, pribumisasi ilmu pengetahuan di Indonesia sudah saatnya dilakukan. Ilmu pengetahuan yang diperoleh dari luar digali secara epistemologi, sehingga bisa dilakukan pembaruan bahkan penemuan baru. Langkah pribumisasi mesti dilanjutkan untuk menemukan teori-teori baru baik di bidang sosial, humaniora, maupun eksakta. Sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan ilmuwan Indonesia bisa melahirkan teknologi yang maju dan setara dengan penemuan bangsa lain. UI diminta untuk melakukan penggalan epistemologi, melakukan inovasi, dan invensi di berbagai bidang pengetahuan. Sebagai barometer bagi Pendidikan Tinggi lain di Indonesia, UI diharapkan mampu melakukan pribumisasi ilmu pengetahuan yang diperoleh dari luar (Siradj, 2012).

Berbagai pendapat yang dikemukakan di atas menggambarkan bahwa manusia dan bangsa Indonesia belum memiliki komitmen yang kuat untuk menjadikan Pancasila dan kebudayaan yang kita miliki dikembangkan di pendidikan tinggi. Padahal komitmen ini penting sebagai salah satu usaha pribumisasi ilmu pengetahuan. Salah satu faktor penyebab terpenting adalah tidak percaya diri dan menderita penyakit yang menggemari segala sesuatu yang bersifat asing (*xenofilia*). Hal itu tentunya sangat disayangkan seperti dikemukakan Koh Young Hun (Profesor di Program Studi Melayu-Indonesia- Hankuk University of Foreign Studies, Seoul Korea) dalam "Korea Saja Bisa, Apalagi Indonesia", bahwa Korsel menjadi negara maju dalam waktu relatif singkat karena empat etos Korea. *Pertama*, "sikap rajin bekerja". Lebih menghargai bekerja secara tuntas betapapun kecilnya pekerjaan itu, ketimbang pidato yang muluk-muluk tetapi tiada pelaksanaannya.

Kedua, “sikap hemat”, yang tumbuh sebagai buah dari rajin bekerja tadi. *Ketiga*, “sikap *self-help*”, yang didefinisikan sebagai berusaha mengenali diri sendiri dengan perspektif yang lebih baik, lebih jujur, dan lebih tepat, berusaha mengembangkan sifat mandiri dan rasa percaya diri. *Keempat*, koperasi atau kerjasama, cara untuk mencapai tujuan secara efektif dan rasional, dan mempersatukan individu serta masyarakatnya. Inilah picu laras yang memacu jiwa kerja bangsa Korea. Bila kita perhatikan, keempat butir nilai itu sesungguhnya adalah nilai lunur bangsa Indonesia. “Rajin pangkal pandai...” dan “sedikit bicara banyak kerja” adalah pepatah yang telah mengakar dalam budaya bangsa Indonesia. Adapun nilai *self-help*, mandiri, sudah lama melekat dalam nilai religi sebagaimana besar masyarakat Indonesia, Karena Tuhan Yang Maha Esa (Allah, pen.) dalam Al Qur’an menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu mengubah nasibnya sendiri. Sedangkan setiap usaha mengubah nasib, baik itu membuahkan hasil ataupun tidak, Islam telah memberinya nilai tambah, digolongkan pada perbuatan ibadah. Sementara sifat terakhir, koperasi, adalah sendi – sendi budaya Indonesia yang amat menonjol. Koperasi atau gotong – royong tetap dipelihara dan dilestarikan.

Saatnya memang ilmuwan Indonesia menghilangkan rasa tidak percaya diri dan *xenofelia*, untuk dapat melakukan pribumisasi ilmu pengetahuan. Karena dilihat dari perspektif epistemologi baru yang dikenalkan Habermas (Kleden, 1987 :xvi –xvii) sesungguhnya memperkuat pentingnya pribumisasi. Epistemologi baru yang dimaksud adalah tentang hubungan *Erkenntnis und Interesse* (Pengetahuan dan Kepentingan). Menurut epistemologi baru, jenis pengetahuan lahir dari dorongan jenis kepentingan (atau ideologi) tertentu dan hubungan antara keduanya bersifat niscaya. Kepentingan teknis, mendorong kelahiran kelompok ilmu-ilmu empiris–positif untuk menunjang proses produksi. Kontrol terhadap alam dan manusia/masyarakat untuk kepentingan produksi menjadi cirikhas ilmu ini. Kepentingan praktis (yaitu dorongan untuk hidup yang benar) melahirkan kelompok ilmu-ilmu humaniora, yang menunjang proses komunikasi. Kemudian kepentingan politis, mendorong ilmu sosial kritis yang menunjang proses emansipasi.

Dengan demikian, ilmu sosial memiliki semacam taksonomi. Misalnya tipologi Habermas, yang didasarkan atas tiga kepentingan “Konstitutif-Pengetahuan” atau kepentingan “kognitif” terutama kontrol teknis, kepraktisan, dan emansipasi. Taksonomi lain, dikemukakan Schrijvers, yang melakukan pembedaan antara “pendekatan” (neo)-positif, kritis, dan transformatif (Nordholt dan Visser, 1997: 42). Dalam kaitan ini Soedjatmoko (1985), mengajukan pendekatan “obyektivitas yang rasional”, yaitu ilmu-ilmu sosial memiliki tugas memperluas pilihan-pilihan masyarakat yang sangat penting bagi evolusi suatu bangsa.

Atas dasar taksonomi ilmu-ilmu sosial di atas, maka ilmu-ilmu sosial tidak hanya memiliki kapasitas interpretatif (daya penjabar) seperti yang diperlihatkan pada tipologi kognitif, pendekatan positif (mendeskripsikan/menguraikan dan menghubungkan fakta empirik), tetapi juga untuk kepentingan praktis (contohnya: oleh negara digunakan legitimasi atau delegitimasi). Dan jika dihubungkan dengan masyarakat, maka akan didapatkan ilmu sosial instrumental, yang tujuan akhirnya pada dominasi masyarakat atau emansipasi. Kemudian ilmu sosial kritis, yang bahasanya lebih difokuskan pada pengertian akademis atau penilaian dari kacamata akademis, sehingga temuan-temuan penelitian ilmu sosial tidak begitu saja diterima, akan tetapi dinilai layak diterima atau tidak secara akademis. Sedangkan ilmu sosial transformatif fokusnya pada rekayasa sosial. Rekayasa sosial baik dalam arti untuk mengatasi masalah sosial yang ada (rekayasa klinis) maupun untuk melakukan perubahan ke arah masyarakat yang diinginkan.

Ke arah mana suatu universitas hendak mengembangkan ilmu-ilmu sosial? Yang niscaya adalah memproduksi ilmu pengetahuan kemudian diabdikan kepada masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan. Untuk berperan sebagai produsen, maka peran sebagai konsumen mulai dikurangi. Ilmu pengetahuan yang diproduksi tidak bebas nilai (*value free*), tetapi berdasarkan nilai dan kepentingan (atau ideologi) yang dianut bangsa Indonesia (*value based*). Untuk berperan sebagai produsen tidak mudah karena seperti dikemukakan Joost Coate (1996: 1), para ahli ilmu sosial melihat ada tiga kawasan (domain) yang mengalami konflik dalam masyarakat sipil modern, yaitu (1) kawasan kepentingan individu, (2) kawasan kepentingan negara, (3) kawasan kepentingan perekonomian kapitalis.

Jika memperhatikan misalnya pada era Orde Baru maka dalam konflik yang selalu menjadi pemenang adalah kepentingan negara (rezim). Negara Orde Baru sangat otonom dan hegemonik. Hampir seluruh wilayah kehidupan rakyat terkooptasi oleh negara. Maka dalam kondisi yang demikian kepentingan individu nyaris terabaikan sama sekali. Perkembangan ekonomi yang menjadi primadona, tidak berkembang secara sehat. Hanya individu atau kelompok yang dekat dan mempunyai akses terhadap kekuasaan yang bisa berkembang. Maka yang lahir adalah *crony capitalism*. Akar perekonomian nasional menjadi sangat rapuh. Maka tidak mengherankan krisis moneter pada pertengahan 1997 begitu cepat melaju mendorong timbulnya krisis ekonomi, politik, dan bidang kehidupan lain (krisis total). Sampai sekarang belum tampak ada penelitian tentang krisis total tersebut dari ilmuwan sosial untuk mencari faktor penyebab atau akar permasalahan secara empirik. Persoalan sebelumnya belum terpecahkan, menyusul persoalan-persoalan baru seperti kasus Bank Century, mafia pajak, Wisma Atlet, konflik sosial dan pertanahan. Kasus-kasus besar ini pun tampak belum ada penelitian dari ilmuwan sosial untuk membedah akar permasalahannya.

Tampaknya universitas dihadapkan pada persoalan bagaimana untuk tetap hidup ketika pemerintah mengurangi alokasi dana anggarannya. Yang terjadi kemudian, universitas disibukkan untuk mencari dana sendiri untuk mengatasi kekurangan dana yang dibutuhkan. Tampaknya memproduksi ilmu pengetahuan melalui riset belum menjadi prioritas. Kemudian kesan universitas bergeser dari lembaga sosial menjadi lembaga bisnis. Untuk menghapus kesan ini, kini dikembangkan kebijakan baru yaitu mengembalikan universitas sebagai pendidikan tinggi pemerintah. Penerimaan mahasiswa baru ke depan seharusnya dilakukan kebijakan hanya melalui jalur SNMPTN (bersubsidi). Karena menghilangkan kebijakan subsidi untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak yaitu kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara adalah tidak konstitusional dan menjauhkan keadilan sosial (sila IV Pancasila).

Kebijakan yang demikian merupakan konsekuensi dari liberalisme yang didukung oleh teori determinitas biologis Malthus. Teori ini sangat percaya pada "*social survival*" dan tidak mendukung gagasan bantuan sosial, cenderung meningkatkan rasa tidak bertanggung ja-

wab. Prinsip Malthus ini kemudian dijadikan sebagai ideologi dasar kelompok pemikir yang menentang kebijakan pemberian bantuan kaum miskin dan perbaikan kondisi kemiskinan. Kebijakan pemberian bantuan pada kaum miskin dipandang oleh kelompok ini bertentangan dengan prinsip alamiah dan kebijakan yang demikian hanya akan mempercepat kehancuran (Nuri Suseno, 1997: 26).

Apakah dengan dengan kebijakan di atas kemudian universitas dapat mengembangkan produksi ilmu pengetahuan untuk masyarakatnya? Hal ini perlu memperhatikan tiga kekuatan yang dirasakan berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara: yaitu kekuasaan negara, kekuatan pengusaha (pasar), dan masyarakat kewarganegaraan (*civil society*). Selama ini tampaknya universitas dipengaruhi/dikendalikan oleh negara dan pasar. Penelitian-penelitian dan pandangan/pemikiran para pakar ilmu sosial ditengarai ada kecenderungan lebih berfungsi sebagai legitimasi pemerintah yang terjebak pada kapitalisme global (neoliberalisme). Kebijakan deregulasi, privatisasi, dan dorongan kuat untuk masuk perdagangan bebas tanpa kebijakan proteksi terhadap kepentingan nasional cukup menjadi indikasi bahwa pemerintah yang neoliberal sebagai kekuatan dominan. Dengan kata lain, kini yang mendominasi di era reformasi adalah pengusaha – penguasa, sedangkan di era Orde Baru adalah penguasa – pengusaha.

Di negara demokrasi Pancasila, yang ideal adalah masyarakat kewarganegaraan yang mampu mengendalikan negara, dan negara mampu mengendalikan pengusaha agar dalam menjalankan usahanya/bisnisnya, tetapi berpijak pada moral dan menjalankan fungsi sosial. Dalam negara kesejahteraan seperti yang dianut NKRI, memang tidak harus anti pasar. Tetapi negara paling tidak seperti dikemukakan Makmur Keliat (2011) harus mampu melindungi warganya yang tidak mampu meraup peluang-peluang yang dapat diraih melalui mekanisme pasar.

Arah pengembangan ilmu-ilmu sosial yang dikembangkan di universitas diorientasikan pada nilai dan kepentingan atau ideologi demokrasi Pancasila tersebut. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti digambarkan oleh Koh Young Hun, sesungguhnya dapat untuk mendorong kemajuan bangsa Indonesia. Karena nilai-nilai tersebut terbukti yang telah menghantarkan bangsa Korsel menjadi negara maju. Kemajuan itu tentunya tidak terlepas dari pengembangan IPTEK-nya yang mempribumi.

Komitmen Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) untuk menjadi *Leading In Character Education*, yang ditegaskan rektor UNY ketika Dies ke-47 tanggal 21 Mei 2011, sebagai bentuk keprihatinan terhadap nilai-nilai Pancasila dan agama yang ditanggalkan begitu saja hanya untuk memperoleh kepentingan sesaat dan menjadi slogan semata bagi sebagian anak bangsa, akan memberikan dasar yang kuat bagi upaya pribumisasi ilmu sosial di FIS (Fakultas Ilmu Sosial). Dalam hal ini Ketua MWA UI, KH Said Aqil Siradj, menyatakan “Pendidikan karakter penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, karena menjamin objektivitas dan kejujuran. Selain itu sangat berguna dalam melahirkan pemimpin yang bisa menjadi pelopor terjadinya perubahan sosial (Siradj, 2012).

Kemudian dengan memperhatikan taksonomi ilmu-ilmu sosial, maka di negara Pancasila pendekatan ilmu-ilmu sosial yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan mengkonstruksi pribumisasi ilmu-ilmu sosial adalah dengan menggunakan kombinasi dari berbagai pendekatan yaitu: transformatif – emansipatif, kritis, dan obyektivitas yang rasional.

Dengan demikian dapat dinyatakan peran universitas dalam proses pribumisasi ilmu-ilmu sosial dapat ditempuh dengan cara (1) membuat teori baru, (2) menyeleksi teori-teori yang berasal dari Barat yang relevan dengan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, (3) memberi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta kearifan lokal pada teori- teori yang ada.

Daftar Pustaka

- Arif Budiman. 1989. *Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Beny Subianto. 1989. "Ilmu-ilmu Sosial Indonesia: Mencari Pendekatan dari Masa ke Masa", dalam *Prisma 2*, Jakarta : LP3ES.
- Daoed Joesoef. 2011. "Pancasila di Zaman Edan". *Kompas*, edisi 1 Juni 2011.
- Darodjatun Kuntjoro Jakti. 1984. "Cendekiawan Dunia Ketiga: Orang Barat di Dunia Timur", dalam Aswab Mahasin dan Ismed Natsir, *Cendekiawan dan Politik*, Jakarta : LP3ES.
- Ester Lince Napitupulu, HAR Tilaar. 2012. "Berkarya Hingga Akhir". Dalam *Kompas*, edisi 16 Juni 2012.
- Jaya Suparna. 2012. "Kebanggaan Nasional" dalam *Kompas*, edisi 2 Juni 2012.
- Koh Young Hun. "Korea Saja Bisa, Apalagi Indonesia". Dalam *Kompas*, Desember 2007.
- Ignas Kleden. 2004. *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*. Magelang: Indonesiatera.
- _____. 1987. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, Jakarta: LP3ES.
- Makmur Keliat. 2011. "Kegagalan Bernegara?", dalam *Kompas* edisi 6 Juni 2011, halaman 7.
- Mohammad Hatta. 1984. "Tanggungjawab Moral Kaum Inteligensia", dalam Aswab Mahasin dan Ismed Natsir, *Cendekiawan dan Politik*, Jakarta : LP3ES.
- Nico Schulte Nordholt & Lontine Visser. 1997. *Ilmu Sosial di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES.
- Nuri Suseno. 1997. "Argumentasi Teori-teori dalam Proses Pembentukan Liberalisme Modern", dalam *Jurnal Ilmu Politik 17*, AIPI.
- Sabam Siagian. 2012. "Pengalaman Intelektual Batara Simatupang", dalam *Kompas* 26 Mei 2012, halaman 7.
- Sri Edi Swasono. 2011. "Pancasila dan Nasionalisme Kampus". dalam *Kompas* edisi 3 Juni 2011, halaman 7.

- Soedjatmoko. 1985. "Ilmu-ilmu Sosial, Pemerintah dan Kaum Muda". Pidato pengarahan pada Six Biennial Conference of the Association of Asian Social Science Research Council, Denpasar Bali pada September 1985.
- Soedjatmoko, 1986, *Dimensi Manusia Dalam Pembangunan*, Jakarta : LP3ES.
- Said Aqil Siradj. "Saatnya Pribumisasi Ilmu Pengetahuan Dilakukan", REPUBLIKA.CO.ID, Rabu, 16 Mei 2012, diunduh 18 Juni 2012.

ORIENTALISME DALAM PENGGKAJIAN SEJARAH ALAM MELAYU

Syed Farid Alatas

Jabatan Pengkajian Melayu, University Nasional Singapura, Singapura 117570
telp : 65 65163707, faks: 65 67732980, email: alatas@nus.edu.sg

A. Ringkasan

Walaupun pelbagai contoh ketidakjitian atau ketidaksesuaian faham-faham, teori-teori dan andaian-andaian Barat telahpun diperhatikan dalam karya-karya kritis tentang kedudukan ilmu-ilmu kemasyarakatan di alam Melayu-Indonesia, akan tetapi apa yang dimaksudkan di aras fahaman dan empiris oleh kejitian dan ketidakjitian jarang telah menjadi perkara perbincangan ilmiah. Makalah ini bertujuan untuk memajukan pemahaman kita terhadap masalah kejitian ini secara menghuraikan beberapa masalah yang masih menghinggapi pengkajian sejarah Nusantara ini. Masalah-masalah ini berkaitan dengan kenyataan Orientalisme yang berterusan menguasai pengkajian Melayu-Indonesia. Dalam makalah ini masalah Orientalisme ditakrifkan dan beberapa contoh apa yang dimaksudkan dengan pendekatan bukan Erosentris dihasilkan.

B. Pendahuluan

Sejak kurun kesembilan belas telah menjelma kesedaran akan kekurangan kecocokan antara ilmu-ilmu kemasyarakatan Barat dan kenyataan sosial di dunia Melayu. Pelbagai contoh ketidaksesuaian faham-faham, teori-teori dan andaian-andaian Barat telahpun diperhatikan dalam karya-karya kritik tentang kedudukan ilmu-ilmu kemasyarakatan di dunia Melayu. Kenyataan bahawa ilmu-ilmu kemasyarakatan telah muncul di Barat, diamalkan di dunia Melayu pada mulanya oleh sarjana-sarjana penjajah dan Eropah selainnya, dan akhirnya ditanamkan di kalangan sarjana-sarjana tempatan semasa dan selepas kemerdekaan, telah membangkitkan persoalan kesesuaian ilmu-ilmu ini untuk masyarakat-masyarakat alam Melayu. Beberapa sarjana pada kurun kesembilan belas dan lebih ramai lagi pada zaman pasca-penjajahan telah mencatat bahawa ilmu-ilmu kemasyarakatan tidak boleh dipindahkan dari suatu latar sejarah dan ekonomi-sosial tertentu kepada yang lain tanpa memutar-belitkan pemahaman terhadap kenyataan itu. Secara ringkas, masalah ketidaksesuaian ilmu-ilmu kemasyarakatan Barat telah dikenalpasti dan keperluan membangkitkan pengganti-pengganti yang sesuai telah diakui. Masalah ketidaksesuaian ini berkaitan dengan suatu orientasi yang dinamakan Orientalisme yang berterusan menguasai pengkajian Melayu-Indonesia.

Kertas ini bertujuan untuk mendedahkan serta menggambarkan andaian-andaian Orientalisme yang menggaris-bawahi sebahagian besar daripada kajian-kajian mengenai sejarah kepulauan Melayu-Indonesia. Orientasi Orientalisme inilah yang menentukan sebahagian besar daripada penyusunan sejarah kita, dan tiada membawa kita kepada suatu gambaran masa lampau yang benar. Orientalisme, yang berasal daripada tradisi kesarjanaan Eropah-Amerika, telah muncul dengan permulaan kajian Melayu-Indonesia pada abad kesembilan belas. Orientasi yang berasaskan kepada Orientalisme itu telah mempengaruhi ahli-ahli sejarah Melayu-Indonesia dalam erti bahawa ada segolongan daripada mereka yang menjadi pengikut tradisi itu. Akibatnya adalah bahawa setengah-setengah ciri-ciri Orientalisme dikekalkan dalam kesarjanaan tempatan di dunia Melayu.

Ini merupakan suatu masalah lama yang masih mendampingi kita, malah dalam bentuk baru. Di sini kita perlu membezakan antara

Orientalisme lama dan Orientalisme baru. Orientalisme yang lama merujuk kepada orientasi yang terang-terangan anti-Timur dan berasaskan kepada pelbagai garis pemisah (*dichtotomies*) yang palsu antara Timur dan Barat seperti “maju-mundur”, “beradab-biadab”, “kebenaran-kepalsuan”, dan sebagainya. Orientalisme yang lama berdasarkan kepada prasangka-prasangka ras dan agama, dan stereotaip-stereotaip tertentu.

Pada umumnya, Ilmu-ilmu kemasyarakatan zaman sekarang telah mengatasi masalah ini. Tetapi, tempat Orientalisme yang lama telah diambilalih Orientalisme baru, iaitu, suatu orientasi yang mengetepikan binaan (*constructions*) dan gagasan-gagasan tempatan dan asli, iaitu bukan-Barat.

Contoh yang lazim adalah wacana dan penyelidikan tentang agama Hinduisme. Apa yang sebenarnya terdiri daripada pelbagai agama yang berbeza-beza dan berasingan, apabila ditemui sarjana-sarjana penjajah di India, disatukan dalam suatu binaan yang digelar Hinduisme. Binaan palsu ini telah diambil dan dimiliki oleh sarjana-sarjana Belanda yang telah “menemui” agama Hindu di Indonesia.

Bahayanya dikuasai oleh binaan Orientalis adalah proses pengetepian teori dan faham tempatan dan asli. Contohnya, dalam kajian mengenai kebangkitan Islam istilah seperti fundamentalisme digunakan seolah-olah ada keserupaan antara fundamentalisme Kristian dan apa yang disebut fundamentalisme Islam. Yang diketepikan dalam proses ini adalah faham-faham yang berasal daripada tradisi Islam sendiri seperti islah, tajdid, *ghuhw* dan *hashwiyah*.

C. Diagnosis di Alam Melayu terhadap Permasalahan Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan dan Sejarah

Zaman penubuhan ilmu-ilmu kemasyarakatan dan institusi-institusi dalam mana mereka diajar dan berkembang di dunia Melayu telah dimulakan oleh sarjana-sarjana dan pentadbir-pentadbir penjajahan sejak kurun kelapanbelas, dan juga oleh orang Eropah selainnya secara langsung dan tidak langsung.

Tinjauan atas persoalan ketidaksesuaian di aras falsafah, teoretik, empiri dan terapan adalah akibat daripada pertemuan di antara teori dan model Barat pada satu pihak, dan kenyataan tempatan/ kebangsaan/rantauan pada pihak lain.

Mari kita mengambil contoh dalam mana ketidaksesuaian dipandang sebagai masalah dengan merujuk kepada faham agama.

Istilah yang kita gunakan menentukan dan mencerminkan kefahaman kita terhadap sesuatu. Contohnya adalah istilah “agama”. Apabila kita sebut “agama Islam” kebanyakan orang memahami ini sebagai merujuk kepada suatu sistem kepercayaan dan amalan-amalan ibadah yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang dinamakan Islam. Sebenarnya, ini tidak tepat sebab Islam adalah lebih daripada sistem kepercayaan dan ibadah.

Istilah yang seringkali diterjemahkan sebagai agama atau religion, iaitu, din, sebenarnya tidak membawa sama makna dengan “agama” atau *religion*. Pertama-tama sekali, istilah agama berasal daripada bahasa Sanskerta dan berarti sesuatu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Istilah agama ini digunakan oleh orang Hindu untuk merujuk kepada kitab-kitab Vedic, iaitu, kitab suci Hindu. Namun begitu, orang Islam di rantau Asia Tenggara yang berbahasa Melayu tidak memahami agama dalam arti Hindu ini. Ramai diantara mereka memahami agama dalam arti *religion* seperti yang difahami di Barat, iaitu, sebagai suatu sistem kepercayaan dan amalan yang merupakan sebahagian daripada budaya dan tidak seharusnya merangkumi seluruh sesuatu budaya. Ini disebabkan oleh kenyataan bahawa agama Nasrani di Eropah telah sejak berkurun-kurun menjadi hanya sebahagian daripada kehidupan budaya dan sosial orang Eropah. Jadi, faham agama yang terkandung dalam istilah *din* tidak dapat disamakan dengan yang terkandung dalam istilah *religion*.

Ketidaksesuaian ilmu Barat dalam konteks bukan Barat termasuk berkisar dari ketidaksesuaian pandangan Eropah terhadap agama ke kesan pemutar-balikan kaedah selidik survei ke ketidaktepatan model-model Barat. Begitu sungguh perhatian seumpama ini sehingga telah muncul rumusan pelbagai pemandangan teoretik terhadap keadaan ilmu-ilmu kemasyarakatan di Dunia Ketiga yang mengajukan penilaian kritik akan pengaruh ilmu-ilmu kemasyarakatan Barat atas bidang-bidang ilmiah di Dunia Ketiga.

Sejak abad kesembilan belas, para sarjana alam Melayu dan cendekiawan lain telah membahas keadaan ilmu-ilmu kemasyarakatan di rantau ini. Penilaian mereka acap melibatkan kritik terhadap Orientalisme dan penanaman secara tidak kritikal ilmu-ilmu kemasyarakatan

Amerika dan Eropah di alam Melayu. Banyak karya jenis ini terbit di Singapura, termasuk tulisan-tulisan Syed Hussein Alatas (1956, 1969, 1972, 1974), M.L. Blake (1991), Syed Farid Alatas (1993, 1995a, 1995b, 1998, 2006), dan Vineeta Sinha (1997, 1998). Di Singapura juga terdapat perkembangan minat dalam pengganti feminis terhadap wacana sosiologi arus utama (lihat, misalnya, Chung, 1989; PuruShotam, 1992, 1993, 1998; Sinha, 1999; Wee, 1988; Wee, Heyzer & Kwa, 1995).

Masalah serupa diungkapkan pertama kali di Indonesia, bukan oleh orang Indonesia sendiri, melainkan oleh para sarjana Belanda. Yang mula-mula menentang Orientalisme ilmu-ilmu kemasyarakatan, dari kalangan Belanda khususnya, dan dari kalangan orang-orang Eropah secara umum, adalah Jacob Cornelis van Leur, seorang sarjana yang tragisnya mati muda dalam pertempuran di Laut Jawa melawan orang-orang Jepang. Ia (van Leur, 1937, 1940a, 1940b) kritis terhadap kecenderungan Erosentris yang ditemukan dalam pengetahuan Belanda mengenai Hindia Belanda. Ia menulis dalam bahasa Belanda, tetapi beberapa esainya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris (van Leur, 1955). Van Leur terkenal karena tulisannya yang menentang perspektif dari "geladak kapal, dinding-dinding benteng, balkon tinggi rumah-rumah dagang" (ibid.: 261), meskipun ia sendiri tidak objektif dalam menilai, misalnya, pengislaman Indonesia (Alatas, 1962: 225-26). Sebagai contoh, ia mempertanyakan ketepatan abad delapan belas sebagai sebuah kategori dalam sejarah Hindia Belanda, karena merupakan kategori yang dipinjam dari sejarah Barat (van Leur, 1940a).

Secara perlahan, orang-orang Indonesia sendiri mulai menulis tentang masalah Orientalisme dan bias-bias lain yang muncul dalam penulisan sejarah Indonesia (misalnya, Pane, 1951; Soedjatmoko, 1960).

Beberapa sarjana juga menyoroti masalah imperialisme intelektual dan gagasan-gagasan terkait. Pada 1950-an, Syed Hussein Alatas dari Malaysia merujuk pada "import secara besar-besaran gagasan-gagasan dunia Barat ke masyarakat Timur" (Alatas, 1956), yang dilakukan tanpa pertimbangan sepatutnya dari segi konteks sosial-sejarah. Ini disebutnya sebagai masalah asa kolonialisme. Lebih lanjut ditunjukkan bahwa cara berpikir penduduk terjajah memiliki kaitan dengan imperialisme politik dan ekonomi. Demikian pula ungkapan imperialisme akademik (Alatas, 1969).

D. Mentakrifkan Masalah dalam Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan dan Sejarah

Dari catatan-catatan tadi, berbagai persoalan yang telah dikenal pasti oleh sejumlah ilmuwan dan pemikir Asia dapat dijabarkan menurut ciri-ciri berikut:

1. Ada *bias Erosentris* sehingga ide, model, pilihan masalah, metodologi, teknik, bahkan rencana penyelidikan berasal dari karya Amerika, Inggris, dan hingga tingkatan tertentu, Prancis dan Jerman.
2. Ada pengabaian umum terhadap tradisi falsafah dan sastra tempatan. Meski mungkin ada kajian mengenai sastera dan atau falsafah tempatan, tradisi semacam ini tetap menjadi objek kajian, tidak dianggap sebagai sumber konsep ilmu-ilmu kemasyarakatan.
3. Kurangnya kreativiti atau ketidakmampuan para ilmuwan sosial di luar arena budaya Ero-Amerika untuk melahirkan teori dan metode yang asli (Sinha, 1998: 19). Terasa adanya kekurangan gagasan-gagasan asli yang menumbuhkan faham baru, perspektif teoritis baru, aliran pemikiran baru, atau inovasi dalam metode penyelidikan.
4. Mimesis (peniruan) terlihat dalam penerimaan pengetahuan yang tidak kritik terhadap model ilmu-ilmu kemasyarakatan Barat (Sinha, 1998: 19).
5. Terkait dengan ini adalah masalah auto-Orientalisme, yakni internalisasi gagasan-gagasan Orientalis yang berkembang di Barat, kemudian dikonsumsi di wilayah-wilayah yang merupakan objek konstruksi Orientalis.
6. Teori-teori Orientalisme dan Erosentrisme, yang membincangkan binaan secara wacana (*discursive construction*) Timur dan sejarah dunia, juga merujuk kepada satu segi ketidakjitian, iaitu, ketidakselarasan antara andaian dan kenyataan. Umpamanya, banyak di antara pemerhatian Marx dan Weber terhadap masyarakat-masyarakat bukan-Eropah bukan hanya salah secara fakta, akan tetapi mereka berasaskan kepada andaian-andaian tiada berdasar sepanjang yang menyangkut ciri-ciri utama masyarakat-masyarakat "Timur". Akibat Orientalisme adalah masalah ketidakjitian atau ketidaksesuaian dalam ilmu-ilmu kemasyarakatan di dunia Melayu, termasuk pendekatan ilmiah terhadap sejarah rantau ini.

7. Wacana Eropa mengenai masyarakat bukan Barat cenderung mengarah pada pembinaan esensialis, yang “memastikan” bahwa dirinya adalah kebalikan dari Eropa: barbar, terbelakang, dan irasional (Sinha, 1998: 11-12).
8. Tiadanya sudut pandang minoriti. Sebagai mithal, Evans (1997) mencatat bahwa dalam berlimpahnya data yang dikumpulkan para etnografer Cina, Vietnam, dan Laos, tidak ada tradisi untuk mencatat “suara-suara minoriti” (ibid.: 10). Jika kita memahami istilah “minoriti” bukan hanya dalam arti minoriti etnik tetapi juga semua kelompok yang tidak beruntung dan terpinggirkan, maka dapat kita tegaskan bahwa ilmu-ilmu kemasyarakatan semacam itu dikuasai oleh perspektif elitis.
9. Persekutuan dengan negara. Peranan yang dimainkan disiplin-disiplin seperti antropologi dan geografi pada masa kolonial terus berlanjut di zaman sekarang. Sebagai mithal, antropologi dipergunakan negara untuk mewujudkan integrasi, kawalan atas dasar negara, dan penciptaan sebuah budaya kebangsaan (Evans, 1997: 8, Pieke, 1997: 6; Ramstedt, 1997: 15).
10. Persoalan-persoalan tadi berada dalam konteks imperialisme akademik atau intelektual (Alatas, 2000), yakni penguasaan intelektual Dunia Ketiga oleh kuasa-kuasa ilmu-ilmu kemasyarakatan (AS, Inggris, dan Prancis).

Jenis watak yang tertawan oleh Orientalisme bercirikan cara memikir yang dikuasai oleh pemikiran Barat. Masalahnya bukan pengambilan dari pemikiran Barat sendiri, tetapi cara tanpa kupasan dan tiruan dalam mana ilmu dari Barat dimengerti dan diterima. Suatu *demonstration effect* mengakibatkan tiruan di segala aras kegiatan-kegiatan keserjanaan, termasuk penetapan masalah, analisa, pengitlakan, pembentukan faham, penggambaran, penghuraian, dan pentafsiran (Alatas, S.H. 1972: 11-12). Dari teori tawanan watak kita dapat memahami ketidakjitian sebagai bercirikan ilmu masyarakat yang ditentukan oleh ketidakbolehan membangkitkan masalah asli dan merencanakan kaedah asli demi penyelesaian masalah.

Penulisan ilmiah watak tertawan juga berasaskan kepada “ketidaknyataan andaian-andaian asas, abstraksi yang salah, ketidaktahuan atau salah pentafsiran fakta-fakta, dan pemahaman keliru terhadap

masalah-masalah tertentu” dalam ilmu-ilmu kemasyarakatan (Alatas, S.H. 1972: 11). Masalah ketidakselarasan antara andaian dan kenyataan mengakibatkan masalah penerapan teori-teori, faham-faham serta model-model Barat. Teori-teori Orientalisme, Erosentrisme dan kupasan pascapenjjajaan telah terus-menerus menunjukkan bagaimana teori-teori yang tidak dapat diterapkan dipaksakan pada fakta-fakta sejarah, yang akhirnya menjadi binaan yang sangat diragukan. Contoh terkenal adalah faham ragam pengeluaran Asiatic Marxis. Ketidaktepatan dalam erti ketidakterapan di sini disebabkan oleh ketidakcocokan antara teori dan kenyataan empiri.

E. Seruan Akan Wacana Pengganti: Ke Arah Pembinaan Semula Sejarah Nusantara

Pemahaman bahwa ilmu-ilmu kemasyarakatan di Asia memiliki masalah sebagaimana disebutkan dan dibicarakan tadi telah menimbulkan reaksi di kalangan sarjana Barat dan non Barat. Pengenalan masalah ketidaksesuaian adalah suasana tepat untuk memahami seruan untuk kesesuaian.¹ Ini telah menjelma dalam bentuk anjuran untuk mentafsirkan semula sejarah.

Sejarah yang ditafsir semula merupakan apa yang Edward Said menamakan:

“*revisionary history*”, iaitu penulisan sejarah yang menolak wacana berpengaruh dan berkuasa dan yang “melebihi perlawanan Timur menentang Barat, dan secara cendekia dan konkrit mencuba memahami perkembangan beraneka-ragam dan yang seringkali aneh, yang dahulu tiada tercapai oleh apa yang dinamakan sejarawan dunia dan juga Orientalis penjajahan...” (Said, 1993).²

Di dunia Melayu, seorang pendukung awal ilmu-ilmu kemasyarakatan dalam bentuk non akademis, kemungkinan adalah Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi (1796-1854). Salah satu karyanya adalah *Kesah Pelayaran Abdullah* pada 1838. Abdullah (1838/1965) merupakan seorang pengamat yang tajam mengenai masalah keterbelakangan

¹ Pelbagai seruan ini telah disenaraikan dalam Alatas (1995a: 128-133).

² Contoh karya seumpama ini yang dirujuk Said adalah Gran (1979), Tucker (1987), Batatu (1978), Alatas (1977). Lihat juga Said (1990).

masyarakat Melayu pada zamannya, yang baginya disebabkan oleh tatanan feodal. Abdullah adalah pendukung penggunaan bahasa Melayu sebagai media pengembangan kesadaran orang Melayu. Abdullah jelas tidak menentang seni tilawah Al-Quran. Namun, mempelajari Al-Quran tanpa memahami isinya menurutnya tidak rasional (Abdullah, 1838/1965: 15). Ia menyayangkan bahwa orang-orang elit Melayu tidak memainkan peran utama dalam menyuburkan proses belajar di kalangan orang-orang Melayu agar dapat menghasilkan karya-karya di berbagai cabang pengetahuan (Abdullah, 1838/1965: 15-16). Abdullah kemudian menilai dampak feudalisme pada pikiran Melayu yang ia pandang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karyanya merupakan catatan kritik pertama mengenai feudalisme Melayu yang menawarkan sebuah perspektif yang mematahkan sudut pandang kolonial dan feodal.³

Di Indonesia, para sarjana kolonial Belanda-lah yang pertama kali membicarakan masalah pengganti dalam kajian sejarah Indonesia. Belakangan, baru diikuti oleh orang-orang Indonesia sendiri. Meskipun gagasan sejarah yang Indosentris tetap merupakan faham yang kabur dan tampak "lebih berhasil dalam konsepsi ketimbang pelaksanaan" (Kartodirdjo, 1982: 30), beberapa catatan mengenai usaha-usaha awal masih bisa dikemukakan.

Sarjana Belanda, J.C. van Leur, telah mempertanyakan cocok-tidaknyanya abad kedelapan belas dijadikan sebuah kategori dalam sejarah Indonesia.⁴ Abad kedelapan belas adalah sebuah kategori pinjaman dari sejarah Barat yang menunjukkan aspek-aspek khas Barat. Lebih lanjut, tidaklah absah menganggap sejarah Indonesia sebagai sejarah *Dutch East India Company* (Perusahaan Hindia Timur Belanda). Apalagi, para sejarawan telah membuat kesalahan dengan mengasumsikan bahwa negara-negara "Oriental" mengalami kemunduran pada abad delapan belas sebagaimana keadaan Eropa sebelum Revolusi Industri. Maka, yang dibutuhkan adalah sebuah sistem kategori baru yang hanya dapat dimunculkan melalui keakraban dengan sejarah Indonesia sebagai sebuah sejarah menurut ketentuannya sendiri, bukan sejarah seberang laut Belanda.

³ Untuk diskusi yang sangat bagus mengenai pemikiran Abdullah, lihat Shahanuddin (1988: Bab 2). Saya bersandar pada karya ini untuk keterangan tadi.

⁴ Penjelasan mengenai van Leur diambil dari Hall (1959: 7-8) yang membicarakan ulasan van Leur (1940a) tentang Stapel (1938-1940).

Cendekiawan Indonesia Armin Pane (1951) telah mempublikasikan sebuah esai berisikan gambaran besar mengenai sejarah Indonesia yang Indosentris. Ini bukan berarti mengabaikan karya-karya atau sumber asing, tetapi lebih menempatkan mereka kembali dalam sudut pandang sejarah Asia dan Asia Tenggara, bukan Eropa (Pane, 1951). Indosentrisme dapat dipahami sebagai upaya mengoreksi sejarah Indonesia yang (semula) tak lebih dari perluasan sejarah seberang laut Belanda. Caranya, dengan memusatkan perhatian pada orang Indonesia sendiri sebagai pelaku sejarah. Implikasinya mencakup perhatian pada sejarah lokal dan regional. Sejarah mikro semacam itu pada akhirnya akan mendorong seruan pendekatan multidimensi yang tidak terdapat dalam pendekatan sejarah arus utama (Kartodirdjo, 1982: 38-39). Meski kebutuhan akan pendekatan multidimensi tampak nyata, banyak sejarah alam Melayu yang masih harus ditulis kembali dengan semangat ini.

Syed Hussein Alatas (1962: 22; 1964) telah mengemukakan cadangan membina semula sejarah Kepulauan Melayu-Indonesia yang terkait dengan metodologi dan falsafah sejarah. Ia mencatat, dalam sejarah Melayu-Indonesia, abad ketiga belas hingga keenam belas merupakan periode yang diabaikan dalam kajian sejarah Asia Tenggara dan harus diperlakukan sebagai zaman tersendiri (ibid.: 219). Alatas mengusulkan agar zaman tersebut dianggap sebagai zaman Islam dengan individualitinya sendiri kerana merupakan sebuah zaman pengislaman yang intensif, dan memunculkan masalah historiografik seperti periodisasi, unit analisis, dan sudut pandang sejarah (ibid.: 224). Selain dari itu, karya Alatas dalam mana penafsiran semula sejarah dilakukan adalah bukunya, *The Myth of the Lazy Native* (1977).

Karya awal lain tentang rekonstruksi adalah karya saudara Alatas, Syed Muhammad Naquib al-Attas (1969), yang diikuti dengan karya serupa dalam bahasa Melayu (1972). Karya ini mengemukakan teori umum mengenai pengislaman Kepulauan Melayu-Indonesia didasarkan pada sejarah gagasan. Al-Attas menggarapnya dengan meneliti "konsep-konsep istilah pokok yang berubah dalam bahasa Melayu" di abad keenam belas dan tujuh belas. Bukti yang membentuk landasan teori umum tersebut diambil dari sastra-sastra utama berbahasa Melayu, Arab dan Persia, dan metode yang digunakan adalah "penaf-

siaran kritis dan komentatif” terhadap teks maupun “konsep metodologis dan pendekatan analisis semantik modern” (al-Attas, 1969: 1-2).

Di sini, mungkin menarik dicatat bahwa Singapura telah memiliki tradisi menghasilkan wacana pengganti sejak 1970-an. Contoh-contohnya mencakup penyelidikan sosiologi sejarah tentang ideologi penjajahan yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas dengan fokus pada (a) falsafah politik Raffles (1971) dan (b) mitos kemalasan Melayu, Jawa dan Filipina (1977), dan (c) seruannya untuk menumbuhkan tradisi ilmu-ilmu kemasyarakatan otonom di Asia (1979, 1981). Demikian pula dengan karya-karya lain oleh Shabaruddin Maaruf (1984, 1989, 1992) dan Sharifah Maznah Syed Omar (1993).

Usaha-usaha seumpama ini telah bermula tetapi tidak berte-rusan dan masih belum mempengaruhi bidang pengkajian Melayu-Indonesia. Jika kita merujuk kepada tulisan “*revisionary history*”, iaitu penulisan sejarah yang menolak wacana berpengaruh dan berkuasa, contohnya, karya Syed Hussein Alatas dan Syed Muhammad Naquib Al-Attas, buku dan makalah mereka jarang dipetik atau disebut secara luas dan kritikal, sepanjang yang menyangkut pandangan mereka terhadap Orientalisme.

Dalam apa yang berikut, saya memberi dua contoh apa yang dimaksudkan dengan ilmu-ilmu kemasyarakatan yang melawan Orientalisme.

Penerapan secara kritik faham-faham dari Barat

Istilah yang biasanya digunakan untuk merujuk kepada sistem ekonomi negeri-negeri Melayu sebelum zaman kapitalis adalah feudalisme. Sebenarnya, istilah ini dengan sendirinya tidak sesuai. Salah-satu daripada ciri-ciri Orientalisme adalah penerapan faham-faham daripada Barat secara tidak kritikal. Ini menyebabkan pengabaian faham-faham lain yang mungkin lebih sesuai untuk menggambarkan keadaan ekonomi-politik negeri-negeri Melayu pada zaman prakapitalis.

Ekonomi-politik negeri-negeri Melayu dan kepulauan Melayu-Indonesia pada amnya dapat difahami sebagai terdiri daripada dua jenis peraturan politik, iaitu, yang berpusat dan yang tidak berpusat. Yang tidak berpusat dinamakan oleh Bronson sebagai jaringan perukaran persungai (Bronson, 1978). Pusat politik dan ekonomik sistem ini terletak di kuala sungai di daerah pantai dan membentang hingga ke hulu atau hutan-hutan di pedalaman di mana terdapat

pengeluar terakhir barang-barang hasil hutan. Sistem ini adalah sistem yang tidak berpusat kerana yang memerintah di kuala sungai itu tidak memiliki keseluruhannya wilayah itu, iaitu wilayah yang membentang dari kuala sungai hingga ke hulu. Ia hanya cuba memaksa ataupun memperoleh kesetiaan pengeluar-pengeluar di hulu sungai dengan menagih sumpah setia atau ufti, iaitu, bayaran yang di kenakan oleh seorang pemerintah ke atas daerah-daerah yang di luar kuasanya. Ia juga harus bersaing dengan kuasa-kuasa lain di wilayah itu untuk menubuhkan dan memelihara kekuasaan ke atas daerah pedalaman di mana barang-barang dikeluarkan dan diedarkan sampai ke hilir kerana ia hendak menjadi pusat pengedaran barang-barang ekspot dan impot. Ia juga bersaing dengan pemerintah wilayah yang lain yang berpusat di kuala sungai yang lain. Sistem ekonomi politik ini dinamakan sistem tidak berpusat kerana pemerintah tidak memiliki dan menguasai keseluruhan wilayah itu. Satu contoh jaringan pertukaran persungai adalah negara Srivijaya.

Sistem ekonomi-politik yang berpusat dinamakan jaringan pertukaran persawahan. Dalam sistem ini barang-barang yang dikeluarkan di perkampungan-perkampungan dijual di pekan-pekan oleh petani-petani dan pedagang-pedagang beberapa hari seminggu. Pekan-pekan ini adalah kecil dan merupakan pekan yang sementara. Dari pekan-pekan ini barang-barang dijual ke pasar-pasar yang besar dan tetap. Dari pasar-pasar menengah ini barang-barang dijual di bandar atau kota diraja untuk kegunaan penduduknya dan ekspot. Negara yang berdasarkan kepada sistem seumpama ini terdiri daripada beberapa perkampungan dan pasar menengah. Sistem ini dinamakan sistem berpusat kerana kebanyakan tanah dimiliki pemerintah. Sistem ini berdasarkan kepada pengeluaran barang-barang pertanian seperti padi. Pemerintah menguasai pengedarannya dan menagih cukai atasnya. Contoh jaringan pertukaran persawahan adalah negara Majapahit dan Mataram (Hall, 1985).

Untuk mendalami pemahaman kita tentang kedua-dua jenis sistem ekonomi-politik yang dibincangkan di sini kita perlu merujuk kepada faham ragam pengeluaran (*mode of production*). Ini merupakan faham yang paling am dan abstrak untuk memeriksa dan menjelaskan sifat dan fungsi sebuah ekonomi-politik.

Setiap ragam pengeluaran terdiri daripada alat-alat pengeluaran, kelas-kelas dan perhubungan pengeluaran tertentu. Ragam pengeluaran yang paling penting pada zaman prakapitalis di dunia Melayu, iaitu, ragam pengeluaran penyerahan ufti (*tributary mode of production*), dicirikan olah adanya dua kelas utama, kelas tani yang menetap di perkampungan dan kelas pemerintah yang menguasai jenetara politik dan menetap di perkampungan dan kota dan dapat memperuntukkan lebih ekonomi daripada kelas tani. Dalam ragam pengeluaran penyerahan ufti, ufti dalam bentuk sewa diserahkan kepada kelas pemilik tanah atau kelas pemerintah dan ini memberikan mereka hak menduduki dan memanfaatkan tanah itu. Ragam pengeluaran ufti yang terdapat di dunia Melayu-Indonesia terdiri daripada beberapa jenis.

Kedua jenis jaringan pertukaran yang dibicarakan di atas terdiri daripada ragam pengeluaran penyerahan ufti yang berlainan. Jaringan pertukaran persungai terdiri daripada ragam pengeluaran feodal, sedangkan jaringan pertukaran persawahan terdiri daripada ragam pengeluaran Asiatik dan ragam pengeluaran perlungguhan.

Kalau ragam pengeluaran Asiatik difahami sebagai ragam pengeluaran dalam mana pemerintah memperoleh lebih ekonomi dari rakyat petani secara langsung, nyata bahwa sistem ekonomi Jawa prakapitalis tidak boleh digambarkan oleh ragam pengeluaran ini semata-mata. Nagaragung dan mancanegara Imperaturia Mataram berdasarkan kepada pemberian tanah kepada pegawai kerajaan sebagai gaji. Ini dinamakan lungguh.

Mengubah gagasan-gagasan yang sudah diterima

Sesuatu yang berpengaruh dalam pengkajian sejarah ekonomi-politik dunia Melayu adalah andaian bahawa negara-negara pra-kapitalis di rantau ini berasaskan kepada ragam pengeluaran Asiatik atau ragam pengeluaran yang lain yang tidak mengandungi prasyarat-prasyarat untuk perkembangan ragam pengeluaran kapitalis atau kapitalisme moden. Umpamanya, untuk Karl Marx ada empat prasyarat untuk penjelmaan ragam pengeluaran kapitalis yang hanya dapati di Eropah dalam ragam pengeluaran feodal. Mereka adalah 1) pembebasan kaum petani daripada kewajipan mereka terhadap pemilik tanah (Marx, 1965: 107; 1978: 69, 73); 2) perkembangan

pekerjaan kemahiran perkotaan (*urban crafts*) (Marx, 1965: 104-5); 3) pengumpulan hakmilik yang diperolehi daripada perdagangan dan riba (*usury*) (Marx, 1965: 107-9); dan 4) meningkatnya kegiatan pembuatan (*manufactures*) (Marx, 1965: 116-17; 1978: 72-3). Kesemuanya empat prasyarat ini adalah sangat penting bagi peralihan daripada feudalism ke kapitalisme di Eropah.

Perkembangan dalam pekerjaan kemahiran perkotaan dan pembuatan memerlukan bekalan buruh yang cukup yang tidak ada di kota-kota Eropah pada Zaman Pertengahan, yang kemudian dimungkinkan oleh pembebasan kaum petani dari perdesaan dan adanya sebuah kelas pedagang yang agak bebas daripada kuasa pemerintah di perkotaan. Prasyarat-prasyarat ini difahami Marx sebagai tiada terdapat dalam masyarakat Asia kerana ekonomi-politiknya dicirikan oleh pengaturan kota dan desa dalam mana tiada terdapat kelas pedagang yang bebas.

Kenyataan, seperti yang terdapat di negeri-negeri Melayu tidak semestinya menaati binaan teoretis ini. Telah dikemukakan oleh P.L. Burns bahawa dalam kes negeri-negeri Melayu, terutama sekali di Perak, Selangor dan Sungai Ujong, proses peralihan daripada ragam penagihan penyerahan ufti kepada kapitalisme telah mula dijalankan oleh orang besar atau datuk-datuk Melayu sebagai pemilik lombong-lombong timah. Kapitalisme menjelma dalam industry timah di Semenanjung Melayu sebelum penubuhan pemerintah penjajahan (Burns, 1982). Datuk-datuk Melayu telah bekerjasama dengan pedagang-pedagang Cina, Arab, Jawi Peranakan dan Serani untuk mengimpot buruh Cina.

Mewujudkan gagasan yang baru

Selain daripada usaha-usaha yang tercatat di atas, cabarab kita sekarang adalah untuk mewujudkan kembali minat terhadap pemikir-pemikir dan gagasan-gagasan dari tradisi tempatan dan asli kita dengan tujuan untuk menyumbang kepada ilmu-ilmu kemasyarakatan yang sejagat dan menyeluruh. Contohnya adalah daripada pemikir-pemikir seperti Jose Rizal dan Syed Hussein Alatas yang telah mengambil perhatian terhadap faham kemalasan dan memajukan suatu definisi kemalasan yang baru (Alatas, 1977; Rizal, 1963), dan pemikir-pemikir selainnya seperti 'Alç Shariati, Said Nursi, Pramoedya Ananta Toer,

Morteza Mutahhari, Ibn Khaldun, Benoy Kumar Sarkar, Gilberto Freire, dan sebagainya.

F. Kesimpulan

Ringkasnya, para sarjana di Dunia Ketiga telah mengkritik keadaan ilmu-ilmu kemasyarakatan di masyarakat mereka. Kritik-kritik itu mencakup berbagai segi, tetapi semuanya sepatutnya difahami dalam konteks hubungan antara ilmu-ilmu kemasyarakatan Dunia Ketiga dan lembaga-lembaga ilmu Barat.⁵ 'Wacana pengganti merupakan istilah kolektif yang merujuk pada pelbagai usaha untuk membincangkan tentang masalah-masalah yang menhinggapi ilmu-ilmu kemasyarakatan seperti Orientalisme.

⁵ Berhubung buku ini berkenaan dengan keadaan ilmu sosial di luar lingkungan budaya Barat, terutama di wilayah yang biasanya disebut dengan istilah "wilayah berkembang" atau "area yang sedang tumbuh", atau "Dunia Ketiga", maka "Barat" di sini digunakan sepenuhnya dalam arti deskriptif. Istilah "Barat" tidak digunakan untuk mode Oksidentalisme apa pun, melainkan sekadar kategori yang cocok untuk merujuk pada segala sesuatu yang secara umum disebut Anglo-Saxon. Hingga tingkat tertentu, istilah "Barat" juga merujuk pada sebuah Benua (terutama Jerman dan Prancis) yang mendominasi tradisi ilmu sosial.

Rujukan

- Alatas, Syed Farid. 1993. "A Khaldunian Perspective on the Dynamics of Asiatic Societies" *Comparative Civilizations Review* 29: 29-51.
- _____. 1995a "The Theme of 'Relevance' in Third World Human Sciences", *Singapore Journal of Tropical Geography* 16, 2: 123-140.
- _____. 1995b. "The Sacralization of the Social Sciences: A Critique of an Emerging Theme in Academic Discourse", *Archives de Sciences Sociales des Religions* 91, 89-111.
- _____. 1998. "The Rhetorics of Social Science in Developing Societies", CAS Research Papers Series No 1, Singapore: Centre for Advanced Studies, National University of Singapore.
- _____. 2006. *Alternative Discourses in Asian Social Science: Responses to Eurocentrism*, New Delhi: Sage.
- Alatas, Syed Hussein. 1972. "The Captive Mind in Development Studies," *International Social Science Journal* 34, 1: 9-25.
- _____. 1974. "The Captive Mind and Creative Development," *International Social Science Journal* 36, 4: 691-699.
- _____. 1977. *The Myth of the Lazy Native: A Study of the Image of the Malays, Filipinos, and Javanese from the Sixteenth to the Twentieth Century and its Functions in the Ideology of Colonial Capitalism*, London: Frank Cass.
- Batatu, Hana. 1978. *The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq*, Princeton: Princeton University Press.
- Bronson, B. 1978. "Exchange at the Upstream and Downstream Ends: Notes Toward a Functional Model of the Coastal State in Southeast Asia," dalam K.L. Hutterer, peny., *Economic Exchange and Social Interaction in Southeast Asia: Perspectives from Prehistory, History and Ethnography*, Ann Arbor: University of Michigan Center for South and Southeast Asian Studies.
- Burns, P.L. 1982. "Capitalism and the Malay States" in Hamza Alavi et al, *Capitalism and colonial production*, London: Croom Helm, pp. 159-178.

- Hall, K.R. 1985. *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia*, Honolulu: University of Hawaii Press.
- Marx, Karl. 1965. *Precapitalist Economic Formations*, New York: International Publishers.
- Marx, Karl. 1978. *The German Ideology*, New York: International Publishers.
- Rizal, José. 1963 "The Indolence of the Filipino", *Political and Historical Writings*, Manila: National Historical Institute.
- Said, Edward. 1990. "Third World Intellectuals and Metropolitan Culture," *Raritan* 9, 3: 27-50.
- Said, Edward. 1993. *Culture and Imperialism*, London: Chatto & Windus.
- Sinha, Vineeta. 1998. "Socio-Cultural Theory and Colonial Encounters: The Discourse on Indigenizing Anthropology in India". naskah, Jabatan Sosiologi, Universiti Kebangsaan Singapura.



Bab 2

INDEGENOUSASI TEORI PEMBANGUNAN SEBAGAI WACANA ALTERNATIF DARI TEORI PEMBANGUNAN BARAT

Yuswardi¹
Akademik FIS UNY

A. Abstrak

Makalah ini menguraikan tentang tentang kajian kritis terhadap teori pembangunan Barat dan tawaran alternatif wacana Indegenousasi teori pembangunan sebagai alternatif. Dalam tulisan ini diuraikan bahwa produksi dan penyebaran teori pembangunan dari Barat tidak terlepas dari kepentingan kekuasaan dari negara-negara Barat. Kondisi ini telah mengakibatkan tersingkirnya pengetahuan lokal yang mengakibatkan pembangunan yang berlangsung tidak tidak berakar pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, tulisan ini menawarkan teori pembangunan harus dibangun berdasarkan pada kepentingan sudut pandang native. Dalam mencapai tujuan tersebut maka perlu didorong munculnya intelektual organik sebagai aktor yang dapat memfasilitasi munculnya teori pembangunan alternatif yang bebrbasis pada sudut pandang native.

¹ Staff Pengajar Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negara Yogyakarta (IAN-UNY) aktif di FISTRANS INSTITUTE FIS UNY.

B. Pendahuluan

Pembangunan adalah upaya untuk membuat kehidupan yang lebih baik untuk setiap orang (*better life for everyone*) (Peet and Hartwick, 2009). Hal ini berarti pembangunan merupakan sebuah upaya yang dapat membawa masyarakat mengikuti sebuah proses untuk mencapai kehidupan yang sebelumnya dianggap tidak baik, atupun kurang baik, menjadi sebuah kondisi yang lebih baik. Meskipun demikian, kondisi masyarakat yang lebih baik adalah sebuah kondisi yang tidak dapat ditunggalakan. Kondisi ini mempunyai banyak ukuran dan kriteria yang berbeda. Akibatnya, ukuran kondisi yang lebih baik bagi seseorang belum tentu baik menurut orang lain, bahkan dapat saja menjadi kondisi yang lebih buruk.

Meskipun demikian, asumsi dan kriteria sebuah kondisi yang lebih baik telah menjadi acuan dari pengembangan sebuah teori pembangunan. Karena terdapat perbedaan kriteria dalam merumuskan kehidupan yang lebih baik, maka teori pembangunan adalah sebuah teori yang tidak dapat dikatakan sebagai teori yang netral dan bebas nilai dan kepentingan kekuasaan. Sebab ketika mengembangkan standar dan ukuran pembangunan, setiap orang yang mengembangkan teori pembangunan tidak dapat dilepaskan dari nilai dan kepentingan yang dimilikinya.

Tulisan ini akan mencoba memabahas tentang kepentingan, nilai, dan proses teori-teori pembangunan yang disebarakan oleh negara Barat, dan dampak dari penyebaran teori-teori ini terhadap masyarakat Dunia Ketiga yang menggunakan teori-teori tersebut. Selanjutnya tulisan ini akan menguraikan pentingnya indegenousasi teori pembangunan sebagai upaya membangun masyarakat Dunia Ketiga dari sudut pandang nilai, kriteria dan kepentingan masyarakat Dunia Ketiga sendiri. Sebelum membahas hal tersebut, terlebih dahulu tulisan ini akan menguraikan sudut pandang teori untuk memahami relasi antar teori pembangunan dan kepentingan kekuasaan yang mempengaruhi pengembangan teori pembangunan.

C. Hubungan antara Ilmu Pengetahuan dan Kekuasaan

Ide untuk memahami relasi ilmu pengetahuan dengan kekuasaan secara kritis tidak dapat dilepaskan dari pendekatan pos-strukturalis. Berbeda dengan pendekatan yang berkembang pada abad pencerahan yang didominasi oleh cara berfikir yang positivistik yang memandang

realitas sosial secara dualisme, yaitu memisahkan antara subjek dan objek, pendekatan poststruktural tidak yang memandang realitas dunia secara terpisah. Pendekatan ini memandang kedua hal tersebut sebagai dualitas, yaitu subjek dan objek adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan².

Dengan demikian dalam sudut pandang pendekatan ini, klaim objektif dalam ilmu pengetahuan sebagaimana klaim positivis ditolak, karena objek tidak dapat dipisahkan dari subjeknya. Oleh karena itu, klaim objektif dalam ilmu pengetahuan juga tidak dapat dilepaskan dari nilai dan kepentingan. Menurut Michel Foucault, salah satu tokoh berpengaruh dalam pendekatan poststruktural, pengetahuan tidak berada di luar kekuasaan. Baginya, kekuasaanlah yang menentukan pengetahuan dalam arti yang bekerja menetapkan mekanisme dan patokan yang memungkinkan untuk membedakan proposisi benar atau salah; menetapkan teknik dan prosedur dalam mencapai kebenaran di atas; menetapkan status bagi mereka yang ditugasi untuk mengatakan hal-hal yang dianggap benar.

Dalam sudut pandang poststruktural, saat ini peradaban telah didominasi oleh pengetahuan modern telah menciptakan kebenaran tunggal. Penyebaran pengetahuan ini dilakukan melalui produksi pengetahuan ilmiah yang disebarakan melalui institusi-institusi seperti universitas, angkatan bersenjata, dan media. Penciptaannya ini tidak dapat dilepaskan dari hasrat kekuasaan untuk melakukan kontrol. Selanjutnya ia menyampaikan bahwa politik ekonomi kebenaran diproduksi kekuasaan melalui pengetahuan:

Kebenaran berpusat pada bentuk diskursus ilmiah dan instiusi yang memproduksinya. Ia adalah subjek bagi rangkaian konstan ekonomi dan politik (kebutuhan akan kebenaran sama banyaknya dengan produksi ekonomi atau kekuasaan politik); ia adalah objek difusi besar-besaran dan konsumsi besar-besaran (yang beredar melalui perangkat pendidikan dan informasi yang meluas secara relatif dalam lembaga sosial, tanpa ada batas yang tegas); ia diproduksi dan ditransmisikan di bawah aparatur sentral dan dominan-kalau tidak eksklusif-dari segelintir aparatur besar dan ekonomi (universitas, angkatan bersenjata, tulisan media); dan terakhir ia adalah masalah dari keseluruhan debat politik dan konfrontasi sosial (Perjuangan ideologis)³

² Kazuo Shimogaki, *Kiri Islam; antara modernisme dan postmodernisme, telaah kritis atas pemikiran Hasan Hanafi*, LKS, 1994.]

³ M Foucault, *Power/Knowledge*, ed. Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980) hal 133, dalam Kazuo Shimogaki, *Kiri Islam; antara modernisme dan postmodernisme, telaah kritis atas pemikiran Hasan Hanafi*, LKS, 1994.

Dengan demikian, kaum postruktural telah merelatifkan semua yang selama ini dianggap sebagai kebenaran mutlak. Menurutnya kebenaran itu adalah produk dari pengetahuan modern, yang ditampilkan dalam bentuk pengetahuan ilmiah. Dengan pengetahuan ilmiah yang demikian, maka pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat yang dianggap tidak modern dapat ditundukkan, dengan demikian kekuasaan yang mereproduksi pengetahuan modern akan dengan mudah mengontrol pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat lokal.

D. Kepentingan dan Kekuasaan dibalik Penyebaran Teori Pembangunan Barat

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa perkembangan dari ilmu sosial tidak dapat dilepaskan dari kepentingan kekuasaan. Demikian juga dengan teori-teori pembangunan juga tidak dapat dilepaskan dari kepentingan kekuasaan dari institusi-institusi yang memproduksi dan menyebarkan pengetahuan tersebut, seperti perguruan tinggi, negara, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pada saat ini, teori pembangunan yang dipraktekkan sebagian besar negara Dunia Ketiga termasuk Indonesia adalah teori pembangunan yang direproduksi dari teori-teori dari negara Barat. Penyerapan teori-teori telah berlangsung lama, yakni sejak masa kolonialisme yang dibawa dan disebarkan oleh negara kolonial yang diperuntukkan untuk menundukkan masyarakat lokal melalui penyingkiran pengetahuan mereka dengan tujuan memperlancar proses eksploitasi terhadap sumber daya negara-negara mereka.

Selanjutnya negara-negara Barat terus melakukan upaya ini pada masa pascakolonial. Upaya untuk mengendalikan pembangunan demi kepentingan politik dan ekonomi negara-negara Barat terhadap negara-negara dunia non-Barat, tersusun secara sistematis dimulai sejak berlangsungnya Perang Dingin antara negara Blok Barat dan negara-negara Blok Timur. Pada masa itu, negara-negara Barat menyebarkan ide-ide modernisasi di negara-negara Dunia Ketiga yang disebarkan melalui bungkus wacana pembangunan (*Developmentalism*). Proses penyebaran wacana developmentalisme digambarkan oleh Escobar (1990) dilakukan melalui :

1. Pengombinasian problem secara progresif sebagai *ketidaknormalan* untuk diperlakukan dengan intervensi spesifik. Hal ini menghasilkan “bidang intervensi kekuasaan”

2. *Profesionalisasi development*, penyeleksian oleh para ahli mengenai hal-hal yg sebenarnya bisa menjadi masalah politik ke dalam terminologi "scientific" netral, bertujuan menjadi rezim kebenaran dan norma, atau "bidang kontrol pengetahuan"
3. *Institusionalisasi development*, formasi jaringan situs kekuasaan/ pengetahuan yang mengikat orang untuk berperilaku dan rasionalisasi tertentu.

Menurut Arturo Escobar dan Mansour Faqih, wacana developmentalisme di mulai sejak tahun 1940-an, khususnya pada tanggal 20 Januari 1949, yakni saat presiden Amerika Serikat Hary S. Truman, mengumumkan kebijaksanaan pemerintahnya. Menurut Truman, seluruh dunia seharusnya mendapatkan "*Fair democratic deal*" melalui intervensi Amerika serikat untuk mengatasi masalah kemiskinan global.⁴

Dalam rangka memperbesar pengaruh Barat dan penyebaran ideologi kapitalisme, maka proses produksi wacana developmetalisme mendapat dukungan besar-besaran dari Institusi-institusi yang berkepentingan terhadap penyebaran ide ini. Produksi ini dimulai dari para pakar ilmu sosial Amerika Serikat yang mendapat dukungan besar dari negara pada tahun 1950-an dan 1960. Para pakar yang berafiliasi pada *the center for international studies* di Massachusetts Institute of Technology (MIT) Amerika Serikat inilah memproduksi pengembangan wacana akademik mengenai pembangunan. Salah satu dari hasil penting dari studi mereka adalah gagasan *development* dan modernisasi sangat menunjukkan bagaimana produksi pengetahuan sangat didominasi oleh subjektifitas Barat.

Para ahli ini memandang pembangunan adalah sebuah evolusi perjalanan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Ide ini dapat ditemukan dalam teori pertumbuhan yang sangat terkenal yakni pada skema lima tahap pertumbuhannya W.W. Rostow. Teori ini membagi masyarakat dunia kedalam dua bagian yaitu masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Problematika yang dimunculkan adalah, masyarakat tradisional adalah sebuah kondisi tidak normal,

⁴ Escobar, arturo, *Encentering development The making and making of the third world*, Princeton University press, Princeton New Jersey 2005. Fakih, Mansour Teologi kaum tertindas, Seri Dian II Tahun I, Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat, Interfidei, 1994.

dan masyarakat modern adalah kondisi normal yang diidealkan. Oleh karena itu perlu diterapkan tahap-tahap pembangunan untuk membimbing masyarakat Dunia Ketiga yang dianggap tradisonal menjadi masyarakat yang modern. Dalam mencapai masyarakat modern Rostow menekankan pentingnya upaya memunculkan elite wira-swasta guna menjadi motor proses modernisasi.

Pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara Blok Barat lainnya telah membuat gagasan Developmentalisme menjadi gagasan masif dan mampu menjadi ide penting yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan di negara-negara Dunia Ketiga. Lembaga bantuan dana Amerika Serikat, USAID, menjadikan hal ini sebagai bagian program bantuan luar negerinya, sehingga doktrin ini dianut baik pada pemerintah Dunia Ketiga maupun LSM. Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan di Barat juga serempak menjadikan wacana ini sebagai dagangan baru. Pada masa itu hampir setiap universitas membuka kajian baru yang dikenal dengan "*developmental studies*". Melalui *developmental studies* ini, proses penyerapan kapitalisme di penjuru dunia dipercepat; yakni melalui teknokrat, intelektual LSM, pemimpin Dunia Ketiga dimana mereka menjadi sasaran utama program tersebut.

Selain didukung oleh negara dan perguruan tinggi, proses penyebaran developmentalisme juga didukung oleh lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia (*World Bank*) dan *International Monetary Fund* (IMF). Melalui program yang mereka sebut dengan "*development aid*", mereka mengikat negara berkembang pada ekonomi negara kaya. Hutang luar negeri (*loans*) disebut sebagai sebuah bantuan (*Aid*) dijadikan oleh pemberi bantuan dalam rangka memperlancar ekspor serta memperkuat kepentingan ekonomi-politik mereka sendiri yang mereka investasikan ke Dunia Ketiga⁵.

Setelah berakhirnya perang dingin negara-negara Barat telah merubah skema dan doktrinnya dari developmentalisme menjadi neoliberalisme. Meskipun terjadi perubahan dalam mekansimenya, teori pembangunan yang dipakai tetap dibangun dari perspektif Barat dan dalam rangka melanggengkan kepentingan ekonomi dan politik mereka, yang terjadi hanyalah perubahan mekanisme dari dipimpin oleh negara menjadi dipimpin dan dikendalikan oleh pasar. Dalam pro-

⁵ Knuljer, 1987; p 116, dalam ibid.

ses ini jaringan yang digunakan untuk menyebarkan ide-ide developmentalisme tetap digunakan.

Dengan demikian, proses produksi dan reproduksi teori pembangunan dari Barat telah menunjukkan bahwa klaim objektif dan kebenaran dari teori pembangunan dari Barat, tidaklah dapat diterima. Pendekatan poststruktural telah membongkar kepentingan yang ada dibalik penyebaran ide-ide developmentalisme dan neoliberalisme. Teori-teori pembangunan yang diproduksi dari universitas, dibiaya oleh negara-negara Barat, kemudian disebarkan melalui *network* kelembagaan (seperti lembaga dana internasional, universitas, lembaga riset, Badan Perencana Pembangunan Nasional) oleh negara-negara Barat bukanlah teori yang bebas nilai sebagaimana klaim ilmiah yang selalu disampaikan, melainkan adalah teori-teori yang diproduksi dan disebarkan guna mengendalikan negara dan masyarakat non Barat agar dapat tunduk dan patuh, sekaligus memperlancar proses akumulasi kapital dari pemilik modal.

E. Kritik dan Dampak Reproduksi Teori Pembangunan Barat di Negara-negara Non Barat

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa pembangunan dinegara-negara non Barat didasarkan dari teori-teori pembangunan yang disebarkan oleh negara-negara Barat yang mengklaim sebagai masyarakat telah maju guna melanggengkan sistem kepentingan politik dan ekonomi mereka. Dengan berhasil melakukan hegemoni wacana terhadap masyarakat Dunia Ketiga, melaui penyebaran ide developmentalisme yang kemudian dilanjutkan dengan ide neoliberalisme, negara-negara maju berhasil melakukan penunggalan impian dan tujuan pembangunan masyarakat Dunia Ketiga, serta cara untuk mencapainya. Dengan teori-teori ini, negara-negara Barat telah menjadikan kondisi yang mereka alami sebagai tujuan ideal (masyarakat modern), sedang kondisi yang dialami oleh negara-negara non Barat adalah kondisi yang tidak ideal (masyarakat tradisional).

Meskipun negara-negara Dunia Ketiga mengimplemtenasikan teori pembangunan dari negara-negara maju, pada akhirnya aktivitas ini tidaklah membuat masyarakat Dunia Ketiga pada kondisi yang lebih baik. Setelah berpuluh-puluh tahun mengamalkan doktrin-doktrin pembangunan dari negara-negara maju, hasil yang diperoleh masya-

rakat negara Dunia Ketiga tidak seperti yang diimpikan. Bahkan, Pada masyarakat dunia telah terjadi kesenjangan ekonomi yang tinggi dengan angka kemiskinan yang tinggi, ketergantungan ekonomi terhadap negara-negara maju dengan hutang luar negeri yang tinggi, ketidakotonoman dalam politik, kerusakan lingkungan hidup dengan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam, dan yang paling mendasar lagi adalah tersingkirnya pengetahuan lokal masyarakat, padahal hal ini adalah modal sosial masyarakat dalam membangun.

Kondisi yang tidak membaik, bahkan lebih buruk ini terjadi karena, *pertama*, hegemoni teori pembangunan dari negara-negara Barat telah menyingkirkan pengetahuan lokal. Penyingkiran pengetahuan lokal sekaligus penerapan teori baru telah mengakibatkan teori-teori baru tersebut menjadi teori ahistoris, yang tidak mempunyai akar kuat di dalam masyarakat Dunia Ketiga. *Kedua*, pengetahuan Barat yang mengklaim mempunyai kebenaran universal sehingga memposisikan pengetahuan yang dimiliki oleh negara Dunia Ketiga adalah tidak benar, tidak ilmiah, dan tidak objektif. Oleh karena itu, pengetahuan ini perlu disingkirkan dan digantikan oleh pengetahuan Barat yang ilmiah. Karenanya teori pengetahuan Barat telah mematikan pengetahuan lokal yang telah tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Ketiga, kepentingan politik dan ekonomi negara-negara maju telah mengakibatkan teori pembangunan yang disebarkannya bias kepentingan ekonomi dan politik. Teori yang mengatakan pembangunan membutuhkan modal ekonomi, telah membuat negara-negara Dunia Ketiga berhutang kepada negara-negara Barat dan lembaga-lembaga keuangan internasional. Kondisi ini memperbesar ketergantungan secara ekonomi, dan mempermudah negara-negara maju melakukan kontrol terhadap negara-negara Dunia Ketiga. Demikian juga klaim tidak ilmiah terhadap proses produksi di negara-negara Dunia Ketiga, seperti penggunaan pupuk kimia di dunia pertanian, telah mengakibatkan proses produksi di negara Dunia Ketiga mengalami ketergantungan pengetahuan sekaligus ekonomi dan politik terhadap negara-negara maju.

F. Menuju Indegenousasi Teori Pembangunan

Pembangunan yang mereproduksi teori-teori dari negara Barat ternyata tidak membuat masyarakat non Barat berada pada kehidupan yang lebih baik. Penyebabnya adalah karena teori-teori tersebut ada-

lah teori yang ahistoris, menyeragamkan semua masyarakat dan bias kepentingan politik dan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk membebaskan masyarakat Dunia Ketiga dari ketergantungan pengetahuan dari negara-negara Barat, yang juga telah mengakibatkan ketergantungan dalam hal ekonomi dan politik.

Dalam rangka membebaskan pengetahuan masyarakat Dunia Ketiga terhadap pengetahuan Barat, maka penerapan teori-teori Barat tanpa mempedulikan sudut pandang masyarakat Dunia Ketiga perlu dikaji ulang. Masyarakat Dunia Ketiga perlu didorong untuk mengembangkan pengetahuan berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Syed Farid Alatas mewarkan perlunya pengembangan diskursus alternatif terhadap wacana yang dominan. Menurut Syed Farid Alatas (2010: 216), langkah yang dapat dilakukan ilmuwan sosial non Barat adalah mengoreksi pengetahuan yang "Eurosentris" menjadi berbentuk nativisme. Oleh karena itu menurutnya perlu dilakukan upaya Indegenousasi ilmu sosial, yaitu upaya untuk mengangkat sudut pandang *native* dalam pengembangan ilmu sosial⁶.

Ide indogenousasi isi perlu juga diterapkan dalam mengembangkan teori pembangunan. Dengan melakukan indogenousasi maka akan dapat muncul *pertama*, pengetahuan yang tidak ahistoris. Penyebabnya adalah mengembangkan pengetahuan yang berbasis sudut pandang masyarakat sendiri akan dapat mengembangkan teori-teori pembangunan yang mempunyai akar sejarah yang kuat di dalam masyarakat. Dengan upaya ini akan mampu mengarahkan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat non Barat. *Kedua*, Indegenousasi juga akan dapat membebaskan masyarakat Dunia Ketiga dari penunggalan kebenaran. Dengan demikian akan mengakibatkan proses pembangunan menjadi tidak seragam dan akan sesuai dengan kondisi lingkungan, politik, ekonomi dan budaya masyarakat non Barat. *Ketiga*, Pengembangan perspektif masyarakat asli dalam pembangunan juga akan membawa pembangunan yang dijalankan adalah pembangunan yang terbebas dari kontrol dan kendali kepentingan masyarakat Barat. Sebab, pembangunan yang akan dijalankan adalah pengetahuan yang berbasiskan pada kepentingan masyarakat sendiri.

⁶ Alatas, Syed Fared, Diskursus alternatif dalam Ilmu sosial Asia tanggapan terhadap Eurosentrisme, Mizan Publika, 2010.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berbasis pada pengetahuan masyarakat dan terbebaskan dari hegemoni pengetahuan Barat, maka ide intelektual organik dari Gramsci dapat digunakan. Sebab, upaya indigenisasi membutuhkan intelektual-intelektual yang tidak berada di atas menara gading. Upaya ini membutuhkan intelektual organik yaitu intelektual yang mau dan berkomitmen kuat untuk hidup dan mengembangkan pengetahuan yang ada di dalam masyarakat bersama-sama dengan masyarakat sendiri. Oleh karena itu, intelektual organik bertugas mengangkat dan melakukan transformasi sosial di dalam masyarakat dengan mengangkat dan mengembangkan pengetahuan masyarakat. Dalam melakukan tugasnya para intelektual-intelektual organik berperan guna melakukan pengembangan wacana tandingan, terhadap wacana teori pembangunan Barat yang telah menghegemoni masyarakat Dunia Ketiga sejak lama.

Daftar Pustaka

- Alatas, Syed Farid. 2010. *Diskursus Alternatif dalam Ilmu Sosial Asia; Tanggapan terhadap Eurosentrisme*. Jakarta: Mizan Publika.
- Budiman, Arief. 1997. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- Budi Hardiman, Fransisco. 1993. *Kritik Ideologi Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat Kanisius.
- Chambers, Robert. 1983. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Dryzek, John. S. 1997. *The Politics of the Earth: Enviromental Discourses*. Oxford University Press.
- Escobar, Arturo. 2005. *Encountering Developpent. The Making and Making of the Third World*. Princeton New Jersey: Princeton University Press.
- Pieterse, Jean Nederveen. 2000. *Development Theory Deconstruction/ Recontuction*. New Delhi: Vistaar Publication.
- Peet, Rhicard dan Hartwick Elaine. 2003. *Theories of Development*. The Guilford Press.
- Ritzer George. 2003. *Teori Sosial Postmodern*. Kreasi Wacana.
- Scott, James C. 2000. *Senjatanya Orang-orang Kalah: Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani*, Terj. A.Rahman Zainudin, Sayogyo, Mien Joebhaar, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Shimogaki Kazuo. 1994. *Kiri Islam; Antara Moderisme dan Postmodernisme, Telaah Kritis atas Pemikiran Hasan Hanafi*. Yogyakarta: LKiS.
- Richard Peet and Elaine Harttwick. 2009. *Theories of Development Contentations, Argumentation, Alternative*. Guiliford Press.
- Redelif, Micheil. 1987. *Suistanable Development Exploring the Contradiction*. Methuen and Co ltd.

PEMBUDAYAAN ANALISIS KONTEKSTUAL DI INDONESIA¹

Purwo Santoso
Guru Besar FISIPOL UGM

We hold that knowledge is a tool of knowing, that knowing is an aspect of our interaction with the social and physical world, and that the interplay of knowledge and knowing can generate new knowledge and new ways of knowing. We believe this generative dance between knowledge and knowing is a powerful source of organizational innovation. Harnessing this innovation calls for organizational and technological infrastructures that support the interplay of knowledge and knowing.

(Scott D. N. Cook and John Seely Brown; 1999)

Komunitas ilmu sosial belakangan ini semakin tidak nyaman, dan warganya bahkan banyak yang menolak untuk didisiplinkan dengan model analisis tertentu. Model analisis tertentu, diyakini bersifat kolonialistik dan memojokkan bangsanya sendiri. Pada saat yang sama, mereka juga meninggalkan tradisionalnya yakni sebagai pengedar, kalaulah bukan konsumen (*end users*), hasil-hasil kajian para ilmuwan negara-negara maju. Persoalannya di sini bukan semata-mata karena

¹ Disampaikan dalam Seminar Nasional, Indigeneousasi Ilmu Sosial dan Implementasinya dalam Pendidikan Ilmu Sosial di Indonesia, yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis ke-48 UNY, Auditorium UNY, 30 April 2012.

'orang lain' yang membuatnya, melainkan dibalik pengembangan ilmu yang diklaim netral tersebut sebetulnya berlangsung ketidaknetralan.² Mereka menyadari bahwa ilmu, lebih spesifik lagi teori-teori sosial, dibuat dengan standar metodologis tertentu. Di balik pemberlakuan standar tersebut, ada keuntungan dan sekaligus kerugian yang tidak terungkap. Semakin disadari bahwa, praktek keilmuan senantiasa berimpit dengan praktek kekuasaan.³

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ilmuwan sosial perlu cermat dalam memahami dan menyikapi setiap metodologi keilmuan yang berlaku. Sebagai contoh, dalam ilmu politik, konsep demokrasi senantiasa diperdebatkan. Proposisi teoritik ilmuwan tentang demokrasi berbeda posisi teoritik ilmuwan lainnya sekiranya acuan metodologis untuk menjustifikasi teori demokrasi tersebut berbeda. Suatu hal akan dapat dijelaskan secara berbeda-beda karena masing-masing versi menjelaskan hal tersebut dengan metodologi keilmuan tersendiri. Pertanyaannya kemudian, penjelasan versi mana paling benar atau tepat? Ini adalah pertanyaan metodologis. Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dipertanyakan kembali untuk apa teori (dalam hal ini teori demokrasi) dikembangkan. Kalau pengembangan teori demokrasi dimaksudkan untuk memfasilitasi rakyat berdemokrasi, maka teori yang paling tepat adalah yang paling memudahkan warga berdemokrasi. Namun kalau pengkajian demokrasi tersebut dimaksudkan untuk mengikuti standar berdemokrasi yang berlaku dalam kancah internasional, maka kita berteori untuk memuaskan komunitas internasional.

Yang jelas, pada skala global para ilmuwan sosial sudah memiliki *stock* teori tersendiri. Setiap bidang kajian sudah memiliki komunitasnya sendiri-sendiri. Dengan semakin terintegrasikannya tata keilmuan di Indonesia dengan tatanan di negara-negara maju, pada saat ini para ilmuwan sosial Indonesia hampir-hampir tidak memiliki kendala untuk mengakses *stock* teori tersebut. Kalaulah ada, yang didefinisikan "sekadar" kesulitan bahasa atau kesulitan memilih naskah yang tersedia dalam jumlahnya yang "terlalu" banyak. Pendefinisian

² Purwo Santoso, "Ilmu Sosial Transformatif", Pidato pengukuhan guru besar disampaikan dalam sidang terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 April 2011.

³ Richard D. Brown, *Knowledge Is Power, The Diffusion of Information in Early America, 1700-1865*, Oxford University Press, 1989.

bahwa masalah keilmuan yang terjadi adalah sekadar masalah akses ini tentulah naif; tidak sensitif terhadap politik pengetahuan yang (secara diam-diam) berlangsung.

Terlepas dari masih menggejalanya kenaifan tersebut di atas, sejumlah ilmuwan sosial semakin tidak nyaman dengan kecenderungan tersebut. Hal ini mereka aktualisasikan dalam berbagai versi gerakan keilmuan, mereka usung dalam jargon yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan istilah pribumisasi atau indigenisasi ilmu sosial;⁴ ada pula yang menggulirkan ilmu profetik,⁵ ilmu sosial nusantara,⁶ dekolonialisasi riset⁷ dan sebagainya.

Kesadaran tentang praktek politik yang menyusup ke domain pengembangan ilmu mencuat terlebih dahulu di dalam komunitas pengkaji antropologi. Cara antropolog mengkonstruksikan realita sosial sempat ditengarai sebagai pemaksaan masyarakat Barat untuk paksa masuk ke dalam bingkai budaya Barat yang dipahaminya. Kajian antropologi setelah itu sangat sadar dengan dan memberontakan terhadap praktek kolonialisme melalui pembingkaiian secara teoritik.⁸ Hal yang serupa juga berlangsung dalam kajian sosiologi dan kajian-kajian lain.

Meskipun berbeda-beda ekspresinya, perlawanan-perlawanan yang digalang didasari kesadaran problematikanya metodologi keilmuan yang diberlakukan. Sandra Jovchelovitch, pakar psikologi sosial lama tinggal di Brazil lalu mengajar di London School of Economics and Political Science, bisa dijadikan contoh. Sebagai pakar psikologi sosial, dia gelisah dengan asumsi yang berkembang, seolah terciptanya pengetahuan hanyalah proses penggunaan logika pada diri seseorang saja. Pengetahuan tentang realitas sosial, menurut dia tidak bisa lepas dari komunikasi dan tindakan antara sesama manusia (subjek), komunikasi dan tindakan terhadap objek tertentu, dan komunikasi dan tindakan orang lain tentang objek. Jelasnya, terciptanya pengetahuan mau tidak

⁴ Heri Santosa, *Pribumisasi ilmu sosial*, IndonesiaTera, Magelang, 2001.

⁵ Komunitas yang mengembangkan kajian ini perpusat di Universitas Gadjah Mada, meniadakan juri pemikiran Dr. Kuntowijoyo.

⁶ Terminologi ini dipakai oleh Ifada Institute, Yogyakarta

⁷ Linda Tuhiwai Smith. *Decolonizing Methodology: Research and Indigenenous People*; Zed Books, 1999.

⁸ Sebagai contoh; lihat: Veronica Strang, "A Happy Coincidence? Symbiosis and Synthesis in Anthropological and Indigenous Knowledges," *Current Anthropology*, Vol. 47, No. 6 (December 2006), pp. 981-1008. Tentang contoh-contoh kontroversi yang terkait, cermati juga <http://zeroanthropology.net/2009/10/29/0-19-questions-about-colonialism-and-anthropology-epistemology-methodology-and-politics>.

mau melibatkan proses representasi, dan proses representasi ini hanya bisa diungkap kalau kajian dilakukan secara kontekstual.⁹ Urgensi dan kaidah untuk melakukan analisis secara kontekstual ini disajikan secara komprehensif dalam *Handbook Contextual Political Analysis* yang dihimpun dan diedit oleh Robert E. Goodin and Charles Tilly.¹⁰

Refleksi metodologis ini masih relatif jarang dilakukan karena kebanyakan komunitas keilmuan di Indonesia *taking for granted* terhadap standar metodologis yang diberlakukan dan diikutinya. Mudahlah dimengerti kalau daya dobrak dari gerakan pembaruan keilmuan ini pun relatif terbatas. *Mainstream* kajian ilmu-ilmu sosial di Indonesia masih tenang-tenang saja. Lebih dari itu, perlawanan tersebut dilakukan pada level individual, melalui karya ilmiah yang dihasilkan oleh ilmuwan itu sendiri. Reproduksi metodologi keilmuan yang membekali setiap ilmuwan, kepekaan dan ketrampilan dalam menyikapi politik keilmuan tersebut di atas, belum berlangsung dengan baik. Tulisan sederhana ini dimaksudkan untuk kepentingan itu.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk menyajikan lagi urgensi melangsungkan gerakan keilmuan. Hal ini sudah dibahas di dalam berbagai kesempatan, dan tulisan ini tidak bermaksud untuk mengulang-ulang pembicaraan.¹¹ Tulisan ini dimaksudkan hanya untuk ambil bagian

⁹ Sandra Jowchelovitch, *Knowledge in Context, Representations, Community and Culture*, Routledge, London 2007.

¹⁰ Robert E. Goodin and Charles Tilly (eds.), *The Oxford Handbooks of Contextual Political Analysis*, Oxford University Press, 2006.

¹¹ Cukuplah kiranya ditambahkan di sini bahwa pengetahuan, apalagi ilmu, adalah kekuasaan. Pemberlakuan rezim keilmuan tertentu—katakanlah rezim yang positivistik—secara diam-diam mempolakan relasi kuasa tertentu. Obsesi untuk menghasilkan pengetahuan yang terverifikasi secara empiris menjadikan ilmuwan tanpa sadar bersemayam di "atas angin". Berbagai pengetahuan masyarakat yang tidak terkodefikasi dan terverifikasi, tetap saja diposisikan sebagai "dunia lain" meskipun hal itu aktual sebagai sistem sosial. Mengapa begitu? Para ilmuwan harus menjaga objektivitas, seolah-olah bukan partisipan dari sistem sosial yang bersangkutan. Obsesinya adalah menemukan grand theory, bukan mengarungi perubahan sosial sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setempat. Sebagai ilustrasi, dari text-book ilmuwan tahu bahwa birokrasi adalah organisasi modern untuk mencapai tujuan publik. Kacamata textbook ini begitu kuat membingkai pikirannya sedemikian rupa sehingga tidak lagi sanggup membayangkan bahwa para birokrat adalah orang-orang yang mencari nafkah, dan dalam perjuangan menafkahi keluarganya ini harus juga membantu keluarga yang sedang mencari kerja. Ilmuwan yang dimaksudkan dalam ilustrasi di atas merasa nyaman hidup di dunia lain, tepatnya dunia text-book import. Tidak ada keberanian untuk menterisasikan birokrasi sebagai fokus pencarian nafkah, karena untuk menghasilkan teori baru, dia harus bergantung pada teori-teori lain yang telah diajarkan kepadanya. Kepatuhannya untuk patuh pada kaidah deduksi teoritis menjadikan kesehariannya sebagai warga masyarakat hampir-hampir tidak relevan untuk mengembangkan teori; mengembangkan ilmu berbasis praktek sosial yang dijalaninya.

Praktek-praktek penjajahan ataupun penindasan tidak mudah dirasakan dan dikenali para korbannya, manakala praktek tersebut telah disamarkan dalam sistem pengetahuan yang direproduksi terus-menerus. Nuansa penjajahan ataupun penindasan luput dari kesadaran banyak orang ketika pengetahuan yang direproduksi pada gilirannya menjustifikasi (membentuk) norma, bahkan subyek yang pada gilirannya,

dengan menjangkau tataran yang agak praktikal, yang pada gilirannya menjadikan gerakan tersebut meluas pesertanya, dan semakin konkrit aktualisasinya. Karena arah yang selama ini dicanangkan berbeda-beda, maka yang disajikan di sini adalah hanya relevan untuk berbagai agenda yang disebutkan di atas (pribumisasi ilmu sosial, ilmu sosial profetik dan sebagainya). Mereka bersepakat tentang satu hal, pembudayaan analisis yang kontekstual.

Pembudayaan Pada Level Praktis

Perdebatan pada tataran filosofis, sebagaimana disebutkan di atas, sangat diperlukan, namun perdebatan pada tataran itu "hanya" akan bermuara pada adanya pengakuan terhadap sebuah karya sang filosof. Yang menjadi persoalan adalah pemberlakuan standar metodologis, yang secara diam-diam, menjebak fikiran para ilmuwan. Untuk itu, pemahaman filsafati (epistemologis) tetap diperlukan, namun harus disertai penyediaan acuan-acuan praktis dalam menganalisis. Jelasnya, yang menjadi persoalan adalah bagaimana mengubah memperkenalkan, membiasakan penerapannya, sedemikian sehingga acuan filosofis tersebut menjadi tradisi keilmuan yang normal.

Sebagai contoh, pendefinisian masalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang menulis skripsi, tesis dan disertasi selama ini dilakukan secara sepihak. Masalah tidak dirumuskan dan disepakati bersama dengan narasumber dalam penelitian yang dirancang. Mengapa skripsi, tesis dan disertasi diperlakukan sebagai karya ilmiah mandiri? Sejauh ini, kaidah ini tidak dirasa problematik karena ilmu sosial yang para pembimbing dan penguji karya mereka tidak menemukan problematik dari kesepihakan peneliti dalam penentuan masalah penelitian. Kalau saja komunitas ini disadarkan bahwa kesepihakan itulah yang menjadikan kajian-kajiannya memiliki relevansi yang sangat terbatas dalam kehidupan masyarakat, maka bisa dikembangkan terobosan baru bahwa karya ilmuwan sosial yang mendalami realitas sosial justru harus dimulai dengan pendefinisian masalah bersama

penuntut untuk dipatuhi perintah-perintahnya. Sebagai contoh paket modernisasi yang ditawarkan negara-negara Industri ataupun lembaga-lembaga pendidikan di kawasan perkotaan. Di satu sisi menjanjikan kemajuan, namun secara diam-diam menciptakan ketergantungan. Nuansa ketergantungan ini tidak terasa lagi manakala, eksponen-eksponen dari modern secara lisan mengikrarkan komitmennya untuk "membantu" dan pada saat yang sama menikmati banyak privileg dan meminta tambahan "korban". Di satu sisi ada banyak pengorbanan-pengorbanan yang dimilati akan tetap dipenuhi karena begitu meyakinkan

para pelaku dalam realita sosial tersebut. Kesepahaman tentang alasan dilakukan penelitian, arah penelitian, dan pemanfaatan hasil penelitian, justru harus dilakukan secara partisipatif. Inilah hal yang diperjuangkan para aktivis yang menawarkan metode penelitian *participatory action research*. Metode penelitian ini tidak mudah diterapkan para aktivis karena terbentur pada standar metodologis dalam penulisan dan pengujian skripsi, tesis dan disertasi. *Review* metodologis pada program- program studi yang menenuli ilmu sosial kiranya akan membuka jalan bagi pembaruan ilmu sosial, sekiranya hal itu bermuara pada pemberlakuan standar baru.

Kalaulah pemberlakuan standar metodologis baru ini difahami, hal itu tidak akan mudah. Ada sejumlah kendala yang menghadang. Di Indonesia, komunitas keilmuan lebih terbebani dengan tugas mendidik atau menyampaikan hasil kajian, daripada mengembangkan ilmu. Meskipun memiliki sesanti *tri-dharma* (pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat), perguruan tinggi sebetulnya lebih menekankan pada *dharma* pendidikan, dari pada *dharma* penelitian. Sejumlah universitas memang obral sesumbar, berjanji menjadi *world class research university*, tidak cukup bukti bahwa *dharma* penelitian menjadi *driving force* kegiatan komunitas ilmuwan di dalamnya. Dalam "himpitan" kebutuhan untuk mengajar yang tak mudah dihindari, maka proses penelitian (tepatnya proses pengembangan ilmu) tidak bisa menjadi produk andalannya. Produk andalan universitas adalah para pencari kerja bergelar sarjana, bukan teori baru yang menjadi acuan untuk mencerdaskan eskponen bangsa yang lain. Dalam *setting* seperti ini, maka teori-teori sosial yang diperbincangkan dan menjadi rujukan dalam *policy-making* pada umumnya adalah teori-teori yang dibuat para sarjana asing atau hasil kajian para ilmuwan dengan mengacu pada kondisi empiris negara lain.

Point penting yang hendak disampaikan adalah bahwa, di satu sisi ilmuwan Indonesia tidak menjadi penghasil teori-teori yang diajarkan kepada mahasiswa, di sisi lain, pengajaran teori-teori sosial itupun tidak cukup jauh dikaitkan dengan konteks Indonesia. Kita tahu bahwa secara filsafati, kekuatan mereka dalam menekuni dunia keilmuan terletak pada kepawaiannya dalam mengaitkan ontologi bidang kajiannya, dengan rujukan epistemologi yang tepat untuk mewujudkan misi aksiologis tertentu. Dalam keterbatasan yang dialaminya yang

ditekuninya kajian ontologis yang “sudah jadi”, tinggal diajarkan kepada mahasiswa. Inilah titik rentannya. Kealpaannya menekuni aspek epistemologis dari kajiannya menjadikan kajian ilmu sosial di Indonesia sebagai kolonialisme melalui reproduksi kajian-kajian keilmuan sebagaimana disinyalir para ilmuwan kritis, hampir-hampir tidak terdeteksi. Sebagai contoh, ketika mengajarkan *good governance* tidak banyak sempat menyadari bahwa penjabaran konsep tersebut adalah penjabaran dari gagasan pemerintahan liberal, ketika mengukur kadar demokrasi konteks unik Indonesia tidak terartikulasi. Muaranya cukup tragis: Indonesia adalah lokasi untuk memberlakukan berbagai preskripsi teoritik yang dibuat para ilmuwan asing. Kealpaan dalam meng-kontekstualisasi-norma-norma politik yang hegemonik, katakanlah demokrasi, menjadikan tidak banyak terlihat adanya *guilty feeling* dalam diri komunitas ilmuwan yang bersangkutan manakala norma-norma tersebut “dipesetkan” oleh masyarakat yang ternyata memiliki cara pandang yang berbeda cara pandang para ilmuwan.

Ada sejumlah usul yang perlu dipertimbangkan, dan jika cocok dimatangkan sebagai upaya pembudayaan analisis yang kontekstual.

1. Ada kebijakan politik keilmuan yang dirumuskan oleh pemerintah. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kementerian Riset dan Teknologi, adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk itu.
2. Penguatan lembaga dan pengajaran metodologi keilmuan dan turunannya pada pembelajaran metode penelitian. Para (calon) ilmuwan harus diperkenalkan terhadap semua spektrum metodologi yang tersedia, dan diminta untuk memilih dan menerapkan metodologi tertentu dengan kesadaran akan keunggulan dan kelemahan metodologi yang bersangkutan. Mereka perlu faham acuan filosofis dari setiap paket metode penelitian yang dipakai. Untuk itu, universitas perlu melakukan konsolidasi kelembagaan agar kematangan metodologis para (calon) ilmunya terjamin. Lebih dari itu, metodologi haruslah diajarkan sebagai ketrampilan. Tekanan pembelajaran metodologi adalah penghayatan dan penerapan metodologis, bukan kemampuan menghafal.
3. Menjembatani atau mempersempit praktek berbasis kearifan lokal dengan kegiatan keilmuan di kampus. Harus diakui bahwa apa yang disebut-sebut sebagai kearifan lokal adalah hal yang tidak berhasil diteoritisasikan menurut standar yang diberlakukan selama ini.

PENDEKATAN BARU MEMAHAMI INSTITUSI DI INDONESIA¹

Dwi Harsono²
Akademisi FIS UNY

A. Pendahuluan

Masih terbayang dalam ingatan kita ketika Indonesia pada tahun 1998 dihantam krisis multidimensial yang tidak berkesudahan karena ketidaksiapan infrastruktur ekonomi menghadapi kepanikan pasar uang di Asia Timur. Krisis yang pada awalnya terjadi di Korea Selatan dan Taiwan menjalar hingga mencapai Thailand dan Indonesia. *Capital flight* besar-besaran yang terjadi dalam waktu singkat mendepresiasi nilai tukar mata uang lokal secara tajam. Di Indonesia, nilai tukar rupiah melemah hingga hampir 800 persen, dari 2000 menjadi 18000 rupiah per satu dollar Amerika. Kondisi ini meruntuhkan bangunan ekonomi yang selama 32 tahun diarsiteki oleh Orde Baru.

¹ Disampaikan dalam Diskusi Bulanan tanggal 28 Februari 2012 dengan tema "*State of the Art of Social Science*" di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

² Staf Pengantar di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

Berbeda dengan kondisi yang terjadi di Indonesia yang tidak kunjung pulih, negara-negara di Asia timur justru bisa segera memulihkan ekonomi domestik. Krisis yang menghantam Indonesia pada awalnya terjadi hanya di sektor ekonomi, justru semakin meluas dan merambat ke wilayah sosial dan politik. Krisis ekonomi mengakibatkan lemahnya nilai tukar rupiah sehingga banyak perusahaan harus gulung tikar karena semakin tingginya ongkos produksi untuk bahan baku berbasis impor. Terjadinya pemutusan hubungan kerja besar-besaran semakin menurunkan daya beli masyarakat dan pada kesempatan yang sama harga beragam kebutuhan pokok merangkak naik. Hal ini menimbulkan masalah sosial lain berupa membengkaknya angka pengangguran. Dampaknya adalah munculnya krisis politik berupa hilangnya kepercayaan publik terhadap rezim Orde Baru yang lengser dan digantikan oleh Orde Reformasi di tengah semakin terpuruknya masyarakat dalam ketidakpastian.

Orde Reformasi memberikan secercah harapan dalam diri masyarakat bagi terciptanya kehidupan politik, sosial dan ekonomi yang lebih baik dibanding dengan rezim sebelumnya. Namun demikian, sejarah menunjukkan bahwa Indonesia tidak segera pulih, bahkan, tampak terseok-seok untuk segera *mentas* dari krisis yang terjadi. Padahal Indonesia telah memasuki tahap kemerdekaan politik lebih besar dibandingkan dibawah rezim Orde Baru tapi hal ini tidak mempercepat proses pemulihan dari krisis.

Rika (2010), menjelaskan bahwa meskipun terjadi perubahan didalam bidang politik berupa kehidupan demokratis yang lebih baik, hal ini tidak membawa perubahan pada aktor-aktor yang berperan dalam bidang politik dan ekonomi. Ikatan kelompok politik-bisnis menciptakan struktur hegemonik yang masih mendudukkan pemain lama untuk memegang tokoh kunci di pemerintahan dan dunia bisnis. Akibatnya, kebijakan reformis pemerintahan, seringkali dituduh sebagai antek-antek neolib, seringkali dibajak oleh kebijakan yang diusung oleh kelompok ini –warisan kebijakan *developmental state* yang dijalankan Orde Baru. Secara politik Indonesia telah memasuki sebuah zaman baru yang lebih demokratis tapi hal ini tidak secara otomatis menjamin reformasi berjalan dengan mulus.

Tarik-menarik beragam kepentingan yang mewarnai perjalanan Indonesia untuk pulih dari krisis hingga kini sangat menarik. Tulisan di

media massa seringkali menganggap reformasi jalan ditempat karena secara politik tidak ada perkembangan pesat dalam demokratisasi, khususnya dalam perilaku politik elit dan penegakan hukum. Di sisi lain, secara ekonomi ternyata Indonesia mulai pulih dari krisis, bahkan, bisa bertahan dari hantaman krisis kredit perumahan (*subprime mortgage*) di Amerika Serikat di tahun 2008 dan krisis hutang yang tengah melilit Eropa dari tahun 2010. Dua fenomena yang sangat berbeda ini tidak berdiri sendiri tapi berkaitan satu dengan yang lain jika dianalisis dengan menggunakan pendekatan institusi.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi yang terjadi di Indonesia menggunakan pendekatan institusi sekaligus menganalisis pengaruh institusi terhadap perilaku individu di masyarakat. Pada bagian awal, tulisan ini menjelaskan pendekatan institusi yang baru muncul untuk mengisi kekurangan yang dimiliki oleh pendekatan perilaku dan pendekatan rasional dalam menjelaskan tindakan individu. Selanjutnya, pemaparan menunjukkan peranan institusi dalam mempengaruhi perilaku individu, Pada bagian akhir, tulisan ini akan menganalisis kondisi politik yang terjadi di Indonesia dan menjelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi.

B. Pemahaman Baru tentang Institusi (*New Institutionalism*)

Pendekatan baru tentang institusi muncul sebagai respons atas pendekatan perilaku dan rasional yang menganggap perilaku individu adalah otonom dan tidak dipengaruhi oleh faktor dari luar (Peters, 2004). Alasan sosio-psikologis dalam pendekatan perilaku dan pilihan rasional dalam pendekatan rasional diasumsikan menjadi penggerak individu untuk melakukan sebuah tindakan. Pemahaman ini mulai bergeser di tahun 1980-an karena banyak fakta menunjukkan bahwa alasan tindakan politik individu justru muncul karena perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor luar (eksogen) yang ada di masyarakatnya –contohnya perilaku politik para pemilih. Individu justru dipengaruhi oleh institusi formal maupun informal yang tanpa sadar memberikan preferensi dalam melakukan suatu tindakan.

Kondisi di atas mendorong digunakannya pendekatan institusionalis baru (*new institutionalism*) yang memperkaya metode yang telah dikembangkan oleh pendekatan perilaku dan pendekatan rasional. Dalam hal ini institusi didefinisikan secara spesifik sebagai atur-

an main dalam masyarakat atau alat yang membatasi manusia dalam berinteraksi (North, 1990:1). Sedangkan secara umum Hall dan Taylor (1996: 6), merumuskan institusi sebagai prosedur-prosedur, rutinitas, norma-norma, dan beragam konvensi yang telah mengakar dalam struktur keorganisasian proses pemerintahan dan politik ekonomi. Senada dengan yang diungkapkan oleh Peters (2004:18), yang mengemukakan institusi sebagai atribut utama yang bersifat struktural sebagai penanda suatu masyarakat atau kebijakan. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, institusi tidak hanya sebatas pada kelembagaan organisasi yang bersifat struktural saja tapi memiliki makna lebih mendalam yang menyentuh aspek aturan main maupun peraturan yang dimiliki oleh suatu lembaga sehingga bisa langgeng dan bertahan dalam waktu yang lama dan juga kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut dalam upaya mempengaruhi masyarakatnya. Lebih jauh lagi, Hall dan Taylor (1996), menegaskan bahwa titik sentral dari analisis institusi adalah menjawab pertanyaan: Bagaimanakah institusi mempengaruhi perilaku dari individu? Pada akhirnya melalui tindakan-tindakan individu, institusi dapat melihat manfaat politis dari aturan main maupun peraturan yang dimiliki dan dijalankan oleh masyarakatnya.

Seerti pendekatan sebelumnya, institusionalisme baru pun memiliki variasi yang beragam. Hal ini menyesuaikan dengan fokus utama dari setiap variasi pendekatan baru ini yang meliputi: *normative institutionalism*, *sociological institutionalism*, *rational choice institutionalism*, *historical institutionalism*, *empirical institutionalism*, *constructivist institutionalism*, dan *interest based institutionalism* (North 1990; Hall dan Taylor 1996; Peters 2004). Berkaitan dengan tema yang menjadi dasar tulisan, penulis memfokuskan pendekatan institusi sejarah (*historical institutionalism*) untuk memahami institusi di Indonesia.

Historical institutionalism dalam melakukan analisis berawal dari pemahaman yang menjelaskan bahwa pilihan terhadap sebuah kebijakan yang dibuat akan berpengaruh terhadap kebijakan selanjutnya dan pola tersebut akan berulang dan bertahan (Peters, 2004: 19-20). Pendekatan ini menekankan pada 4 aspek penting yang membedakan dengan pendekatan lainnya, yakni: a) pendekatan ini berupaya untuk mengkonseptualisasi hubungan antara institusi dengan perilaku indi-

vidu secara luas, b) pendekatan ini menekankan pada hubungan kekuasaan asimetris dengan operasi dan pengembangan institusi, c) pendekatan ini berupaya memiliki pandangan pengembangan institusi yang menekankan pada pola ketergantungan (*path dependence*) dan hasil yang tidak terencana (*unintended consequences*), dan d) pendekatan ini secara khusus memperhatikan perpaduan analisis institutional dengan sumbangan faktor-faktor lain yang bisa memberikan manfaat secara politik (Hall dan Taylor, 1996: 7). Aspek-aspek ini membuat pendekatan ini menjadi lebih lengkap dalam melakukan analisis terhadap institusi dibandingkan dengan pendekatan lain.

Di samping itu, *historical institutionalism* juga menggunakan dua pendekatan utama sebagai pisau analisa untuk memahami perilaku individu, yaitu pendekatan kalkulus (*calculus approach*) dan pendekatan kultural (*cultural approach*). Pendekatan kalkulus menekankan analisis pada pertimbangan kalkulatif yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh keuntungan maksimal dari perilakunya. Sebaliknya, pendekatan kultural lebih menekankan pada penggunaan pola-pola perilaku yang telah menetap lama dalam masyarakatnya sebagai kebiasaan. Dalam hal ini, individu akan terpuaskan dengan menjalankan tradisi yang sudah biasa dilakukan. Kondisi ini berbeda dengan pendekatan kalkulus yang menempatkan individu sebagai *utility maximiser* (Hall dan Taylor 1996).

Analisis atas perilaku tidak hanya dilakukan pada level individu tapi bisa juga dilakukan terhadap organisasi maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Ruang lingkup analisis bukan hanya konteks (*context*) tapi juga tindakan (*conduct*) yang dilakukan sehingga ketika individu tersebut adalah aktor pembuat keputusan pada tingkat elit negara maka analisis bergeser ke level negara. Konsekuensinya, struktur negara menjadi alat yang dapat digunakan oleh individu untuk mempengaruhi perilaku masyarakat melalui penggunaan institusi (*rules and regulations*).

C. Institutional Building di Indonesia

Sejak tahun 1945 Indonesia telah merdeka dan Republik ini telah memasuki umur 67 tahun. Namun demikian, masih ada pertanyaan tentang *capacity building* dari bangsa ini dalam membangun karena pembangunan yang berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alih-alih

memberikan solusi, permasalahan justru bergeser pada anggapan ketidaksiapan institusi negara untuk menjadi motor pembangunan. Hal ini diikuti dengan datangnya tawaran dari badan-badan internasional seperti Bank Dunia (WB) dan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memperkecil peran negara dalam pembangunan dan diserahkan pada pasar yang diasumsikan sebagai institusi yang lebih siap melalui agenda *good governance*. Ketika tawaran ini diterima, yang terjadi adalah semakin terpinggirkannya aspek-aspek sosial dalam kebijakan yang dibuat negara. Peran sosial negara untuk menjalankan fungsi redistributif semakin dikurangi dan diambil alih oleh pasar. Padahal negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan redistribusi hasil-hasil pembangunan kepada rakyatnya. Meskipun kondisi ini tidak sepenuhnya terjadi tapi hal ini sempat menjadi wacana kuat dalam beberapa kurun waktu terakhir di Indonesia.

Berdasarkan tulisan Rika (2010), pertarungan antara kelompok nasionalis dengan jargon negara pembangunan (*developmental state*) dengan kelompok neolib yang mengusung neoliberalisme di Indonesia terjadi justru di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meskipun pada zaman Orde Baru pendekatan pasar juga mulai dikenalkan tapi diakhir kepemimpinan rezim tersebut, justru yang muncul adalah pendekatan negara pembangunan yang ditopang oleh aktor-aktor pemerintahan yang berhubungan dekat dengan kelompok pebisnis kuat di Indonesia. Fakta ini semakin menarik ketika mengetahui bahwa aktor-aktor politik dan kelompok bisnis ini ternyata masih kuat bercokol pada masa reformasi.

Struktur ekonomi-politik zaman Orde Baru masih bercokol kuat di masa Reformasi. Hal ini bisa dipahami karena Orde Baru sangat lama berkuasa sehingga struktur yang dimiliki telah berhasil mengakar dengan kuat di Indonesia. Struktur tersebut juga dibangun dengan institusi yang kuat selama 32 tahun. Meskipun akhirnya runtuh, tapi yang runtuh adalah simbol-simbol kekuasaannya saja sedangkan struktur yang ditancapkan masih kuat.

Kuatnya institusi mempengaruhi perilaku masyarakat juga bisa dilihat dari relasi antara struktur dan agen dalam perilaku sosial. Giddens (1992) mengemukakan relasi antara struktur dan agen dalam bentuk perilaku yang saling membatasi. Dimana struktur yang berusaha untuk mempengaruhi perilaku agen, belum tentu berhasil karena

agen memiliki pilihan rasional untuk bertindak sesuai dengan keinginan individunya. Agen bersedia mengikuti struktur yang ada apabila struktur tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi dirinya.

Archer (1996) dengan pendekatan *morphogenetic*-nya menolak proposisi Giddens dan mengemukakan pemikirannya yang menjelaskan bahwa struktur dan agen adalah saling bergantung satu sama lain (interdependen). Struktur akan mempengaruhi perilaku agen tanpa disadari karena agen melakukan adaptasi dengan struktur di sekitarnya. Kondisi lingkungan dan masyarakat dari agen akan membentuk perilaku. Meskipun agen memiliki pilihan rasional, interaksi dengan lingkungan justru menjadikan agen melakukan adaptasi atas lingkungannya. Kondisi ini akan terjadi terus-menerus selama agen bersentuhan dengan struktur di sekitarnya dan perubahan-perubahan yang terjadi sesungguhnya adalah modifikasi struktural terhadap perilaku agen. Pendekatan *morphogenetic* ini menjelaskan perilaku masyarakat dan aktor politik di masa Orde Baru dan hal ini masih tampak meskipun sudah memasuki era Reformasi. Hal ini dikuatkan dengan polling yang menunjukkan bahwa masyarakat menganggap bahwa kondisi masyarakat di masa Orde Baru lebih baik di masa Orde Reformasi. Preferensi masyarakat masih menggunakan Orde Baru sebagai pembanding era Reformasi sehingga menganggap Orde Baru lebih baik.

Terlebih lagi, dengan *historical institutionalism* tampak bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat di era Reformasi tidak berbeda jauh dengan Orde Baru meskipun secara politik lebih terbuka dan demokratis. Pola-pola kebijakan pembangunan memiliki kemiripan dengan Orde Baru karena aktor di pemerintahan dan parlemen tidak berubah sehingga yang terjadi adalah reproduksi kebijakan Orde Baru tapi terjadi di era Reformasi. Di samping itu perilaku elit politik yang sangat tampak cenderung untuk memaksimalkan keuntungan dari posisi politiknya sama persis dengan cara-cara yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Perilaku aji mumpung dan tindak KKN masih mencerminkan perilaku yang sangat kental di zaman Orde Baru. Birokrasi dan parlemen menjadi ajang pertarungan partai politik untuk memperoleh pengaruh dan sumber daya. Fakta lain yang menarik adalah masih digunakannya jargon tradisi, kekerabatan dan primordial untuk meraih pengaruh masyarakat. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan pendekatan tradisi kultural, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) de-

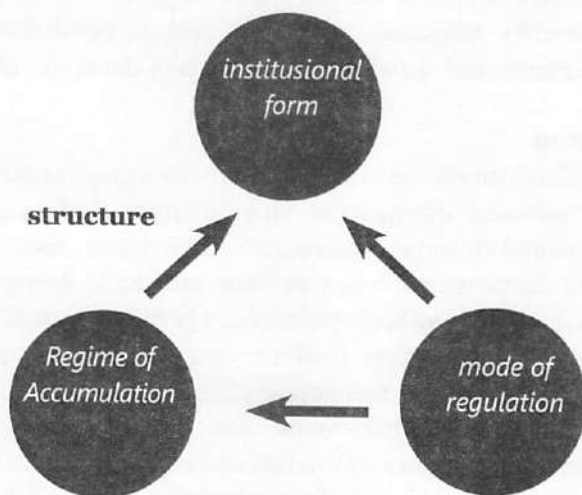
ngan Sukarnoisme-nya dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan primordial religius menunjukkan pola-pola lama masih muncul. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kultural masih kuat dilakukan oleh elit politik. Dengan demikian *path dependence* sebagai premis yang dikemukakan oleh *historical institutionalism* masih terjadi di Indonesia.

Meskipun demikian, ternyata sejak tahun 1999 Indonesia telah mencetak beragam prestasi. Dari sisi demokratisasi, dunia mengakui Indonesia sebagai negara yang menyelenggarakan pemilihan umum langsung dengan partisipan terbesar di dunia. Krisis kredit perumahan tahun 2008 yang menghantam Amerika Serikat sehingga membawa efek karambol bagi perekonomian dunia ternyata tidak berpengaruh banyak bagi Indonesia. Bahkan Indonesia menjadi negara ketiga di dunia yang berhasil memiliki pertumbuhan positif 4,5% di bawah China dan India. Di awal tahun 2012, Indonesia menjadi negara yang layak untuk investasi oleh lembaga rating internasional dan pendapatan perkapita penduduk telah melewati angka US\$ 3000. Prestasi-prestasi ini diraih justru ketika secara politik, ekonomi dan sosial masih meraba format Indonesia di masa mendatang. Lambat tapi pasti Indonesia mulai menata institusinya menjadi lebih baik.

D. Menjaga Institusi Kenegaraan

Dalam pemaparan di atas, ditunjukkan bahwa secara institusional struktur Orde Baru masih kuat bercokol di Indonesia meskipun demokratisasi sudah berjalan dan negara mulai dapat bangkit secara ekonomi. Namun secara politik dan sosial Indonesia masih membutuhkan banyak pembenahan. Perilaku elit partai tidak mencerminkan sebagai semakin meningkatkan kualitas budaya politik di Indonesia. Di sisi lain, kesenjangan ekonomi semakin meningkat karena pendapatan perkapita yang meningkat didongkrak oleh besarnya jumlah orang kaya di Indonesia tapi penduduk miskin juga semakin banyak. Meningkatnya jumlah penduduk miskin juga berpotensi meningkatkan permasalahan sosial terkait dengan angka pengangguran, kriminalitas, *trafficking* dan lain-lain. Kuatnya struktur yang dibangun Orde Baru tidak mudah untuk diubah. Orde Reformasi terbukti belum bisa memberikan alternatif struktur yang lebih baik. Alih-alih mengubah yang terjadi justru reproduksi dan pengulangan pola-pola yang dilakukan oleh Orde Baru.

Mengubah struktur bukanlah pekerjaan mudah. Struktur cenderung untuk bertahan lama dan sulit untuk terjadi perubahan. Bahkan Orde Reformasi tahun 1998 yang diharapkan bisa melakukan perubahan struktural ternyata belum berhasil melakukannya. Namun hal tersebut bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Pemikiran Sekolah Regulasi Prancis (Boyer 2004; Aglietta 2004; Lipietz 1983) menganalisis elemen-elemen dalam sebuah struktur yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan. Pemikiran ini mengemukakan bahwa suatu struktur material yang ada ada dalam masyarakat terdiri dari tiga komponen: rezim akumulasi, model regulasi dan bentuk institusi.



Gambar 1.
Elemen dalam Struktur

Rezim akumulasi adalah ide-ide dasar yang menjadi pokok-pokok pikiran dibangunnya struktur yang akan digunakan melanggengkan kepemimpinan kelompok yang berkuasa. Sedangkan model regulasi alat yang digunakan untuk memperoleh kapital bagi elit yang berkuasa dalam struktur sehingga elit dapat memperoleh sumber daya untuk melanggengkan struktur tersebut. Akhirnya bentuk institusi adalah bagian yang tampak dari struktur yang berupa aturan main dan peraturan yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku agen dalam struktur yang dibangun. Ketiganya berinteraksi secara intens untuk

selalu mereproduksi institusi yang menguntungkan struktur rezim.

Berdasarkan pemahaman ini adalah sangat sulit untuk mengubah struktur hanya dari institusinya karena institusi adalah sisi yang tampak dari sebuah struktur. Yang terkuat justru adalah dua elemen lain yang justru menjadi titik kunci untuk melakukan perubahan struktur. Artinya selama aktor pemerintahan dan kelompok bisnis masa Orde Baru masih bercokol, kecil kemungkinannya terjadi perubahan dalam institusi kenegaraan yang dimiliki oleh Indonesia. Namun demikian, meskipun perubahan institusi kenegaraan masih jauh panggang dari api, tampaknya pertarungan akan masih terus terjadi dalam elemen rezim akumulasi karena sebenarnya masih banyak individu-individu yang memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan sehingga permasalahan sosial di Indonesia lambat laun dapat teratasi.

E. Penutup

Analisis institusional menunjukkan bahwa tanpa sadar sebenarnya perilaku individu dipengaruhi oleh institusi. Sedangkan institusi sendiri diciptakan untuk menjaga struktur dalam masyarakat. Oleh karena itu untuk menciptakan struktur yang baik, didalamnya harus diisi oleh individu yang berkompeten dan berpihak kepada masyarakat karena akan menghasilkan institusi yang baik. Senada dengan Hall dan Taylor (1996), yang mengungkapkan bahwa institusi merupakan penyedia *template* untuk moral dan kognisi dalam melakukan interpretasi dan tindakan dalam diri seorang individu. Pada akhirnya institusi akan memberikan pedoman tindakan yang baik bagi individu dan buka alat untuk “menyetir” perilaku individu.

Daftar Pustaka

- Archer, M. 1996. *Realist Social Theory: the morphogenetic approach*. Cambridge: University Press.
- Giddens, Anthony. 1992. *Human Societies a Reader*. Cambridge: Polity Press.
- Hall, Peter and Taylor R. C. R. 1996. "Political science and the three new institutionalisms", dalam *Political Studies*, 44 (5)
- Lipietz, Alain. 1986. "Behind the Crisis: the Exhaustion of a Regime of Accumulation". *Review of Radical Political Economics* 18 (1&2)
- North, Douglass C. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press
- Peters, B. Guy. 2004. *Institutional theory political science: the new institutionalism*. New York: Continuum
- Rika. 2010. *Change or continuity? rethinking neoliberal trajectory amidst regime change in Indonesia*. Den Haag: ISS Research Paper



Bab 3

KONSEPSI NEGARA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS

Zulkamain

Lahir di Taliwang Sumbawa Barat, 9 Agustus 1974. Menamatkan studi pada Program Magister Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Jakarta (2002). Saat ini sebagai Pengajar di Pendidikan Sejarah FIS UNY dengan konsentrasi pada matakuliah Sejarah Tata Negara.

A. Pendahuluan

Membahas sejarah tata negara, baik secara makro maupun mikro, berarti masuk ke kawasan politik. Sedangkan wilayah politik itu sendiri dapat dikaji dari berbagai sudut pandang di antaranya; sejarah politik, sosiologi politik, antropologi politik, dan ilmu politik. Dalam pembahasannya, dimensi ini saling mengoreksi dan melengkapi satu dengan yang lainnya sehingga ditemukan fenomena yang utuh tentang konsep ketatanegaraan. Oleh karena itu, dalam pembahasan sejarah tata negara tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan suatu terminologi dan pendekatan yang multidimensional. Terminologi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, sejarah politik. Dari segi epistemologis, sejak Thucydides menulis *Perang Peloponesia* sebagai sebuah sejarah politik, tradisi

sejarah sangat didominasi oleh sejarah politik. Lebih-lebih dalam abad ke-19 sebagai abad nasionalisme dan formasi negara nasional di Eropa Barat, sejarah politik-lah yang sangat menonjol. Dalam konsep itu, sejarah diplomasi dan perang sangat menonjol di satu pihak, dan di pihak lain para raja, panglima perang, dan negarawan memegang peranan sentral. Fenomena ini masih kuat pengaruhnya sampai sekarang. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa jalannya sejarah ditentukan oleh kejadian politik, diplomasi, perang, dan aktivitas militer. Di samping itu, ada pula teori yang mengatakan bahwa orang besarlah yang menentukan jalannya sejarah. Fenomena ini terbukti dari banyaknya karya biografi para tokoh sampai pada Perang Dunia II. Perkembangan itu sejajar dengan berkembangnya sejarah nasional yang pada masa tersebut sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.

Mempelajari sejarah politik, tidak dapat dilepaskan dari sejarah sosial. Dimensi itu dapat dilihat pada tulisan Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia*, dalam edisi bahasa Indonesia. Demikian pula sebaliknya, sejarah sosial tidak dapat dilepaskan dengan sejarah politik, lihatlah tulisan Sartono Kartodirdjo tentang *Pemberontakan Petani Banten 1888* (1966). Kemudian yang menjadi pertanyaan kita adalah, materi apakah yang dibahas oleh sejarah politik?

Secara konvensional, sejarah politik membahas tentang sejarah perang, sejarah parlementer, sejarah kerajaan, dan sejarah modern. Dalam teori dan metodologinya, sejarah politik membahas tema-tema yang luas seperti; biografi politik, partai politik, birokrasi, struktur politik suatu masyarakat atau negara, pemberontakan, hubungan sipil-militer, dan lain sebagainya. Sejarah politik tersebut lebih bersifat tematis sehingga temanya sangat luas. Di Indonesia, ada dua contoh tentang biografi politik yang dikemas menjadi sejarah politik, misalnya tulisan L.D. Legge dan Dahm yang sama-sama menulis tentang Soekarno. Oleh karena itu, membicarakan biografi politik sebagai tema mikro dapat dimasukkan sebagai bagian dari sejarah tata negara.

Kedua, sosiologi politik. Sosiologi politik merupakan interdisiplin sosiologi yang pernah dikembangkan secara metodologis oleh Max Weber abad ke-19. Sosiologi politik membicarakan tipe kepemimpinan yang menurut teori Weber, yaitu: (1) otoritas

tradisional yang dimiliki berdasarkan pewarisan atau turun temurun; (2) otoritas karismatik, yaitu berdasarkan pengaruh dan kewibawaan pribadi; dan (3) otoritas legal rasional yang dimiliki berdasarkan jabatan serta kemampuannya. Di negara-negara berkembang, tipe kepemimpinan rasional dan kharismatik sering digabungkan menjadi satu. Contohnya, sebagai refleksi, dalam diskusi mengenai korupsi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Dewan Pertahanan Nasional tahun 2000 yang membahas mengenai "Merit Sistem". Dalam diskusi tersebut disebutkan bahwa kedudukan atau jabatan harus didasarkan pada prestasi, sehingga praktik KKN tidak terjadi. Hal ini berarti bahwa Merit Sistem didasarkan pada tipe kepemimpinan rasional.

Selain membahas tipe kepemimpinan, baik formal maupun informal, sosiologi politik juga membahas mengenai struktur politik, partai politik, partisipasi politik, hubungan sipil-militer, tokoh politik, dan peranan serta fungsi kelembagaan politik.

Adapun perbedaan antara pemimpin formal dan informal terletak pada otoritas kekuasaan yang dimilikinya. Pemimpin tipe formal memperoleh kekuasaan atau jabatan dengan cara-cara formal sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan tipe informal adalah pemimpin yang pada dirinya melekat kekuasaan karismatis. Dalam konteks Indonesia, tipe formal pada umumnya memiliki otoritas tradisional seperti golongan aristokrasi yang masih mempunyai hak pewarisan jabatan, terutama yang memangku jabatan pamong praja. Pada umumnya, berbagai tipe kepemimpinan menduduki lokasi sosial-historis dengan orientasi nilai yang berbeda-beda sehingga berbeda pula reaksinya terhadap inovasi, yaitu; penolakan, adaptasi, dan asimilasi. Konflik politik dapat dikembalikan kepada faktor sosiokultural dengan kepentingan ideologi atau nilai tertentu.

Dalam konsepsi ini, ahli sosiologi politik telah mengambil sistem kategorisasi jenis sistem politiknya sekaligus merupakan studi perbandingan. Analisis strukturalnya membahas status dan peranan berbagai elite, hubungan, dan perbandingan kekuasaan antara mereka. Kesemuanya dalam kerangka hierarkis suatu sistem feodal. Struktur kekuasaan sangat menentukan struktur sosial dengan kedudukan birokrasi yang sangat sentral fungsinya. Dalam hubungan ini sangatlah relevan menelaah kehidupan sosial antargolongan sosial

terutama dalam konteks kepentingan, status sosial, ideologi, serta sistem nilai-nilainya. Tidak dapat diabaikan juga kenyataan bahwa tindakan dan interaksi politik tidak dapat berjalan di luar kerangka kebudayaan politik (*political culture*). Di sini tindakan, kelakuan, serta sikap perlu dilembagakan.

Suatu determinisme sosial berpendapat bahwa seluruh peranan seorang tokoh ditentukan oleh struktur masyarakat, atau paling tidak peranannya dijalankan dalam batas-batas struktural masyarakat. Pelaku tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari ikatan atau subjektivitas itu, khususnya berkaitan dengan pandangan dunia. Sebaliknya, perlu diakui bahwa tokoh sejarah acapkali lebih jauh memandang ke depan atau berperan sebagai perintis atau protagonis. Protagonisme atau inovasi sering menuntut perubahan evolusioner sehingga pelaksanaannya menuntut kepribadian atau kepemimpinan yang kuat. Tepatlah kiranya apabila dikatakan bahwa tokoh yang mulanya menjadi orang marginal dan pencipta sub-kultur, akhirnya dapat menciptakan kultur dominan dalam kajian sosiologi politik.

Ketiga, antropologi politik. Pada awalnya, antropologi politik membicarakan perkembangan masyarakat kesukuan, hal ini karena antropologi lebih menekankan pada sistem kekerabatan. Kemudian antropologi politik berkembang, pengkajiannya pada: simbol-simbol politik, strategi politik, hubungan kebudayaan dengan politik, serta adat-istiadat setempat dalam hubungannya dengan politik. Antropologi politik sangat erat hubungannya dengan antropologi sosial. Sebagai contoh, kolusi dan korupsi yang terjadi dalam pemerintahan politik akan lebih tajam pembahasannya jika dikaji dengan antropologi politik. Hal ini karena menyangkut masalah kebudayaan politik dalam hubungannya dengan korupsi.

Contoh lain, dalam membahas kerajaan tradisional, tepatlah kiranya analisis antropologi politik dipakai untuk mengupas sistem politiknya yang mencakup: otoritas karismatis atau tradisional, patronase, feodalisme, birokrasi tradisional, dan lain sebagainya. Banyak antropolog yang mengkaji hal semacam itu, misalnya Cunningham, Schori, dan Schulte-Nordholt. Pada hakikatnya, yang mereka hasilkan lebih merupakan sejarah struktural dengan pendekatan sinkronis. Maka dari itu, tepatlah kiranya apabila sejarawan menggarap tema yang sama secara diakronis, meskipun tanpa mengabaikan pendekatan strukturalnya.

Keempat, ilmu politik. Dalam studi ilmu politik, konsentrasi bidang ketatanegaraan hanya dilakukan pada negara-negara modern yaitu negara-negara yang muncul menjelang Perang Dunia I, terutama kerajaan-kerajaan yang mulai meninggalkan tradisi monarki. Kemudian pembahasan mengenai ketatanegaraan diteruskan pada negara-negara setelah Perang Dunia II. Dalam hubungan ini, skenario politik baik di tingkat makro maupun mikro, dapat digambarkan secara rinci berdasarkan analisis ilmu sosial sehingga dapat diekstrapolasi antara lain; (1) gejala atau pola umum perjuangan politik, dan (2) kecenderungan dalam proses politik yang menunjukkan keteraturan (*regularities*). Kedua gejala ini akan menambah makna kejadian-kejadian serta memberi kemungkinan untuk membuat suatu perbandingan serta generalisasi.

Dimensi sosial dari proses politik mencakup status dan peranan elite politik, bangsawan, aristokrasi, birokrat, kaum intelegensia, elite religius, meritokrasi, teknokrasi, elite desa, dan lain sebagainya. Otoritas yang mereka miliki antara lain otoritas kharismatis termasuk pula yang sudah mengalami rutinisasi, otoritas tradisional, otoritas legal dan rasional. Bagaimana interaksi dalam proses perjuangan kekuasaan, terutama dalam periode transisi (abad ke-19 dan ke-20) sewaktu orientasi nilai-nilai bergeser sebagai dampak proses penetrasi pengaruh Barat dan modernisasi? Posisi sosiokultural elite masing-masing menimbulkan konflik yang bernuansa sosial dan politik yang selalu berkesinambungan. Lebih jauh, hal ini akan dibahas pada bab-bab berikutnya dari kajian sejarah tata negara ini.

Secara singkat, dapat dijelaskan bahwa kajian ilmu politik berarti memasuki wilayah kekuasaan. Dalam hal ini, ilmu politik berarti ilmu yang membahas tentang bagaimana cara untuk mendapatkan kekuasaan baik dalam konsep yang bersahaja maupun modern, dan bagaimana cara-cara untuk mempertahankannya. Konsep ini tampak sederhana, tetapi setelah memasuki wilayah kajiannya, maka akan ditemukan fenomena-fenomena yang sangat kompleks yang mewarnai kajian ilmu politik, dan memperkaya kajian sejarah ketatanegaraan yang akan dibahas dalam buku ini.

B. Konsepsi Negara Dalam Pandangan Masyarakat Primitif

1. Kepemimpinan Masyarakat Kesukuan

Jika membahas perkembangan negara dari suatu organisasi yang sangat sederhana sampai yang modern, pada umumnya ahli-ahli ilmu politik selalu berpijak pada antropologi. Dua bidang antropologi ini dalam hubungannya dengan negara membahas organisasi, pemimpin, tradisi, dan kebudayaan. Oleh karena itu bidang antropologi politik sebagai pendekatan untuk menjelaskan sejarah ketatanegaraan, tidak terlepas dari kerangka politik yang mendukungnya.

Buku karangan Huizinga, yang berjudul *Antropologi Sosial: Sebuah Pengantar*, membahas bentuk-bentuk negara yang primitif. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa sistem politik diantara masyarakat-masyarakat yang dipelajari oleh ahli antropologi tersebut ternyata dapat dinamakan *state*, meskipun masyarakat tersebut tergolong primitif dan tinggal secara terisolasi di pedalaman. Masyarakat kesukuan atau primitif ini oleh ahli antropologi dinamakan *tribe*. Dari pendekatan antropologi sosial dan politik, *tribe* sudah mempunyai sistem politik.

Masyarakat kesukuan berdasarkan kajian antropologi mempunyai ciri-ciri:

- 1) Jumlah penduduk biasanya sedikit dibandingkan dengan masyarakat modern, hanya ada beberapa keluarga yang mendiami wilayah-wilayah kesukuan.
- 2) Masyarakat kesukuan sangat tergantung pada alam, bahkan masyarakat tersebut mengisolasi dan membentengi diri dari pengaruh kebudayaan masyarakat lainnya dalam lingkungan alam. Contohnya: Suku Asmat di Irian Jaya, Suku Badui Dalam di Banten, dan masih banyak contoh lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.

Berdasarkan teori antropologi yang dibangun oleh para ahli antropologi Eropa Barat yang mempelajari masalah masyarakat di Asia sebagai tanah koloni, antara lain dijelaskan bahwa masyarakat-masyarakat kesukuan sebenarnya merupakan masyarakat yang sudah mempunyai sistem kekuasaan, dan hal ini dapat dilihat dari pemimpin-pemimpin sukunya. Adapun ciri-ciri pemimpin atau kepala masyarakat kesukuan antara lain:

- 1) Mempunyai kelebihan dari kemampuan rata-rata anggota suku, misalnya keberanian melindungi warga suku dari suku lain, yang oleh ahli antropologi disebut "*primus inter pares*".
- 2) Mempunyai pengetahuan dalam hal adat-istiadat, memimpin ritual, dan penyerbuan.
- 3) Seorang pemimpin kesukuan mampu menciptakan suasana kekerabatan yang baik, sehingga unsur-unsur dendam dapat dihilangkan. Oleh karena itu, pemimpin kesukuan harus kerja sama dengan warga kesukuan.

Masyarakat kesukuan yang primitif termasuk budayanya mencakup tahap ontologi, yaitu tahap dimana hakikat dasar hidupnya sangat tergantung pada alam. Tahap ini diperkuat dengan tahap mistis, yaitu tahap memitoskan alam dengan berbagai ritual seperti upacara adat. Sedangkan dalam masyarakat modern tahapannya sudah memasuki tahap fungsional dimana logika, nalar, dan pikiran mulai digunakan untuk menguasai alam dan tidak tergantung pada alam. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam masyarakat modern masih seringkali kita jumpai mereka meyakini hal hal yang sifatnya mistis, contohnya; Seorang calon pejabat publik yang ingin menang dalam kompetisi baik pilpres, pilkada, pilkades dan jabatan prestisius lainnya, mereka melakukan prosesi mistis dengan meminta bantuan penguasa alam seperti melakukan ritual pertapaan di alam terbuka, penyerahan sesembahan pada alam, dan lain sebagainya.

Terbentuknya kepemimpinan masyarakat kesukuan dapat dimulai dari Indonesia dan membandingkannya dengan suku lain di dunia, terutama Afrika dan Amerika Latin. Untuk Indonesia dapat dipilih tentang masyarakat kesukuan yang ada di Papua. Adapun alasannya adalah sebagai berikut.

Hingga saat ini, masyarakat kesukuan di Papua masih dapat dilacak ciri-ciri aslinya. Ciri aslinya dapat dilacak dari faktor adat istiadat, kebudayaan, bahasa, dan ciri-ciri kepemimpinan lokal.

Ada sebagian masyarakat kesukuan di Papua, misalnya di Jaya Wijaya yang merupakan wilayah perbatasan dengan Papua Nugini, yang meninggalkan zaman neolitikum baru sekitar dua dekade atau 20 tahun terakhir. Ini berarti bahwa masyarakat kesukuan dapat direkam dari ciri-ciri kepemimpinan kesukuan yang dalam beberapa literatur

disebut *primus inter pares*, yaitu satu-satunya tokoh dari sekian banyak orang.¹

Suku-suku Papua, dibandingkan dengan suku-suku lain di Indonesia masih dapat menunjukkan hubungan yang erat dengan lingkungan sekitarnya, sehingga tahap pemikirannya dapat dimasukkan dalam tahap mistis dan ontologis. Sedangkan suku bangsa lainnya yang sudah modern, dapat digolongkan dalam tahap fungsional.

Buku yang merupakan sumber informasi tentang Papua telah banyak ditulis oleh para ahli antropologi dan sosiologi baik sarjana lokal maupun sarjana-sarjana asing. Profesor Koentjaraningrat (1964), menerbitkan buku tebal tentang penduduk Irian Jaya, di samping artikel-artikel kecil tentang Papua yang sangat bermanfaat untuk ditelaah lebih lanjut. Dalam sejumlah karangan Koentjaraningrat itu (1964), dapat diambil kesimpulan tentang ciri-ciri masyarakat kesukuan, yakni: (1) masyarakat sangat terikat pada lingkungan sekitarnya, karena berada pada tahap mistis dan ontologis; (2) orientasi pada nenek moyang. Kebiasaan menghiasi badan merupakan bagian dari ritual kepercayaan. Banyak yang menghias badannya dengan kayu, daun, dan beberapa anggota tubuh hewan. Biasanya ritual ini dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu untuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Hiasan ini membedakan ritual status sosial yang dijalankan oleh kelompok masyarakat kesukuan.

2. *Tribe Communities* dan *Feodal Society*

Perkembangan negara bila dilihat dari sudut pandang keanekaragaman perkembangan masyarakat kesukuan *tribe communities* dan *feodal society*, nampaknya agak sulit untuk melangkah pada suatu hubungan linear bahwa masyarakat feodal merupakan perkembangan dari *tribe communities*. Dalam kenyataannya, ada *tribe communities* yang selamanya menjadi komunitas kesukuan. Tetapi di beberapa masyarakat di dunia, masyarakat kesukuan berkembang menjadi masyarakat kerajaan, misalnya masyarakat kesukuan di Benua Afrika.

¹ Untuk memahami lebih jauh tentang *primus inter pares*, lihat buku *Indonesia Sociological Studies* karangan B. Schriek terbitan Sumur Bandung (1960). Dalam membahas masyarakat kesukuan, konsep *primus inter pares* ini masih sangat relevan. Pada umumnya, konsep kepemimpinan *primus inter pares* tidak dianut dalam masyarakat demokratis dan masyarakat modern.

Di Indonesia, pengertian masyarakat kerajaan bukan merupakan perkembangan langsung dari masyarakat kesukuan, misalnya pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan bergeser ke Jawa Timur. Hal ini tidak dapat disebut sebagai perkembangan masyarakat kesukuan. Hingga saat ini, keragaman suku di Papua meskipun dalam era modern tidak membentuk masyarakat kerajaan. Berpuluh-puluh suku di Irian Jaya dengan bahasa lokalnya yang berbeda-beda, tetap menjadi masyarakat kesukuan dengan ciri-cirinya yaitu berburu, beternak, dan sebagian ada yang berpindah-pindah. Itulah sebabnya diperlukan teori-teori secara empiris tentang munculnya masyarakat feodal, yang dinamikanya ada di dalam birokrasi kerajaan.

Dalam buku yang berjudul *Social Society* (Vol. I, 1961), March Block banyak membahas perkembangan masyarakat feodal di Eropa. Perkembangan feodal di Eropa sebagai masyarakat negara, berbeda dengan perkembangan masyarakat kerajaan di Asia. Mungkin March Block kekurangan informasi tentang feodalisme di Asia, sehingga pembahasannya tidak terlalu mendalam. Ia hanya sekedar membandingkan lahirnya masyarakat feodal di Timur Tengah dan Eropa Barat, atau lahirnya foedalisme dalam masyarakat Islam dan Kristiani. Ia menggunakan pendekatan ikatan ketergantungan.

Dari pendekatan itulah Block menggunakan pihak penguasa dan pihak yang dikuasai. Ini berarti bahwa dalam masyarakat Islam dan Eropa Barat, ada kelompok sosial yang dikuasai. Di Eropa Barat kelompok yang dikuasai adalah rakyat yang dalam ikatan khusus adalah para petani, sedang penguasa adalah tuan-tuan tanah. Di Inggris, tuan-tuan tanah ini biasa melakukan pertemuan-pertemuan dan mengangkat tuan tanah senior yang kemudian menjadi raja. Proses itu berlangsung sejak masa sebelum masehi hingga lahirnya kerajaan-kerajaan di Inggris.

Di Afrika, berbeda halnya dengan di Inggris. Masyarakat suku Afrika yang beraneka ragam mengembangkan dirinya dengan suatu birokrasi dengan kriteria persamaan suku dan adat-istiadat yang akhirnya menjadi komunitas kerajaan kecil. Komunitas ini saling melakukan invasi, penyerangan, penguasaan, sehingga ada komunitas-komunitas yang dikuasai. Komunitas-komunitas yang dikuasai adalah raja-raja kecil yang oleh Block disebut *homage*, yaitu rasa hormat yang disertai dengan pemberian upeti kepada komunitas kerajaan.

Di Indonesia, pengertian masyarakat feodal agak lain dengan di Eropa. Jika berdasarkan pada sumber-sumber arkeologi, sangat jelas bahwa masyarakat kerajaan muncul begitu saja dari tingkat komunitas yang kecil dan dibimbing oleh seorang raja dan kemudian berkembang melalui invasi ke daerah-daerah dan para pegawainya digaji dengan tanah. Dalam perkembangan masyarakat kerajaan di Jawa, pegawai kerajaan yang mendapat gaji itu menggunakan sistem *apanage*. Buku yang merupakan hasil studi ilmiah berjudul *Vorstenlanden* karangan G.P. Rouffaer sangat khas membicarakan dan membahas struktur birokrasi kerajaan Jawa dengan sistem *apanage*. Makin tinggi jabatan seseorang dalam birokrasi tersebut, maka gaji yang berupa tanah akan semakin luas. Tanah ini dikerjakan oleh petani dengan sistem pengabdian sosial.²

Di pulau Jawa, para raja untuk mengokohkan dirinya secara hukum dan secara religius, maka raja-raja itu banyak melakukan upacara-upacara keagamaan. Sistem upacara yang mereka jalankan adalah sistem kebudayaan Hindu dan Budha. Upacara itu tampaknya merupakan gejala umum di Asia Tenggara.³ Upacara-upacara tersebut dikemas menurut aturan-aturan agama Hindu dan Budha sehingga raja sebagai penguasa dianggap bukan orang biasa oleh rakyat. Rakyat menganggap bahwa mereka adalah utusan para dewa untuk memerintah di bumi, sehingga muncul konsep dewa raja.

Hal tersebut berbeda dengan di Eropa, di mana pemahaman agama-agama lebih bersifat birokratis. Pada abad pertengahan misalnya, pendeta Nasrani lebih merupakan figur birokratis-politis karena ia bersama-sama raja selalu membuat keputusan-keputusan politik. Sehingga keputusan atau kekuatan gereja sangat disegani oleh rakyat. Gereja juga memiliki wilayah administrasi, penduduk, dan aspek sosial ekonomi yang lain. Bahkan gereja memiliki keputusan politik di samping birokrasi. Baru pada abad ke-17 dimulai gerakan pemisahan antara birokrasi gereja dan birokrasi negara.

3. Patronase dan Paternalistik Masyarakat Kesukuan di Afrika

Patronase dan paternalistik masyarakat kesukuan di Afrika memiliki karakteristik yang unik dan menarik. Keterbelakangan masyarakat Afrika sebagai benua berlangsung sampai akhir abad ke-

² Lihat D.H. Burger, *Sejarah sosiologis ekonomis Indonesia*, 1960.

³ Lihat G. Goedes, *Indianized states of Southeast Asia*, 1970.

19. Dalam konsepsi ini, orang Barat memberinya predikat sebagai *the dark continent*, suatu sebutan yang cukup menyakitkan bagi orang-orang Afrika. Mereka menyebut sebagai benua gelap karena Afrika secara keseluruhan baru mengenal tulisan pada akhir abad ke-19. Padahal jika mengkaji sejarah Afrika Utara, maka di situ terdapat Mesir yang pada 5000 tahun Sebelum Masehi sudah mengenal tulisan. Itu artinya ada suatu kekecualian bahwa Mesir sudah memasuki zaman sejarah sejak sebelum masehi. Bahkan pada zaman tersebut Mesir sudah dapat dikatakan sebagai *state*.

Dalam buku yang berjudul *Inside Africa* karangan John Gunther (1955) telah mengumpulkan data sejarah dan antropologi masyarakat Benua Afrika pada akhir tahun 1920-an hingga tahun 1930-an. Gunther telah menggunakan lebih dari 100 sampel yang terdiri dari wilayah dan kota yang dikunjunginya di benua tersebut. Menurut dia, keunikan Afrika bersumber dari keadaan sosiologis, historis, antropologis, dan geografisnya. Dari segi itu ternyata masyarakat-masyarakat Afrika pedalaman tumbuh dan berkembang dari kelompok-kelompok kesukuan dan sub-kesukuan. Itulah sebabnya terjadi kolonialisme di Afrika oleh Perancis, Inggris, Belanda, dan Belgia. Mereka mulai mengeksploitasi ekonomi Afrika, dan beberapa diantara mereka sembari mengumpulkan informasi historis-antropologis masyarakat kesukuan tersebut. Dari kajian historis-antropologis itu, ditemukan unsur budaya dari masyarakat primitif hingga masyarakat modern. Dalam masyarakat Afrika, ternyata yang masih tetap kuat adalah unsur patronase dan paternalistik.

Afrika juga mempunyai keunikan dari sudut geografi yang menempatkan Afrika sebagai benua sendiri di dunia. Keunikan itu adalah terbentuknya gurun pasir yang oleh para pakar Barat disebut Laut Putih. Sedangkan di pedalaman Afrika, diwarnai dengan kekayaan flora dan fauna yang memberikan sumbangan besar terhadap kajian antropologi, sejarah, dan akhir-akhir ini kajian mengenai lingkungan hidup.

Kedua keunikan itulah yang membentuk masyarakat Afrika secara khusus, dan penting untuk dikaji secara ilmiah tentang pentingnya Afrika sebagai kajian ilmiah, berdasarkan pada jurnal-jurnal ilmiah yang terbit selama beberapa dekade dan oleh karenanya kajian Afrika di mata sarjana Barat telah melahirkan *Africa Studies*. Jurnal ilmiah yang paling banyak adalah bidang antropologi tentang Afrika.

Secara khusus ada universitas di Inggris, yang dinamakan “Universitas Bidang Ketimuran” yang mempelajari tentang Asia dan Afrika.

Munculnya kajian Afrika di universitas-universitas Eropa Barat dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi, yaitu: *pertama*, didorong oleh kebijakan-kebijakan kolonial ketika Afrika menjadi tanah koloni Eropa Barat. Atas dasar ini, maka kajian Afrika telah dimulai sejak Afrika menjadi tanah koloni. *Kedua*, kajian Afrika didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa Barat sejak revolusi industri di Inggris yang menempatkan bidang ilmu dan teknologi sebagai prioritas utama untuk kemajuan industri.

Setelah Perang Dunia II kajian Afrika semakin berkembang pesat, terutama di kampus-kampus Eropa Barat. Perkembangan yang pesat ini karena dorongan perkembangan teori dan metodologi ilmu sosial yang menempatkan cara-cara kualitatif yang diagungkan tahun 1930-an. Sementara itu, Amerika Serikat menjadi pelopor perkembangan secara kualitatif dalam ilmu sosial. Dilihat dari segi pembagian wilayah kajian, meskipun pembagian itu semu, tampaknya perguruan tinggi di Eropa Barat lebih memusatkan kajiannya pada wilayah-wilayah Afrika, sedangkan Amerika Serikat lebih memusatkan pada kajian Asia Tenggara (*Southeast Asian Programs*).

4. *Patront-Client*

Membahas *patront-client* berarti membahas dua bidang yaitu: membahas teori Barat yang berhubungan dengan *patront-client*, dan membahas pengalaman masyarakat dalam mengembangkan kebudayaannya sehingga terbentuk struktur masyarakat. Dari segi teori-teori Barat, hubungan *patront-client* berarti membahas teori-teori kepemimpinan R. Bendix dan Max Weber. Bendix adalah seorang pemikir Italia yang menjelaskan bahwa dalam masyarakat dunia selalu terdiri dari pemimpin dan orang yang dipimpin. Yang dipimpin adalah rakyat yang selalu didominasi oleh para kaum kolonial. Itulah sebabnya Bendix menyebut istilah sub-ordinasi, yaitu sebagai masyarakat yang dikuasai. Oleh karena itu, menurut Bendix, pemimpin selalu mempunyai dua hal yaitu *power* dan *authority*. Dalam kajiannya, Bendix lebih banyak menjelaskan *power* dan *authority* masyarakat feodal di Eropa.

Kemudian Weber, pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, juga menjelaskan hubungan *patront-client* melalui teorinya yaitu: (1) teori

tradisional, (2) kharismatik, dan (3) rasional. Pada hubungan yang tradisional, seorang *patront* memperoleh kedudukannya secara turun temurun. Kekuasaan yang diperoleh secara turun temurun ini dibahas oleh Bendix tetapi kurang membahas tentang *patront-client* pada kepemimpinan rasional. Ia sedikit menyinggung kharismatik seorang penguasa. Pada hubungan kharismatik, seorang *patront* mempunyai *client* yang banyak, diikuti oleh rakyat banyak karena kharismanya. Misalnya tokoh-tokoh keagamaan, pendeta, pastor, dan kiai. Pembahasan Weber mengenai kharismatik ini merupakan pembahasan argumentatif-komparatif, yaitu pengalaman masyarakat keagamaan di dunia.

Di Eropa Barat pada abad pertengahan, yang dimulai pada abad ke-13 hingga menjelang revolusi industri, ternyata para pendeta sangat mempunyai kewibawaan dalam agama, sosial, politik, dan ekonomi sehingga membentuk nilai kharisma. Di Indonesia pada abad ke-19, tokoh-tokoh agama Islam seperti kiai menduduki kepemimpinan yang kharismatik. Ada dua hal yang mendorong hal ini: *Pertama*, kiai-kiai mengembangkan pesantren-pesantren seperti di Jawa dan Pesantren di wilayah lingkaran tambang Sumbawa Barat, sebagai akibat dari modernisasi Barat dan masuknya ekonomi uang. Maka cara melawannya adalah dengan mendirikan pesantren-pesantren. Jika mempelajari sejarah pesantren atau tradisi pesantren, tampak bahwa seorang kiai mempunyai kharisma yang sangat dikagumi oleh para santri pondok serta alumninya. Itulah sebabnya para kiai mempunyai hubungan *patront-klient* yang kharismatik. Jika dipelajari, hubungan kiai dengan para santrinya menunjukkan corak yang kharismatik. Ada beberapa teori yang menyatakan bahwa perkembangan Islam diikuti ajaran sufisme, yaitu gerakan yang dipimpin oleh para sufi/kiai yang mempelajari tasawuf. Dalam konsep yang sufistik, ada hubungan *patront-client* yang kharismatik.

Kedua, kebijakan kolonial yang berupa pemberian tugas kepada aparat birokrasi kolonial untuk mengawasi kegiatan-kegiatan orang Islam, dan harus memberikan laporan. Atas dasar itulah maka para kiai sangat dipatuhi oleh pengikutnya sebagai *patront*. Dalam konsep tradisi, kiai sebagai *patront* mempunyai kewajiban: (1) membimbing para santri untuk dapat menjalankan syariat Islam secara baik; (2) melindungi para santri dari ancaman-ancaman, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, sehingga ajaran seorang kiai pada suatu pesantren

sangat dipatuhi sebagai benteng untuk melawan segalanya. Di sini biasanya seorang kiai mengembangkan tarekat atau tasawuf dengan aliran masing-masing.

Pemimpin yang rasional, menurut Max Weber, mendasarkan ukuran *patront-client* pada prestasi, sehingga mengembangkan “*merit system*”, yaitu sistem jabatan berdasarkan keahlian, sehingga lebih mengembangkan rasio atau nalar. Kebudayaan Barat sejak abad ke-16 mulai dengan *merit system*, terutama di Inggris, meskipun di sana pada abad ke-15, feodalisme masih kuat. Setelah revolusi industri abad ke-18, sistem keahlian berkembang pesat, sehingga dunia perdagangan, birokrasi, ekonomi, politik, industri berkembang pesat karena dorongan *merit system* (keahlian atau prestasi).

Berdasarkan pada kebudayaan Islam di Indonesia, yang dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan Islam pada abad ke-17 ketika ada potensi ekonomi yang luar biasa di bidang perdagangan, ternyata hubungan *patront-client* mulai berubah ke arah yang egalitarian yang kemudian disebut demokrasi, menurut konsep masyarakat modern. Abad ke-17 adalah abad Islam dalam sejarah Indonesia, karena potensi ekonomi perdagangannya. Hubungan *patront-client*, dalam hal ini dapat diambil contoh kerajaan Aceh. Di Aceh, kerajaan Aceh mempunyai dua kitab undang-undang, yaitu *Tajusalatin* dan *Bustanu Salatin*. Dua buku ini merupakan dua sumber untuk mengatur masyarakat Islam Aceh dalam hal hubungan antara raja dengan rakyat (*patront-client*). Ada perbedaan raja sebagai *patront* antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan Hindu. Dalam kebudayaan Islam *patront* adalah: (1) raja dalam konsep Islam dianggap sebagai orang biasa yang mempunyai kelebihan; (2) dalam kebudayaan Islam, *patront* baik raja maupun sultan, harus mampu mengemban keadilan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Oleh karena itu, menurut adat Aceh, seperti yang terungkap dalam dua kitab tersebut, raja dituntut oleh *client*-nya: (a) bertindak adil pada orang yang mencuri, memberikan hukuman berat pada orang yang mencuri; (b) raja harus menghidupkan yang mati, dan mematikan yang hidup. Artinya yang salah harus dihukum dan yang benar harus dibebaskan; (c) raja-raja Islam Aceh dituntut oleh *client* untuk memberikan sebagian hartanya pada rakyat.

Sedangkan dalam kebudayaan Hindu, *patront* dituntut bahwa: (a) raja sebagai *patront* dianggap sebagai orang yang luar biasa, karena ia

mengandung unsur magis dan sakral. Dunia giri raja sebagai *patront*, digambarkan sebagai mikrokosmos, di mana *client*/rakyat beranggapan dan percaya bahwa hubungan mikrokosmos/alam raya harus serasi dan seimbang. Jika terganggu akan menimbulkan malapetaka bagi kehidupan manusia. Untuk itu, *patront* harus disakralkan dengan berbagai upacara dan ritual. (b) pada masa kejayaan Majapahit, kepala perang daerah, pada waktu upacara bulan purnama setahun sekali harus menghadap raja bersama upetinya berupa emas dan hasil bumi. Karena raja dianggap sebagai sakral, maka mekanisme ini tidak mengalami kesulitan.

C. Negara dalam Konsep Umum

Selain sebagai makhluk Tuhan dan makhluk individu, manusia juga memiliki kodrat sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, sejak dahulu manusia selalu hidup bersama-sama dalam suatu kelompok untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, seperti: mencari makan, menghadapi masalah, mengatasi gangguan dan ancaman, serta melanjutkan keturunan (Suhady, 2001: 3). Semula kelompok manusia itu hidup berpindah-pindah tempat, kemudian karena perkembangan peradaban, mereka mulai hidup menetap pada suatu tempat tertentu, misalnya untuk beternak dan bercocok tanam.

Dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya pada tempat tinggal tertentu yang dianggap baik sebagai sumber penghidupan bagi kelompoknya, diperlukan seorang atau sekelompok kecil orang yang ditugaskan untuk mengatur dan memimpin kelompoknya. Dalam hal ini, pemimpin kelompok diberi kekuasaan dan kewenangan tertentu dan anggota kelompok diwajibkan untuk menaati peraturan atau perintah dari pemimpinnya. Dengan demikian, maka timbullah dalam kelompok itu suatu kekuasaan "pemerintahan yang sangat sederhana" (Kansil: 1978). Setiap anggota kelompok itu dengan sadar mengetahui atau mendukung tata hidup dan peraturan-peraturan yang ditetapkan pemimpin mereka. Tata dan peraturan hidup tertentu itu mula-mula tidak tertulis, batasannya tidak jelas, dan merupakan adat kebiasaan saja. Namun demikian, lambat laun peraturan itu mereka tuliskan dan menjadi peraturan-peraturan tertulis yang dilaksanakan dan ditaati.

Berkaitan dengan bertambah luasnya kepentingan kelompok-kelompok itu dan untuk mengatasi segala kesulitan yang timbul, baik internal maupun eksternal, maka dianggap perlu dibentuk suatu or-

ganisasi yang lebih teratur dan memiliki legitimasi kekuasaan yang memadai. Organisasi itu sangat diperlukan untuk melaksanakan dan mempertahankan peraturan-peraturan hidup agar dapat berjalan secara tertib. Organisasi yang memiliki legitimasi kekuasaan itulah yang kemudian dinamakan negara.

Dalam *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila* (1983: 224) dijelaskan secara etimologis bahwa istilah negara berasal dari kata “nagari atau negara” (Sansekerta) yang berarti kota, desa, daerah, wilayah, atau tempat tinggal seorang pangeran. Secara etimologis, konsep “negara” muncul dari terjemahan bahasa asing “*Staat*” (Jerman dan Belanda) dan “*state*” (Inggris). Dua konsep itu, baik *Staat* maupun *State* berakar dari bahasa Latin, yaitu *statum* atau *status*, yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan. Kata *status* juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan sifat atau keadaan tegak dan tetap.

Konsep negara sebagai organisasi kekuasaan dipelopori oleh J.H.H. Logemaan dalam buku *Over de Theorie van Een Stelling Staadrecht*. Konsep itu menyebutkan bahwa keberadaan negara bertujuan untuk menyelenggarakan dan mengatur masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi. Definisi itu menempatkan negara sebagai organisasi kekuasaan (Budiyanto, 1997). Terminologi seperti itu kemudian diikuti oleh Harold J. Laski, Max Weber, dan Leon Duguit.

Dalam konsepsi negara sebagai kekuasaan, Kansil (1978) menyatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari manusia-manusia (masyarakat) dan merupakan alat yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pengertian luas, negara merupakan kesatuan sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Berikut adalah pengertian tentang negara yang dikemukakan oleh para pakar kenegaraan:

1) Kranenburg

Dalam konsepsi Kranenburg, negara merupakan suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.

2) Roger F. Soltau

Negara adalah suatu alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama yang mengatasmakan masyarakat.

3) George Jellinek

Dalam terminologi Jellinek, negara merupakan organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediamaan di wilayah tertentu.

4) Max Weber

Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam menggunakan kekuatan secara sah dalam suatu wilayah.

5) G.W.F. Hegel

Negara adalah organisasi kesesuaian yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.

6) Harold J. Laski

Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati oleh individu maupun asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.

7) Soenarko

Negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan.

8) R.Djokosoetono

Negara adalah organisasi sekelompok manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sah.

Dari beberapa pendapat para ahli seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang di dalamnya harus ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang berdaulat (baik ke dalam maupun ke luar).

Dalam konsep negara sebagai organisasi kekuasaan, di dalam negara terdapat suatu mekanisme atau tata hubungan kerja yang mengatur suatu kelompok manusia atau rakyat agar berdaulat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara. Untuk dapat mengatur rakyatnya, maka negara diberi kekuasaan (*authority*) yang dapat memaksa seluruh anggotanya untuk mematuhi segala peraturan atau

ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Untuk menghindari adanya kekuasaan yang sewenang-wenang, negara juga menetapkan cara-cara dan batas-batas kekuasaan itu dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan, organisasi, maupun oleh negara itu sendiri.

Ketika di dalam bahasa Indonesia kita hanya mengenal satu pengertian tentang negara, maka tidak demikian halnya dalam sejarah bernegara di Eropa. Analisis ini diperlukan agar kita tidak tergelincir ke pengertian negara yang tidak sesuai dengan cara pandang bangsa Indonesia. Semenjak bangsa-bangsa di Eropa sudah menetap dan tidak mengembara (nomaden) lagi, maka bernegara pada umumnya diartikan sebagai memiliki atau menguasai sebidang tanah atau wilayah tertentu (Padmo Wahyono, 1992: 92). Dengan perkataan lain, penguasaan atas tanah yang menumbuhkan kewenangan kenegaraan (teori patrimonial) di mana struktur sosial yang dihasilkan disebut feodalisme atau landlordisme. Negara dalam keadaan demikian disebut sebagai tanah (*land*) dan hal ini nampak pada sebutan England, Holland, dan lain sebagainya.

Definisi tersebut kemudian berkembang, yaitu bahwa tanah mendatangkan kemakmuran atau kekayaan (*reichrijksdom*), di mana negara kemudian diartikan sebagai *rijk* (Belanda) atau *reich* (Jerman) yang artinya kekayaan kelompok manusia (dinasti), misalnya *frankrijk*, *Oostenrijk*, dan sebagainya. Kondisi pra-liberal ini berakhir dengan tumbuhnya teori liberalisme yang dipelopori oleh John Locke, Thomas Hobbes, dan Jean Jacques Rousseau. Dalam konsepsi itu, negara tidak lagi diartikan sebagai tanah maupun kekayaan (*land* atau *reich*), melainkan sebagai suatu status hukum (*state-staat*), suatu masyarakat hukum (*legal society*) sebagai hasil dari suatu perjanjian bermasyarakat (*social contract*). Jadi, negara merupakan hasil perjanjian bermasyarakat (*ver trag-ver drag*) dari individu-individu yang bebas, sehingga hak-hak orang seorang (hak asasi) lebih tinggi kedudukannya ketimbang negara yang merupakan hasil bentukan individu-individu bebas tersebut.

Cara pandang individualistik ini sebagaimana dijelaskan oleh Soepomo di dalam rapat BPUPKI, tidak kita pilih atau kita ikuti, sekalipun di dalam lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia masih di-

“indoktrinasi”. Paham individualistik ini mendapat pertentangan dalam sejarah kenegaraan di Eropa dari kelompok Sosialis-Komunis yang dipelopori oleh Marx, Engels, dan Lenin yang mendasarkan anggapannya pada teori kelas, bahwa negara adalah alat dari mereka yang ekonominya kuat untuk menindas yang lemah. Cara pandang seperti itu juga bukan cara pandang bangsa Indonesia tentang negara.

Selain kedua cara pandang tersebut di atas, Soepomo menguraikan adanya cara pandang yang ketiga yang dikenal sebagai cara pandang integralistik, yang melihat negara sebagai suatu kesatuan organis yang utuh, seperti yang dikemukakan oleh Hegel, Adam Muller, dan Spinoza. Paham integralistik ini berbeda dengan cara pandang individualistik dari Rousseau dan kolektivisme Rusia. Dalam pada itu, Hatta menentang paham integralistik Jerman ini karena dianggap dapat menumbuhkan negara kekuasaan, sekalipun ada kemiripan dengan cara pandang Indonesia tentang satunya makro dan mikrokosmos.

Hatta mengusulkan dilengkapinya cara pandang integralistik tersebut dengan kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Dengan diterimanya usul Muhammad Hatta, maka terbentuklah integralistik Indonesia yang berbeda dengan cara pandang integralistik Jerman (Padmo Wahyono, 1992: 94). Dapat diidentifikasi bahwa di dalam individualisme Rousseau, individu lebih diutamakan ketimbang masyarakat. Sedangkan di dalam integralistik Jerman, masyarakat lebih diutamakan ketimbang individu, dan di dalam integralistik Indonesia, kemakmuran masyarakat diutamakan, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai. Oleh karena itu, cara pandang Indonesia tidak sekadar melihat negara secara organis, melainkan sebagaimana disepakati yang kemudian dirumuskan dalam alinea ketiga UUD 1945, yaitu bahwa negara adalah suatu keadaan kehidupan berkelompoknya bangsa Indonesia yang atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan berkebangsaan yang bebas. Dengan demikian, sekalipun semenjak Rousseau analisis bernegara berkisar pada masalah hukum, yaitu pembentukan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, namun analisis tersebut di Indonesia harus tetap didasarkan pada cara pandang integralistik.

D. Sejarah Terjadinya Negara, Tujuan, dan Fungsi

1. Terjadinya Negara

Suatu negara tidak serta-merta begitu saja muncul, tetapi ada latar belakang pendorongnya. Terdapat beberapa teori tentang terjadinya suatu negara, antara lain sebagai berikut.

a. Teori Kenyataan

Dalam teori ini, terjadinya suatu negara adalah suatu kenyataan. Ketika unsur-unsur negara (pemerintahan yang berdaulat, bangsa, dan wilayah) ada, maka pada saat itu juga suatu negara sudah menjadi kenyataan.

b. Teori Ketuhanan

Terjadinya suatu negara adalah kehendak Tuhan. Menurut teori ini, segala sesuatu tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak menghendakinya. Kalimat-kalimat seperti "Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa"...*"by the grace of God..."* menunjuk ke arah teori ini.

c. Teori Perjanjian

Berdasarkan teori ini, terjadinya negara dikarenakan oleh adanya perjanjian yang dibuat antara orang-orang yang tadinya hidup bebas merdeka, terlepas satu sama lain tanpa ikatan kenegaraan. Perjanjian ini diselenggarakan agar kepentingan bersama terpelihara dan terjamin, agar orang yang satu tidak merupakan binatang buas bagi orang yang lain (*homo homini lupus*, menurut Hobbes). Perjanjian itu disebut perjanjian masyarakat (*social contract*, menurut Rousseau). Dapat pula terjadi suatu perjanjian antara daerah jajahan, misalnya kemerdekaan Filipina pada tahun 1946 dan India pada tahun 1947.

d. Teori Penaklukan

Berdasarkan teori ini, terjadinya negara disebabkan oleh sekelompok manusia yang menaklukkan daerah kelompok lain. Agar daerah itu tetap dapat dikuasai, maka dibentuklah suatu organisasi yang berupa negara. Selain itu terjadinya negara dapat pula disebabkan oleh bangsa/negara lain. Suatu daerah tertentu melepaskan diri dari negara yang sebelumnya menguasainya dan menyatakan dirinya sebagai suatu negara baru (misalnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Timor Leste

yang sebelumnya menjadi bagian dari NKRI kemudian melepaskan diri dari Bangsa Indonesia dan menjadi negara merdeka.).

e. Teori Pemberontakan

Pemberontakan terhadap negara lain yang menjajah, seperti: Amerika Serikat terhadap Inggris pada tahun 1776-1783.

f. Peleburan atau fusi antara beberapa negara menjadi satu negara baru, misalnya: Jerman bersatu pada tahun 1871.

Secara teoretis, suatu negara dianggap ada apabila telah memenuhi ketiga unsur negara, yakni: pemerintahan yang berdaulat, bangsa, dan wilayah. Konsepsi seperti ini memengaruhi pula perdebatan di dalam PPKI, baik dalam membahas wilayah negara maupun dalam merumuskan Pembukaan yang sebenarnya direncanakan sebagai naskah Proklamasi. Suatu kenyataan pula bahwa tidak satupun warga negara Indonesia yang tidak menganggap bahwa terjadinya NKRI adalah pada waktu Proklamasi 17 Agustus 1945, sekalipun ada pihak-pihak (terutama luar negeri) yang beranggapan berbeda dengan dalih teori yang universal. Oleh karena itu, sekalipun pemerintah belum terbentuk, bahkan hukum dasarnya pun belum disahkan, tetapi bangsa Indonesia beranggapan bahwa NKRI sudah ada semenjak diproklamasikan. Bila kita kaji secara detail dan mendalam, rumusan pada alinea kedua Pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia beranggapan bahwa terjadinya negara merupakan suatu proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Adapun rincian tersebut adalah: (1) perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia; (2) proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan, dan (3) keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam menerjemahkan perkembangan teori kenegaraan tentang terjadinya NKRI sangat terperinci. Hal ini dapat kita amati dari unsur terjadinya NKRI sebagai berikut.

- a. Terjadinya negara merupakan suatu proses yang tidak sekadar dimulai dari proklamasi, melainkan bahwa perjuangan kemerdekaan pun mempunyai peran khususnya dalam pembentukan ide-ide dasar yang dicita-citakan.
- b. Setelah Proklamasi barulah "*mengantarkan bangsa Indonesia*" ke depan pintu gerbang kemerdekaan, jadi tidak berarti bahwa dengan proklamasi proses bernegara telah selesai.

- c. Keadaan bernegara yang kita cita-citakan bukanlah sekadar adanya pemerintahan, wilayah, dan bangsa, melainkan harus kita isi menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur.
- d. Terjadinya negara adalah kehendak seluruh bangsa, dan bukan sekadar keinginan golongan yang kaya dan yang pandai atau golongan ekonomi lemah untuk menentang golongan ekonomi kuat seperti dalam teori kelas.
- e. Unsur religiusitas dalam terjadinya negara menunjukkan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Unsur terakhir inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi pokok pikiran keempat yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945, yaitu bahwa Indonesia bernegara mendasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang di dasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

2. Tujuan Negara dalam Sistem Feodal dan Modern

Dalam sistem feodal, tujuan negara adalah penguasaan atas tanah. Oleh karena itu, pemupukan kekayaan oleh penguasa menjadi tujuan utama dan kekayaan yang melimpah pada penguasa (negara) akan "tertumpah" pada rakyatnya. Rakyat cukup menyerahkan diri pada penguasa apabila ingin makmur. Itulah tujuan bernegara yang feodalistik atau yang sering kali terjelma pula dalam sistem perekonomian "*merkantilistik*" bahkan etatisme. Secara kiasan sering diungkapkan bahwa rakyat harus menunggu "membesarnya kue" yang akan dibagi.

Cara pandang demokrasi modern tentu sangat berbeda dengan cara pandang feodal. Menurut J.J. Rousseau, tujuan bernegara adalah persamaan dan kebebasan (*man are born free and equal*). Gagasan ini bahkan menjadi mitos di Eropa dengan nuansa penekanan yang berbeda-beda. Misalnya di Eropa Barat, orang mengutamakan kebebasannya sedangkan persamaannya cukup dalam hukum, sedangkan di Eropa Timur (menurut Eropa Barat) yang diutamakan

persamaan materinya, sedangkan kebebasannya dinomorduakan. Mitos persamaan dan kebebasan ini kemudian dituangkan ke dalam konsep negara hukum yang demokratis dengan berbagai variasinya, sehingga oleh Carl Schmitt disimpulkan bahwa "*Ideal Begriff derverfassung*" atau pengertian ideal di dalam konstitusi adalah "*Demokratischen Rechtsstaat*". Mitos ini pernah diterapkan pula di dalam konstitusi RIS dan UUDS 1950 dengan rumusan negara hukum yang demokratis. Di negara-negara *Anglo Saxon* kita kenal konsep *Rule of Law and not of men*, sedangkan negara-negara Eropa Timur cenderung pada konsep *Socialist Legality*.

Pertanyaan kita kemudian adalah, bagaimanakah tujuan bernegara Indonesia. Sesungguhnya, konsep yang lebih tua daripada negara hukum (modern) ialah bahwa konsep negara bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum atau *res publica*. Ini dibakukan dalam konsep negara Republik, sehingga asumsinya setiap negara yang berbentuk Republik, adalah untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan dinasti (monarki) atau untuk kepentingan golongan (aristokrasi).

Konsep kepentingan umum menurut bangsa Indonesia secara ketatanegaraan seringkali diungkapkan sebagai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dirumuskan unsur-unsur masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila tersebut secara dinamis dan tidak terminal utopistis. Unsur-unsur tersebut adalah: (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) memajukan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, konsepsi masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila secara ketatanegaraan yakni terselenggaranya keempat unsur tersebut secara dinamis dan berkesinambungan.

Operasionalisasi pencapaian tujuan bernegara menurut penjelasan UUD 1945 tersebut adalah pertama di-"ciptakan" pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan ke dalam pasal-pasal sebagai instruksi bagi penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Penjabaran ini lebih lanjut ialah ke dalam undang-undang. Demikianlah sistem undang-undang dasar kita. Penciptaan ke dalam pasal-pasal adalah dalam bentuk ke dalam tatanan-tatanan kehidupan yang dijabarkan nilai-nilai dasarnya.

3. Sifat negara

Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Pada umumnya terdapat anggapan bahwa setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua (Miriam Budiarto, 2007). Berikut akan dijelaskan lebih lanjut tentang sifat sebuah negara.

a. Sifat memaksa

Sifat memaksa mengandung pengertian bahwa, peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara harus ditaati, sehingga penertiban dalam masyarakat tercapai serta dapat mencegah timbulnya tindakan anarkhi. Di sini, negara dapat menggunakan kekuatan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah negara menggunakan aparat keamanan seperti Polisi, TNI, Kejaksaan, Kehakiman, dan lembaga lainnya seperti yang diatur dalam konstitusi negara.

b. Sifat monopoli

Negara mempunyai hak monopoli atas penetapan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini, negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan, suatu ideologi, atau aliran politik tertentu dilarang berkembang atau disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.

c. Sifat mencakup semua

Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, contohnya undang-undang perpajakan.

4. Fungsi negara

Adapun fungsi negara adalah sebagai berikut.

- a. Melaksanakan penertiban dan keamanan negara. Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah terjadinya disintegrasi bangsa, maka negara harus berperan melaksanakan penertiban.
- b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- c. Pertahanan dan menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan peradilan.

E. Bentuk dan Unsur Negara

1. Bentuk Negara

Bentuk negara adalah penjelmaan dari organisasi negara secara nyata di masyarakat. Ia mencerminkan suatu pola tertentu atau dengan orientasi sistemik. Bentuk negara merupakan suatu sistem berorganisasi atau puncak manusia dalam kehidupan berkelompok. Berdasarkan teori-teori modern, bentuk negara yang terpenting adalah Negara Kesatuan (Unitarisme) dan Negara Serikat (Federasi). Dilihat dari segi ini, bentuk organisasi negara bukan lagi masalah republik, monarki, atau aristokrasi, melainkan negara kesatuan atau negara serikat.

a. Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat di mana di seluruh negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah. Di dalam negara kesatuan, pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk mengatur seluruh wilayahnya melalui pembentukan daerah-daerah dalam wilayah negara. Dalam negara kesatuan, pelaksanaan pemerintahan negara dapat dilaksanakan dengan sistem sentralisasi, dekonsentrasi, dan desentralisasi. Pertama, sistem sentralisasi adalah segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah tinggal melaksanakannya. Kedua, sistem dekonsentrasi, di mana pemerintah di atas mendelegasikan sebagian wewenangnya pada pemerintahan yang berada di bawahnya. Contohnya Mendagri mendelegasikan wewenangnya pada pemerintahan tingkat 1 (Gubernur). Ketiga, sistem desentralisasi, di mana kepada daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom.

Bentuk negara kesatuan pada umumnya mempunyai sifat-sifat seperti: 1) kedaulatan negara mencakup ke dalam dan ke luar yang ditangani pemerintah pusat; 2) negara hanya mempunyai satu undang-undang dasar, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu Dewan Perwakilan Rakyat; 3) hanya ada satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

b. Negara Serikat (Federasi)

Negara serikat adalah suatu negara yang merupakan gabungan beberapa negara, yang menjadi negara-negara bagian dan negara serikat. Negara-negara bagian itu semula merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Dengan menggabungkan diri dengan negara serikat, maka negara yang tadinya berdiri sendiri itu kemudian menjadi negara bagian. Mereka melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkan kepada negara serikat. Kekuasaan yang diserahkan itu disebutkan satu demi satu (limitatif), dan hanya kekuasaan yang disebutkan itulah yang diserahkan kepada negara serikat (*delegated powers*). Kekuasaan asli ada pada negara bagian, dan negara itu berhubungan langsung dengan rakyatnya.

Kekuasaan dari negara serikat adalah kekuasaan yang diterimanya dari negara bagian. Biasanya yang diserahkan oleh negara-negara bagian kepada negara serikat ialah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, dan urusan pos dan telekomunikasi.

2. Unsur terbentuknya negara

Suatu negara harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1) rakyat yang bersatu; 2) daerah atau wilayah; 3) pemerintah yang berdaulat; dan 4) mendapat pengakuan dari negara lain (Budiyanto, 1997). Konvensi Montevideo pada tahun 1933 menyebutkan unsur-unsur berdirinya suatu negara antara lain berupa rakyat, wilayah yang tetap, dan pemerintah yang mampu mengadakan hubungan internasional. Dari pendapat tersebut, unsur rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat merupakan unsur konstitutif karena keberadaannya mutlak harus ada. Sedangkan pengakuan dari negara lain merupakan unsur deklaratif yang bersifat formalitas, karena diperlukan dalam rangka memenuhi unsur tata aturan pergaulan internasional. Kansil (1978) menyatakan bahwa pada umumnya negara harus memenuhi unsur-unsur atau syarat: (a) harus ada wilayahnya; (b) harus ada rakyatnya; (c) harus ada pemerintahan yang berkuasa terhadap seluruh daerah dan rakyatnya, dan (d) harus ada tujuannya.

F. Penutup

Membahas sejarah tata negara, baik secara makro maupun mikro, berarti masuk ke kawasan politik. Sedangkan wilayah politik itu sendiri dapat dikaji dari berbagai sudut pandang, di antaranya sejarah politik, sosiologi politik, antropologi politik, dan ilmu politik. Dimensi ini saling mengoreksi dan melengkapi dalam pembahasannya, sehingga ditemukan fenomena yang utuh tentang konsep tata negara. Oleh karena itu, dalam pembahasannya, sejarah tata negara tidak dapat berdiri sendiri, sehingga memerlukan suatu terminologi dan pendekatan multidimensional. Sedangkan dalam pembahas perkembangan negara dari suatu organisasi yang sangat sederhana sampai yang modern, pada umumnya ahli-ahli ilmu politik selalu berpijak pada antropologi. Dua bidang antropologi ini dalam hubungannya dengan negara membahas organisasi, pemimpin, tradisi, dan kebudayaan. Oleh karena itu, bidang antropologi politik sebagai pendekatan untuk menjelaskan sejarah ketatanegaraan, tidak terlepas dari kerangka politik yang mendukungnya.

Masyarakat kesukuan yang primitif termasuk budayanya mencakup tahap ontologi, yaitu tahap dimana hakikat dasar hidupnya sangat tergantung pada alam. Tahap ini diperkuat dengan tahap mistis, yaitu tahap memitoskan alam dengan berbagai ritual seperti upacara adat. Sedangkan dalam masyarakat modern, tahapannya sudah memasuki tahap fungsional, di mana logika, nalar, dan pikiran mulai digunakan untuk menguasai alam dan tidak tergantung pada alam.

Dalam konsep negara sebagai organisasi kekuasaan di masyarakat moderen, di dalam negara terdapat suatu mekanisme atau tata hubungan kerja yang mengatur suatu kelompok manusia atau rakyat agar berdaulat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara. Untuk dapat mengatur rakyatnya, maka negara diberi kekuasaan (*authority*) yang dapat memaksa seluruh anggotanya untuk mematuhi segala peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Untuk menghindari adanya kekuasaan yang sewenang-wenang, negara juga menetapkan cara-cara dan batas-batas kekuasaan itu dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan, organisasi, maupun oleh negara itu sendiri.

PEMBELAJARAN GEOGRAFI PADA SUB DISIPLIN ILMU SOSIAL ¹

Hastuti

Dosen Pendidikan Geografi, FIS, UNY

A. Intisari

Di Indonesia, geografi menjadi bagian dari ilmu sosial yang dikembangkan terutama pada beberapa universitas yang semula institusi keguruan atau LPTK. Geografi sebagai ilmu sosial relevan dikembangkan pada fakultas yang melahirkan guru-guru pendidikan dasar dan menengah, mengingat geografi di jenjang pendidikan tersebut termasuk dalam kelompok ilmu sosial. Persoalan harus dihadapi geografi sebagai disiplin ilmu terkait objek kajiannya yakni geosfer meliputi aspek alam dan manusia. Aspek alam dan manusia umumnya dikembangkan dalam disiplin dan pendekatan yang relatif berbeda sehingga perdebatan terus mewarnai perjalanan geografi sebagai ilmu. Tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan geografi sebagai sub disiplin ilmu sosial di LPTK adalah mengoptimalkan pembelajaran geografi dalam rangka membentuk guru geografi yang memiliki kompetensi profesional

¹ Disampaikan pada diskusi FISTRANS UNY tanggal 29 Mei 2012.

B. Pendahuluan

Penggambaran karakteristik muka bumi awalnya dilakukan dengan identifikasi secara sederhana menggunakan pencatatan dan sketsa dari satu tempat ke tempat lain. Saat ini cara demikian telah mengalami perubahan dengan memanfaatkan alat bantu yang mampu menggambarkan detail muka bumi melalui verifikasi yang akurat. Kajian geografi senantiasa mengalami dinamika untuk menjelaskan fenomena muka bumi dalam konteks kekinian tentunya sulit terlepas dari perdebatan maupun kritik. Perdebatan dalam geografi sebagai keniscayaan mengingat persoalan dalam kajian geografi yang kian kompleks. Geografi sebagai disiplin ilmu holistik berupaya memadukan unsur alam dan manusia dengan pendekatan dan prinsip keilmuan yang diterapkan meskipun sering menimbulkan persoalan tersendiri yang mengundang perdebatan.

Tantangan ahli geografi dengan fokus kajian manusia adalah menguatkan disiplin geografi diantara dinamika ilmu sosial. Persoalan manusia dalam perjalanan kehidupannya tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Kajian manusia dalam melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup terkait dengan *demand and supply* menjadi fokus kajian disiplin ekonomi. Manusia ketika memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi dengan sesama manusia dalam institusi sosial, budaya, politik menjadi topik kajian ilmu sosial yakni sejarah, antropologi, sosiologi, dan politik. Aktivitas manusia tersebut tentu membutuhkan ruang sebagai wadah yakni bumi tempat berpijak yang ikut berpengaruh baik secara langsung maupun tak langsung dalam kehidupan manusia secara keseluruhan. Bumi dengan segala karakteristiknya termasuk aktifitas manusia di muka bumi menjadi objek material geografi.

Aktifitas manusia merupakan fokus kajian dalam pembelajaran geografi pada pendidikan dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi. Diperlukan pengembangan geografi sebagai sub disiplin ilmu sosial di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan mengoptimalkan pembelajaran geografi dalam rangka membentuk guru geografi yang memiliki kompetensi profesional. Menjelaskan aspek geosfer secara sederhana sesuai perkembangan peserta didik menjadi tantangan tersendiri dalam pembelajaran geografi di pendidikan dasar dan menengah. Konsep inilah yang seharusnya menjadi pokok kajian dalam

pembelajaran geografi di pendidikan tinggi. Pembelajaran geografi diarahkan pada pemahaman tentang relasi dan interaksi gejala fisis dan manusia dalam konteks keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan.

C. Interelasi Manusia dengan Lingkungannya

Geografi pada era tradisi ruang dan wilayah, maupun era tempat dan ruang awal 1970-an, kemudian mengkaji ruang dan lingkungan alam pada era 1980-an, secara terus menerus masih terjadi perdebatan dalam pemikiran geografi (Peet, 1998). Sebenarnya siapa geograf dan apa geografi itu senantiasa mengalami dinamika dalam memaknainya. Mengenai bagaimana kita memandang dunia, bagaimana kita melihat manusia di suatu tempat itulah geografi (Gale dalam Kitchin dan Tate, 2000). Dijumpai beberapa disiplin ilmu yang mengkaji tentang kebumihan seperti geologi selain geografi. Sedikit orang tahu bahwa ada perbedaan mendasar antara geografi dan geologi sebagai disiplin yang menekankan kajian tentang bumi. Geografi mengkaji bentang muka bumi dikaitkan dengan aktifitas manusia sementara Geologi mengkaji bentang muka bumi sampai isi bumi. Mengkaji geosfer dalam geografi tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang aktivitas manusia, sebagaimana diketahui kajian aktivitas manusia merupakan fokus kajian ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, sejarah, psikologi, dan politik. Memahami filsafat geografi diperlukan agar dapat dijadikan pedoman dalam alur berfikir sesuai kaidah keilmuan baik tentang apa yang dipelajari (ontologi), bagaimana mengkaji (epistemologi), serta manfaat ilmu dipelajari (aksiologinya). Pada dasarnya ontologi, epistemologi, dan aksiologi geografi relatif berdekatan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya.

Filosofi dan metodologi yang dikembangkan untuk mengkaji aspek *natural* dan *human* relatif berbeda. Satu-satunya disiplin ilmu yang menghampiri aspek alam dan manusia adalah geografi. *Geography is an unusual position* (Viles, 2005). Geografi memiliki metode dan pendekatan sebagaimana dijumpai dalam pengembangan ilmu alam dan sosial. Pendekatan kuantitatif lebih dekat untuk kajian aspek *natural*, demikian pula aspek *human* lebih dekat dengan pendekatan kualitatif. Paradigma positivistik lebih banyak untuk pengembangan aspek *natural*, sementara aspek *human* cenderung dikembangkan dengan paradigma realisme maupun humanistik.

Beberapa hasil kajian secara tegas mengemukakan bahwa aspek *human* dikembangkan pada sub disiplin geografi *human* dan aspek fisik (*natural*) dikembangkan pada sub disiplin geografi fisik (Hagget, 1984; Kitchin, dan Tate, 2000; Viles, 2005). Perbedaan sub disiplin geografi manusia dan fisik dikuatkan dengan perbedaan jurnal kedua sub disiplin geografi sebagai dikemukakan Johnston dalam Castree, Rogers dan Sherman (2005). Kitchin dan Tate (2000) mengemukakan sub disiplin yang disebut *mix geography* untuk mengkaji aspek alam dan manusia secara berimbang. Pada dasarnya geografi dikemukakan sebagai kajian tentang muka bumi dikaitkan dengan aktifitas manusia memiliki tiga sub disiplin geografi fisik, geografi manusia, dan geografi teknik (Hagget, 1984).

de Blij dan Murphy (2003), menyebutkan kerangka kerja geografi adalah lima tema yakni *location, interaction human and the environment, regions, place, movement, and landscape*. Knox dan Marston (2004) menjelaskan analisis keruangan dalam geografi memperhatikan lima konsep yakni lokasi, jarak, ruang, aksesibilitas, dan keruangan. Objek material menjadikan geografi berdiri pada dua kaki yakni *natural* dan *human*, maka perekat untuk menguatkan geografi adalah analisis, metode, tema, dan pendekatan, yang dianggap khas geografi. Pengembangan agar epistemologi geografi memiliki ketajaman untuk analisis fenomena geosfer yang semakin kompleks sehingga memberikan manfaat dalam kehidupan di muka bumi, inilah tantangan ahli geografi. Geografi sebagai disiplin ilmu diharapkan mampu memberi kontribusi secara nyata dalam kehidupan manusia di muka bumi sehingga terbentuk keselarasan interelasi antara manusia dan lingkungannya yang berdampak pada kenyamanan kehidupan di muka bumi.

Manusia sebagai unsur penting dalam kehidupan senantiasa akan mewarnai peradaban di muka bumi ini. Guna mewujudkan kehidupan yang semakin baik diperlukan keselarasan interelasi antara manusia dan lingkungan. Demikian pentingnya keselarasan interelasi manusia dengan lingkungan tercermin dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) 2015 yang ditandatangani oleh 149 kepala negara dan diakomodasi oleh 189 negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa Bangsa. MDGs 2015 diorientasikan pada pemberantasan kemiskinan, pencapaian pendidikan untuk semua, mendorong kesetaraan

gender dan pemberdayaan perempuan, penurunan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, serta memastikan kelestarian lingkungan hidup (Stalker, 2008). Orientasi pembangunan abad ini apabila dicermati seperti dalam kesepakatan tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang guna menguatkan posisi geografi sebagai kajian interelasi manusia dengan lingkungannya.

Tema interelasi manusia dengan lingkungan merupakan kerangka kerja geografi yang dicetuskan oleh Harvey di era 70-an dan de Blij di abad mellineum, tema ini masih tetap relevan dikaji dalam geografi. Analisis geografi dengan tema-tema, prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman, dan pendekatan sebagai panduan penting dalam kajian geografi tentang bagaimana kehidupan manusia di muka bumi. Manusia menjadi fokus kajian dalam ilmu sosial juga sebagai aspek kajian penting dalam geografi dalam konteks interelasi manusia dengan lingkungannya. Sebuah keniscayaan menempatkan geografi dalam jajaran ilmu sosial sebagai disiplin yang mengkaji aktifitas manusia dalam wadah geosfer.

D. Sepotong Kecil Potret Pembelajaran Geografi

Sebagaimana dikemukakan Ritzer dalam Johnston (2000), bahwa geografi mencoba memetakan kritik terhadap pemikiran mazhab Frankfurt. *Pertama* kritik terhadap dominasi ekonomi, *kedua* kritik sosiologi bukan sekedar ilmu atau metode sendiri tetapi harus dapat mentransformasikan struktur sosial dan membantu manusia keluar dari tekanan struktur. *Ketiga* kritik filsafat positivistik yang memandang manusia sebagai objek (alam) dan tidak tanggap terhadap perubahan, *keempat* kritik terhadap masyarakat modern yang telah dikuasai oleh revolusi budaya, dan *kelima* kritik budaya (birokrasi) yang menyebabkan masyarakat dibatasi oleh mekanisme administrasi, dan melahirkan budaya semu yang melahirkan repesifitas struktur yang melumpuhkan manusia.

Geografi mengkaji aspek manusia dalam arti luas memiliki sub disiplin geografi tentang berbagai kegiatan manusia seperti geografi ekonomi, geografi industri, geografi pariwisata, geografi sosial, geografi transportasi, geografi pemukiman, dan studi gender (Kitchin dan Tate, 2000). Geografi yang dekat dengan ilmu sosial sebagai bagian geografi

yang memiliki pendekatan berbeda dengan cabang ilmu sosial lainnya dalam mengkaji kegiatan manusia. Geografi dengan kajian sosial mengkaji setiap kegiatan manusia dalam konteks ruang, tempat, hubungan manusia dengan lingkungannya, wilayah, dan perpindahan (de Blij, 2000). Kajian aspek manusia dalam perspektif geografi tentu saja tidak dapat dipisahkan dari kajian bumi tempat melakukan aktifitas tersebut. Selanjutnya de Blij menyebutkan epistemologi geografi dengan kajian manusia secara umum tentu saja hampir sama dengan pendekatan untuk kajian ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, sejarah, politik, dan pendidikan.

Pembelajaran geografi di sekolah menengah sebagai lahan utama *output* sumber daya manusia dari pendidikan geografi di universitas (LPTK), seharusnya mampu menjadikan peserta didik memiliki toleransi tinggi dan menjauhkan dari tekanan yang dapat menghilangkan toleransi peserta didik terhadap lingkungannya. Penguasaan kognitif tentang aspek geosfer diharapkan secara signifikan terkait penguasaan ranah afektif dan psikomotorik peserta didik betapa pentingnya keselarasan hubungan manusia dengan alam dalam kehidupan di muka bumi. Tantangan dalam pengembangan geografi sebagai ilmu sosial justru pada peran yang dapat disumbangkan setelah belajar tentang geografi. Peran pembelajaran geografi bukan hanya pada aspek kognitif tetapi bagaimana membentuk pola pikir dan sikap peserta didik agar mampu menerapkan apa yang telah dipelajari ke dalam perilaku keseharian. Pengembangan geografi dalam payung ilmu sosial diharapkan mampu sebagai instrumen teknis, interpretatif humanistik, dan kritis emansipasi dalam dinamika kehidupan manusia di muka bumi (Castree, Roger, dan Sherman, 2005).

Selama ini pembelajaran geografi lebih ditekankan pada penguasaan ilmu oleh peserta didik sebagaimana tercermin dalam model evaluasi yang cenderung mendiagnosis seberapa jauh penguasaan ilmu secara kognitif berhasil dikuasai peserta didik. Terlebih pada pembelajaran tingkat sekolah menengah ke bawah, aspek afektif dan psikomotorik dalam pembelajaran geografi relatif terabaikan. Pemikiran bahwa pembelajaran geografi seharusnya diarahkan agar peserta didik akan terbentuk sikap dan perilaku terhadap lingkungan mikro, meso, dan makro ketika melaksanakan pembelajaran geografi kurang diperhatikan.

Dominasi ekonomi, nir transformasi sosial yang mampu melepaskan dari tekanan struktur, lebih menempatkan manusia sebagai objek, mengedepankan modernisme tanpa kendali, pembelengguan terhadap manusia, ikut mendominasi pembelajaran geografi sebagai ilmu sosial dan mewarnai pembelajaran secara umum termasuk dalam pembelajaran geografi akhir-akhir ini. Menurut Castree, Roger, dan Sherman (2005), pendidikan geografi sebagai ilmu sosial bukan hanya sekedar menanamkan pengetahuan namun pendidikan geografi seharusnya mampu membentuk identitas diri sebagai manusia untuk berpikir dan bertindak. Gejala ini tercermin dalam isu-isu jurnal pembelajaran geografi di Sekolah Menengah Atas yang jarang mendiskusikan tentang cara terbaik apa yang dapat membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku peserta didik setelah memiliki pengetahuan tentang geografi. Kondisi demikian terus mewabah hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pendidikan telah menciptakan kondisi kepada mahasiswa tak terkecuali mahasiswa geografi, bahwa setelah belajar hanya memikirkan bagaimana cara mereka untuk mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan studinya. Demikian pula pengajar di perguruan tinggi yang disesaki setumpuk tugas mengajar dan tugas lain yang kadang keluar dari koridor pengembangan ilmunya sehingga kesulitan mengembangkan diri melalui penelitian-penelitian yang seharusnya dilakukan untuk membangun teori-teori baru (Purwo Santoso, 2012). Boleh jadi, sedikit dijumpai teori pembelajaran geografi dan teori geografi yang mampu dibangun kemudian dijadikan patokan tentang bagaimana pembelajaran geografi mampu menghasilkan peserta didik sekurangnya sesuai dengan pemikiran Suharyono dan Amien (1994).

Menurut Suharyono dan Moch. Amien (1994), bahwa pengajaran geografi seharusnya mampu menanamkan kesadaran kepada Tuhan Yang Maha Esa, memahami relasi dan interaksi gejala fisis dan manusia dalam konteks keruangan, menanamkan kesadaran masyarakat, menanamkan rasa etis dan estetis, menanamkan cinta sesama, mengembangkan kemampuan memanfaatkan alam sekitar, mengembangkan keterampilan, pengamatan, mencatat, menafsirkan, menganalisis, mengklasifikasikan, mengevaluasi gejala fisis, dan sosial dalam lingkungannya, memupuk keterampilan membuat deskripsi dan membuat peta, memupuk kesadaran tentang ekologi, memupuk ke-

sadaran akan pentingnya keseimbangan serta distribusi manusia dan lingkungan pendukung, maupun meningkatkan pemahaman tentang potensi daya dukung lingkungan. Keberhasilan pengajaran geografi tentu saja akan menepis kegalauan Sri Edi Swasono sehingga potret buram pembelajaran geografi dapat dihindari. Sri Edi Swasono ketika kuliah sub topik "Interdependensi Ekonomi" di kelas semester ke-8 pada sebuah universitas terkemuka di Jakarta. Para mahasiswa tidak mengenal Laut Sawu, Teluk Tomini, Morotai, Sorong, Timika, dan lokasi geografis strategis lain guna membangun pola-pola interdependensi ekonomi yang akan dibahas di kelas tersebut.²

Pembelajaran geografi seharusnya mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air mengingat kajian geografi terkait dengan distribusi dan variasi keruangan seperti unsur-unsur alam, lingkungan, dan aktifitas manusia yang tersebar di tanah air. Geografi memiliki peran strategis ikut serta mengenalkan kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia kepada peserta didik dengan kajian antroposfer dalam konteks keruangan. Mengetahui kemampuan sumber daya pendukungnya, mengetahui keterkaitan manusia dan lingkungannya diharapkan mampu menumbuhkan sikap dan perilaku untuk memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan, melakukan penghematan energi, menghindari diri dari pemborosan penggunaan air, dan ikut memelihara tanaman di sekitarnya

E. Penutup

Di Indonesia, konsistensi pemaparan geografi sebagai ilmu sosial pada pembelajaran geografi di tataran pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi, yang menghasilkan tenaga kependidikan di Indonesia relatif telah mantap sejak dikembangkan LPTK sebagai institusi yang melahirkan tenaga kependidikan. Namun demikian perhatian serius masih diperlukan untuk pembenahan dan penguatan kajian geografi melalui penelitian termasuk penelitian-penelitian terkait pengembangan pembelajaran geografi. Selama ini, jarang dijumpai penelitian mengenai pengembangan pembelajaran geografi secara komprehensif

² Disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema "Revitalisasi Pendidikan (PS Dalam Pembangunan Karakter Bangsa" yang diselenggarakan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia (HISPISI) bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) dan Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada hari Minggu 15 Januari 2012 di Auditorium FE UNY.

dengan konteks "*Indonesia banget*". Penelitian yang diorientasikan pada model transfer pengetahuan guna mewujudkan peserta didik agar memiliki penguatan afektif dan psikomotorik bukan hanya menekankan kemampuan kognitif bahkan sekadar pandai menghafal tentang aspek geosfer tersebut.

Daftar Pustaka

- Castree, N; Rogers,A; dan Sherman, D. 2005. *Questioning Geography Fundamental Debate*. USA: Blackwell Publish.
- de Blij, H,J. 2003. *Human Geography, Culture, Society, and Place*. Wiley: John Wiley and Sons Inc.
- Johnston, R.J. 2000. *Philosophy and human geography: an introduction to comtemporany approach*. London: Edward Arnold
- Kitchin Rob and Nicholas J. Tate. 2000. *Conducting Research in Human Geography: Theory, Methodology and Practice*. Addison Wesley Longman. Singapore: Singapore (Pte) Ltd.
- Peet, Richard. 1998. *Modern Geographical Thought*. USA: Blackwell Publisher.
- Purwo Santoso. 2012. *Pembudayaan Analisis Kontekstual Untuk Pengembangan Ilmu Sosial Di Indonesia*. Makalah dalam Seminar Nasional Indegeneousasi Ilmu Sosial dan Implementasinya Dalam Pendidikan Ilmu Sosial Di Indonesia dalam rangka Dies Natalis UNY ke 48. Yogyakarta: UNY.
- Stalker, Peter. 2008. *Millenium Development Goals*, UNDP – Bappenas RI
- Suharyono, dan Moch Amien, 1994. *Pengantar filsafat geografi*, Proyek P2MTK Dirjend Dikti Depdikbud Jakarta
- Viles, Heather, 2005. “a divided disciplines?” dalam Castree, N; Rogers,A; dan Sherman, D, 2005. *Questioning geography fundamental debate*, USA: Blackwell Publish.

KEBIJAKAN TENTANG RESOLUSI KONFLIK YANG SESUAI DENGAN KONSTRUKSI MASYARAKAT MULTIKULTURAL¹

Suharno²
Dosen FIS UNY

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara multikultural, menghadapi potensi konflik yang tinggi antar elemen pembentuk multikulturalismenya. Anasir konflik dapat bermula dari persoalan perbedaan identitas hingga perjuangan pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Elemen identitas yang berbeda berupa etnis, agama, adat istiadat, bahasa dan lainnya secara alamiah merupakan penanda keberagaman yang secara sosial dapat memunculkan friksi atau gesekan. Agar minimalisasi potensi konflik dimungkinkan diperlukan ruang koeksistensi (*space of co-existence*) bagi sebagian besar identitas. Negara sebagai institusi yang mengikat, memaksa, dan mencakup semua (*all-*

¹ Disampaikan dalam Seminar yang diadakan Pusat Studi FISTRANS FIS UNY Tanggal 21 Maret 2012 di Ruang Ki Hadjar Dewantata

² Dosen Kebijakan Publik, Jurusan PKNH FIS UNY

encompassing, all-embracing),³ seharusnya mampu menghadirkan kebijakan yang memberikan ruang itu. Intervensi kebijakan dapat diambil dalam tiga ranah: prevensi, kurasi, dan preservasi.

Persoalannya dalam banyak kebijakan negara menonjol politik monokultural, bahkan sejak sebelum Indonesia menjadi. Pendekatan monokultural diambil untuk semata-mata stabilitas dan integrasi sosial. Pemerintah Hindia-Belanda menyederhanakan pluralitas kompleks masyarakat dengan cara pandang para elite priyayi dari sejumlah kerajaan dan kesultanan di Nusantara yang telah ter-Eropa-kan di lembaga pendidikan kolonial. Sebagai keturunan priyayi dari kerajaan-kerajaan pan-Nusantara, mereka (merasa) memiliki legitimasi budaya untuk kemudian menyatukan pluralitas geografis, historis, etnis, dan bahasa yang beragam lewat status dan peran mereka di sebuah negara yang baru lahir itu. Melalui mereka pula segenap manusia yang berbeda-beda (merasa) terpenuhi subyektivitasnya lewat lembaga kekuasaan yang baru tersebut.⁴ Kondisi ini mirip dengan gagasan Ernest Renan, bahwa bangsa merupakan sebuah identitas superior yang mengendap dari kesamaan nasib dan cita-cita sekelompok orang, beserta visi masa depan yang didirikannya bersama.⁵

Politik monokulturalisme juga dilakukan pemerintah Orde Baru. Politik monokulturalisme telah menghancurkan *local cultural geniuses* seperti tradisi "*pela gandong*" di Ambon, Nagari di Sumatera Barat dan lain-lain, diantaranya melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah yang menyeragamkan struktur desa di seluruh Indonesia seperti struktur desa di Jawa. Padahal, struktur desa yang dimiliki beberapa masyarakat tertentu seperti sistem pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, pemerintahan Marga di Sumatera Selatan, pemerintahan Saniri di Maluku, tidak hanya mengandung sistem pelayanan administrasi, namun juga pelayanan adat dan bahkan memiliki mekanisme resolusi jika terjadi konflik. Saniri, misalnya, selain berperan sebagai pemerintahan, juga berperan

³ Lihat Harold J. Laski, *The State in Theory and Practice*, New York, The Viking Press, 1947, hlm. 8-9. Lihat juga Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 1996, hlm. 40-41

⁴ Anderson, Benedict, 2001, *Komunitas-komunitas terbayang (Imagined communities : Reflections of the Origin and Spread of Nationalism)*, Pengantar oleh Daniel Dhakidae; diterjemahkan oleh Omi Intan Naomi, Yogyakarta: Insist Press, hal. 23.

⁵ Eley, Geoff and Suny, Ronald Grigor, ed. 1996. *Becoming National: A Reader*. New York and Oxford: Oxford University Press, 1996, hal. 211.

dalam menjaga kelestarian alam sekaligus mencegah eksploitasi alam oleh suatu pihak yang dapat merugikan pihak lain yang dapat menimbulkan konflik. Dalam sistem pemerintahan Saniri terdapat lembaga Sasi. Sasi laut, misalnya, melarang seluruh aktivitas masyarakat yang terkait dengan pemanfaatan atau pengambilan faedah tertentu dari suatu wilayah laut sampai ketika Saniri dibuka dan laut dinikmati bersama-sama oleh seluruh masyarakat. Dalam konflik Ambon, Saniri sebagai bagian dari resolusi berhasil mencegah kehancuran lebih luas masyarakat di wilayah Pulau Seram.⁶

Kebijakan politik monokulturalisme mempersempit ruang koeksistensi antar berbagai elemen multikultural. Dengan demikian, kebijakan tersebut menambah potensi alamiah konflik dengan bobot politis, apalagi kebijakan monokultural tersebut diinstrumentasi dengan sentralisme, dan bahkan otoritarianisme. Dari sisi kebijakan, perpaduan antara kebijakan monokultural dan kegagalan otoritarianisme negara mengawal kebijakan tersebut merupakan salah satu faktor penting yang memicu, memendam energi, atau membiarkan berlarut-larut berbagai konflik antar identitas kultural atau konflik multikultural atau multi-etnik.

Berbagai konflik etnik yang terjadi menggambarkan fenomena tersebut dalam kurun yang lama. Stabilitas dan integrasi sosial yang diujikan tidak terwujud, sebaliknya berbagai konflik terjadi, baik laten maupun manifes. Antara 1952 hingga 2000, misalnya, konflik di Kalimantan Barat antar berbagai etnis paling tidak telah terjadi 12 kali. Konflik-konflik tersebut antara lain: pertikaian antara Etnis Madura dan Etnis Dayak di tahun 1952, peristiwa pengusiran orang-orang yang berlatarbelakang Etnis Cina oleh orang Dayak di tahun 1967, peristiwa kerusuhan antara Etnis Madura dengan Etnis Dayak tahun 1979 yang terjadi di Kalimantan, peristiwa pertikaian antara Etnis Madura dan Etnis Dayak yang terjadi di tahun 1983, peristiwa kerusuhan Etnis Dayak dengan Etnis Madura yang terjadi di Sanggau Ledo di tahun 1997, konflik antara Etnis Madura dengan Etnis Dayak yang terjadi di Kalimantan pada tahun 1998, konflik antara etnis Melayu dengan Etnis Madura yang terjadi di Sambas, dan kerusuhan Etnis Melayu Pontianak dengan Etnis Madura yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2000.⁷

⁶ Carputty, Ferdinand, 2005, *Dinamika Masyarakat Patafina (Suku Bangsa Alune) Dalam Mempertahankan Budaya Lokal di Pulau Seram*, Tesis Tidak Dipublikasikan, Universitas Gadjah Mada, hal. 3.

⁷ Pulau Kalimantan sebagai pulau yang luas dan menyimpan banyak potensi kekayaan telah menarik minat banyak orang dari seluruh Indonesia bahkan dunia (China) untuk datang dan mengadu peruntungan di sana

Peristiwa konflik multikultur juga terjadi di Sampit Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah yang melibatkan warga Etnis Madura dan Etnis Dayak. Dalam konflik ini ratusan bahkan ribuan penduduk dinyatakan tewas, kebanyakan warga Madura. Konflik juga mengakibatkan arus pengungsian sekitar 55.323 jiwa yang menimbulkan penelantaran, terbukti dengan meninggalnya 357 pengungsi, meluasnya wabah penyakit, kualitas hidup yang buruk serta sanitasi yang tidak memadai. Dampak luas yang terjadi berupa suasana ketakutan, trauma psikologis, dan ribuan warga yang kehilangan harta.⁸

B. Memahami Masyarakat Multikultural

Multikulturalisme, dengan keragaman dan kecenderungan perkembangan konsep dan praktek, oleh Parekh⁹ dibedakan menjadi lima macam. *Pertama*, isolasionis, yang mengacu kepada masyarakat yang memiliki berbagai kelompok kultural yang ada di dalamnya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal antara yang satu dengan yang lainnya.

Kedua, akomodatif, yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. *Ketiga*, otonomis, yaitu masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima.

Keempat, kritikal atau interaktif yakni masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu *concern* dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. *Kelima*, kosmopolitan, masyarakat ini berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat

hingga melahirkan suatu masyarakat yang plural. Catatan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan dituangkan dalam buku "Masyarakat dan Budaya Kalimantan Barat" terbitan Balai Pustaka tahun 1997 menyebutkan bahwa di Kalimantan Barat terdapat 41% orang Melayu, 28% Dayak, 12% China, 9% Jawa, 6-7% Madura dan sisanya adalah suku-suku lainnya seperti Bugis dan Batak. Khusus di Pontianak, jumlah warga Madura lebih banyak mencakup hampir 12% penduduk Pontianak. Data tersebut merupakan data sebelum terjadinya kerusuhan etnik.

⁸ Tempinteraktif, 16 Juli 2001, diakses 14 Februari 2009.

⁹ Parekh, Bhikhu, 1997. *National Culture and Multiculturalism*, dalam Kenneth Thomson (ed.), *Media and Culture Regulation*, London: Sage Publications, hal. 88.

dimana setiap individu tidak lagi terikat dan *committed* kepada budaya tertentu, sebaliknya secara bebas terlibat dalam eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

C. Konflik

Masyarakat multikultural ini mengandung potensi konflik. Konflik adalah situasi dan kondisi dalam kehidupan masyarakat yang kacau atau tidak adanya ketertiban, saling klaim antar pihak, berselisih, bersengketa, bermusuhan dari yang sifatnya ancaman kekerasan sampai kepada kekerasan fisik. Konflik terjadi karena masyarakat tersebut mengandung berbagai kepentingan, lembaga, organisasi, dan kelas sosial, yang tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dan serasi. Konflik bisa disebabkan oleh banyak hal.¹⁰ Konflik dapat disebabkan oleh polarisasi sosial yang memisahkan masyarakat berdasarkan penggolongan-penggolongan tertentu dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan dan permusuhan antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat yang dapat berujung pada munculnya kekerasan yang terbuka.

Konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial.¹¹ Terjadinya konflik juga tidak terelakkan dalam masyarakat.¹² Masyarakat dipandang sebagai struktur sosial yang mencakup proses-proses asosiatif dan disosiatif yang hanya dapat dibedakan secara analisis. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa konflik merupakan pencerminan pertentangan kepentingan dan naluri untuk bermusuhan.

Menurut Galtung, terdapat 3 (tiga) unsur utama konflik¹³: a) Ketidaksesuaian diantara kepentingan dan kontradiksi di antara kepentingan, atau secara akademis sering disebut "ketidaksesuaian antara nilai-nilai sosial dan struktur sosial". b) Perilaku negatif dalam bentuk persepsi atau stereotip yang berkembang diantara pihak-pihak yang berkonflik. 3) Perilaku kekerasan dan ancaman yang diperlihatkan.

¹⁰ Lihat Suharno, "Konflik, Etnisitas, dan Integrasi Nasional", Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Resolusi Konflik pada Civics Community DIY tanggal 18 dan 20 November tahun 2006 di Universitas Negeri Yogyakarta. Penyebab konflik tersebut disarikan dari hasil diskusi panel tentang Penyelesaian Konflik di berbagai daerah di Indonesia yang diselenggarakan Universitas Gadjah Mada atas kerjasama Indonesia-Jerman. Para panelis dalam diskusi tersebut antara lain; Mochtar Mas'ood, Heru Nugroho, Gerry van Klinken.

¹¹ *Ibid*, hal. 3.

¹² *Ibid*, hal. 4.

¹³ Rozi Syaifuan, dkk. 2006. *Kekuasaan Komunal Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pelajar, hal 29.

Konflik berlangsung melalui beberapa fase. 1) Fase sengketa, merupakan permulaan sebuah konflik. Ini ditandai dengan klaim yang saling berlawanan melalui proses-proses institusional, tanpa penggunaan kekerasan dan ancaman. 2) Fase krisis, posisi berlawanan yang terdapat dalam proses institusional menggunakan ancaman kekerasan dalam memperjuangkan klaimnya. 3) Fase kekerasan terbatas, dimana masing-masing klaim mulai diekspresikan dengan penggunaan kekerasan reguler dan sistematis, namun belum menggunakan kekuatan yang tidak terkendali. 4) Fase kekerasan massif, ditandai dengan penggunaan kekerasan secara reguler dan sistematis, dengan kekuatan yang tidak bisa dikendalikan. Ekspektasi para pihak di level ini adalah destruksi atau penghilangan pihak lawan. 5) Fase penurunan/peredaan, ini ditandai dengan karakter dimana setiap pihak yang sebelumnya melakukan perlawanan, menggunakan kekerasan, dan bermaksud menghilangkan pihak lawan mulai melakukan tindakan tertentu untuk menahan. 6) Fase penyelesaian, ditandai dengan resolusi atas pertentangan yang menyebabkan konflik dimana pengakuan (rekognisi) proses institusional mengakomodasi secara damai tuntutan-tuntutan yang berlawanan.¹⁴

Konflik bisa ditinjau dari aspek sosial dan politik. Konflik sosial bisa diartikan sebagai perjuangan untuk mendapatkan nilai-nilai atau pengakuan status, kekuasaan dan sumber daya langka. Tujuan kelompok-kelompok yang berkonflik tidak hanya mendapatkan nilai-nilai yang diinginkan tetapi juga menetralkan, melukai, atau mengurangi saingan-saingan mereka. Konflik bisa terjadi di antara individu dan individu, antara individu dan organisasi atau kelompok, antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain, dan dalam komponen sebuah organisasi atau kelompok.¹⁵

¹⁴ Tahapan ini diperkenalkan dalam kerangka mekanisme sistem peringatan dini konflik/Conflict Early Warning System (CEWS) oleh University of South California/USC dalam http://www.usc.edu/dept/LAS/ir/cews/html_pages/confinprocedure.htm#Phase1 Bandingkan dengan Schmid, yang mengkategorikan tingkatan konflik yang bereseting politis sebagai berikut: 1) situasi stabil dan damai, 2) situasi ketegangan politis, 3) konflik politik dengan kekerasan, 4) konflik (intensitas rendah, dan 5) konflik dengan intensitas tinggi. Schmid, "Indicator Development: Issues in Forecasting Conflict Escalation", dalam Davies dan Gurr (eds.), 1998, *Preventive Measures: Building Risk Assessment and Crisis Early Warning Systems* (Rowman and Littlefield Publishers Inc, Maryland, USA), hlm. 43-47. Sedangkan Pickering mengkategorikan konflik pada tiga tahapan: 1) Everyday Concerns and Disputes, 2) More Significant Challenges, 3) Overt Battles. Lihat Pickering, 2000, *How to Manage Conflict: Turn All Conflicts into Win-Win Outcomes* (Career Press, Franklin Lakes, NJ), hlm. 21-22

¹⁵ David L. Sills, 1966, *The Government of Associations: Selections from the Behavioral Sciences*. Publisher: The Bedminster Press, Totowa, New Jersey, hal.112.

Schmeidl dan Jenkins mengkategorikan konflik etnik sebagai konflik dengan karakter tertentu. Konflik etnik pada umumnya merupakan perjuangan terhadap sumber daya yang langka yang tidak didistribusikan secara merata bagi kelompok-kelompok etnik. Konflik etnik ini sangat sulit untuk dilepaskan secara tersendiri dari perang sipil. Beberapa perang sipil bermula dari sengketa kekuasaan dan sumber daya ekonomi namun kemudian melebar kepada tuntutan-tuntutan (etnik atau) etnonasionalis.¹⁶

Konflik etnik/ konflik multikultural sebagai konflik dengan karakter tertentu memiliki penyebab yang kompleks. Penyebab tersebut dapat dikemukakan berbagai faktor sebagai berikut: *Pertama*, faktor sosial ekonomi (akses terhadap sumber daya ekonomi) yang dicerminkan dengan kondisi: a) saling mengklaim dalam menguasai sumber daya yang terbatas akibat tekanan penduduk dan kerusakan lingkungan atau ada eksploitasi sumber daya oleh sekelompok masyarakat tanpa mengindahkan norma-norma masyarakat di sekitarnya, b) kecemburuan sosial yang bersumber dari ketimpangan ekonomi antara kaum migran (pendatang) dengan penduduk asli (lokal). *Kedua* adalah faktor sosial budaya yang dicerminkan oleh: a) dorongan emosional kesukuan yang karena ikatan-ikatan norma tradisional melahirkan sebuah kefanatikan, b) sentimen antar pemeluk agama yang terjadi karena kurangnya pengetahuan dalam memahami suatu ajaran agama.

Ketiga adalah faktor sosial politik yang dicerminkan dengan: a) distribusi kekuasaan yang tidak merata. Ini berarti bahwa konflik sosial pasti akan muncul karena secara rasional tidaklah mungkin dilakukan distribusi kekuasaan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat sehingga konflik akhirnya merupakan suatu keniscayaan dalam masyarakat, b) tidak tunduknya individu atau kelompok sebagai pihak yang dikuasai terhadap sanksi yang diberikan oleh pihak yang sedang berada dalam posisi menguasai, c) ketegangan antara kelompok yang sedang berkuasa dengan kelompok yang dikuasai di mana kelompok yang berkuasa ingin mempertahankan *set of properties* yang melekat pada kekuasaannya sementara yang dikuasai selalu terobsesi untuk mewujudkan perubahan yang dianggapnya merupakan satu-satunya jalan untuk menggapai perbaikan posisi dirinya.

¹⁶ Schmeidl dan Jenkins, "Early Warning Indicators of Forced Indicators", dalam Davies dan Gurr (eds.), 1998, *Preventive Measures: Building Risk Assessment and Crisis Early Warning Systems* (Rowman and Littlefield Publishers Inc, Maryland, USA), hlm. 66

Bilamana ini terjadi, maka pihak yang berkonflik berada pada sebuah zona tawar-menawar yang distributif. Dalam hal ini suatu aturan berusaha untuk membagi sumber daya sehingga terjadi situasi kalah-menang. Proses tawar-menawar distributif difokuskan pada upaya memaksa salah satu pihak yang berkonflik untuk menyetujui atau menerima titik sasaran spesifik pihak lain atau sedekat mungkin dengan titik sasaran itu. Artinya, salah satu pihak dipaksa untuk menjauhi titik sasarnya dan mendekati titik sasaran pihak lain.

Ini merupakan suatu bukti bahwa prinsip *politics of recognition* tidak bisa diterapkan bila penyelesaian suatu konflik dilakukan melalui proses tawar-menawar secara distributif. Prinsip *politics of recognition* bisa berjalan manakala regulasi yang digunakan untuk mengatasi konflik menerapkan proses tawar-menawar yang integratif. Proses ini mengandaikan adanya satu atau lebih cara penyelesaian yang dapat menghasilkan situasi menang-menang.

D. Resolusi Konflik

Dalam studi konflik, dikenal beberapa konsep dasar yang mengkerangkai bagaimana respons atas konflik atau potensi konflik, antara lain: manajemen konflik, transformasi konflik, dan resolusi konflik. Transformasi konflik merupakan konsep yang menekankan pada proses penumpukan dan penghalusan konflik pada level dimana para pihak yang berkonflik dapat hidup bersama dan masing-masing dapat mengendalikan diri mereka, melalui saling empati kepada pihak lain, diperlukan kreativitas untuk mencari hal baru, dan dengan cara berperilaku, berbicara, dan—bahkan lebih jauh lagi—berpikir tanpa kekejaman. Dalam kerangka tersebut dituntut prinsip "cintailah musuhmu", atau—dalam level yang sangat awal—prinsip "kurangi kebencian pada musuhmu" sudah cukup membantu mengatasi persoalan.¹⁷ Tujuan utama transformasi konflik adalah restorasi ketertiban, harmoni, dan hubungan dalam komunitas.¹⁸

¹⁷ Galtung, "Introduction: Peace by Peaceful Conflict Transformation—A Transcend Approach", dalam Webel dan Galtung (eds.), 2007, *Handbook of Peace and Conflict Studies*, (Routledge, London and New York), hlm. 28. Lihat juga Boege, "Traditional Approaches to Conflict Transformation: Potentials and Limits", *ibid.* www.berghof-handbook.net, juga Miall, "Conflict Transformation: A Multidimensional Task", dalam *Berghof Handbook of Conflict Transformation*, www.berghof-handbook.net

¹⁸ Boege, "Traditional Approaches to Conflict Transformation: Potentials and Limits", *ibid.* www.berghof-handbook.net, hlm. 7

Sedangkan konsep resolusi konflik merupakan konsep yang lebih luas dan umum.¹⁹ Konsep ini merefleksikan bahwa konflik harus diatasi, mulai dari konflik intrapersonal, interpersonal, intragrup, intergrup, intranasional, hingga internasional. Resolusi konflik meniscayakan pengetahuan akan akar masalah, kesadaran akan masalah dan potensi penyelesaiannya, hingga ketrampilan (*skills*) untuk mengatasi masalah.²⁰ Tujuan akhir dari resolusi konflik adalah perdamaian—antara perorangan, kelompok, atau bahkan bangsa yang terlibat.

Dalam kontinum kajian konflik dan perdamaian, terdapat dua konsep yang menunjukkan kedekatan dan kejauhan intervensi serta tujuan resolusi yang ingin dicapai. Untuk pendekatan-pendekatan keamanan dan intervensi jangka pendek dikenal konsep *peacekeeping*. Sementara pendekatan-pendekatan perubahan kelembagaan dan pencegahan dalam jarak yang lebih panjang disebut *peacebuilding*.²¹ *Peacekeeping* merupakan upaya untuk membuat keamanan melalui kontrol berupa pengawasan (*surveillance*), pembatasan, pengendalian, dan sanksi atas setiap tindakan kekerasan dan konfrontasional. Konsep ini dengan demikian lalu dikaitkan dengan upaya penciptaan "perdamaian negatif"²², yang bukan berarti perdamaian dalam konotasi yang buruk, akan tetapi lebih ditekankan pada terwujudnya syarat minimum perdamaian, berupa tidak adanya kekerasan dan kekejaman fisik. Sedangkan *peacebuilding* merupakan upaya untuk meredakan friksi antar kelompok dan masalah-masalah struktural dan kesenjangan melalui pendidikan, penyelesaian masalah, reorganisasi pola interaksi, dan aktivitas-aktivitas komunitas lainnya. Pendekatan ini dimaksudkan untuk membangun ulang ikatan sosial dan mengubah ekspektasi masyarakat yang satu dengan yang lain dari kekerasan menuju hubungan yang damai.

Sedangkan manajemen konflik merupakan konsep yang lebih spesifik dan prosedural dalam merespon suatu konflik. Manajemen konflik memiliki tiga dimensi: 1) sekumpulan prosedur informal-formal,

¹⁹ Moffit dan Bordone (2000) menggunakan istilah "dispute resolution", lihat *The Handbook of Dispute Resolution* (Jossey-Bass A Wiley Imprint, San Francisco, CA).

²⁰ Deutsch dan Coleman, 2000, *Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice* (Jossey-Bass Publishers, San Francisco) hlm. 1-9, 499-514. Resolusi konflik dalam buku sangat penting dalam studi konflik ini banyak mengambil setting konflik, terutama intrapersonal, interpersonal, dan intergroup, sedangkan setting resolusi yang dominan adalah psikologi (personal) dan psiko-sosial.

²¹ Bickmore, "Conflict Resolution Education: Multiple Options for Contributing to Just and Democratic Peace", dalam Pammer dan Killian (eds.), *Handbook of Conflict Management*, (Marcel Dekker Inc, New York), hlm. 3-4.

²² *Negative peace*, yang sering disandingkan dengan *positive peacemaking* dalam pendekatan *peacebuilding*.

otonom-intervensionis, untuk menghadapi dan mengatasi konflik, 2) Pemahaman dan keterampilan untuk mengenali dan memahami konflik, sehingga dapat membayangkan dan mengkomunikasikan alternatif resolusi, 3) Konteks hubungan individual dan komunitas dimana konflik muncul, dirasakan dan dipahami oleh masyarakat sebagai masalah, berkembang dan meluas (eskalasi), lalu berkurang dan menurun (de-eskalasi).²³

Penting untuk dicatat bahwa konflik yang terjadi di Sampit antara Etnis Dayak dengan Etnis Madura adalah konflik dalam masyarakat, maka untuk mencapai keberhasilan perdamaian secara substantif membutuhkan penyelesaian konflik yang benar-benar tuntas di level masyarakat dan sesuai dengan nalar penyelesaian konflik bagi masyarakat, bukan penyelesaian konflik pada level pemerintah yang sifatnya *top down*. Oleh karena itu penyelesaian konflik yang baik dapat dicapai kalau konsensus telah selesai di level masyarakat dan kemudian dilegalformalkan dalam sebuah kebijakan publik sehingga konsensus atas perdamaian antar pihak yang berkonflik tersebut memiliki kekuatan memaksa dan mengikat bagi masing-masing pihak untuk melaksanakannya.

E. Pentingnya Politik Rekognisi dalam Resolusi Konflik Multikultural

Eksistensi sebagai suatu negara yang multikultural dengan potensi konflik yang sedemikian besar dan ancaman terjadinya eskalasi menuju ke arah pertentangan dengan intensitas yang lebih tinggi hingga terjadi kekerasan mengharuskan adanya saluran yang tepat. Dengan demikian kondisi multikultural tersebut bisa terjembatani sehingga konflik yang terjadi bersifat sinergi bukan sebaliknya bersifat korosi dan menghancurkan tatanan kehidupan bernegara.

Salah satu gagasan penting yang menjadi pembahasan selama beberapa dekade terakhir adalah pentingnya penerapan politik pengakuan (*politics of recognition*) yang dapat menjadi landasan bagi terciptanya kebersamaan di antara berbagai budaya, kelompok etnis, ras dan agama. Sebab tak adanya pengakuan adalah penindasan (*misrecognition is an oppression*).²⁴

²³ Bickmore, *ibid.* hlm. 4

²⁴ Demikian Hegel yang pemikirannya diabstraksi oleh Sybol C. Anderson. Lihat Anderson, 2009, *Hegel's Theory*

Politik rekognisi merupakan konsep yang relatif baru, yang bermakna pengakuan dari pihak yang mayoritas kepada pihak yang minoritas dan tidak teruntungkan sedang pengakuan tersebut dituangkan di dalam sebuah aturan hukum yang mengikat. Pada mulanya, politik rekognisi berangkat dari kajian filsafat, budaya dan politik identitas. Kajian filsafat yang menonjol mengenai rekognisi diajukan oleh Hegel (1977).²⁵

Pemikiran, kesadaran, dan spirit—menurut Hegel—merupakan kekuatan aktif, berada dalam sebuah perjuangan berkelanjutan. Di dalamnya, spirit bertarung melawan alienasi dirinya sendiri di dunia luar, mengakui eksistensi yang diobjektivasi sebagai bagian dari perwujudannya sendiri, dan berbalik kepada dirinya melalui negasi, serta mengakui sejarah sebagai proses realisasi gradual dirinya. Rakyat, institusi, ilmu, karya, moral, agama, dan semua aspek eksistensi sosial mengikuti trajektori yang sama. Perjuangan antar prinsip-prinsip, kekuatan-kekuatan, dan bentuk-bentuk kehidupan mendorong sejarah bergerak maju.

Dalam pandangan Hegel, secara normatif, kebebasan dan kehidupan etik berkaitan secara intrinsik. Dalam kehidupan etik, moralitas dan legalitas pada akhirnya kembali ke dalam kesatuan organis dan menjadi manifestasi institusional negara. Seluruh sistem normatif, dengan proteksi legal yang terbatas, merupakan stasiun yang parsial di atas jalan menuju rekonsiliasi puncak kehidupan etik. Subjektivitas juga terbentuk melalui perjuangan antar masyarakat demi pengakuan timbal balik (*reciprocal recognition*) atas identitas mereka.

Hegel tidak memandang kesadaran sebagai entitas soliter melawan dunia luar. Sebaliknya, diri terbentuk secara reflektif dan sangat tergantung terhadap tindakan orang lain. Perjuangan untuk rekognisi merupakan hubungan etik yang pokok dan bentuk utama intersubjektivitas praktis.²⁶

of Recognition: from Oppression to Ethical Liberal Modernity, London and New York: Continuum Books, hal. 37-45. Lihat juga Terry Lovell (ed.), 2007, (Mis)recognition, Social Inequality and Social Justice: Nancy Fraser and Pierre Bourdieu, London and New York: Routledge

²⁵ Filsafat Hegel mengenai rekognisi merupakan respon atas pandangan Kant yang memberikan ekspresi filosofis terhadap obsesi modern melalui pemisahan antara subjek dan objek, antara diri dan dunia. Pandangan Hegel mengatasi "celah" tersebut menghidupkan ulang kesatuan segala yang ada (the unity of existence). Jawaban Hegel atas pemisahan tersebut radikal: pembelahan telah terinternalisasi dan terhistorisasi, fragmentasi modernitas telah dipandang tak saja sebagai katastrofi namun juga sebagai sebuah tingkatan kebutuhan dalam pengembangan spirit atau nalar menuju kesadaran diri sendiri. Lihat Costas Douzinas, "Identity, Recognition, Rights or What Can Hegel Teach Us About Human Rights?" dalam *Journal of Law and Society*, Volume 29, Number 3, September 2002, hlm. 380.

²⁶ Hal ini berbeda sama sekali dengan Descartes dan Kant yang menempatkan kesadaran sebagai entitas soliter.

Filsafat Hegel (1977) mengenai rekognisi dilanjutkan oleh Axel Honneth dalam *Struggle for Recognition*, yang menegaskan urgensi pengakuan atas entitas sosio-kultural yang beragam. Fokus utama kajian Honneth tak semata di aras moralitas bahwa rekognisi merupakan prinsip etik dan normatif yang menempatkan eksistensi sebagai keniscayaan dalam intersubjektivitas, relasi antara diri dan dunia luar, antara subjek dengan objek, atau antara subjek dengan subjek yang lain. Honneth menekankan perjuangan untuk rekognisi, yang menempatkan tindakan legal sebagai sisi tak terpisahkan dari prinsip moral untuk memastikan bahwa seluruh eksistensi menjadi kesatuan organis yang mendapatkan proteksi, terutama institusi negara.

Tindakan negara untuk memberikan proteksi legal atas prinsip-prinsip rekognisi inilah yang dibaca Charles Taylor sebagai politik rekognisi. Taylor (1994) kemudian menegaskan konsep mengenai politik rekognisi dalam kajian multikulturalisme dan politik identitas.²⁷ Menurut Taylor, rekognisi (pengakuan) dalam dinamika gerakan politik memiliki paling tidak empat dimensi sebagai berikut:²⁸ *Pertama*, sebagai tuntutan yang dikedepankan dalam pelbagai aktivitas politik masa kini. Tidak adanya pengakuan atau adanya pengakuan hanya oleh salah satu pihak dapat memicu terjadinya bahaya yang mungkin berbentuk penekanan (represi), pemenjaraan seseorang secara salah dan penyimpangan atau pengurangan harkat seseorang sebagai manusia.

Kedua, sebagai tuntutan atau kebutuhan beberapa kelompok minoritas. Tesis yang mengemuka adalah, bahwa identitas seseorang sebagian dibentuk oleh ada atau tidaknya pengakuan, seringkali oleh kesalahan pengakuan tentang orang lain dan juga seseorang atau sekelompok orang dapat menderita kerusakan yang nyata, penyimpangan yang nyata atau gambaran yang hina tentang diri mereka sendiri.

Ketiga, sebagai tuntutan atau kebutuhan pada beberapa bentuk gerakan feminisme. Bagi kaum feminis, perempuan dalam masyarakat dipaksa secara hegemonik untuk mengadopsi suatu gambaran yang merendahkan diri mereka sendiri. Mereka dicekoki dengan gambaran inferioritas mereka sendiri. Hal inilah yang kemudian mendorong

Ibid. hlm. 383.

²⁷ Taylor, Charles, 1994, "The Politics of Recognition", dalam Goldberg, D.T. (ed.), *Multiculturalism: A Critical Reader*, Oxford: Blackwell, hlm. 76.

²⁸ *Ibid.* hlm. 81.

mereka untuk melakukan gerakan agar mendapatkan pengakuan yang sederajat (*gender equality*) dengan kaum laki-laki di tengah-tengah komunitasnya.

Keempat, sebagai tuntutan dalam apa yang sekarang dikenal sebagai politik multikulturalisme. Keberagaman budaya, suku, dan aspek-aspek partikularis masyarakat lainnya merupakan realitas natural atau kenyataan alamiah. Namun, sejarah peradaban umat manusia menunjukkan betapa keberagaman yang bersendikan perbedaan tersebut justru melahirkan permusuhan berkepanjangan.

Politik rekognisi diniscayakan sebagai sendi utama dalam kebijakan publik untuk menyelesaikan konflik etnik yang terjadi, terutama pada tahap formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan atau bahkan untuk kasus penyelesaian konflik Sampit, proses rekognisi dapat pula telah berjalan pada tahap sebelum tahap formulasi kebijakan dilaksanakan. Dengan demikian waktu untuk para pihak yang berkonflik bermusyawarah, bernegosiasi, dan membuat kesepakatan-kesepakatan merupakan kebutuhan.

Pemahaman akan waktu terjadinya proses rekognisi ini telah berjalan menjadi sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan analisis serta pengambilan kesimpulan. Ketika ternyata proses rekognisi telah berjalan pada tahap dialog antar pihak yang berkonflik sehingga telah dicapai konsensus-konsensus perdamaian maka pada hakekatnya proses perdamaian telah selesai. Perdamaian tercapai ketika antar pihak yang berkonflik telah sampai kepada konsensus untuk berdamai. Berarti kebijakan publik atau Perda yang dibuat atau dihasilkan sekedar menjadi stempel / pengesahan atau formalisasi dari konsensus yang telah dicapai oleh antar pihak masyarakat yang berkonflik tersebut.

Konstruksi politik rekognisi dalam kebijakan penanggulangan konflik etnik ternyata tidak hanya dihipotesiskan tetapi telah terbukti secara nyata dapat menjadi *tools* untuk penyelesaian konflik dan preservasi suasana damai (*peace building*). Politik rekognisi tidak semata-mata diharapkan menjadi *living values* dan norma moral, akan tetapi secara legal formal diejawantahkan dalam instrumen hukum sebagai produk politik yang memiliki sifat determinan, mengikat, dan memaksa.

Dalam resolusi konflik multikultural ini, Sampit Kotawaringin Timur dapat dicatat menjadi contoh kasus sukses. Konflik Sampit ter-

catat sebagai tragedi kemanusiaan yang sangat sadis, sekarang dapat selesai relatif tuntas. Pemda Kotim menuntaskan kasus Sampit dengan Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik. Perda ini kiranya termasuk dalam kategori ini, dimana memberikan cara penyelesaian yang dapat menghasilkan situasi menang-menang yang menunjukkan proses berjalannya atau terjadinya prinsip-prinsip rekognisi antar pihak yang berkonflik. Perda dalam perspektif lebih luas inilah salah satu bentuk kebijakan publik yang dituangkan dalam peraturan perundangan yang secara khusus menampung dan mengakui adanya keragaman sekaligus mengandung niat dari pihak-pihak yang mayoritas untuk mengakui (merekognisi) pihak-pihak pendatang yang minoritas. Hal ini antara lain tercermin dalam Pasal 2 yang menyatakan “Pengembalian penduduk berdasarkan kesetaraan sebagai anak bangsa, untuk hidup berdampingan secara damai di Kalimantan Tengah”.²⁹

²⁹ Perda Kabupaten Kotawaringin Timur No 5 tahun 2004 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik.

PEMBIASAAN SIKAP TOLERANSI MELALUI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Taat Wulandari

Akademisi FIS UNY, Saat ini sedang menyelesaikan studi S3 di Pascasarjana UNY

A. Abstrak

Kondisi keberagaman masyarakat dan budaya, secara positif menggambarkan kekayaan potensi sebuah masyarakat yang bertipe pluralis, namun secara negatif orang merasa tidak nyaman karena tidak saling mengenal budaya orang lain. Terjadinya tidak saling mengenal identitas budaya orang lain, bisa mendorong meningkatnya prasangka terhadap orang lain, berupa sikap antipati yang didasarkan pada kesalahan generalisasi yang diekspresikan sebagai perasaan. Pembiasaan sikap toleransi menjadi suatu langkah yang segera harus diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan. Melalui pembelajaran multikultural, subyek belajar dapat mencapai kesuksesan dalam mengurangi prasangka dan diskriminasi. Dengan kata lain, variabel sekolah terbentuk dimana besar kelompok rasial

dan etnis yang memiliki pengalaman dan hak yang sama dalam proses pendidikan. Pelajar diharapkan mampu mengembangkan keterampilannya dalam memutuskan sesuatu secara bijak. Mereka mengembangkan visi sosial yang lebih baik dan memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan serta mengkonstruksinya dengan sistematis dan empati. Hal yang seharusnya diketahui oleh guru adalah bagaimana berperilaku terhadap para pelajar yang bermacam-macam budayanya di dalam kelas. Mereka mengetahui perbedaan-perbedaan nilai-nilai dan kultur dan bentuk-bentuk perilaku yang beraneka ragam.

Kata kunci: toleransi, pendidikan multikultural.

B. Pendahuluan

Salah satu fungsi manusia dalam perspektif sosiologis adalah bagaimana manusia itu mampu membangun makna dunianya dengan melalui mekanisme sosialisasi. Proses sosialisasi itu sebenarnya merupakan proses dialektika individu *versus* individu lainnya dalam membuat sebuah kesepakatan sosial. Kesepakatan sosial itulah pada akhirnya bermuara pada terbentuknya sebuah komunitas masyarakat yang dibangun berdasarkan nilai-nilai kebersamaan. Sehingga kemajemukan sebuah masyarakat sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari proses perkembangan individu menuju sebuah kedewasaan proses kehidupan.

Adalah sosiolog Pierre L. Van Berghe (Nasikun, 1995: 33) yang memperkenalkan sebuah ciri yang melandasi sebuah masyarakat itu disebut masyarakat majemuk. Menurutnya masyarakat majemuk ditandai oleh beberapa karakteristik sebagai berikut, yakni; (1) Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub-kebudayaan yang berbeda satu sama lain; (2) memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer; (3) kurang mengembangkan konsensus diantara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar; (4) secara relatif sering kali mengalami konflik-konflik diantara kelompok yang satu dengan yang lain; (5) secara relatif integrasi sosial tumbuh diatas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi dan; (6) adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain.

Asumsi karakteristik yang dikembangkan oleh Berghe di atas menyiratkan bahwa secara primordial masyarakat majemuk identik dengan munculnya sebuah konflik. Sebuah upaya sosial juga yang dapat dipahami sebagai mekanisme alokasi dan posisional sebuah kelompok atau individu atas lainnya. Asumsi sederhana ini jika dikembangkan terus dalam konteks psikologi sosial akan melahirkan apa yang dinamakan sebuah *attitude*. W.A. Gerungan (1991: 149) memberikan arti *attitude* sebagai sikap atau pandangan untuk bertindak sesuai dengan sikap dan kesediaan beraksi terhadap suatu hal. *Attitude* senantiasa terarahkan terhadap suatu hal atau suatu objek.

Dalam konteks interaksi dan keinginan untuk mengembangkan eksistensi diri ataupun kelompok, manusia biasanya cenderung untuk menempatkan dirinya sebagai suatu entitas yang menampilkan nilai-nilai dominasi terhadap yang lain sebagai sebuah upaya mekanisme sub-ordinasi entitas diluar dirinya. Mekanisme ini sering muncul bersamaan ketika nilai-nilai kesepakatan sosial di atas tidak menemukan format yang ideal yang bisa dijadikan referensi nilai dan etika dalam bermasyarakat. Dalam konteks yang lebih bernuansakan kompetisi sosial biasanya hal ini dibarengi dengan mengembangkan sikap-sikap *social prejudice* sebagai upaya mencari justifikasi terhadap perilaku yang muncul dan teraktualisasikan.

Prasangka sosial merupakan sikap perasaan orang-orang terhadap kelompok manusia tertentu, golongan ras atau kebudayaan yang berlainan dengan kelompok yang melakukan prasangka tersebut (W.A. Gerungan, 1991: 167). Prasangka sosial pada awalnya bermula dari hanya sekedar sikap-sikap perasaan negatif. lambat laun sikap tersebut menyatakan dirinya dalam tindakan-tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap orang atau kelompok diluar dirinya, tanpa ada sebuah alasan yang objektif yang bisa dikenakan secara fair pada kelompok tersebut.

Berangkat dari perspektif sosiologis dan psikologis di atas, nampaknya nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam sebuah komunitas yang multikultural dan plural adalah sikap penekanan pada pemunculan sikap saling menghargai dalam konteks kesetaraan dan kesederajatan posisi dalam melakukan proses sosialisasi dan komunikasi. Dalam konteks yang lebih aplikatif rasional, relasi yang harus dikembangkan dalam konsep masyarakat majemuk adalah dimunculkannya perilaku-perilaku

yang *civilized* yang hal itu menjadi prasarat utama munculnya mekanisme yang bisa mengelola ketidaksamaan dan perbedaan yang muncul dalam masyarakat majemuk. Sebuah masyarakat yang demokratis tentunya, dimana nilai esensial yang harus masuk dalam ranah rekonstruksi demokratis bertumpu pada tiga fondasi: kebebasan, tanggung jawab dan berdasarkan pada realitas (Zamroni, 2007: 124). Sehingga proses itu justru pada akhirnya akan melahirkan keseimbangan baru. Sebuah nilai baru yang akan dapat meningkatkan kehidupan kearah yang lebih enak, tenang, tentram dan beradab (Zamroni, 2007: 149).

Konkritnya dalam perspektif yang lebih spesifik, realitas sosial di atas haruslah dikembangkan dalam bingkai pendidikan sebagai mekanisme pendewasaan sikap dan perilaku manusia dalam bingkai dan warna pendidikan yang lebih bersifat manusiawi. Dengan kata lain pendidikan disini diartikan sebagai proses humanisasi, dalam arti mengolah potensi-potensi yang dimiliki seseorang untuk menjadi lebih beradab. Sehingga pendidikan lantas bukan hanya soal transfer ketrampilan teknis, melainkan soal pembentukan kreativitas, soal estetika-eksistensi (Bambang Sugiharto, 2008: 380).

Berangkat dari paparan singkat di atas itulah, makalah ini mencoba mengkaji lebih jauh tentang bagaimana mengembangkan model pendidikan yang memungkinkan bisa menampung ide-ide pluralisme sebagai sebuah keharusan dan fakta sejarah dengan mencoba melihat mekanisme-mekanisme yang nanti akan bisa dimunculkan nilai-nilai primordial dari sebuah masyarakat atau kelompok yang tergambarkan dalam idiom kearifan lokal dalam konteks bagaimana pendidikan itu memiliki korelasi yang positif seiring perkembangan manusia dan masyarakat itu sendiri.

C. Kajian Teoritis

1. Makna Toleransi

Realitas masyarakat kita yang terdiri dari sekian banyak kelompok, komunitas, suku dan identitas-identitas sosial lainnya mencerminkan betapa keinginan untuk mengekspresikan budaya-budaya dan sikap sosial dengan perspektif yang monolitik sifatnya adalah sebuah kemustahilan sejarah sendiri. Identitas-identitas di atas dalam masyarakat biasanya akan mengalami proses pengembangbiakan ataupun juga sebaliknya yakni penyusutan bahkan kepunahan.

Kondisi tersebut akan sangat tergantung dari vitalitas nilai-nilai budaya yang bersangkutan dalam konteks bagaimana memberikan respons terhadap perubahan dan perkembangan yang sedang berlangsung. Baik itu dalam aras modernisasi maupun respons terhadap globalisasi yang sedang berjalan. Kongkritnya bagaimana manusia memberikan respons dalam bentuk tindakan adalah kunci utama untuk memahami realitas di atas. Teori tindakan manusia dalam perspektif Max Weber barangkali bisa digunakan untuk melihat perspektif ini lebih rasional.

Menurut Max Weber (Tom Campbell, 1994: 208-209), ada empat jenis tindakan manusia dilihat dari karakteristiknya. *Pertama*, tingkah laku rasional-tujuan. Penghitungan secara matang, tepat dan terukur menjadi ciri utama karakteristik yang pertama ini. *Kedua*, tingkah laku rasional-nilai. Orientasi pada pencapaian nilai-nilai yang menjadi tujuan akhir menjadi lebih penting dari hanya sekedar melihat bagaimana mekanisme tata cara untuk mencapai tujuan, adalah menjadi ciri dari model tindakan yang kedua ini. *Ketiga*, tindakan yang bersifat efektif atau emosional. Tindakan disini muncul semata-mata hanya karena emosional dan karenanya tidak rasional. *Keempat*, tingkah laku yang bersifat tradisional. Prinsip utama model keempat ini adalah tingkah laku yang dimunculkan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah mapan dan menghormati otoritas yang ada.

Ekspresi-ekspresi tindakan manusia di atas dalam kehidupan sosial bisa mengejawantah dalam bentuk sebuah ideologi, keyakinan, agama, ataupun nilai-nilai kehidupan lainnya yang diyakini kebenarannya. Yang sering menjadi permasalahan pada tataran berikutnya adalah ketika ekspresi-ekspresi tindakan manusia tersebut berubah menjadi sebuah proses institusionalisasi. Proses pembakuan dan pelembagaan dalam kehidupan. Lebih-lebih dalam domain agama. Proses semacam ini memang lebih berkesan manusiawi karena manusia butuh pemaknaan yang kurang lebih, jelas bagi kehidupannya. Pembakuan memang menjamin kejelasan itu, selain mempermudah proses pewarisan kepada generasi-generasi berikutnya.

Permasalahan berikutnya menjadi sebuah paradoksal adalah manakala proses pembakuan ini, dan memang ini sering in-

herent ada dalam proses pembakuan itu, yakni kecenderungan memutlakkan sesuatu karena kecenderungan pada kemapanan. Institusionalisasi memang berkait erat dengan kemapanan itu. Tetapi itu justru bisa membuat manusia menjadi mandek dan statis (Al Andang, 1998: 98). Manusia sudah merasa puas dengan apa yang sudah di dapat. Manusia dalam konteks ini sudah menduga sudah pada posisi puncaknya dan mengira tugas manusia untuk terus mencari sebuah kebenaran sudah berakhir. Sehingga seolah bahasa garis demarkasi kebenaran menjadi sedemikian jelas dan tegas: kelompok kita, kelompok mereka. Itulah barangkali gambaran yang pas untuk mengekspresikan fenomena tersebut.

Itulah makanya makna toleransi menjadi suatu yang absurd dalam konteks ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena toleransi mengisyaratkan adanya beragam alternatif, warna, dan pluralitas kebenaran. Toleransi dalam hal ini berarti *endurance* atau ketabahan, yang bukan hanya menunjuk pada sikap membiarkan orang lain hidup di sekitar kita tanpa larangan dan penganiayaan. Toleransi dalam arti ini khususnya dibidang keagamaan menunjuk pada sikap kerelaan dan kesediaan untuk memasuki dan memberlakukan agama lain dengan penuh hormat dalam suatu dialog dengan orang lain secara terus-menerus tanpa perlu dipengaruhi oleh pendapat lain dalam dialog tersebut (Victor I. Tanja, 1998: 13). Sehingga dalam konteks ini tentunya yang diharapkan adalah, meminjam istilahnya Kuntowijoyo (Th Sumartana dkk, 2001: 279), bukan hanya sekedar mampu memunculkan konsep toleransi negatif yang semata-mata berfungsi hanya untuk menghilangkan sikap fanatisme semata dalam konteks beragama dan berkeyakinan di tengah-tengah pluralisme fenomena dan aktualisasi keagamaan.

Barangkali fakta tentang kualitas pendidikan agama kita patut menjadi renungan kita bersama. Di mana menurut Benny Susetyo (2005: 66) salah satu penyebab kegagalan pendidikan agama dalam membentuk moral adalah, pendidikan agama hanya mementingkan sikap hidup yang sempit, mengunggulkan cara beragamanya sendiri dan meniadakan toleransi. Kepada anak didik tidak dikembangkan sikap hidup yang memuat moralitas toleransi. Mereka, baik secara langsung atau tidak, justru “dididik” untuk menyalahkan lainnya.

2. Pendidikan Multikultural

Secara sederhana pendidikan multikultural menurut Musa Asy'arie adalah proses penanaman cara hidup menghormati, toleran, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat plural (*Kompas*, 3/9/2004). Konsep pendidikan multikultural menjadi sesuatu yang baru dalam konsep sejarah kependidikan yang ada di Indonesia. Sejarah awal kelahiran pendidikan multikultural dapatlah kita tengok dalam lembaran sejarah pendidikan di negara-negara Barat. Australia, Amerika, dan juga Kanada, mungkin menjadi *prototype* yang pas untuk melihat awal gerakan dari pendidikan multikulturalisme ini.

Yang menarik dalam posisi ini adalah, konsep kelahiran akan gagasan dan ide pendidikan multikultural di negara-negara maju tersebut nampaknya tidak memiliki nilai korelasi yang sejalan dan seide yang kuat akan konteks yang melatarbelakangi kemunculannya, bila di komparasikan dengan realitas yang ada di Indonesia. Di negara-negara dimana ide pendidikan multikultural ini lahir, nilai-nilai diskriminasi, dominasi atas nama suatu kelompok, ras, ataupun kategori sosial lainnya sangatlah mencolok. Sehingga ada kecenderungan untuk memunculkan sikap superioritas atas nilai dan budaya kelompok lainnya.

Padaحال sebagaimana yang di ungkapkan oleh Syafig Mugni (Choirul Mahfudz, 2008: xiii), prinsip pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural senantiasa mampu menciptakan struktur dan proses di mana setiap budaya bisa melakukan ekspresi. Untuk itulah menurutnya pendidikan multikultural berdiri pada dua pilar pokok; yakni proses dialog dan menyuburkan sikap toleransi.

Secara lebih elaboratif, Ekstrand (Maulanusantara, 30-4-2008) mengelaborasi pemikiran tentang pendidikan multikultural yang terespresikan ke dalam tiga tujuan pendidikan; yakni tujuan *attitudinal*, tujuan kognitif, dan tujuan instruksional. Pada tingkat *attitudinal*, pendidikan multikultural memiliki fungsi untuk menyemaikan dan mengembangkan sensitivitas kultural, toleransi kultural, penghormatan terhadap identitas kultural, pengembangan sikap budaya responsif dan keahlian untuk melakukan penolakan dan resolusi konflik.

Pada tingkat kognitif, pendidikan multikultural memiliki tujuan bagi pencapaian kemampuan akademik, pengembangan pengetahuan tentang kemajemukan budaya, kompetensi untuk melakukan analisis dan interpretasi perilaku kultural, serta kemampuan untuk mengembangkan kesadaran kritis tentang kebudayaan sendiri. Sedang pada tingkat instruksional, pendidikan multikultural memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan untuk melakukan koreksi atas distorsi-distorsi, peniadaan-peniadaan, dan misinformasi tentang kelompok dan etnik yang dimuat dalam berbagai buku dan media pembelajaran.

Dengan kata lain, konsepsi tentang pendidikan multikultural ini haruslah diletakkan pada persepsi akan kesetaraan dan kesederajatan dalam bingkai kewarganegaraan dan demokrasi yang beradab. Sehingga bergerak dari konsep inilah konsep pendidikan multikultural kelak yang seharusnya untuk dikembangkan di Indonesia. Hal ini akan membawa sebuah konsekuensi yang cukup radikal dalam konteks tata cara berpikir dan bertindak yang selama ini selalu dalam konteks mayoritas-minoritas, dominasi dan terdominasi serta pola berpikir lainnya yang cenderung diletakkan dalam konteks yang saling bertentangan.

Pada sisi lain, pendidikan multikultural seyogianya diletakkan pada konteks makna dialogis antara keinginan untuk memperluas dan menggerakkan secara masif konten-konten globalisasi dengan segala nilai dan dampak yang sedemikian besar dan sangat mempengaruhi peri kehidupan sebuah bangsa dengan segala identitas nilai yang melakat. Sementara secara bersamaan bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dari sebuah identitas bangsa bisa diterjemahkan pada proses akulturasi yang melahirkan hasil integrasi nilai dengan kearifan lokal yang ada. Sulit nampaknya. Namun itulah satu-satunya jalan agar pendidikan multikultural dalam proses sebuah ide maupun implementasinya bisa memunculkan sebuah karakter yang kuat akan sebuah eksistensi diri budaya suatu masyarakat. Sehingga yang terjadi akhirnya bukanlah pemindahan tempat dan bingkai nilai-nilai negatif dalam konteks pendidikan multikultural ke tempat dan budaya baru, dimana nilai pendidikan multikultural itu akan diimplementasikan. Ini penting untuk di catat, mengingat

daya ekspansionisnya globalisasi sedemikian dahsyat dan mencengkeram dalam semua dimensi kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural, maka untuk membentuk negara Indonesia yang kokoh perlu mengembangkan jenis pendidikan yang cocok untuk bangsa yang multikultural. Jenis pendidikan yang cocok untuk bangsa yang multikultur ini adalah pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural paling tidak menyangkut tiga hal yaitu (1) ide dan kesadaran akan nilai penting keragaman budaya, (2) gerakan pembaharuan pendidikan, dan (3) proses pendidikan (Sutarno, 2008: 1-21). Sehingga pendidikan multikultural dapat menjadi elemen yang kuat dalam kurikulum Indonesia untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan hidup.

Masyarakat Indonesia terdiri dari masyarakat multikultur yang mencakup berbagai macam perspektif budaya yang berbeda. Jadi sangatlah relevan bagi sekolah di Indonesia untuk menerapkan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural dapat melatih siswa untuk menghormati dan toleransi terhadap semua kebudayaan.

3. Kearifan Lokal

Membicarakan wacana seputar *local wisdoms* atau kearifan lokal biasanya selalu disandingkan dengan wacana perubahan, modernisasi, dan relevansinya. Hal ini bisa dimaklumi sebab wacana di seputar kearifan lokal pada prinsipnya berangkat dari asumsi yang mendasar bahwa, nilai-nilai asli, ekspresi-ekspresi kebudayaan asli dalam konteks geografis dan kultural dituntut untuk mampu mengekspresikan dirinya di tengah-tengah perubahan. Pada sisi lain ekspresi dari kearifan lokal tersebut juga dituntut untuk mampu merespons perubahan-perubahan nilai dan masyarakat jika kearifan lokal itu tidak ingin hilang dari peredaran nilai sebuah masyarakat. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan-kekayaan budaya lokal seperti tradisi, *petatah-petitih*, dan semboyan hidup (Pikiran Rakyat, 4 Oktober 2004).

Dalam bahasa Wales (Soerjanto P, 1993: 120-121), kearifan lokal ini dapat dilihat dari dua perspektif yang saling bertolak belakang.

Yakni *extreme acculturation* dan *a less extreme acculturation*. *Extreme acculturation* memperlihatkan bentuk-bentuk tiruan suatu budaya yang tanpa adanya proses evolusi budaya dan akhirnya memusnahkan bentuk-bentuk budaya tradisional. Sedang *less extreme acculturation* adalah proses akulturasi yang masih menyisakan dan memperlihatkan *local genius* adanya. Yakni adanya unsur-unsur atau ciri-ciri tradisional yang mampu bertahan dan bahkan memiliki kemampuan untuk mengakomodasikan unsur-unsur budaya dari luar serta mengintegrasikannya dalam kebudayaan asli.

Pada konteks yang kedua ini nilai-nilai kearifan lokal mempunyai kemampuan untuk memegang pengendalian serta memberikan arah perkembangan kebudayaan. Dengan demikian tepatlah dikatakan bahwa kebudayaan merupakan manifestasi kepribadian suatu masyarakat. Artinya identitas masyarakat tercermin dalam orientasi yang menunjukkan pandangan hidup serta sistem nilainya, dalam persepsi untuk melihat dan menanggapi dunia luarnya, dalam pola serta sikap hidup yang diwujudkan dalam tingkah laku sehari-hari, serta dalam gaya hidup yang mewarnai peri kehidupannya.

Sebagai masyarakat yang beradab tentu kita tahu bahwa kita memiliki kebudayaan, terlepas dari perbedaan istilah yang digunakan untuk menyebutnya. Mutiara-mutiara budaya itu berserakan dan tersebar luas dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Dan terutama ditemukan dalam kosakata bahasa daerah atau bahasa ibu. Setiap kelompok masyarakat memiliki cara yang khas dalam mengungkapkan kandungan kearifan lokalnya, yang mencerminkan cara pandangnya tentang dunia.

Kedudukan dan peran *local genius* ini sangat signifikan dalam konteks sebuah eksistensi kebudayaan suatu masyarakat atau kelompok. Hal ini disebabkan karena merupakan kekuatan yang mampu bertahan terhadap unsur-unsur yang datang dari luar dan yang mampu pula berkembang untuk masa-masa yang akan datang. Hilangnya atau pudarnya *local genius*, berarti pula mudarnya kepribadian suatu masyarakat, sedang kuatnya *local genius* untuk bertahan dan berkembang menunjukkan pula kepribadian masyarakat tersebut.

Dalam posisi sentral lainnya, kita juga menyadari bahwa hubungan dan pergaulan dalam konteks globalisasi adalah sebuah

keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Proses itu biasanya masuk dalam ranah akulturasi yang hal ini bisa memungkinkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada akan hilang dan musnah. Sehingga nilai dominasi dari budaya asing akan menggantikan kedudukan dari kearifan lokal yang ada. Namun sebaliknya, jika yang terjadi adalah akulturasi yang dibarengi dengan proses integrasi, bisa jadi nilai-nilai luar yang masuk itu hanya akan menjadi nilai komplementer yang justru akan semakin memperkaya khasanah nilai kearifan lokal tersebut. Yang menjadi persoalan dikemudian hari adalah, apakah yang akan terjadi akulturasi menuju pada munculnya dominasi nilai baru atautkah akulturasi yang menghasilkan integrasi akan sangat ditentukan oleh sikap dan pendirian masing-masing masyarakat serta persepsi mereka terhadap kemajuan dan perubahan itu sendiri.

D. Diskusi Masalah

Dalam diskusi masalah ini akan kami angkat kasus kekerasan atas nama keyakinan atau agama. Yang dalam hipotesis awal kami kekerasan ini disebabkan karena kurang berkembangnya sikap toleransi yang seharusnya nilai itu menjadi rujukan utama dalam sebuah proses bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Kasus ini adalah kasus yang terjadi di daerah Parung, Bogor, pada tahun 2010. Yakni terjadinya pengrusakan, intimidasi, pelecehan, dan penghancuran fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh kelompok jamaah Ahmadiyah.

Kasus ini bermula dari munculnya fatwa MUI tentang sesatnya aliran ahmadiyah sebagai bagian yang tidak diakui keislamannya. Fatwa MUI nampaknya bagaikan berfungsi sebagai penyubur dan pemicu yang sangat signifikan semakin keras dan intensnya kelompok-kelompok penentang eksistensi Ahmadiyah yang ada di Indonesia, khususnya Parung, Bogor. Padahal realitas sejarah Ahmadiyah sudah ada di Indonesia sejak tahun 1923 sebelum NU lahir dan Muhammadiyah masih dalam posisi sebagai bayi organisasi keagamaan yang baru lahir.

Kekerasan yang terjadi di atas menurut kami di sebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, kurangnya pemahaman agama sebagaimana kelompok yang melakukan kekerasan itu akan eksistensi kebebasan agama sebagai hak yang paling mendasar dari hidup manusia.

Terlepas dari benar tidaknya keyakinan yang dimiliki kelompok ahmadiyah, seharusnya yang dikembangkan adalah mencari titik-titik persinggungan yang positif dalam kerangka membangun dan membesarkan umat. Sehingga nilai-nilai pada komitmen kebersamaan akan problema-problema kemanusiaan akan jauh memiliki nilai yang transendental sifatnya sebagai titik labuh akan komitmen aksi yang nyata dalam mengaktualisasikan dan mengekspresikan keberagaman.

Kedua, Pengaruh dari globalisasi yang membanjiri Indonesia dengan beragam nilai-nilai, informasi, dan keyakinan, yang bersifat transnasional yang ujung akhir dari tujuan itu adalah *pan-islamisme* sebagai sebuah ideologi besarnya. Padahal kita sudah komitmen dan mempercayai bahwa negara Indonesia adalah berdasarkan Pancasila dan negara bukan berdasarkan agama (Islam). Artinya pemaksaan kehendak yang mengatasnamakan polisi dunia akan eksistensi sebuah agama yang benar dan tidak haruslah dilihat lebih obyektif lagi, sebab tidak menutup kemungkinan ideologi-ideologi di atas, dalam konteks kemunculannya, nuansa politis itu sangat kental sekali.

Ketiga, dua kelompok yang ada kurang bisa mengembangkan sikap toleransi yang berimbang. Artinya idiom agama memang sebuah idiom yang sangat sensitif sifatnya. Sehingga penggunaan yang tidak sejalan dan atau yang disebabkan karena miskomunikasi akan sangat rentan memicu munculnya konflik yang berbau kekerasan.

Kekerasan ataupun konflik lainnya yang juga bisa dijadikan *entry point* untuk melihat relevansinya. Aplikasi nilai-nilai pembiasaan yang berdasarkan pengembangan nilai-nilai toleransi yang tercerahkan oleh nilai kearifan lokal adalah kekerasan yang dilatar belakangi oleh perasaan sukuisme seperti kejadian suku Dayak *versus* Madura, ataupun juga kekerasan yang ada di Ambon dan juga Poso.

E. Model Pembiasaan Sikap Toleransi dalam Konteks Bagian dari Pendidikan Multikultural dalam Bingkai Kearifan Lokal

Toleransi sebenarnya dalam sejarah peradaban masyarakat, sebelum Indonesia berdiri dan juga sampai sekarang, sudah menjadi sebuah nilai yang begitu menyatu dan mendarah daging dalam nafas kehidupan masyarakat. Hal itu bisa dibuktikan dengan banyaknya cerita-cerita sejarah dan bukti artefak-artefak yang merupakan indikasi dari sikap

toleransi sudah menjadi bagian hidup masyarakat saat itu. Peninggalan-peninggalan sejarah tentang sikap akomodasinya masyarakat terhadap keyakinan yang beragam, tempat-tempat ibadah yang begitu banyak dan saling berdampingan adalah bukti yang kongkrit akan hal itu.

James A. Banks (2009) dalam bukunya *The Routledge International Companion to Multicultural Education* mengatakan ada lima dimensi yang harus dikuasai oleh praktisi pendidikan dalam rangka lebih *applicable*-nya konsep pendidikan multikultural ini dalam konteks kependidikan. Lima dimensi itu adalah: integrasi muatan, proses pembangunan pengetahuan, pengurangan prasangka, keadilan pedagogi dan seperangkat pemberdayaan budaya sekolah, dan tatanan sosial.

Kelima dimensi itu harus mampu tersosialisasikan dan terdesiminasikan sedemikian rupa dalam praksis dan pengalaman pembelajaran yang ada di lembaga pendidikan ataupun lembaga keluarga sebagai bagian integral dari konsep pendidikan yang berkesinambungan. Secara lebih riil nilai-nilai pendidikan multikultural yang terkait dengan sikap toleransi sebagai *entry point*-nya dalam wilayah nilai kearifan lokal dapatlah didesiminasikan sebagai berikut:

Pendalaman makna dan konseptualisasi dan juga aplikasi makna toleransi sejalan dengan perkembangan masyarakat yang ada.

Mengadakan penelitian ataupun studi perbandingan, masyarakat-masyarakat dengan segala nilai positif dan negatifnya yang ada tentang peran dan fungsinya nilai-nilai toleransi yang ada dalam masyarakat.

Memaksimalkan kontak person, budaya, masyarakat sehingga melahirkan sikap mau melihat, merasakan, menghargai perbedaan yang semua itu adalah implementasi dari nilai-nilai toleransi sebagai suatu bagian kekayaan dari nilai-nilai kearifan lokal yang harus terus dikembangkan.

Dalam kurikulum pendidikan multikultural maupun proses aplikatifnya dalam proses pembelajaran di kelas, hendaknya nilai toleransi bisa ditumbuh kembangkan lewat media-media, pamflet-pamflet, dan media lainnya yang semakin memperkuat akan pentingnya sikap toleransi dalam sebuah kehidupan bermasyarakat.

Lima dimensi yang diperkenalkan oleh Banks dalam konteks pendidikan multikultural, perlulah untuk diformulasikan dan diberdayakan dalam proses kontak antar person dan antar budaya. Lebih-lebih dimensi pengurangan akan prasangka sosial, proses mem-

bangun pengetahuan dan keadilan pedagogi. Tiga dimensi dari lima dimensi yang ada inilah, nampaknya menjadi kunci pokok bagi pengembangan model-model pembiasaan dan konstruksi nilai-nilai positif yang dibiasakan dalam formulasi pendidikan dan pembelajaran secara lebih teknis dan aplikatif.

F. Penutup

Pembiasaan sikap toleransi melalui pendidikan multikultural yang berbasis kearifan lokal, adalah sebuah upaya menggali nilai-nilai primordial atau asli yang ada dan tumbuh kembang di tengah-tengah masyarakat. Pendidikan multikultural nampaknya merupakan jawaban terhadap problematika yang mungkin dihasilkan oleh sebuah masyarakat yang majemuk. Disadari ataupun tidak, bersama-sama dengan berlaksa manusia di planet ini sedang berada dalam gerbong kereta waktu yang berjalan semakin cepat. Perubahan sangat perlu namun jangan sampai atas nama perubahan itu sendiri, kita menjadi subyek yang buta bagi wujud perubahan yang memudahkan jati diri kita.

Kiranya layak untuk direnungkan bersama adalah mencari format yang adaptif bagi pelestarian kearifan lokal yang dimiliki sebagai kekayaan budaya. Dalam arti, kearifan lokal bersama-sama dengan nilai-nilai keagamaan yang danut, harus bisa turut melandasi perubahan yang positif itu sendiri. Dengan kata lain, kearifan lokal turut menjadi landasan perubahan global. Di situlah fungsi kearifan lokal sebagai penyaring bagi nilai-nilai yang berasal dari luar. Dan kearifan lokal harus bisa digunakan untuk meredam gejala-gejala yang bersifat intern, seperti konflik masyarakat yang sesuku atau antarsuku.

Pluralitas dan multikultural yang ada akan menjadi sebuah nilai negatif, atau sebaliknya positif, akan sangat tergantung pada bagaimana memaksimalkan peran dan fungsi nilai-nilai perbedaan itu. Dalam bingkai memberikan kesadaran melalui konsep dasar pendidikan multikultural yakni adanya kesamaan, kesederajatan akan posisi dengan menghilangkan semua *previledge* yang melatar belakanginya.

Nilai kearifan lokal akan sangat bermakna bagi sebuah identitas budaya dan kesadaran perilaku masyarakat ataupun sebaliknya sangat bergantung pada bagaimana masyarakat itu melakukan proses dialog dan respons terhadap budaya dan nilai dari luar. Sehingga apakah yang akan terjadi akulturasi yang berujung pada integrasi ataukah

akulturasi yang berujung pada dominasi akan juga sangat ditentukan oleh ketahanan masyarakat dengan segala daya dukung dan kohesifitas, intimitas dari masyarakat itu sendiri ketika mengadakan proses barter nilai atau budaya.

G. Daftar Pustaka

- Al Andang. 1998. *Agama yang Berpijak dan Berpihak*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiharto, Bambang. 2008. *Humanisme dan Humaniora*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Susetyo, Benny. 2005. *Politik Pendidikan Penguasa*. Yogyakarta: LKiS.
- Mahfud, Choirul. 2008. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasikun. 1995. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Poespowardojo, Soerjanto. 1993. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Gramedia.
- Sutarno. 2008. *Pendidikan Multikultural*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Th. Sumartana, dkk. 2001. *Pluralisme Konflik dan PA di Indonesia*. Interfidei.
- Campbell, Tom. 1994. *Tujuh Teori Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.
- Victor I Tanja. 1998. *Pluralisme Agama dan Problem Sosial*. Jakarta: Cides.
- W. A. Gerungan. 1991. *Psikologi Sosial*. Bandung: Eresco.
- Zamroni. 2007. *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi*. Jakarta: PSAP.

MEMPERKUAT INDONESIA BARU MELALUI PENDIDIKAN POLITIK

Nasiwan¹

Dosen Fakultas Ilmu Sosial, UNY, email: nasiwan@uny.ac.id

A. Abstrak

Memasuki paruh dekade keenam usia kemerdekaan bangsa Indonesia hingga di penghujung tahun 2012, bangsa ini belum berhasil menuntaskan formulasi tentang satu sistem pendidikan nasional yang disepakati secara permanen oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Indikator tersebut dapat dilihat dari belum adanya konsensus yang permanen tentang formulasi sistem pendidikan nasional yang secara fenomenal dapat dibaca dari munculnya sikap pro dan kontra yang sangat luas menjelang disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Persoalan tersebut jika dilacak lebih jauh akan sampai pada akar persoalan, yaitu belum stabilnya bangunan sistem politik nasional (*floating state*) yang menjadi payung bagi sistem pendidikan nasional.

¹ Nasiwan adalah staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE), Universitas Negeri Yogyakarta

Dilihat dari perspektif politik, rumusan tentang konsepsi sistem pendidikan nasional dan *include* di dalamnya Pendidikan Kewarganegaraan adalah merupakan produk dari kebijakan politik dari suatu sistem politik. Dalam konteks keterkaitan antara sistem pendidikan nasional dengan sistem politik Indonesia, yang menarik dipertanyakan lebih jauh adalah sistem pendidikan nasional di Indonesia tersebut dirumuskan ulang di tengah berlangsungnya reformasi politik yang sudah berlangsung memasuki satu dasawarsa (1998-2012). Merujuk pada gagasan besar demokrasi, lebih khusus lagi perspektif tentang *civil society*, seharusnya rakyatlah yang memiliki otonomi untuk mengarahkan wacana dan memiliki kata putus tentang bentuk sistem politik nasional termasuk di dalamnya tentang sistem pendidikan nasional yang disepakati oleh rakyat. Negara sebenarnya tidak memiliki wewenang untuk mengajari kepada rakyatnya (yang lebih sering menjadi proses hegemonisasi) nilai-nilai – prinsip-prinsip kehidupan yang secara elitis dianggap baik. Kegagalan negara Indonesia melalui rezim yang berkuasa untuk mengajari rakyatnya melalui P4 misalnya, selama kekuasaan Orde Baru, memberikan bukti yang kuat akan kebenaran proposisi di atas. Mengikuti alur logika berfikir seperti ini, maka kerja intelektual untuk mengikhtikarkan bagi hadirnya suatu model pendidikan politik yang mampu melahirkan suatu tipe warga negara yang mampu memberikan kontribusi bagi tercapainya suatu konsensus nasional permanen bagi lahirnya suatu sistem politik nasional adalah merupakan sebuah keniscayaan sekaligus langkah strategis untuk terwujudnya konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Prospek pendidikan politik akan sangat dipengaruhi oleh hadirnya pendidikan politik yang mampu melahirkan warga negara yang memiliki budaya politik baru, gagasan inovatif, memiliki sikap kritis pada kinerja sistem politik nasional, serta memiliki loyalitas pada hasil konsensus nasional di negara yang bernama Indonesia baru. Paparan dalam tulisan ini akan mencermati dan menganalisis prospek Pendidikan Politik sebagai bagaian yang tak terpisahkan dari reformasi politik nasional yang *include* di dalamnya juga reformasi sistem pendidikan nasional.

B. Pendahuluan

“ Negara (*nation*) yang bernama Indonesia dalam banyak hal, hadir dalam wajahnya sebagai komunitas yang terbayang, proses menjadi (*becoming*) yang belum selesai”²

Mencermati sejarah pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia yang ada di persekolahan khususnya melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) maupun yang dilakukan oleh partai politik, baik pada masa pemerintahan Orde Lama maupun pemerintahan Orde Baru sepanjang hampir 40 tahun, proses pendidikan politik memiliki nasib yang sama yaitu lebih sebagai instrumen kekuasaan. Pengalaman buruk pelaksanaan pendidikan politik yang diperalat menjadi sekedar instrumen kekuasaan rezim, dalam waktu yang panjang telah menimbulkan akumulasi dampak negatif yang sangat tragis yaitu: kegagalan pendidikan politik mencapai tujuannya yang sangat mulia untuk melahirkan warga negara yang baik, yang antara lain memiliki sikap loyal (memberikan *support*) kepada sistem politik nasional sekaligus juga memiliki sikap kritis.

Tidak berjalanya fungsi pendidikan politik oleh berbagai institusi politik di Indonesia yang seharusnya menjalankan tugas suci pendidikan politik, termasuk di dalamnya partai politik, diyakini serta secara empiris telah terbukti melahirkan suatu kehidupan partai yang didera berbagai persoalan serius. Berbagai persoalan pelik yang mendera kehidupan politik di Indonesia³ mempertegas tentang urgensi pendidikan politik, termasuk di dalamnya tentang berbagai pilihan strategi-model pendidikan politik.⁴

Jika dicermati perjalanan bangsa Indonesia selama hampir empat dekade lebih, sikap kritis yang berakar pada adanya kemerdekaan berfikir (*liberty*) yang menjadi jantung dari demokrasi telah terpenjara. Pada sisi lain yang lebih dimunculkan adalah sikap loyal yang tidak

² Pernyataan ini diilhami pesan dari tesis utama buku Benedict Anderson, *Imagined Communities*, Insist Press, Yogyakarta, 2001.

³ Lihat, Prisma Vol.28, Juni 2009, hal 87-98, khususnya topik tentang “Partai Politik di Persimpangan Jalan” Hasil survei yang dilakukan oleh LPJES antara lain menemukan bahwa berbagai jenis partai politik seperti partai tradisional, partai dengan idealisme perjuangan, partai tipe organik kontinental yang menganggap masyarakat politik secara keseluruhan sebagai wilayah kerjanya, sudah mulai ditinggalkan masyarakat.

⁴ Lihat, Kompas 60 Tahun Indonesia Merdeka edisi 16 Agustus tahun 2006, khususnya topik tentang “Fragmentasi Politik dan Perilaku Parpol”, hal 48.

didasari oleh kesadaran dan pemahaman yang memadai tentang sistem politik nasional. Kondisi kehidupan politik otoriter yang lebih menekankan loyalitas telah terbukti dengan sangat meyakinkan ikut memberikan kontribusi bagi kemandulan kinerja sistem politik serta ambruknya⁵ bangunan sistem yang otoriter tersebut yang harus diakhiri oleh gerakan reformasi politik,⁶ sejak Mei 1998 hingga tahun 2009 yang juga belum kunjung selesai. Dalam sistem politik yang otoriter, pendidikan (politik) tidak lagi berfungsi untuk melakukan pencerahan pada masyarakat, ia bergeser lebih diposisikan menjadi instrumen pembodohan massal.

Kecenderungan yang ada menunjukkan semakin rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada berbagai lembaga politik yang merupakan bagian dari sistem demokrasi. Indikator menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada salah satu lembaga politik, yakni partai politik, antara lain dapat dilihat pada adanya kecenderungan semakin bertambahnya jumlah pemilih yang tidak menggunakan haknya. Jika pada Pemilu legislatif tahun 2004 ada 15,03% masyarakat yang mempunyai hak memilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya, pada Pemilu legislatif 2009 meningkat menjadi 29,04%.⁷

Kegagalan pendidikan politik termasuk di dalamnya (PKn) dapat dielaborasi lebih rinci lagi, sebagai akibat dari kooptasi dan hegemoni rezim yang otoriter antara lain dapat dilihat pada berbagai fenomena berikut ini;

⁵ Ambruknya bangunan politik Rezim Orde Baru yang dibangun di atas dukungan kekuatan represif militer, politik logistik serta hegemoni ideologi pembangunan pada tanggal 20 Mei 1998, dapat memberikan konfirmasi serta bukti empiris bahwa dengan terkekangnya kebebasan untuk menyampaikan pemikiran kritis atas kinerja pemerintah dalam dinamika kehidupan politik di Indonesia telah menyebabkan matinya mekanisme kontrol yang berfungsi untuk memperbaiki kesalahan atas kinerja sistem politik nasional sehingga tidak sampai terjadi akumulasi kesalahan yang berujung pada timbulnya krisis nasional yang berawal dari krisis kepercayaan pada rezim.

⁶ Gerakan reformasi politik yang dimulai sejak 1998 hingga 2004 untuk mengganti sistem politik ala Orde Baru dengan mesin politik utamanya militer (ABRI), Partai Golkar dan birokrasi yang berselingkuh dengan para teknokrat dan pengusaha dari kalangan konglomerat hitam, nampaknya mulai dipertanyakan oleh rakyat akan berhasil dengan memuaskan. Indikator keraguan rakyat Indonesia pada reformasi politik sebagai bagian solusi dari persoalan rumit krisis nasional dapat dibaca pada hasil Pemilu di era reformasi baik pada Pemilu 7 Juni 1999 maupun Pemilu 5 April 2004 Partai Golkar meraih dukungan yang besar dari rakyat Indonesia. Bahkan pada Pemilu 2004 Partai Golkar mampu keluar sebagai pemenang Pemilu nasional di Indonesia serta memerangkannya di 27 Propinsi. Sementara itu partai-partai politik yang mengusung bendera reformasi kurang mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat sehingga tidak memiliki mandat yang memadai untuk terus melakukan reformasi politik. Hasil Pemilu 2009 memberikan bacaan bahwa partai politik yang menang adalah partai yang dibawah bayang-bayang tokoh mantan militer yakni Partai Demokrat. Sebuah partai politik yang tidak mengusung panji-panji reformasi, tetapi lebih mengambil jalan tengah.

⁷ Lihat Laporan Kompas tentang "Hasil Rekapitulasi Nasional dan Tingkat Partisipasi Pemilu tahun 2009", Kompas edisi 24 Juli 2009.

1. Rendahnya daya tarik siswa pada mata pelajaran PKn
2. Tidak jelasnya substansi dan rincian materi PKn
3. Citra yang doktriner pada pembelajaran PKn
4. Sangat rentan dari intervensi kekuasaan
5. Tidak bisa membangkitkan rasa bangsa dan nasionalisme
6. Secara keilmuan masih dipertanyakan (*debatable*) pohon keilmuan yang menjadi payung dari Pendidikan Kewarganegaraan
7. PKn mewarisi dosa politik rezim-rezim otoriter yang pernah ada di Indonesia.

Belajar dari kegagalan Pendidikan Kewarganegaraan selama Indonesia merdeka, menurut hemat penulis, penting sekali dilakukan kajian yang objektif terhadap pelaksanaan pendidikan PKn di Indonesia disertai dengan adanya keterbukaan untuk menerima secara selektif model-model pendidikan politik dari berbagai ideologi besar yang hidup di dunia modern. Kajian tersebut tidak menempatkan PKn dalam ruang vakum, tetapi diletakan dalam konteks dan keterkaitannya dengan setting perkembangan sosial politik nasional serta pergeseran ideologi dunia. Dengan kerangka pembahasan tersebut lebih memiliki kemungkinan untuk menemukan alternatif formulasi pendidikan politik (PKn) yang dapat mencapai tujuan terpentingnya, yaitu menumbuhkan nasionalisme tetapi sekaligus juga tetap memperhatikan perkembangan global. Hal tersebut juga sangat mempengaruhi corak nasionalisme suatu bangsa pada dekade tertentu dan wilayah tertentu.

Untuk konteks Indonesia nampaknya masih perlu waktu untuk lahirnya suatu konsensus nasional yang permanen (*settlement consensus*) yang memiliki pijakan kuat pada budaya politik nasional yang matang tanpa membunuh sub-sub budaya politik lokal. Proses integrasi untuk lahirnya budaya politik nasional hingga akhir abad ke-20 nampaknya belum bisa terwujud bahkan setelah reformasi politik tahun 1998, yakni setelah runtuhnya rezim Orde Baru, ada kecenderungan simpul integrasi nasional nampak semakin terpecah-pecah dengan berbagai motivasi; ada yang bermotivasi kedaerahan, agama, kepentingan ekonomi lokal, kepentingan elit lokal dll. Proses untuk "Menjadi Indonesia" belum selesai. Proses menjadi Indonesia masih membutuhkan proses dialektika antar berbagai elemen.⁸

⁸ Lihat, Komanuddin Hidayat dan Ahmad Gausaf, *Menjadi Indonesia, 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*, Mizan, Jakarta, 2006. Lihat juga, Parakriti T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*. Pen. Kompas, Jakarta, 2006.

Proses panjang untuk bisa menjadi Indonesia yang bisa mengakomodasi seluruh elemen yang ada dan hidup di Indonesia, untuk terjadinya proses integrasi masih membutuhkan waktu,⁹ walaupun dalam tiga kali Pemilu di era reformasi sejak Pemilu 1999, Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, memberikan isyarat bahwa antara berbagai kekuatan politik yang diwakili oleh partai-partai politik yang ikut Pemilu sudah menunjukkan bukti empiris untuk bisa membentuk pemerintahan koalisi. Dengan lahirnya tradisi baru pemerintahan koalisi dalam tiga kali Pemilu setelah runtuhnya Orde Baru, memberikan peluang untuk terjadinya proses saling mendekat antar berbagai kekuatan politik yang berbeda garis pemikiran politik dan ideologi sosialnya. Melalui pemerintahan koalisi, memungkinkan untuk terjadinya proses moderasi ideologi sehingga lahirnya suatu konsensus antara berbagai kekuatan politik baik yang ada pada pemerintahan (*the rolling party*) ataupun yang ada pada posisi partai oposisi.

Bermunculannya partai politik yang jumlahnya mencapai 183 partai yang mendaftarkan diri untuk ikut dalam Pemilu tahun 1999, yang kemudian menyisakan 48 partai yang ikut Pemilu. Dan jumlah ini masih terus bertahan jumlahnya yang masih puluhan pada pendaftaran Pemilu tahun 2004 yang kemudian menyisakan 24 partai politik yang bisa ikut pemilu. Dan masih terus bertahan pada Pemilu tahun 2009 dengan jumlah mencapai 36 partai peserta Pemilu (gabungan antara 8 partai lokal di Aceh dengan partai nasional), dapat dibaca sebagai bukti empiris bahwa di Indonesia itu hidup banyak sekali aliran pemikiran politik dan sekaligus kelompok-kelompok kekuatan politik. Aliran-aliran politik dan kekuatan-kekuatan politik tersebut di Indonesia selama Indonesia merdeka hingga awal abad ke-21 yang telah mengadakan Pemilu sebanyak 10 kali (Pemilu 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009),¹⁰ Nampaknya belum mampu mendorong untuk terjadinya pelembagaan politik (*Political institutionalisation*) secara matang.

⁹ Lihat, Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin, *Profil Budaya Politik Indonesia*, Pen. PT Pustaka Utama Grafiri, Jakarta, tahun 1991.

¹⁰ Lihat, *Almanak Parpol Indonesia (API) Pemilu 1999*. Edisi Revisi. Lihat juga *Partai Partai Politik Indonesia, Ideologi, Strategi dan Program*, Pen. Kompas, Jakarta. Tahun 1999. Lihat, *Peta Politik Pemilihan Umum 1999-2004*, Pen. Kompas, Jakarta. Tahun 2004. Serta *Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009*, Kompas, Jakarta. Tahun. 2004.

Belum matangnya proses pelebagaan politik di Indonesia juga dapat dilihat dari cairnya berbagai bentuk koalisi yang pernah terjadi dalam rezim yang pernah berkuasa setelah reformasi tahun 1999. Pengalaman tiga kali Pemilu pasca reformasi tahun 1999 yang diikuti oleh terbentuknya kabinet hasil koalisi menunjukkan terjadinya bentuk koalisi yang terbelah antara koalisi di kabinet dengan koalisi di parlemen. Sering kali terjadi kebijakan yang dipilih oleh pemerintah hasil koalisi tidak diikuti dukungan politik oleh partai pendukung koalisi yang ada di parlemen.

Di samping persoalan belum matangnya pelebagaan politik di Indonesia, sistem politik nasional Indonesia mengalami suatu keadaan yang disebut sebagai gejala "*floating state*", atau "*failur state*". Yakni suatu kondisi dimana ada gap yang dalam antara struktur politik Indonesia modern dengan kultur politik yang hidup di Indonesia. Sebenarnya kemungkinan untuk terjadinya gap antara struktur politik dan budaya politik juga terjadi pada negara-negara yang sudah terlebih dahulu menerapkan sistem politik demokrasi, seperti juga halnya di Inggris dan negara Amerika Serikat. Namun di dua negara yang sering dijadikan *icon* bagi demokrasi ini dalam perjalannya akhirnya terjadi proses harmonisasi serta proses pelebagaan politik secara bertahap. Persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, terkait dengan masalah budaya politik dan struktur politik, juga adanya kesenjangan antara struktur politik yang ada dengan kebudayaan politik yang hidup pada masyarakat yang bersangkutan. Kesenjangan antara *political culture* dan *political structure* sering sekali terjadi pada masyarakat Indonesia dan bertambah kompleks, masyarakat Indonesia masih dalam masa transisi demokrasi.¹¹

C. Beberapa Perspektif tentang *Political Education*

Penegasan tentang urgensi pendidikan politik (*political education*) antara lain disampaikan oleh Amy Gutmann¹²

"... we can conclude that political education -- the cultivation of the virtues, knowledge, and skills necessary for political participation--has moral primacy over others purposes of public education in a democratic society. Political education prepares

11 Lihat, Chris Manning, *Indonesia di Tengah Transisi, Aspek-Aspek Reformasi Sosial dan Krisis*, LKIS, Yogyakarta, tahun 2000.

12 Lihat Amy Gutmann, *Democratic Education*, Princeton University Press, Princeton New Jersey, 1999: 287-291.

citizens to participate in consciously reproducing their society and conscious social reproduction is the ideal not only of democratic education but also of democratic politics"

Adapun tentang berbagai perspektif tentang *political education* dan *political socialization* dari para sarjana yang memberikan perhatian pada bidang pendidikan politik kiranya dapat diikuti dalam uraian berikut ini.

Term *political socialization* dan *political education* menurut pandangan John J. Patrick, adalah merupakan term yang berbeda. Menurut John J. Patrick:

*"Political socialization refers to the process by which people learn to adopt the norms, values, attitudes, and behaviors accepted and practiced by the on going system, political socialization refers to the individual's acquisition of his society's political culture or norms for managing "the authoritative distribution of advantages and disadvantages". The end towards which this process functions is the development of individuals who accept approved motives, habits, and values relevant to the political system of their society and who transmit these norms to future generations"*¹³

Pendapat lainnya, Ben Rosemond:

*"political socialization as the process or the set of processes, through which people learn about politics and acquire political values. There is much dispute about which processes are significant and about when in the life cycle the most important socialisation takes place"*¹⁴

Sementara itu sarjana lain, Bay, menyatakan bahwa *political education* lebih luas daripada *political socialization*, lebih lanjut dia menyatakan *"as with all education, political science education must aim at liberating the student from the blinders of the conventional wisdom, from political totems and taboos, so that may make the basic choice of how to live and of political ideals as an independent person with optimal critical powers."*

Sedangkan menurut Pranger, menyatakan bahwa *"a broad political education emphasizes the artificiality of political order and the citizen as creative actor within this order"*. Pandangan yang senada dikemukakan oleh Entwistle, ia berpendapat bahwa *"political*

¹³ Lihat Stanley Allen Renshon, *Handbooks of Political Socialization Theory and Research*, The Free Press a division of Macmillan Publishing Co. Inc. London, 1977, hal. 191.

¹⁴ Lihat Ben Rosamond, *Politics: an Introduction Second Edition*, Routledge: London, 2002, hal. 58.

education, in contrast to socialization, should help youngsters learn to question basic assumptions of their polity and to consider alternative answers”.

Perbedaan makna antara *political socialization* dengan *political education* sebagaimana dikemukakan di atas, memiliki implikasi pengembangan kurikulum dan desain instruksional, antara *political socialization* dengan *political education*. Menurut John J Patrick, letak perbedaannya adalah, bahwa;

“student of political socialization should be concerned primarily with question about the maintenance of political systems, about the transmission of political orthodoxy. They should ask how individuals learn to conform to the sociopolitical status quo so that political norms are observed and established political roles are performed”.

Sedangkan pendidikan politik (*political education*) memiliki perhatian yang lebih luas. Pendidikan politik tidak hanya membatasi individu untuk belajar mendukung tata-tatan politik yang berlaku, tetapi juga meminta individu untuk belajar menciptakan dan merubah tata-tatan politik (*they should ask not merely how individuals learn to conform so that political orders endure; but they also should ask how individuals learn to create and to change political orders*) (John J Patrick, 1977: 193).

Menurut pendapat Freed I. Greenstein, studi tentang *political socialization* memiliki tempat dalam studi ilmu politik di Amerika Serikat sejak tahun 1968. Dari pelacakan yang dilakukan oleh Greenstein di kalangan para sarjana ilmu politik terdapat beragam pendapat tentang definisi dari *political Socialization*. Menurutnya paling tidak ada empat perhatian tentang variasi definisi *political socialization*;

1. *The study of Children’s political socialization orientations. To define the study of political socialization as “the political study of Children.” Nevertheless, just as “anthropology” is usually defined formally in abstract intellectual terms (as the study of “culture” or of “social structure”) but tends informally to mean “the study of nonliterate populations.” Political socializations also has a mundane operational definition; “the study of pre-adult orientations to the adult politycal process.”*

2. *The study of the acquisition of prevailing norms. Sometimes the phrase is used to apply quite narrowly to studies of the way the prevailing norms of a political system become the norms of the new members of that system. Here the usage parallels one of the meanings sociologists give to the more general term "socialization." The political subset of socialization is also sometimes called "politicization." In any event, the focus is on the acquisition of norm-consistent behavior.*
3. *Sometimes "political socialization" is used more broadly to refer to the study of any political learning what soever of conformity or deviance, and at any stage in the life cycle."*
4. *Finally, "political socialization" sometimes refers to actual observations of socialization processes, in any of the above senses, taking into account both the socialized and the agents of socialization.¹⁵*

Dalam konteksnya dengan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada warga negara, dimaknai sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul, nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun (Alfian, 1986: 235). Pendidikan politik dalam konteks kegiatan pemilu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan terencana, dengan sadar untuk memberikan penyadaran kepada warga negara yang sudah berhak memilih (Alfian, 1991: 245).¹⁶ Sementara itu Good merumuskan bahwa pendidikan politik adalah pengembangan kesadaran generasi terhadap berbagai problematika kekuasaan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik (Dictionary of Education, 1973: 67).

Rumusan lain dikemukakan oleh Ustman (2000). Pendidikan politik adalah upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik pada setiap warga negara. Membentuk dan menum-

¹⁵ lihat Louis J. Cantori, Andrew H. Ziegler, Jr. *Political socialization a Note on the Ambiguity of Political socialization: Definitions, Criticisms, and Strategies of Inquiry*, dalam *Comparative Politics*, hal. 191-192

¹⁶ Lihat, Alfian dan Nazanuddin Sjamsuddin, *Profil Budaya Politik Indonesia*, Pen. PT Pustaka Utama Grafi, Jakarta, tahun 1991, hal. 20-32.

buhkan kesadaran politik dengan segala tingkatannya, kemampuan berpartisipasi politik secara aktif dalam ikut memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan, dan yang mengantarkan kepada perubahan menuju yang lebih baik.¹⁷

D. Pendidikan Politik dan Reformasi Sistem Politik Nasional
Berbicara tentang eksistensi pendidikan politik di Indonesia, yang diselenggarakan secara formal melalui Pendidikan Kewarganegaraan, sebenarnya secara yuridis telah memiliki landasan yang kuat. Hal tersebut dikarenakan amanat untuk mengadakan pendidikan politik (PKn) sudah dituangkan dalam kesepakatan politik yang dibuat oleh DPR dan pemerintah yang dituangkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini, khususnya pada Bab X pasal 37, antara lain dinyatakan bahwa, kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan.¹⁸ Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan undang-undang ini, maksud diadakannya Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Jika eksistensi PKn hanya dilihat dari sisi adanya dasar hukum bagi diselenggarakannya mata pelajaran, memang dapat dinyatakan bahwa keberlangsungan PKn di Indonesia sudah terjamin, minimal untuk beberapa tahun kedepan. Tetapi pengalaman memberikan pelajaran bahwa “daya hidup” PKn itu serta “prospeknya” tidak cukup hanya bermodalkan memiliki landasan yuridis bagi penyelenggaraannya. Untuk menopang eksistensi PKn, di dalamnya dibutuhkan adanya independensi dari intervensi rezim yang berkuasa, materi yang standar, model pembelajaran yang kontekstual serta hadirnya kehidupan politik yang demokratis. Dengan rumusan lain, dapat dinyatakan bahwa keberhasilan PKn tidak dapat berdiri sendiri, terkait dengan sistem pendidikan nasional serta sistem politik yang berlaku.

Eksistensi dan prospek PKn di Indonesia meminjam perspektif

¹⁷ Lihat juga Utsman Abdul Mu'iz, *Tarbiyah Siyasah 'Inda Jama'ah Al Ikhwan Al Muslimin*, terjemah, Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin, Penerbit Intermedia: Solo, 2000, hal. 87.

¹⁸ Lihat Undang- Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Henry Giroux,¹⁹ ketika berbicara tentang pengaruh ideologi dan kultur yang hidup pada suatu bangsa pada dunia pendidikan, dapat dinyatakan akan sangat dipengaruhi oleh ideologi (paradigma) pendidikan yang dianut oleh bangsa Indonesia, khususnya masyarakat dunia pendidikan. Mengikuti perspektif Giroux, kegagalan pendidikan politik (PKn) di Indonesia yang telah diselenggarakan selama Indonesia merdeka, adalah ikut ditentukan dianutnya domain paradigma konservatif dan liberal dalam ideologi pendidikan di Indonesia. Indikator yang sangat kentara dari dianutnya paradigma konservatif adalah menjadikan pendidikan sebagai alat untuk bisa mewariskan nilai-nilai yang dianggap mapan yang menguntungkan pihak yang berkuasa.

Sedangkan paradigma liberal yang berpandangan bahwa pendidikan berfungsi untuk menjamin tetap berfungsinya sistem ekonomi liberal juga sangat nampak dalam arah kebijakan pendidikan di Indonesia, bahkan penetrasinya sampai ke pendidikan politik. Misi pendidikan politik adalah untuk melakukan penjinakan pada pemikiran warga negara supaya mendukung proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut dilakukan dengan menjauhkan pelajar dan mahasiswa dari dunia politik untuk menciptakan stabilitas politik. Dengan kata lain pendidikan (politik) menjadi disubordinasikan dari kepentingan pertumbuhan ekonomi. Proses pendidikan dengan misi seperti itu telah melahirkan suatu generasi bangsa Indonesia yang apatis pada masalah kebangsaan yang ikut memberikan andil pada munculnya krisis politik nasional.

Belajar dari kegagalan praktek pendidikan politik di masa Orde lama dan Orde Baru, pada masa kini dan mendatang (PKn) seharusnya sebagai bagian penting dari pendidikan politik di tengah berlangsungnya proses reformasi politik di Indonesia, memiliki peranan penting untuk ikut mendorong lahirnya budaya politik baru untuk menuju Indonesia baru. Budaya politik baru yang berintikan pada lahirnya sikap kritis di satu sisi serta sikap loyal pada sistem politik nasional. Sikap kritis yang berakar pada adanya kemerdekaan bagi rakyat adalah merupakan ruh dari hidupnya kedaulatan di tangan rakyat. Budaya politik baru tersebut sangat dibutuhkan ketika bangsa ini diterpa krisis multidemensi, bangsa ini membutuhkan hadirnya generasi baru dengan

¹⁹ Lihat Mansour Fakih, *Ideologi dalam pendidikan, kata pengantar pada buku Ideologi-ideologi pendidikan*, karya William F. O'neil, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.

semangat baru, gagasan yang cemerlang, dan generasi yang tercerahkan.

Krisis multidimensi yang menimpa bangsa Indonesia²⁰ semenjak medio 1997 sampai tahun 2004 yang sudah berlangsung enam tahun, memberikan inspirasi serta menghentakkan kesadaran intelektual, untuk menanyakan lebih mendalam, tajam, dan sekaligus kritis, tentang suatu persoalan yang sangat mendasar, yakni tentang eksistensi negara Indonesia, inheren di dalamnya bangunan politik Indonesia sebagai suatu nation state.

Pertanyaan kritis tersebut tidak hanya berhenti pada persoalan-persoalan yang bersifat permukaan seperti tentang kesalahan kebijakan pembangunan pendidikan, kebijakan ekonomi, kesalahan pilihan prioritas pembangunan di Indonesia, kesalahan model pembangunan politik, persoalan moralitas para penyelenggara pemerintah yang berujung pada lahirnya budaya KKN, tetapi lebih pada persoalan yang mendasar. Persoalan mendasar yang dimaksud adalah berkaitan dengan bangunan politik Indonesia. Dalam konteks ini, pertanyaan kritis tersebut sampailah pada suatu titik yang memberikan kemungkinan untuk lahirnya pemikiran kritis-alternatif tentang model bangunan politik Indonesia. Pemikiran kritis tentang bangunan politik Indonesia, untuk pada akhirnya melahirkan suatu perspektif teoritis yang orisinal menjadi keniscayaan mengingat sejak dekade 1990-an, nilai-nilai politik di Indonesia telah memudar dan kekuatan-kekuatan lain yang segera mengisi kekosongan tersebut yaitu kesadaran etnis yang semakin meningkat dan peningkatan komitmen keagamaan terutama yang fundamentalis di wilayah-wilayah tertentu (Robert A. Scalapino, 1996: 1).²¹

Ikhtiar untuk sampai pada perumusan teori politik baru yang orisinal dapat dimulai dengan langkah pertama, yaitu dengan menanyakan adakah kelemahan pada bangunan politik Indonesia? Mengapa lumpuh, tak mampu bekerja efektif untuk menyelesaikan persoalan mendasar dan aktual yang dihadapi oleh bangsa ini? Pertanyaan selanjutnya adalah apakah unsur-unsur utama yang membentuk bangunan politik Indonesia, bagaimana poses menjadi Indonesia, asumsi-asumsi apa yang ada di balik bangunan yang bernama Indonesia tersebut? Dari

²⁰ Lihat Chris Manning & Peter Van Diermen, *Indonesia di tengah transisi, aspek-aspek sosial reformasi dan krisis*, LKIS, Yogyakarta, 2000, hal. 1-15.

²¹ Robert A. Scalapino, *Orasi ilmiah, memperingati 25 tahun CSIS tanggal 18-19 September 1996*.

manakah konsep tentang bangunan politik Indonesia yang berupa negara kebangsaan itu diambil? Apakah gagasan yang berupa barang import dengan segala kelemahan genetis yang dimilikinya tersebut masih mungkin dipertahankan? Adakah kemungkinan untuk lahirnya pemikiran alternatif tentang model bangunan politik Indonesia?

Tulisan ini tidaklah berpretensi untuk menjawab semua pertanyaan di atas, tetapi berbagai pertanyaan tersebut kiranya akan membantu mengarahkan perhatian pembahasan dalam tulisan ini pada persoalan utama yang berkaitan dengan topik Indonesia sebagai *floating state*.

Urgensi untuk hadirnya pemikiran alternatif, berupa perspektif teori yang orisinal mengingat seiring dengan berhembusnya era globalisasi yang dimulai pada akhir abad XX dunia mengalami perubahan besar-besaran dan fundamental melingkupi bangunan politik negara, bahkan sampai muncul ungkapan bahwa era globalisasi merupakan *the end of the nation-state* (Harry Tjan Silalahi, 2002).²² Oleh karenanya, merupakan tuntutan yang mutlak upaya pencerdasan dan pencerahan bangsa di Indonesia. Hal demikian karena sejak 40 tahun lebih bangsa Indonesia dalam masalah pencerdasan otak sebagai dimensi *kognitif* sudah lama tercemar oleh budaya politik yang serba hegemonik dan otoritarian. Akibatnya sangat parah, otak manusia Indonesia telah menjadi tawanan kepentingan politik sesaat melalui berbagai bentuk indoktrinasi yang melelahkan dan akhirnya melumpuhkan. Hanya sedikit orang Indonesia yang mampu mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan kreatifnya.²³

Dengan keberanian seperti ini, memungkinkan untuk memiliki sikap terbuka untuk mendudukkan serta mendiskusikan eksistensi *nation-state* dalam kerangka khasanah puncak-puncak pemikiran dari peradaban bangsa lain, dengan tanpa beban namun dengan tetap bersikap kritis. Melalui energi kreatif-kritis dan independen dalam membaca fenomena kehidupan politik di Indonesia termasuk kapabilitas bangunan politiknya, akan diketahui bahwa berbagai perspektif teori politik khususnya tentang bangunan dan konfigurasi

²² Harry Tjan Silalahi, "Pemahaman BARU KEBANGSAAN", dalam Merumuskan kembali kebangsaan Indonesia, Indra J. Pilang, Center for Strategic and International Studies, 2002: 7.

²³ Ahmad Syafii Maarif, Indonesia Pergumulan Antara Keprihatinan dan Harapan Masa Depan, Pidato Dies Natalis UIN tanggal 21 Mei 2003, hal. 10.

semangat baru, gagasan yang cemerlang, dan generasi yang tercerahkan.

Krisis multidimensi yang menimpa bangsa Indonesia²⁰ semenjak medio 1997 sampai tahun 2004 yang sudah berlangsung enam tahun, memberikan inspirasi serta menghentakkan kesadaran intelektual, untuk menanyakan lebih mendalam, tajam, dan sekaligus kritis, tentang suatu persoalan yang sangat mendasar, yakni tentang eksistensi negara Indonesia, inheren di dalamnya bangunan politik Indonesia sebagai suatu nation state.

Pertanyaan kritis tersebut tidak hanya berhenti pada persoalan-persoalan yang bersifat permukaan seperti tentang kesalahan kebijakan pembangunan pendidikan, kebijakan ekonomi, kesalahan pilihan prioritas pembangunan di Indonesia, kesalahan model pembangunan politik, persoalan moralitas para penyelenggara pemerintah yang berujung pada lahirnya budaya KKN, tetapi lebih pada persoalan yang mendasar. Persoalan mendasar yang dimaksud adalah berkaitan dengan bangunan politik Indonesia. Dalam konteks ini, pertanyaan kritis tersebut sampailah pada suatu titik yang memberikan kemungkinan untuk lahirnya pemikiran kritis-alternatif tentang model bangunan politik Indonesia. Pemikiran kritis tentang bangunan politik Indonesia, untuk pada akhirnya melahirkan suatu perspektif teoritis yang orisinal menjadi keniscayaan mengingat sejak dekade 1990-an, nilai-nilai politik di Indonesia telah memudar dan kekuatan-kekuatan lain yang segera mengisi kekosongan tersebut yaitu kesadaran etnis yang semakin meningkat dan peningkatan komitmen keagamaan terutama yang fundamentalis di wilayah-wilayah tertentu (Robert A. Scalapino, 1996: 1).²¹

Ikhtiar untuk sampai pada perumusan teori politik baru yang orisinal dapat dimulai dengan langkah pertama, yaitu dengan menanyakan adakah kelemahan pada bangunan politik Indonesia? Mengapa lumpuh, tak mampu bekerja efektif untuk menyelesaikan persoalan mendasar dan aktual yang dihadapi oleh bangsa ini? Pertanyaan selanjutnya adalah apakah unsur-unsur utama yang membentuk bangunan politik Indonesia, bagaimana poses menjadi Indonesia, asumsi-asumsi apa yang ada di balik bangunan yang bernama Indonesia tersebut? Dari

²⁰ Lihat Chris Manning & Peter Van Dieumen, *Indonesia di tengah transisi, aspek-aspek sosial reformasi dan krisis*, LKIS, Yogyakarta, 2000, hal. 1-15.

²¹ Robert A. Scalapino, *Orasi Ilmiah*, memperingati 25 tahun CSIS tanggal 18-19 September 1996.

manakah konsep tentang bangunan politik Indonesia yang berupa negara kebangsaan itu diambil? Apakah gagasan yang berupa barang import dengan segala kelemahan genetis yang dimilikinya tersebut masih mungkin dipertahankan? Adakah kemungkinan untuk lahirnya pemikiran alternatif tentang model bangunan politik Indonesia?

Tulisan ini tidaklah berpretensi untuk menjawab semua pertanyaan di atas, tetapi berbagai pertanyaan tersebut kiranya akan membantu mengarahkan perhatian pembahasan dalam tulisan ini pada persoalan utama yang berkaitan dengan dengan topik Indonesia sebagai *floating state*.

Urgensi untuk hadirnya pemikiran alternatif, berupa perspektif teori yang orisinal mengingat seiring dengan berhembusnya era globalisasi yang dimulai pada akhir abad XX dunia mengalami perubahan besar-besaran dan fundamental melingkupi bangunan politik negara, bahkan sampai muncul ungkapan bahwa era globalisasi merupakan *the end of the nation-state* (Harry Tjan Silalahi, 2002).²² Oleh karenanya, merupakan tuntutan yang mutlak upaya pencerdasan dan pencerahan bangsa di Indonesia. Hal demikian karena sejak 40 tahun lebih bangsa Indonesia dalam masalah pencerdasan otak sebagai dimensi *kognitif* sudah lama tercemar oleh budaya politik yang serba hegemonik dan otoritarian. Akibatnya sangat parah, otak manusia Indonesia telah menjadi tawanan kepentingan politik sesaat melalui berbagai bentuk indoktrinasi yang melelahkan dan akhirnya melumpuhkan. Hanya sedikit orang Indonesia yang mampu mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan kreatifnya.²³

Dengan keberanian seperti ini, memungkinkan untuk memiliki sikap terbuka untuk mendudukkan serta mendiskusikan eksistensi *nation-state* dalam kerangka khasanah puncak-puncak pemikiran dari peradaban bangsa lain, dengan tanpa beban namun dengan tetap bersikap kritis. Melalui energi kreatif-kritis dan independen dalam membaca fenomena kehidupan politik di Indonesia termasuk kapabilitas bangunan politiknya, akan diketahui bahwa berbagai perspektif teori politik khususnya tentang bangunan dan konfigurasi

²² Harry Tjan Silalahi, "Pemahaman BARU KEBANGSAAN", dalam Merumuskan kembali kebangsaan Indonesia, Indra J. Pilang, Center for Strategic and International Studies, 2002: 7.

²³ Ahmad Syafii Maarif, Indonesia Pengumpulan Antara Keprihatinan dan Harapan Masa Depan, Pidato Dies Natalis UINW tanggal 21 Mei 2003, hal. 10.

politik Indonesia selama ini adalah mengandung bias negara –rezim Orde Baru- yang merupakan bagian tak terpisahkan dari hegemoni kekuatan politik kapitalisme internasional.²⁴ Bangunan politik yang memiliki karakter utama sekuler tersebut, ternyata telah gagal untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bangunan politik Indonesia hingga awal abad dua puluh satu, belum menunjukkan sebagai sebuah bangunan politik yang mendapatkan dan memiliki dukungan dari basis nilai-nilai yang hidup dan berkembang di Indonesia. Bangunan politik yang secara resmi diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, bahan-bahan bakunya tidak dapat dilepaskan dari tiga unsur dasar yakni; *Pertama*, peradaban asli (*indegenuous*) Indonesia yang masih goyah, belum mendapatkan tempat berpijak yang kokoh. *Kedua* pengaruh peradaban Islam, dan yang *ketiga* pengaruh peradaban Barat yang hadir melalui penjajahan.

Struktur sosial politik masyarakat Indonesia setelah mengalami perkawinan dengan pengaruh peradaban Barat yang dipaksakan melalui proses kolonialisasi. Perkembangannya menjadi mengalami keterputusan rantai sejarah peradaban, termasuk musnahnya negara-negara pribumi²⁵ dan akhirnya mengidap kelemahan mendasar yaitu memiliki gap dengan budaya asli Indonesia, termasuk di dalamnya juga bangunan politik Indonesia yang lebih terasa tipikalnya sebagai barang impor. Mungkin tidak berlebihan jika kondisi negara Indonesia yang demikian sampai hari ini, dilukiskan sebagai *the floating state*.

Terminologi *the floating state*, dalam konteks bahasan ini dipakai untuk melukiskan serta menggambarkan bahwa bangunan politik negara Indonesia sebagai sebuah *nation-state* dengan segenap perangkatnya, belum mendapatkan dukungan mantap dari mayoritas unsur bangsa Indonesia baik dari sisi budaya, nilai-nilai yang hidup dan berkembang di Indonesia, moralitas, adat, serta politik yang diturunkan dari nilai-nilai agama. Ini terbukti, bahwa sampai awal abad XXI masih ada resistensi yang muncul dari elemen bangsa Indonesia

²⁴ Arief Budiman, "Theories of The Capitalist Nature of the State in Indonesia", Pierre James, "State Theories and New Order Indonesia", dalam *State and civil society, Center of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990: 5, 15*, lihat juga Kalim Siddiqui, *In Pursuit of The Power of Islam, khususnya pada bahasan tentang "Beyond the Muslim Nation-state"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2002, hal. 114-127.

²⁵ Harsya W. Bachtar, "Integrasi Nasional Indonesia" makalah diterbitkan dalam buku dengan judul, *Wawasan Kebangsaan Indonesia, Gagasan dan Pemikiran*, Badan Komunikasi Pengahayatan Kesatuan Bangsa (Jakarta: BAKOM PKB Pusat, 1994: 7-8).

pada negara Indonesia dalam berbagai bentuknya. Beberapa contoh yang sangat fenomenal adalah resistensi yang didasarkan pada etnisitas²⁶ dan agama seperti munculnya Gerakan Aceh Merdeka;²⁷ gejolak di Riau; keinginan sebagian orang Papua (OPM) untuk memisahkan diri dari Indonesia;²⁸ pemaknaan otonomi daerah yang justru menjadi pintu masuk bagi pemberlakuan syariat Islam²⁹ seperti di Banten, Serang, Sulawesi Selatan, Cirebon;³⁰ serta keinginan untuk membangkitkan kembali berbagai kerajaan di Indonesia.

Ketercerabutan bangunan politik Indonesia tersebut secara menonjol ditandai oleh tiga karakter yang saling memotong.

Pertama, adanya penolakan dari sebagian kalangan bangsa Indonesia baik secara terang-terangan maupun terselubung terhadap kehadiran wajah Indonesia yang sekuler (*nation-state*).³¹ Hal ini antara lain dapat dibaca pada deretan panjang ceritera tentang pemberontakan (deligitimasi negara) dalam sejarah Indonesia. Proses deligitimasi melalui kasus DI/TII Kartosuwiryo,³² Kahar Muzakar di Sulawesi, Daud Baureuh (PRRI) serta masalah Aceh yang sampai era reformasi ini belum dapat diselesaikan dengan baik oleh bangsa Indonesia.³³

Kedua, penolakan terhadap khasanah tradisi politik yang diambil dari Indonesia atau yang dianggap berasal dari Indonesia, untuk dijadikan model bagi bangunan politik Indonesia.³⁴ Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari tidak adanya khasanah politik asli Indonesia yang dominan kemudian dipertahankan dan muncul menjadi model bagi bangunan politik Indonesia sekarang.³⁵ Hal ini ber-

²⁶ Indra J Piliang, "Dari Masyarakat Aliran ke Masyarakat Etnik", dalam Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia, CSIS, Jakarta, 2003: 223.

²⁷ Kompas, dalam rubrik Fokus, "Aceh antara GAM dan Komoditas Politik" 4 Mei 2003:29.

²⁸ Kompas, "Semangat Separatisme di Papua" tanggal 25 Februari 2003 hal 6.

²⁹ "Otonomi Daerah, Selamat Datang Syariat Islam" dalam Jurnal Politik Akses vol. 1, No. 1, Februari 2001.

³⁰ Muhaimin AG, Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon, Logos, Jakarta, 2001, hal. 7-10.

³¹ Tentang konsep nasionalisme dan negara kebangsaan, lihat Paul Gilbert, *The Philophy of Nationalism*, Westview Press, USA, 1998: 4-8.

³² Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan Kasus Darul Islam Jawa Barat*, Grafiti, Jakarta, 1990.

³³ Nazarudin Samsudin, *Integrasi Politik di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1989, hal 49-90.

³⁴ Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Bina -Negara di Jawa Masa Lampau, Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX, Yayasan Obor Indonesia*, Jakarta, (1985: 97-130). Lihat juga G. Mudjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa. Penerapannya oleh Raja-raja Mataram*, Kanisius, Yogyakarta: 1987, hal. 15-101.

³⁵ Fachry Ali, *Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern*, Gramedia, 1986: 150. Dalam derajat tertentu perspektif teoritis yang dipakai dalam kajian ini tidak sejalan dengan perspektif yang ditawarkan oleh Fachry Ali, yakni tidak menyetujui bahwa bangunan politik Indonesia modern adalah merupakan pantulan dari

beda dengan negara-negara besar lain seperti Inggris, Belanda,³⁶ Jepang,³⁷ Malaysia,³⁸ dan Thailand, yang dalam derajat tertentu masih mampu mempertahankan dan memelihara warisan khasanah politik masa lalu untuk menjadi modal awal untuk membangun struktur politik modern yang mendapatkan dukungan dari nilai-nilai yang hidup pada komunitas tersebut. Dengan modal tersebut, mereka tidaklah membangun dari nol, dan bisa menghindari atau paling tidak mereduksi proses-proses yang ahistoris.

Dengan kondisi yang tercerabut dari akar budayanya itu, bangunan politik Indonesia menjadi rapuh karena tidak memiliki tempat berpijak pada kesadaran hati atas nilai-nilai yang hidup pada bangsa Indonesia. Bangunan politik Indonesia menjadi mengapung dan tercerabut, bahkan menjadi proses transisi yang tidak berujung. Hal tersebut menyimpan bom waktu yang siap diledakkan oleh sebagian warga bangsa yang termarginalisasi dari bangunan politik negara Indonesia tersebut, jika kondisi memungkinkan sebagaimana telah berkali-kali muncul dalam sejarah Indonesia.

Ketiga, bahwa sebagian warga bangsa Indonesia juga menolak model bangunan politik Indonesia yang berasal dari Islam, sebagaimana telah dibuktikan dalam sejarah Indonesia, misalnya dapat dibaca pada peristiwa *dead lock* sidang konstituante ketika terjadi perdebatan dalam memilih dasar negara Indonesia itu; apakah Pancasila, Islam, atau Sosialis?³⁹ Sejak Indonesia merdeka sampai dengan era reformasi, perdebatan tersebut belum selesai tetapi masih menyisakan pertanyaan-pertanyaan yang menggajal dan disebabkan oleh jawaban-jawaban yang mengambang.

Kasus pro-kontra tentang RUU Sisdiknas terutama pasal 13, tentang kewajiban sekolah formal untuk menyelenggarakan pendidikan agama serta diajarkan oleh guru yang agamanya sama,⁴⁰ dapat dibaca sebagai

konsep kekuasaan Jawa, yang terjadi adalah lebih pada politisasi simbol-simbol Jawa, bukan implementasi simbol-simbol Jawa dalam arti yang sebenarnya, yang berakibat merugikan bagi ada manipulasi dan distorsi pada konsep kekuasaan Jawa.

³⁶ Eva Etzioni-Halevy, *Bureaucracy and Democracy A Political Dilemma*, Routledge dan Kegan Paul, London, 1983, Khususnya bab tentang "The Development of Western Bureaucracy: Overview and Explanation", hal. 101-28.

³⁷ Moore Barington, *Fasisme Asia: Jepang Revolusi dari Atas: Jawaban Kelas Penguasa terhadap Ancaman-Ancaman Lama dan Baru*, dalam Sartono Kartodirdjo, LP3ES, Jakarta, 1984, hal. 185-212.

³⁸ Hussin Mutalib, *Islam dan Etnisitas Perspektif Politik Melayu*, LP3ES, 1996, hal. 1-15.

³⁹ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia. Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959*, Grafiti, Jakarta, 1995:102-118). Lihat juga A. Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan - Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*, LP3ES, Jakarta: 1985, hal. 139-142.

⁴⁰ Lihat Suara Muhammadiyah, "Bahaya Pendidikan yang Sekuler", No. 09 Th ke-88, 1-15 Mei 2003, 29 Shofar-13

masih tetap hidupnya pandangan yang menolak kehadiran agama (Islam) dalam wilayah publik dalam derajat yang berbeda dengan penolakannya pada Islam sebagai ideologi negara atau Piagam Jakarta sebagai dasar negara.

Kondisi kehidupan politik seperti dilukiskan di atas, dalam perjalanannya telah membawa Indonesia mengalami stagnansi, bangunan politik dan perangkatnya menjadi tidak berdaya untuk menggerakkan bangsa Indonesia ke arah kehidupan bangsa yang jaya, makmur, dan stabil.

E. Mengambangnyanya Negara

Untuk rumusan masalah yang pertama, tentang benarkah Indonesia sebagai *floating state*? Kerangka konseptual teoritik yang akan dipakai untuk memecahkan permasalahan ini dapat dikemukakan berikut ini. Untuk membuktikan "stateness" Indonesia dapat dilacak serta diukur dari indikator-indikator sebagai berikut; *Pertama* diukur dari daya terima (legitimasi) kekuasaan negara untuk bisa menghegemoni. Jika negara memiliki legitimasi yang kuat di mata rakyatnya ataupun kekuatan politik di luar negara, berarti dapat dibaca bahwa negara tidak mengambang. Akan tetapi jika legitimasi negara lemah, sehingga negara bisa memiliki daya terima yang kuat untuk melakukan hegemoni, maka dalam posisi ini negara memiliki indikator sebagai *floating state*.

Indikator kedua, dilihat dari kesepihakan dalam memaknai negara baik kekuasaan, kewenangan dan perannya. Jika dalam memaknai negara itu sendiri, baik kekuasaannya, kewenangan dan perannya hanya diakui oleh negara saja, sementara itu elemen-elemen seperti kekuatan lokal maupun kekuatan politik Islam tidak bisa mengakui kewenangan dan peran yang melekat pada institusi negara, maka dapat dibaca bahwa negara tersebut mengalami *floating state*. Atau juga kewenangan negara itu hanya diterima oleh sebagaimana kekuatan lokal, sedangkan kekuatan lokal yang lain serta kekuatan Islam menolak, maka juga dapat diartikan bahwa negara dalam derajat tertentu mengalami *floating state*. Dengan rumusan lain dapat dinyatakan bahwa, jika elemen-elemen negara yang diwakili antara lain oleh kekuatan politik lokal dan politik Islam dapat menerima kewenangan serta peran yang melekat

pada negara maka negara tersebut bukan termasuk *floating state*.

Indikator yang ketiga, dilihat dari kesesuaian antara visi lokal dengan visi nasional, kesesuaian visi etnis dengan visi nasional, kesesuaian visi Islam dengan visi nasional. Jika tidak ada kesesuaian antara visi lokal, visi etnis, dan visi Islam dengan visi nasional negara, maka dapat dibaca bahwa negara mengalami *floating state*. Dengan terjadinya ketidaksesuaian antara visi nasional negara dengan visi kekuatan lain yang diwakili oleh visi lokal, etnis, dan Islam, maka berpeluang besar untuk terjadinya disfungsi institusi negara. Jika institusi negara mengalami disfungsi, tidak dapat menjalankan fungsi-fungsinya yang mendasar seperti; menghadirkan rasa aman, memberikan hak hidup, menjamin kemerdekaan, melindungi hak milik, maka kehadiran negara tidak dirasakan kemanfaatannya. Negara menjadi kehilangan alasan yang kuat untuk tetap ada dan beroperasi. Secara lebih konkrit disfungsi institusi negara tersebut dapat dilihat dari tidak berfungsinya pemerintahan yang ada sebagai representasi dari institusi negara.

Perspektif lain yang dapat membantu untuk membaca apakah negara Indonesia mengalami *floating state*, dapat ditemukan argumen dasarnya dari dua sisi. Yang pertama dari tinjauan sudut sejarah terbentuknya negara Indonesia;⁴¹ keterkaitannya dengan struktur sosial, sistem pendidikan, hukum yang ada saat negara Indonesia terbentuk. Dengan model pembacaan seperti ini akan ada peluang untuk memahami bahwa, sesungguhnya negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, sebenarnya dilihat dari sisi struktur sosial yang ada waktu itu; sistem hukumnya, sistem ekonominya, bahkan ideologi yang ada sudah didisain lebih dahulu selama beratus-ratus tahun oleh penjajah secara sistemis. Sehingga ketika merdeka secara politik menjadi tidak banyak memiliki pilihan kecuali hanya meneruskan rekayasa sosial, politik, ekonomi, peradaban yang dilakukan oleh penjajah khususnya Belanda.⁴²

Cara yang kedua untuk membuktikan bahwa negara Indonesia sebagai *floating state*, ialah dengan melihat bagaimana kerja lembaga ini serta reaksi penerimaan masyarakat Indonesia, semenjak didirikannya negara Indonesia sampai waktu terakhir yang mungkin untuk

⁴¹ Lihat Bantarto Bandoro, *Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia*, CSIS, Jakarta, 1995, hal. 1-40.

⁴² Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*, Gramedia, Jakarta, (1990: 36). Lihat juga H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, LP3ES, Jakarta, (1983: 915).

diteliti (1945-2004). Dengan mencermati reaksi berbagai kelompok masyarakat Indonesia, misalnya kelompok yang bergabung dalam ikatan etnis tertentu, kelompok agama, negara-negara pribumi, akan dapat diketahui apakah negara Indonesia memperoleh dukungan yang kuat dari kekuatan-kekuatan tersebut.⁴³

Dengan melakukan penggabungan dua model pembacaan sebagaimana dikemukakan di atas, memungkinkan didapatkan suatu perspektif teoritis alternatif tentang Indonesia sebagai *floating state*. Untuk menghasilkan kerangka yang orisinal tentang *floating state*, maka perlu dilakukan pengkajian secara mendalam pada dua hal sebagaimana telah disebutkan; yaitu sejarah terbentuknya negara Indonesia dan kaitannya dengan struktur sosial yang ada pada saat itu, serta tanggapan masyarakat Indonesia tentang kinerja Institusi yang bernama Indonesia. Penelitian ini berkepentingan untuk melakukan pengkajian pada hal tersebut.

F. Struktur Politik Indonesia Baru

Kerangka teoritik untuk membedah permasalahan bagaimanakah konstruk struktur politik Indonesia Baru, dapat didekati melalui dua cara. Cara ini merupakan tindak lanjut dari kerangka teoritik yang ditawarkan untuk menjawab persoalan tentang mengapa negara Indonesia menjadi *floating state*? Cara yang pertama adalah dengan meneruskan proses menjadi Indonesia yang belum selesai. Melalui proses pelebagaan yang sejauh mungkin dapat melakukan integrasi dengan kekuatan-kekuatan politik lain yang berada di luar negara, yang keberadaannya sudah ada lebih dahulu sebelum berdirinya negara Indonesia. Kekuatan tersebut pada intinya direpresentasikan oleh kekuatan politik Islam dan kekuatan politik lokal.

Cara yang kedua ialah dengan menghilangkan sejauh mungkin terjadinya distorsi dalam proses pelebagaan serta proses integrasi. Dengan keberhasilan untuk mereduksi adanya distorsi dalam proses pelebagaan dan integrasi tersebut akan dapat dikurangi bahkan dihilangkan resistensi pada negara Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena elemen-elemen di luar negara merasa memiliki terhadap institusi negara Indonesia dan tidak memelihara kecurigaan akan kehilangan

⁴³ Untuk legitimasi Pemerintahan Orde Baru lihat Modhtar Pabottingi, "Dilema Legitimasi Orde Baru: Bayangan Krisis politik dan Arah Pemecahannya", dalam *Menelazh kembali Format Politik Orde Baru*, Gramedia, Jakarta, (1995: 3-38)

hak hidupnya.

Pembahasan dan analisis rumusan permasalahan yang ketiga adalah, bagaimanakah konstruksi bangunan politik Indonesia Baru yang kokoh (settlement agreement) memungkinkan untuk mendapatkan dukungan dari nilai-nilai sosial, budaya, moralitas dan agama di Indonesia?

Kerangka teoritis untuk rumusan ini adalah sebagai berikut; Bahwa perspektif tentang konsep *nation-state* (negara kebangsaan Indonesia) sebagai pilihan yang sudah dipraktekkan oleh bangsa Indonesia (elit politiknya) melalui keputusan politik BPUKI dan PPKI tahun 1945, menunjukkan bahwa bangunan politik yang didasarkan pada gagasan sekuler *nation-state*⁴⁴ yang pada awalnya merupakan perlawanan pada doktrin gereja, adalah tidak cocok dan ahistoris dengan kondisi di Indonesia. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan negara Indonesia berdiri dan merdeka, dalam perjalanannya justru telah banyak berhutang pada struktur religio politik. Khusus dalam perjuangan meraih kemerdekaan, Islam memiliki peran yang sangat penting baik dalam posisinya sebagai simbol perlawanan pada penjajahan yang memang bertentangan dengan doktrin ajaran agama Islam, maupun dalam hal keterlibatan tokoh-tokoh dari agama Islam dalam sejarah panjang menggusur penjajah (kaum kafir). Hal ini dipertlihatkan dalam perlawanan lokal terhadap penjajah⁴⁵, melalui gerakan modern seperti Partai Sarikat Islam, MIAI, Partai Masyumi⁴⁶ (Yusril Ihza Mahendra, 1999: 240-259).⁴⁷

Dengan kata lain, bangunan politik yang berakar pada negara kebangsaan yang gagasan dasarnya diimpor serta dibawa oleh bangsa penjajah memiliki dilema dan kontradiksi ketika akan dipakai oleh bangsa yang dijajah, yakni bangsa Indonesia, untuk membangun struktur politik

⁴⁴ Patrick Dunleavy and Brendan O'Leary, *Theories of the State the Political of liberal Democracy*, Macmillan Education LTD, London, 1987. Lihat juga Bob Jessop, *State Theory Putting Capitalist States in Their Place*, Polity Press, British, 1990.

⁴⁵ Azumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Mizan, Bandung, 1999: 283-293. Mengemukakan bahwa perlawanan yang dilakukan untuk mengusir penjajah dari bumi nusantara telah dipelopori oleh kalangan ulama Islam seperti dipelopori oleh seorang ulama bernama Al-Palimani dengan ajaran Jihadnya, yang ditunjukkan melalui kitab yang ditulisnya dengan judul, *Fadha'il Al-Jihad*. Kitab ini yang kemudian menjadi rujukan utama dari Kikayat Perang Sabil yang telah mampu mengobarkan semangat orang Aceh untuk menentang penjajah Belanda selama bertahun-tahun. Demikian juga Gerakan Kaum Padri di Minangkabau, yang juga dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam Tuanku nan Renceh (Tuanku Imam Bonjol).

⁴⁶ Lihat Defiar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942*, LP3ES, Jakarta, 1995, hal. 144-179. Juga lihat Defiar Noer, *Partai Islam di Pentas Politik Nasional*, Grafiti pers, 1987, hal. 44-98.

⁴⁷ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, Perbandingan Partai Masyumi dan Jama'at Islami*, Paramadina, Jakarta, 1999: 240-259).

ketika meraih kemerdekaan. Dilema atau kontradiksi tersebut antara lain;

1. Asumsi-asumsi yang mendasari berdirinya *nation-state* yang di dalamnya terdapat penentangan pada keterlibatan agama dalam wilayah publik (negara). Hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh sebagian besar bangsa Indonesia yang religius, yang tidak pernah memisahkan keterlibatan agama dalam wilayah publik.
2. Agama sebagai struktur *religio* politik Islam dalam kenyataan memiliki peran kesejarahan yang besar dalam mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat dari sisi penggunaan simbolnya, nilai-nilai, kelembagaan, maupun tokoh-tokohnya. Ini membawa konsekuensi sejarah atas kepemilikan hak untuk ikut mengatur, mengisi bangunan politik Indonesia.
3. Pembangunan politik dalam kerangka negara kebangsaan yang mensyaratkan adanya sekularisme, sebagaimana telah dipraktekkan dalam pemerintahan Orde Baru yang ternyata berakhir dengan kegagalan, mendapatkan resistensi dari masyarakat Indonesia. Telah menguras banyak energi bangsa, menimbulkan ketidakstabilan politik, bahkan krisis nasional. Kasus GAM, OPM, dan RMS adalah ikon politik yang menunjukkan adanya resistensi pada negara nasional tersebut.

Dengan mempertimbangkan konsepsi di atas, maka perlu dirumuskan suatu kerangka teoritik tentang bangunan politik Indonesia Baru, yang tidak mengapung di atas nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam hati masyarakat Indonesia.

Secara garis besar karakter bangunan politik Indonesia Baru yang membumi di hati masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut;

1. Bangunan politik modern yang tidak membunuh pemikiran dan khasanah politik yang hidup di Indonesia
2. Bangunan politik Indonesia baru tidak berangkat dari gagasan negara sekuler karena bertentangan dengan aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia.
3. Bangunan politik tersebut merupakan perpaduan antara gagasan struktur *religio* politik dengan gagasan negara kebangsaan yang religius.

Perspektif teoritis yang dipakai oleh para peneliti terdahulu yang sudah terlanjur mapan dan menjadi *mainstream* berkaitan dengan bangunan politik Indonesia, pada umumnya tidak secara kritis mempertanyakan asumsi-asumsi, ideologi, serta konteks sosial kemasyarakatan di mana gagasan tentang negara kebangsaan itu dilahirkan. Pada umumnya bersifat *taken for granted* dengan perspektif teoritis yang sudah mapan bahwa gagasan tentang negara kebangsaan itu serta merta sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam alam pikiran bangsa Indonesia. Sebagai akibatnya, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema negara⁴⁸ (bangunan politik Indonesia), memiliki bias mendalam dengan teori politik barat yang sekuler yang tidak memberikan tempat bagi agama dalam wilayah publik. Akibatnya penelitian tersebut gagal untuk membedah dan memecahkan persoalan yang tumbuh dan berkembang pada diri bangsa Indonesia secara akurat dan memadai.

Analisis-analisis yang dihasilkan memiliki bias negara dan tidak secara objektif menempatkan variabel agama (Islam) sebagai struktur *religio* politik. Padahal sebagaimana dikonstantasikan oleh W.F Wertheim (1999)⁴⁹ dalam bukunya yang monumental, ada berbagai macam penafsiran ide nasionalisme oleh kalangan-kalangan yang berbeda di Indonesia; kalangan Islam berbeda dengan kalangan priyayi, berbeda pula dengan pemahaman kalangan elit Indo tentang nasionalisme. Gagasan nasionalisme (sekuler) dari awal telah mengundang sikap kritis terutama pada kalangan Islam. Kalangan Islam tidak bisa menerima begitu saja ide nasionalisme untuk dipakai sebagai ideologi gerakan dalam meraih kemerdekaan maupun untuk menata dan mendesain struktur Indonesia setelah merdeka. Hal demikian disebabkan kalangan Islam sebelumnya sudah memiliki ideologi sendiri yang karena sebab-sebab rekayasa dan pilihan penjajah Jepang yang dilatarbelakangi oleh pertimbangan politik pada saat itu, lebih memilih gagasan nasionalisme beserta tokoh-tokohnya untuk mengelola negara Indonesia. Karena lebih mendapatkan angin dan kesempatan, gagasan yang kemudian lebih berkembang pada saat

⁴⁸ Lihat Purwo Santoso, "Bias epistemologis Konseptualisasi Interaksi Negara-Rakyat" dalam Jurnal Ilmu sosial dan Politik UMY, Edisi 1 Th.X. Februari 2001: 1-17.

⁴⁹ W.F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition, a Study of Social Change*, (terj) Masyarakat Indonesia dalam Transisi Studi Perubahan Sosial, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999.

Indonesia merdeka adalah gagasan nasionalisme.⁵⁰

Untuk membahas rumusan permasalahan, bagaimanakah konstruk bangunan struktur politik Indonesia Baru? dengan mengikuti kerangka konseptual sebagaimana dikemukakan di atas agar bisa menghasilkan suatu kerangka teoritis yang orisinal, membutuhkan eksplorasi yang mendalam dan luas tentang bangunan politik Indonesia yang berakar pada *nation-state*, asumsi-asumsi yang melatarbelakanginya, konteks sosial-politik kelahiran, *nation-state* di Indonesia, perjalanan serta dinamika penerapan *nation-state* di Indonesia. Dengan eksplorasi tersebut akan diketahui dengan mendalam karakter bangunan politik Indonesia yang berakar pada gagasan *nation-state* serta kelemahan dan kelebihanannya. Dengan cara seperti itu maka pada tahap berikutnya akan dapat diharapkan lahir suatu perspektif alternatif tentang bangunan politik Indonesia baru. Meminjam ungkapan Syafii Maarif bahwa antara Islam, keindonesian, dan kemanusiaan, tidak saja bisa berjalan bersama dan seiring tetapi ketiganya dapat menyatu dan saling mengisi untuk membangun taman sari yang khas Indonesia.⁵¹

G. Penutup

Proses gelombang demokratisasi yang terjadi di berbagai belahan dunia tak terhindarkan juga memasuki wilayah Indonesia. Proses demokratisasi tersebut acapkali ditandai oleh ditumbangkannya rezim lama serta sistem politik lama diganti dengan rezim baru, serta sistem politik baru yang dianggap lebih sesuai dengan tuntutan aspirasi masyarakat. Proses penumbangan struktur politik lama seharusnya diikuti dengan hadirnya proses institusionalisasi politik. Jika sampai terjadi proses penumbangan struktur lama tidak diikuti proses institusionalisasi yang berhasil maka proses demokratisasi memiliki kemungkinan besar untuk menemui kegagalan, dan tidak bisa berlanjut dengan proses konsolidasi demokrasi. Lebih dari itu ada kemungkinan tatanan masyarakat akan kembali lagi ketatanan lama yang otoriter.

Hal tersebut dikarenakan proses demokratisasi secara faktual

⁵⁰ Lihat Harry J Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta, Pustaka Jaya, 1980, hal. 205-234.

⁵¹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesian dan Kemanusiaan Sebuah Refleksi Sejarah*, Penerbit Mizan bekerjasama dengan Institute for Culture and Humanity, Bandung, 2009, khususnya hal 300-308.

acapkali menimbulkan adanya ketidakteraturan (anarkhisme), menurunnya jaminan keamanan, tidak secara cepat adanya bukti-bukti akan tiba saatnya zaman kesejahteraan. Hal tersebut masih sering diperparah oleh adanya persaingan antara elit dengan arogansi politik yang tinggi, sulit untuk melahirkan konsensus untuk melakukan proses konsolidasi demokrasi.

Dengan rumusan lain, dapat dinyatakan bahwa proses demokratisasi yang seharusnya diikuti oleh proses konsolidasi demokrasi acapkali dalam realitas kehidupan politik sulit untuk diwujudkan. Fenomena politik seperti itu dapat mengurangi kepercayaan dan pesona demokrasi dimata rakyat, bahkan lebih jauh dapat menjerumuskan negara jatuh dalam posisi *floating state*, mengapung, dan lemah. Menghadapi persoalan pelik dan krusial tersebut salah satu jalan keluar yang dapat diusulkan adalah perlunya dirumuskan suatu model pendidikan politik yang mampu memadukan antara aspirasi masyarakat serta dinamika global.

Lebih dari itu dituntut hadirnya suatu model pendidikan politik yang memiliki kekhasan Indonesia (*genuine Indonesia*)—sejalan dengan cita-cita melakukan indigeousasi ilmu sosia— termasuk didalamnya adalah suatu model pendidikan politik yang merefleksikan nilai-nilai religius. Pendidikan politik yang mampu mendorong untuk berhasilnya proses ko-integrasi antara negara dengan struktur *religio* politik Islam.⁵² Bukan model pendidikan politik yang hanya merupakan copy dan derifat dari ideologi sekuler yang bertentangan dengan ideologi yang disepakati oleh bangsa Indonesia. Hal tersebut mempertimbangkan kondisi emperis masyarakat Indonesia yang religius serta adanya aspirasi politik seperti tercermin dari hasil pemilu sejak Pemilu 1955, 1999, 2004, serta Pemilu 2009, yang menunjukkan adanya kekuatan riil struktur *religio* politik yang direpresentasikan oleh partai-partai politik yang berplatform religius.

⁵² Lihat Noah Fieldman, *Constitutionalism in the Muslim World*, dalam *Issues of Democracy, Constitutionalism and Emerging Democracies*, March 2004, Volume 9 Number 1, Page 33-37. Diantara tesis penting Dr. Noah Fieldman adalah bahwa antara Islam dan demokrasi adalah tidak bertentangan. Sekalipun demokrasi memiliki pandangan bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan sedangkan Islam memiliki pandangan bahwa Allah-lah yang memiliki kedaulatan yang diwujudkan dalam bentuk hukum Allah, tetapi dalam implementasi kehidupan manusia muslim, ajaran Tuhan tersebut diberikan kebebasan kepada manusia untuk menafsirkannya sesuai dengan tingkat perkembangan peradaban masing-masing sepanjang terkait dengan persoalan muamalah keduniawian merujuk pada ungkapan Nabi Muhammad Saw "Antum 'alamu bi umuri dunyakum", kamu sekalian lebih tahu tentang persoalan duniawi.

H. Daftar Kepustakaan

- Adnan Buyung Nasution. 1995. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Grafiti.
- Ahmad Syafii Maarif. 2009. *Islam dalam Bingkai Keindonesian dan Kemanusiaan Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: Penerbit Mizan bekerjasama dengan Institute for Culture and Humanity.
- _____. 1985. *Islam dan Masalah Kenegaraan –Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES.
- _____. 2003. *Indonesia Pergumulan Antara Keprihatinan dan Harapan Masa Depan*, Pidato Dies Natalis UNY tanggal 21 Mei 2003.
- Arief Budiman. 1990. "Theories of The Capitalist Nature of the State in Indonesia", Pierre James, "State Theories and New Order Indonesia", dalam *State and Civil Society*, Center of Southeast Asian Studies, Monash University.
- Amy Gutman. 1999. *Democratic Education*. Princeton New Jersey: Princeton University Press.
- Allen Renshon Stanley. 1997. *Handbooks of Political socialization Theory and Research*. London: The Free Press a division of Macmillan Publishing Co. Inc.
- Azyumardi Azra. 1999. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan.
- Bob Jessop. 1990. *State Theory Putting Capitalist States in Their Palce*. British: Polity Press .
- Bantarto Bandoro. 1995. *Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: CSIS.
- Ben Rosamond. 2002. *Politics: an introduction second edition*. London: Routledge.
- Benedict Anderson. 2001. *Imagined Communities*. Yogyakarta: Insist Press.
- Chris Manning & Peter Van Diermen. 2000. *Indonesia di Tengah Transisi, Aspek-aspek Sosial Reformasi dan Krisis*. Yogyakarta: LKiS.
- Deliar Noer. 1995. *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.

- _____. 1987. *Partai Islam di Pentas Politik Nasional*. Grafiti pers.
- Eva Etzioni- Halevy. 1983. *Bureaucracy and Democracy A Political dilemma*. London: Routledge dan Kegan Paul.
- Fachry Ali. 1986. *Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern*. Jakarta: Gramedia.
- G. Mudjanto. 1987. *Konsep Kekuasaan Jawa, Penerapannya oleh Raja-raja Mataram*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hussin Mutalib. 1996. *Islam dan Etnisitas Perspektif Politik Melayu*. Jakarta: LP3ES.
- Harry Tjan Silalahi. 2002. "Pemahaman Baru Kebangsaan", dalam *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia*", Indra J. Piliang, Center for Strategic and International Studies.
- Harry J Benda. 1980. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Harsya W. Bachtiar. 1994. "Integrasi Nasional Indonesia" makalah diterbitkan dalam buku dengan judul, *Wawasan Kebangsaan Indonesia, Gagasan dan Pemikiran*. Jakarta: Badan Komunikasi Pengahayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM PKB Pusat).
- H. Aqib Suminto. 1983. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- Indra J Piliang. 2003. "Dari Masyarakat Aliran ke Masyarakat Etnik", dalam *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: CSIS.
- Kalim Siddiqui. 2002. *In Pursuit of The Power of Islam*, khususnya pada bahasan tentang *Beyond the Moslim Nation State*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gausaf. 2006. *Menjadi Indonesia, 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*. Jakarta: Mizan.
- Kompas, Fokus, "Aceh antara GAM dan komoditas Politik" 4 Mei 2003
- _____. "Semangat Separatisme di Papua" tanggal 25 Februari 2003
- _____. 60 Tahun Indonesia Merdeka edisi 16 Agustus tahun 2006.
- Karl D. Jackson. 1990. *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan Kasus Darul Islam Jawa Barat*. Jakarta: Grafiti.
- Louis j. cantori, andrew H. Ziegler, Jr. "Political socialization a Note on the Ambiguity of Political socialization: Defenitions, Cruticims, and Strategies of Inquiry" dalam *Comparative Politics*.
- Mansour Fakh. 2002. "Ideologi dalam Pendidikan" kata pengantar

- pada buku *Ideologi-Ideologi Pendidikan*, karya William F. O'neil, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhamin AG. 2001. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon*. Jakarta: Logos.
- Moore Barington. 1984. *Fasisme Asia: Jepang Revolusi dari Atas: Jawaban Kelas Penguasa terhadap Ancaman-Ancaman Lama dan Baru*, dalam Sartono Kartodirdjo. Jakarta: LP3ES.
- Mochtar Pabottingi. 1995. "Dilema Legitimasi Orde Baru: Bayangan Krisis politik dan Arah Pemecahannya", dalam *Menelaah kembali Format Politik Orde Baru*. Jakarta: Gramedia.
- Nazaradin Samsudin. 1989. *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Noah Fieldman. 2004. "Constitutionalism in the Muslim World" dalam *Issues of Democracy, Constitutionalism and Emerging Democracies*. March 2004, Volume 9 Number 1.
- Parakitri T. Simbolon. 2006. *Menjadi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Paul Gilbert. 1998. *the Philophy of Nationalism*. USA: Westview Press.
- Patrick Dunleavy and Brendan O'leary. 1987. *Theories of the State the Political of liberal Democracy*. London: Macmilan Education LTD.
- Prisma* Vol.28. Juni 2009.
- Purwo Santoso. 2001. "Bias epistemologis Konseptualisasi Interaksi Negara-Rakyat" dalam *Jurnal Ilmu sosial dan Politik UMY*, Edisi 1 Th.X. Februari 2001.
- Otonomi Daerah, Selamat Datang Syari'at Islam dalam *Jurnal Politik Akses* vol. 1, No. 1, Pebruari 2001.
- Robert A. Scalapino. 1996. *Orasi Ilmiah* memperingati 25 tahun CSIS tanggal 18-19 September 1996.
- Soemarsaid Moertono. 1985. *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau, Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sartono Kartodirdjo. 1990. *Pengantar Sejarah Idonesia Baru*. Jakarta: Gramedia.
- Suara Muhammadiyah*. 2003. "Bahaya Pendidikan yang Sekuler", No. 09 Th ke- 88, 1-15 Mei 2003, 29 Shofar-13 Rabiul Awwal, 1424 H.

- Utsman Abdul Mu'iz. 2000. *Tarbiyah Siyasah 'Inda Jama'ah Al Ikhwan Al Musli,min*, terjemah, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Solo: Penerbit Intermedia.
- Undang- Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- W.F. Wertheim. 1999. *Indonesian Society in Transition, a Study of Social Change*. (terj) Masyarakat Indonesia dalam Transisi Studi Perubahan Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Yusril Ihza Mahendra. 1999. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, Perbandingan Partai Masyumi dan Jama'at Islami*. Jakarta: Paramadina.

INDEX

A

Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi 52
Adam Müller 117
Afrika 105-109, 110
Aidra Nagazumi 100
Al Andang 156, 166
Aifian 172, 176
Alvin Gouldner 12
Amerika Latin 105
Amerika Utara 26
Amy Gutmann 173
A.N.Whitehead 30
Appadurai 20
Archer 91, 95
ArifBudiman 32, 43
Armin Pane 54
AS 31, 51
Asia vii, viii, 43, 48, 50, 52, 54, 55, 58, 60, 61, 73, 75, 85, 86,
104, 107, 108, 110, 183, 194

Asia Tenggara 43, 48, 54, 108, 110
Axel Honneth 148
Azyumardi Azra 187, 192

B

Bambang Sugiharto 154
Bay 174
Belanda xi, 47, 49, 53, 54, 109, 114, 116, 138, 183, 185,
187, 193
Belgia 169
Bendix 110, 111
Benny Susetyo 156
Benoy Kumar Sarkar 59
Ben Rosemond 174
Berger dan Lucman 26
Berghe 152, 153
Bjorn Wittorck 6
Bourdieu 12-14, 26, 147

Bronson 55, 60
Budha 108
Budiyanto 114, 124

C

Carl Schmitt 121
Castree 130, 132, 133, 136
Charles Taylor 148
Choirul Mahfudz 157
Chris Manning 173, 179, 192
Chung 49
Cinc: viii, 51, 58, 139

D

Dahm 100
Dant 26, 27
Daed Joesoef 36, 43
Daud Baureuh 182
de Bijl dan Murphy 130
Delanty x, xiii, 3-5, 17, 19, 23-27
Dellar Noer 187, 192
Developmentalisme 70
Dutch East India Company 53

E

Edward Said 52
Ekstrand 157
Ertwistle 174
Eropa vii, ix, 49, 51, 53, 54, 87, 100, 104, 107, 108, 110, 111, 116, 117, 120, 121, 138
Escobar 68, 69, 75
G

Galtung 141, 144
Geografi xi, xiv, 127-132, 134
George Jellinek 115
Gibbons 14, 15
Giddens 90, 91, 95
Gilberto Freyre 59
Gouldner 12, 13
G.P. Rouffaer 108
Gramsci 74
Greenstein 175
G.W.F. Hegel 115

H

Habermas 11-13, 38, 39
Hagget 130
Harold J. Laski 114, 115, 138
Harry J Benda 189, 193
HARTilaar 36, 43

Henry Gioux 177
Heyzer & Kwa 49
Hindia-Belanda 138
Hindu 47, 48, 108, 112
Hobbes 116, 118
Huizinga 104

I

Ibn Khaldun 59
Ignas Kleden 30, 43
Immanuel Kant 6
Indegenousasi xi, xiii, 65, 72, 73
Indonesia iv-xii, xiv, 3, 31-39, 41-47, 49, 53-55, 57, 68, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 85-92, 94, 95, 100, 101, 105-108, 111, 112, 116-121, 127, 134-139, 141, 157-159, 161, 162, 166-173, 176-195
Inggris 49-51, 107, 109, 110, 112, 114, 119, 173, 183
Islam viii, 38, 47, 48, 53, 54, 67, 75, 107, 111, 112, 162, 171, 181-195

J

Jacob Cornelis van Leur 49
James A. Banks 163
Jaya Supama 36, 43
Jaya Wijaya 105
Jepang 49, 183, 189, 193, 194
Jerman 5, 6, 11, 50, 59, 114, 116, 117, 119, 141
J.H.H. Logemaan 114
John Gunther 109
John J. Patrick 174
Johnston 130, 131, 136
Juergen Habermas 11

K

Kansil 113, 114, 124
Karl Marx 57
Kartodirdjo 53, 54, 100, 183, 185, 194
Kartosuwiryo 182
Ken 9
Kitchen 129-131, 136
Kleden 30, 33, 34, 38, 43
Knex 130
Koentjaraningrat 32, 106
komunisme 17
Korea Selatan 85
Kranenburg 114
Kuntowijoyo ix, 79, 156

L

Laos 51

Lash dan Urry 20
L.D. Legge 100
Leon Duguit 114
Liberalisme 43
Lyotard 12, 18, 19, 23, 24

M

Mansur Faqih 69
March Block 107
Marston 130
Maulanusantara 157
Max Weber 100, 110, 112, 114, 115, 155
mazhab Frankfurt 131
Michel Foucault 67
Miriam Budiarjo 122
mithalnya 49
Moch. Amien 133
Mohammad Hatta 30, 43
Morteza Mutahhari 59
Musa Asy'arie 157

N

Nastukun 152, 166
Nasionalisme 43, 100
Nasrani 48, 108
neo-humanist 6, 7
Newman 6, 18

O

Orde Baru 31, 32, 40, 41, 85, 86, 90-92, 94, 138, 168-172, 178, 181, 186, 188, 194
Orde Lama 169
Orde Reformasi 86, 91, 92, 93
organized modernity 3, 5, 8, 9, 10, 16
Orientalisme x, xiii, 45-52, 55, 59

P

Padmo Wahyono 116, 117
Pancasila 35-37, 40-43, 114, 121, 162, 183
Pane 49, 54
pan-islamisme 162
Parson 9
Peet and Hartwick 66
Pendidikan Geografi 127
Pendidikan Kewarganegaraan 168, 169, 171, 177
Pendidikan Multikultural xi, xiv, 157, 162, 166
Peters 87, 88, 95
Pierre L. Van Berghe 152
Plato 4, 36
P.L. Bums 58

positivistik 66, 80, 129, 131
post-fordisme 15
post-industrial 12, 24
postkolonial 16, 20, 22
postmodern 17, 21, 23, 24, 25
Pramoedya Ananta Toer 58
Francis 50, 51, 59, 93
Pranger 174
primus inter pares 105, 106
PuruShotam 49
Purwo Santoso xi, xiv, 77, 78, 133, 136, 189, 194

R

R.D.Jokosoetono 115
Reformasi 86, 90-93, 173, 177, 192
Revolusi Perancis 5
Rika 86, 90, 95
Ritzer 21, 75, 131
Roger 114, 132, 133
Roger F. Soltau 114
Rogers 130, 136
Rousseau 116-118, 120

S

Sabam Siagian 31, 43
Sa'id Nursi 58
Sartre 36
Schmeidl dan Jenkins 143
Sharfah Maznah Syed Omar 55
Sherman 130, 132, 133, 136
Shill 9
Singapura x, 45, 49, 55, 61
Sinha 49-51, 61
Soedjatmoko 30
Soedjatmoko 39, 44, 49
Soekarno 100
Soenarko 115
Spencer 6
Sri Edi Swasono 36, 43, 134
Stanley Allen Reenshan 174
Steven Muller 36
Suharyono 133, 136
Susilo Bambang Yudhoyono 90
Syarif Mugni 157
Syafii Maarif 180, 183, 190, 192
Syed Farid Alatas viii, 45, 49, 73
Syed Muhammad Naquib Al-Attas 55

T

Tate 129-131, 136

Taylor 88, 89, 94, 95, 148
Thailand 85, 183
Thucydides 99
Timor Leste 118
Timur Tengah 107, 187, 192
Tom Campbell 155
Touraine 13
Turner 18

U

Universiti Nasional Singapura x
Ustman 176

V

van Leur 49, 53
Victori f. Tanja 156

Vietnam 51
Viles 129, 130, 136

W

W.A. Gerungan 153
Weber 5-7, 36, 50, 100, 110-112, 114, 115, 155
Wee 49
W.F. Wertheim 189
W.W. Rostow 69

Y

Yusuf (Izza Mahendra) 187, 195

Z

Zamroni 154, 166
Zulkarnain x, xi, xiv, 99

Perkembangan ilmu-ilmu sosial di Asia, termasuk di Indonesia, dalam waktu yang lama berada dalam pengaruh dominasi ilmu-ilmu sosial yang berkembang di Eropa atau Amerika. Kondisi yang demikian sudah berlangsung lebih dari satu abad, jauh sebelum Indonesia merdeka. Kondisi perkembangan ilmu sosial yang demikian, telah mengundang beberapa intelektual di Asia dan juga Indonesia mempertanyakan kondisi perkembangan ilmu sosial yang memprihatinkan tersebut. Kondisi perkembangan ilmu sosial di Asia dilukiskan berada dalam kondisi ketergantungan (*captive mind*) dengan ilmu-ilmu sosial Barat.

Di antara solusi yang dapat ditawarkan untuk menghadapi kondisi perkembangan ilmu sosial yang disebut dalam kondisi yang *captive mind* ialah pentingnya ikhtiar untuk membangun suatu diskursus alternatif ilmu-ilmu sosial, di luar arus besar diskursus ilmu-ilmu sosial Barat. Dari diskursus alternatif inilah kemudian muncul berbagai gagasan kritis diantaranya tentang pentingnya melakukan indigenisasi ilmu-ilmu sosial.

Langkah strategis berikutnya adalah bagaimana menurunkan gagasan Indigenisasi, ilmu sosial profetik, pada tataran yang lebih *praxis*. Buku ini menegaskan tentang urgensi indigenisasi ilmu sosial melalui *Prophetic Education* sebagai bagian dari langkah untuk melahirkan perspektif teoritis yang sesuai dengan konteks keindonesiaan serta berusaha keluar dari dominasi perspektif teori-teori Barat atau Eropa sentris.



FIS UNY

FISTRANS Institute

Forum Ilmu Sosial Transformatif Institute
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta

ISBN: 978-602-19081-6-7



9 786021 908167